



LAPORAN KINERJA 2019

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	3

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis	5
2.2 Indikator Kinerja Utama	8
2.3 Perjanjian Kinerja	15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	27
3.2 Realisasi Anggaran	46

BAB IV PENUTUP

DAFTAR TABEL

2.1	Indikator Kinerja Utama Tahun 2019	12
2.2	Perjanjian Kinerja Dinas PPKBPPPA	16
3.1	Pencapaian Kinerja Sekretariat Triwulan I	28
3.2	Pencapaian Kinerja Triwulan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	34
3.3	Pencapaian Kinerja Triwulan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	40
3.4	Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2019 Dinas PPKBPPPA	45
3.5	Capaian Realisasi Keuangan Triwulan I Tahun 2019	47
3.6	Capaian Realisasi Keuangan Triwulan I Tahun 2019	47
3.6	Capaian Realisasi Keuangan Triwulan I Tahun 2019	56
3.7	Capaian Realisasi Keuangan Triwulan I Tahun 2019	47



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	3

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis	5
2.2 Indikator Kinerja Utama	8
2.3 Perjanjian Kinerja	15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	27
3.2 Realisasi Anggaran	46

BAB IV PENUTUP

DAFTAR TABEL

2.1	Indikator Kinerja Utama Tahun 2019	12
2.2	Perjanjian Kinerja Dinas PPKBPPPA	16
3.1	Pencapaian Kinerja Sekretariat Triwulan I	28
3.2	Pencapaian Kinerja Triwulan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	34
3.3	Pencapaian Kinerja Triwulan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	40
3.4	Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2019 Dinas PPKBPPPA	45
3.5	Capaian Realisasi Keuangan Triwulan I Tahun 2019	47
3.6	Capaian Realisasi Keuangan Triwulan I Tahun 2019	47
3.6	Capaian Realisasi Keuangan Triwulan I Tahun 2019	56
3.7	Capaian Realisasi Keuangan Triwulan I Tahun 2019	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, maka pembagian urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mencakup :

1. Sub Bidang Pengendalian Penduduk, yakni: a) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, b) Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota.
2. Sub Bidang Keluarga Berencana, yakni: a) Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local, b) Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), c) Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota, d) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB
3. Sub Bidang Keluarga Sejahtera, yakni: a) Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, b) Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Sedangkan pembagian urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencakup :

1. Sub Bidang Kualitas Hidup Perempuan, yakni: a) Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota, b) Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota, c)

Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.

2. Sub Bidang Perlindungan Perempuan, yakni: a) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota, b) Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota, c) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota,
3. Sub Bidang Kualitas Keluarga, yakni: a) Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota, b) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota, c) Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota,
4. Sub Bidang Sistem Data Gender dan Anak, yakni Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota.
5. Sub Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA), yakni: a) Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota, b) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/kota,
6. Sub Bidang Perlindungan Khusus Anak, yakni: a) Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota, b) Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota, c) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:



Penetapan rencana strategis program dan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;



Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan lainnya yang diberikan kepala daerah



Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas PPKBPPPA



Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi



Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas PPKBPPPA



Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas PPKBPPPA

1.2 Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan dasar Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Stuktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

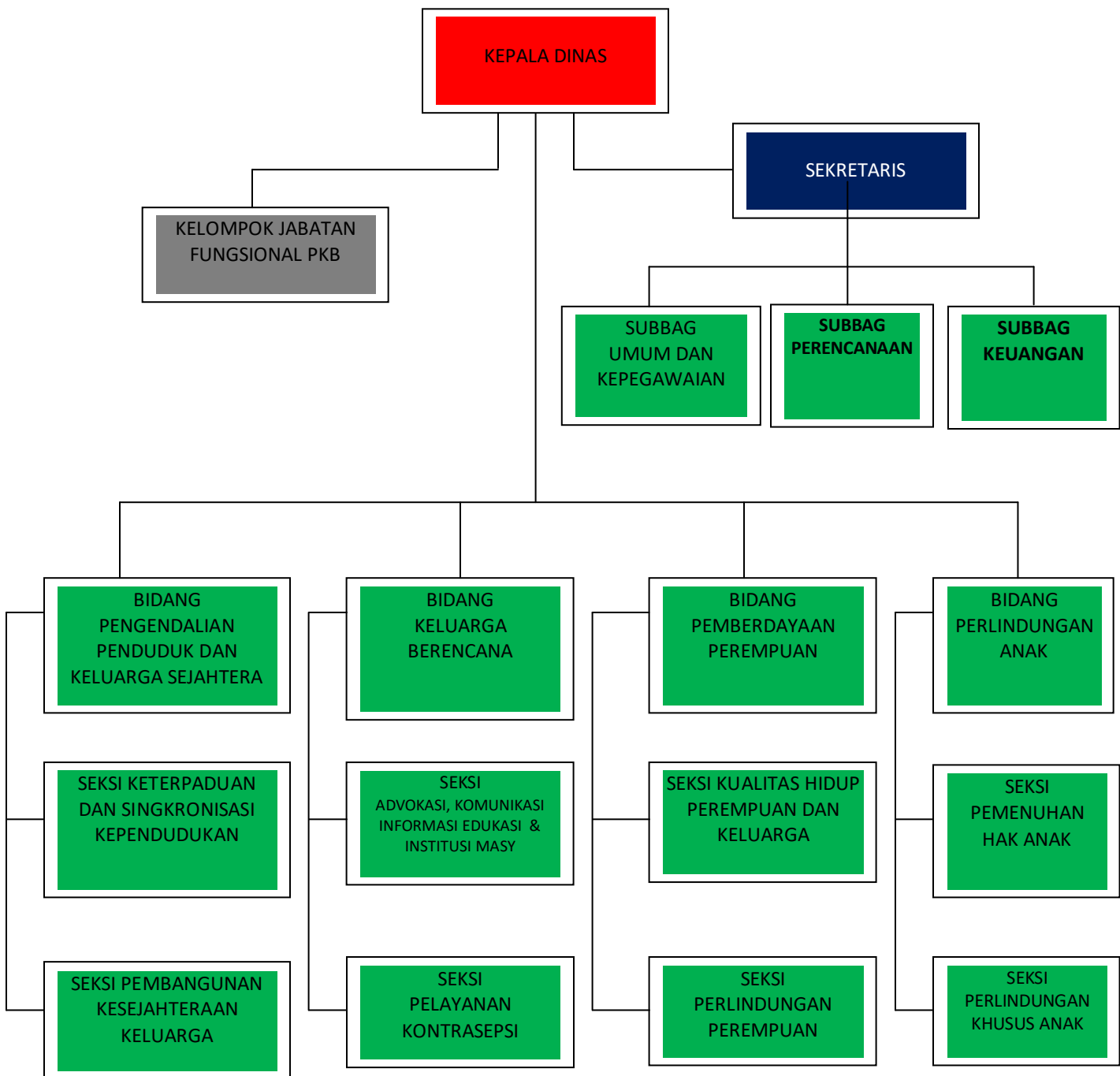
Berpedoman Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Stuktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tatakerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta tugas pembantuan lainnya yang diberikan kepala daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. perumusan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. evaluasi dan pelaporan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tergambar pada Gambar 2.1 di bawah ini.



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas PPKBPPPA

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa perumusan permasalahan perangkat daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah dimasa datang.

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap tujuan dan sasaran perangkat daerah. Hal ini untuk menjamin konsistensi serta sinergitas perangkat daerah antar wilayah dan antara pusat dan daerah, yang melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) kabupaten, provinsi, dan nasional dalam proses perumusannya

Identifikasi permasalahan perangkat daerah dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa permasalahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

1. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Belum optimalnya organisasi yang menindaklanjuti kesepakatan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP);
- b. Meningkatkan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif;
- c. Belum optimalnya kelompok kegiatan ketahanan keluarga.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan meningkatkan umur harapan hidup, harapan lama sekolah dan pendapatan per kapita perempuan;
- b. Belum optimalnya peran perempuan dalam pemerintahan;
- c. Belum optimalnya tingkat pemenuhan aspek desa/kelurahan layak anak terkait dengan status kota layak anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyusun Laporan Kinerja Pemerintahan (LAKIP) atau Laporan Kinerja (LKj) Triwulan 1 sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

^{d.} Laporan Kinerja (LKj) Triwulan 1 SKPD ini dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Dalam laporan kinerja disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka

mencapai Indikator Kinerja Utama SKPD yang ditetapkan dalam Renja-SKPD.

^{e.} Laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berfungsi sebagai alat untuk mendorong instansi pemerintah / perangkat daerah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan secara baik dan benar (*Good Government*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan program secara transparan serta dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (RPJMD 2018-2023).

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2018-2023. Penetapan jangka waktu tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati Hulu Sungai Selatan terkait dengan penetapan/kebijakan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melalui tahapan-tahapan hasil rumusan bersama seluruh komponen/unit kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan dokumen kerja SKPD yang memuat program dan kegiatan serta target dan indikator yang hendak dicapai untuk periode 1 (satu) tahun .

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi dan kebijakan yang digunakan dalam rangka pencapaian

tujuan. Dengan perencanaan strategis, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan dapat membangun strategi sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang. Dengan penetapan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Berpedoman isu strategis RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, khususnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas, Berbasis Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terlihat belum sedemikian optimal. Hal ini terbukti dari koordinasi lintas kategorial serta akuntabilitas aparatur perangkat daerah yang masih perlu ditingkatkan. Mengingat besarnya afirmasi dan atensi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Disamping itu, keberhasilan program pimpinan perangkat daerah dan pembangunan perangkat daerah pada level teknis sangat bergantung pada kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan perangkat daerah tersebut. Oleh karena itu, perwujudan tata pemerintahan yang baik sangat perlu untuk ditingkatkan. Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis. Dimana berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi, maka dirumuskan isu-isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 5 (lima) tahun kedepan, yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Aksesibilitas dan Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya

Perwujudan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditandai dengan kemampuan masyarakat mengakses kebutuhan dasar seperti kesehatan. Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dapat didefinisikan melalui perspektif jarak maupun keterjangkauan layanan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri sampai pada tahun 2017 teridentifikasi bahwa beberapa kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi

dengan optimal. Pada urusan kesehatan beberapa permasalahan juga masih perlu untuk diperhatikan. Seperti halnya kualitas pelayanan kesehatan yang masih belum optimal dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal ini dapat terlihat dengan tingginya usia kawin pertama kurang dari 20 tahun di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kondisi-kondisi tersebut tentu memberikan *pressure* tersendiri terhadap pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sehingga pembangunan manusia mengalami perlambatan. Dengan demikian maka, perwujudan aksesibilitas serta kualitas pelayanan di bidang kesehatan perlu untuk dikedepankan mengingat sumber daya manusia yang baik merupakan wujud nyata dari cita-cita UUD 1945 yaitu kesejahteraan masyarakat.

2. Peningkatan Optimalnya Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan dan Wawasan Lingkungan
Peran strategis pembangunan level *bottom* banyak diakomodir Desa, garda terdepan pelayanan yang bersentuhan dengan masyarakat adalah desa, sehingga kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di desa menjadi sangat penting untuk ditingkatkan. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan karakter dan pondasi perekonomian serta peningkatan pemberdayaan masyarakat di perdesaan masih belum berjalan optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya kapasitas kelembagaan di desa sehingga kualitas pengelolaan desa menjadi tidak begitu efektif dan efisien. Oleh karena itu, perluasan jangkauan pelayanan melalui peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar perlu untuk diupayakan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Jika memperhatikan data, isu perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender mengalami progress positif. Momentum positif terjadi khususnya pada peningkatan penyelesaian pengaduan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan semakin meningkatnya peran perempuan dalam organisasi dan pembangunan. Hal ini memberikan sinyal positif bahwa perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender mendapat respon positif di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kondisi ini tentu harus dipertahankan dan perlu mendapatkan perhatian khusus sehingga momentum positif tersebut dapat *sustain* dan semakin berkualitas.

3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas, Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis

Tuntutan pembangunan modern memaksa perangkat daerah beradaptasi dengan teknologi informasi. Sehingga pelayanan dengan berbasis teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Hal ini mampu mengakomodir belum optimalnya pelayanan publik serta paradigma mainstream masyarakat yaitu urusan pelayanan di pemerintah daerah sangat birokratif dan berbelit. Sampai pada tahun 2019, penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih belum berjalan optimal. Sehingga masih perlu mendapatkan proporsi afirmasi lebih. Inilah sebabnya mengapa pelayanan publik berbasis teknologi informasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, khususnya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih perlu untuk ditingkatkan.

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, maka dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2019
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kab. Hulu Sungai Selatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	SUMBER DATA
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Komponen penilaian terdiri dari pengungkit 60% dan hasil 40%	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah urusan Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Predikat AKIP	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20%	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	SUMBER DATA
				Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3	Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja	Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia < 20 tahun	<p>Alasan Pemilihan : Persentase rata-rata usia kawin pertama masuk dalam indikator kinerja adalah dalam rangka melaksanakan program KB serta pengendalian penduduk dengan sasaran para remaja untuk tidak kawin muda / pendewasaan usia perkawinan (PUP)</p> <p>Cara Perhitungan Indikator : $\frac{\text{Jumlah wanita kawin pertama usia } < 20 \text{ tahun}}{\text{Jumlah total perkawinan}} \times 100\%$</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Bidang KB - Laporan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
4	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	<p>Alasan Pemilihan : IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan yang diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan gender. Dengan IPG dapat mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.</p> <p>Cara Perhitungan Indikator : $IPG = 1/3 (X EDE(1) + X EDE(2) + I inc-dis)$</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Bidang Pemberdayaan Perempuan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	SUMBER DATA
			Keterangan : X EDE(1) = X EDE untuk harapan hidup I inc-dis = Indeks distribusi penghasilan	
		Persentase Desa / Kelurahan Layak Anak	<p>Alasan Pemilihan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B ayat 2 UUD Negara RI tahun 1945); 2. UU NO. 35 th 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 3. Permen Pemberdayaan Perempuan No. 13 th 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten Kota Layak Anak Di Desa/Kelurahan <p>Cara Perhitungan Indikator : $\frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan Layak Anak}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$</p>	Laporan Bidang Perlindungan Anak

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja aparatur sipil negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah (*top-down*) dan ke samping (*horizontal-diagonal*) dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapi dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Kepala SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*);
- d. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Bupati Hulu Sungai Selatan dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KAB. HULU SUNGAI SELATAN

2.2.1 SEKRETARIAT (URUSAN LAYANAN/PENUNJANG RUTIN)

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		Predikat AKIP	Predikat	81,89 (A)	0	0	0	81,89 (A)
		1 Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah	Persen	100 %		100%		100%
		1.1 Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	15	5	9	12	15
		1.2 Penyusunan Dokumen Keuangan	Dokumen Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	12	8	10	11	12

Pada tabel 2.2, dapat dijelaskan bahwa sekretariat merupakan urusan layanan/urusan rutin. Dimana tujuan merupakan Misi 5 (lima) dari RPJMD 2018 – 2023. Yang dari Indeks Reformasi Birokrasi target sebesar 23,50. Untuk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mendukung hasil dari Indeks Reformasi Birokrasi, yaitu Nilai / Predikat AKIP sebesar 81,89. Dengan Perjanjian Kinerja dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari 1 program yaitu Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan 2 (dua) kegiatan yaitu : Penyusunan Dokumen AKIP sebanyak 15 (sebelas) dokumen dan Penyusunan Dokumen Keuangan sebanyak 12 (dua belas) dokumen.

Aspek pemenuhan dokumen-dokumen AKIP yaitu :

Nama Dokumen		Jumlah	
1	Renstra	1	dokumen
2	Berita Acara Reviu Renstra	1	dokumen
3	Cascading Kinerja Tahun 2019	1	dokumen
4	Renja 2019 (Murni, Perubahan)	2	dokumen
5	IKU + SK 2019	1	dokumen
6	PK Murni 2019 Ess II s.d Ess IV Dan Jabatan Fungsional (Staf)	1	dokumen
7	PK Perubahan 2019 Ess II s.d Ess IV Dan Jabatan Fungsional (Staf)	1	dokumen
8	Rencana Aksi 2019	1	dokumen
9	Capaian Kinerja Triwulan Th. 2019	4	dokumen
10	Laporan Kinerja (Lkj) Tahun 2019	1	dokumen
11	Peta Strategi & Struktur Organisasi serta Template Format Keselarasan Kinerja	1	dokumen
Jumlah		15	dokumen

Untuk Aspek pemenuhan dokumen-dokumen AKIP, pemasangan ditarget di triwulan diambil berdasarkan dokumen berurutan. Dan pada triwulan 1 mempunyai target lebih besar dibandingkan dengan triwulan lain yaitu 10, dikarenakan penyusunan dokumen inti seperti Renstra, Renja, Dokumen Cascading, SK IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan dokumen pendukung lainnya terlebih dahulu dibuat, karena sebagai dasar pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Aspek pemenuhan untuk Penyusunan Dokumen Keuangan yaitu :

Nama Dokumen		Jumlah	
1	Renstra	1	dokumen
2	Renja	1	dokumen
3	RKBMD pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan	2	dokumen
4	PRA RKA Murni dan Perubahan	2	dokumen
5	RKA Murni	1	dokumen
6	RKA Perubahan	1	dokumen
7	DPA	1	dokumen
8	Laporan Triwulan	1	dokumen
9	Laporan Prognosis Semesteran 1	1	dokumen
10	Laporan Tahunan (CALAK)	1	dokumen
Jumlah		12	dokumen

Sedangkan untuk Aspek pemenuhan untuk Penyusunan Dokumen Keuangan, pemasangan di target di triwulan diambil berdasarkan dokumen berurutan. Dan pada triwulan 1 mempunyai target lebih besar dibandingkan dengan triwulan lain yaitu 8, dikarenakan penyusunan dokumen inti seperti Renstra, Renja, RKBMD pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan, Dokumen PRA RKA Murni dan Perubahan, RKA Murni, DPA, Laporan Triwulan, terlebih dahulu dibuat, karena sebagai dasar pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari segi keuangan dan pelaksanaan kegiatan.

2.2.2 URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	5	6	7	10	11	12	13	14
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
Menurunkan pernikahan di bawah usia 20 tahun			Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia ≤ 20 tahun	Persen	73,02	0	0	0	73,02
	Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja		Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia < 20 tahun	Persen	73,02	0	0	0	73,02
		Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Persentase organisasi yang menindaklanjuti kesepakatan pendewasaan usia perkawinan	Persen	10	2,5	5,0	7,5	2,5
			Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	Persen	78,89	70	75	78,9	78,99
		Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah remaja teradvokasi dan menerima Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja	orang	357	140	257	307	357
		Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana	Jumlah PUS yang ber KB menggunakan alat kontrasepsi	PUS	34.612	34.312	34.412	34.512	34.812

Tujuan	Sasaran		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan			
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2		5	6	7	10	11	12	13	14
			Program Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif	Persen	60,2	50,17	53,51	56,86	21,08
				Persentase instansi KB yang menyelenggarakan kegiatan sinkronisasi dan keterpaduan program KKBPK	Persen	18,18		9,09		18,18
			Pembinaan kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif	kelompok	180	150	160	170	180
			Penyusunan data kependudukan dan keluarga	Jumlah instansi KB yang menyelenggarakan program KKBPK	buah	2	0	1	0	2

Pada tabel 2.2.2 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dijelaskan bahwa tujuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah menurunkan pernikahan di bawah usia 20 tahun. Sebagai alur pendukung dari tujuan Dinas maka disusun program urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu:

1. Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dengan target:
 - a. Persentase organisasi yang menindaklanjuti kesepakatan pendewasaan usia perkawinan sebesar 10% dan,
 - b. Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif sebesar 78,89 %
2. Program Peningkatan Keluarga Sejahtera dengan target:
 - a. Persentase kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif sebesar 60,2 %, dan
 - b. Persentase instansi KB yang menyelenggarakan kegiatan sinkronisasi dan keterpaduan program KKBPK sebesar 18,18 %

Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) mempunyai 2 kegiatan yaitu:

- 1) Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dengan target 357 orang, target triwulan I sebanyak 140 orang, target triwulan II sebanyak 257 orang, target triwulan III sebanyak 307 orang dan target triwulan IV sebanyak 357 orang. Target pada triwulan adalah hasil kumulatif pada tiap triwulan.
- 2) Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana dengan target 34.612 PUS, target triwulan I sebanyak 34.312 PUS, target triwulan II sebanyak 34.412 PUS, target triwulan III sebanyak 34.512 PUS dan target triwulan IV sebanyak 34.612 PUS. Target pada triwulan adalah hasil kumulatif pada tiap triwulan.

Program Peningkatan Keluarga Sejahtera mempunyai 2 kegiatan yaitu:

- 1) Pembinaan kelompok kegiatan ketahanan keluarga dengan target 180 kelompok, target triwulan I sebanyak 150 kelompok, target triwulan II sebanyak 160 kelompok, target triwulan III sebanyak 170 kelompok, dan target triwulan IV sebanyak 180 kelompok. Target pada triwulan adalah hasil kumulatif pada tiap triwulan.

- 2) Penyusunan data kependudukan dan keluarga dengan target 2 instansi, dilaksanakan pada triwulan II dan triwulan IV. Target pada triwulan IV adalah hasil komulatif pada tiap triwulan.

2.2.3. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	5	6	7	10	11	12	13	14
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
Meningkatkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pangarusutamaan gender serta perlindungan anak			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,27	0	0	0	90,27
	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,27	0	0	0	90,27
			Persentase Desa / Kelurahan Layak Anak	Persen	2,03	0,67	1,35	0	2,03
		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase SKPD yang menerapkan anggaran yang responsif gender	Persen	36,84	0	36,84	0	0
		Pelaksanaan PUG di tingkat daerah	Jumlah SKPD yang perencanaan dan penganggaran responsif gender	SKPD	10	0	10	0	0

			Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan	Persentase organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang aktif	Persen	8,11	0	5,95	8,11	0
			Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan	Jumlah organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang dibina	organisasi	6	0	3	6	0
			Program Peningkatan Pelindungan Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	Persen	100	100	100	100	100
			Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak	Jumlah PATBM desa yang aktif	buah	2	0	1	0	2
			Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Tingkat pemenuhan aspek desa/kelurahan layak anak berbasis kluster	Persen	27,78	5,56	5,56	7,41	9,26
			Pelayanan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah indikator yang terpenuhi	kluster	15	3	3	4	5

Pada tabel 2.2.3 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa tujuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Meningkatkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pangarusutamaan gender serta perlindungan anak. Sebagai alur pendukung dari tujuan Dinas maka disusun program urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu:

1. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan target:
Persentase SKPD yang menerapkan anggaran yang responsif gender sebesar 36,84%,
2. Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan dengan target:
Persentase organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang aktif sebesar 8,11 %,
3. Program Peningkatan Perlindungan Anak dengan target:
Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan 100 %, dan
4. Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dengan target:
Tingkat pemenuhan aspek desa/kelurahan layan anak berbasis kluster sebesar 27,78%.

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan mempunyai 1 kegiatan yaitu:

- 1) Pelaksanaan Pangarusutamaan Gender (PUG) dengan target 10 SKPD dimana kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II. Adapun 10 SKPD yang menjadi target adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Inspektorat, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian, dan Dinas Sosial

Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan mempunyai 1 kegiatan yaitu:

- 1) Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dengan target 6 organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang akan dilaksanakan pada triwulan II dan pada

triwulan III. Organisasi perempuan yang akan dibina yaitu Dharma Wanita Persatuan Kab. HSS, Gabungan Isteri Wakil Rakyat (GATRIWARA) Kab. HSS, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kab. HSS, Muslimat NU, Salimah, dan Katalia.

Program Peningkatan Perlindungan Anak mempunyai 1 kegiatan yaitu:

- 1) Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dengan target 2 Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) desa yang aktif, dimana akan dilaksanakan pada Triwulan I dan Triwulan II dengan masing-masing 1 PATBM desa yang aktif.

Program Peningkatan Perlindungan Anak mempunyai 1 kegiatan yaitu:

- 1) Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dengan target 2 Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) desa yang aktif, dimana akan dilaksanakan pada Triwulan I dan Triwulan II dengan masing-masing 1 PATBM desa yang aktif.

Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak mempunyai 1 kegiatan yaitu:

- 1) Pelayanan Pemenuhan Hak Anak dengan target 15 indikator yang terpenuhi, target triwulan I sebanyak 3 indikator, target triwulan II sebanyak 3 indikator, target triwulan III sebanyak 4 indikator dan target triwulan IV sebanyak 5 indikator.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK), juga tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. Dengan berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan menetapkan tujuan dan sasaran.

Pada bab ini akan disajikan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama satu triwulan yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan pada target Triwulan I serta realisasi anggaran Triwulan I (satu) tahun 2019.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka tujuan sasaran pada Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pencapaian Indikator Kinerja Utama terdapat pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran seperti pada tabel berikut.

TABEL 3.1

PENCAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT TRIWULAN I

Tujuan	Sasaran		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)				
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2		5	6	7	10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi				Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50								
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			Predikat AKIP	Predikat	81,89 (A)	0	0	0	81,89 (A)	0								
		1	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP	Persen	79,8	0	0	0	81,46	0								
				Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah	Persen	100%	66,67%	83,33%	91,66%	100%	66,67%				100 %				
		1.1	Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	15	5	9	12	15	5				100 %				
		1.2	Penyusunan Dokumen Keuangan	Dokumen Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	12	3	6	9	12	3				100 %				
		2	Program Pelayanan Administrasi	Tingkat Kepuasan Pelayanan	Persen	100	100	100	100	100	100				100 %				

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	5	6	7	10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14
			Perkantoran														
		2.1	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun	1 tahun	0,25 tahun	0,50 tahun	0,75 tahun	1 tahun	0,25 tahun				100 %		
		2.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun	1 tahun	0,25 tahun	0,50 tahun	0,75 tahun	1 tahun	0,25 tahun				100 %		
		2.3	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun	1 tahun	0	0	0,50 tahun	1 tahun	0				0		
		2.4	Penyediaan makanan dan minuman	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun	1 tahun	0,25 tahun	0,50 tahun	0,75 tahun	1 tahun	0,25 tahun				100 %		
		2.5	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun	1 tahun	0,25 tahun	0,50 tahun	0,75 tahun	1 tahun	0,25 tahun				100 %		
		2.6	Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun	1 tahun	0,25 tahun	0,50 tahun	0,75 tahun	1 tahun	0,25 tahun				100 %		
		3	Program Peningkatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan	Persen	100	100	100	100	100	100				100 %		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	5	6	7	10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14
			Sarana dan Prasarana Aparatur														
		3.1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor kondisi baik	tahun	1 tahun	0,5 tahun	1 tahun	0	0	0,5 tahun				100 %		
		3.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Mobil dan kendaraan operasional kondisi baik	tahun	1 tahun	0,25 tahun	0,50 tahun	0,75 tahun	1 tahun	0,25 tahun				100 %		
		3.3	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor kondisi baik	tahun	1 tahun	0,25 tahun	0,50 tahun	0,75 tahun	1 tahun	0,25 tahun				100 %		
		4	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan	Persen	100	100	100	100	100	100				100 %		
		4.1	Pembinaan Program KBKR	Jumlah kegiatan KBKR	kegiatan	5 kegiatan	2 kegiatan	4 kegiatan	5 kegiatan	0	2 kegiatan	4 kegiatan			100 %		
		4.2	Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga	Jumlah kegiatan ketahanan keluarga	kegiatan	3 kegiatan	2 kegiatan	0	3 kegiatan	0	2 kegiatan	0			100 %		

Tujuan	Sasaran		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2		5	6	7	10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14
			Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat	Jumlah kegiatan peran serta dan partisipasi masyarakat	kegiatan	5 kegiatan	1 kegiatan	3 kegiatan	4 kegiatan	5 kegiatan	1 kegiatan	3 kegiatan			100 %			
		4.3	Partisipasi Anak	Jumlah kegiatan partisipasi anak	kegiatan	2 kegiatan	0	0	2 kegiatan	0	0	0			100 %			

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, pencapaian kinerja urusan kesekretariatan, sebagai tujuan sasaran strategis yaitu Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada triwulan 1 ini realisasi yang ada tidak bisa dilaporkan sebagai laporan Realisasi sasaran karena bentuknya kegiatan selama setahun, sehingga output/keluaran akan disampaikan pada triwulan 4 (empat). Pada tabel diatas mempunyai program utama sebanyak 1 program dengan kegiatan utama 2 buah. Untuk kegiatan rutin program pendukung terdapat 3 buah dan kegiatan pendukung sebanyak 13 buah yang dilaksanakan sesuai rutin pengelolaan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dan yang terkait dengan Sasaran Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan Indikator Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah dengan kegiatan Penyusunan Dokumen AKIP dan Penyusunan Dokumen Keuangan.

Pada indikator kinerja sasaran pertama Indeks Reformasi Birokrasi hasil capaian kami target Triwulan 4 namun masih belum bisa diukur karena masih tahap persiapan kegiatan. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak melakukan pelayanan publik langsung, melainkan Indeks Reformasi Birokrasi yang diukur adalah pelayanan rutin Sekretariat kepada bidang-bidang baik dalam hal urusan ketatausahaan maupun urusan kepegawaian. Sedangkan indikator kinerja sasaran yang kedua yaitu Nilai/Peringkat AKIP hasil capaian juga kami target pada triwulan 4 masih belum bisa diukur karena hasil penilaian evaluasi Laporan AKIP oleh Kemenpan RB dilakukan pada triwulan 4.

Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, memiliki target kegiatan 37,04% atau jumlah 10 dokumen dari total jumlah 27 dokumen, dimana 15 untuk Dokumen Penyusunan AKIP dan 12 Dokumen dari penyusunan Dokumen Keuangan. Dari Kegiatan

Penyusunan AKIP, telah dilaksanakan sebanyak 7 di Triwulan I yaitu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

	Nama Dokumen		Jumlah
1	Renstra	1	dokumen
2	Renja 2019 (Murni)	1	dokumen
3	IKU + SK 2019	1	dokumen
4	Cascading 2019)	1	dokumen
5	PK Murni 2019 S.D Ess Iv Dan Jabatan Fungsional (Pelaksana)	1	dokumen
6	Pra RKA 2020	1	dokumen
7	Capaian Kinerja Triwulan Th. 2019	1	dokumen
	Jumlah	7	dokumen

Sedangkan untuk Penyusunan Dokumen Keuangan, pada Triwulan 1 sebanyak 3 Dokumen yaitu Dokumen CALK, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan dan Laporan Prognosis.

Pada indikator kinerja program kami target di tiap triwulan pada aspek pemenuhan dokumen untuk kegiatan pelaporan AKIP yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan setiap Triwulan dan Akhir Tahun, serta aspek pemenuhan dokumen untuk pelaporan keuangan yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan setiap Triwulan, Semester dan Akhir.

Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran di targetkan pada triwulan I 5 kegiatan dari 6 kegiatan yang ada dan sudah dilaksanakan 5 kegiatan dengan capaian 100 % yaitu kegiatan penyediaan jasa dan administrasi perkantoran, kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, kegiatan penyediaan makan dan minuman, kegiatan rapat-rapat koordinasi, konsultasi dengan lapangan serta kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya.

Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di targetkan pada triwulan I 3 kegiatan dan sudah dilaksanakan 3 kegiatan dengan capaian 100 % yaitu kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dan kegiatan pemerliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

Pada Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah di targetkan pada triwulan I 3 kegiatan dari 4 kegiatan dan sudah dilaksanakan 3 kegiatan dengan capaian 100 % yaitu kegiatan pembinaan program KBKR, kegiatan penyelenggaraan Ketahanan Keluarga serta kegiatan peran serta dan partisipasi masyarakat.

TABEL 3.2
PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	5	6	7	10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
Menurunkan pernikahan di bawah usia 20 tahun			Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia ≤ 20 tahun	Persen	73,02	0	0	0	73,02	0				0			
	Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja		Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia < 20 tahun	Persen	73,02	0	0	0	73,02	0				0			
		Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Persentase organisasi yang menindaklanjuti kesepakatan pendewasaan usia perkawinan	Persen	10	2,5	5,0	7,5	10	2,5				100 %			
			Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	Persen	78,89	78,40	78,65	78,9	78,99	78,40				100 %			
		Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi	Jumlah remaja teradvokasi dan menerima Komunikasi, Informasi dan Edukasi	orang	357	140	257	307	357	201				143,7 %			

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	5	6	7	10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14
		Remaja (KRR)	Kesehatan Reproduksi Remaja														
		Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana	Jumlah PUS yang ber KB menggunakan alat kontrasepsi	PUS	34.612	34.312	34.412	34.512	34.812	37.238				108,29%			
		Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Penyuluhan KB (DAK FISIK)	Jumlah Balai KKB Kecamatan	Balai KKB Kec	11	4	8	11	11	0				0			
		Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK NF)	Jumlah balai KKB Kec. yang mendapat dukungan operasional keg. program KKBPK	Balai KKB Kec	11	4	8	11	11	4				100%			
		Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan (DAK NF)	Jumlah faskes keluarga berencana yang mendapatkan bantuan alat dan obat kontrasepsi (Alokon)	Faskes KB	26	9	18	26	26	9				100%			
		Operasional Penggerakan Program KKBPK di Kampung KB (DAK NF)	Jumlah kampung KB yang mendapat dukungan integrasi program KKBPK dan program lainnya	Kampung KB	22	7	14	22	22	0				0			

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	5	6	7	10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14
			Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) (DAK NF)	Kader PPKBD	148	50	100	148	148	50				100%			
			Jumlah kader Sub PPKBD di desa yang mendapat dukungan program KKBPB	Kader Sub PPKBD													
			Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK NF)	buah	11	4	8	11	11	4				100%			
			Program Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persen	60,2	50,17	53,51	56,86	60,20	48,13				95,93 %			
			Persentase instansi KB yang menyelenggarakan kegiatan sinkronisasi dan keterpaduan program KKBPB	Persen	18,18	0	9,09	0	18,18	0				0			
			Pembinaan kelompok kegiatan ketahanan keluarga	kelompok	180	150	160	170	180	150				100 %			

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	5	6	7	10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14
			Penyusunan data kependudukan dan keluarga	instansi	2	0	1	0	2	3				100 %			

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas, pencapaian kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sebagai tujuan sasaran strategis yaitu menurunkan pernikahan di bawah usia 20 tahun pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada triwulan 1 ini realisasi yang ada tidak bisa dilaporkan sebagai laporan Realisasi sasaran karena bentuknya kegiatan selama setahun karena merupakan hasil Survey Susenas, sehingga output/keluaran akan disampaikan pada triwulan 4 (empat). Pada tabel diatas mempunyai 2 program yaitu Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dan Program Peningkatan Keluarga Sejahtera.

Pada Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) memiliki 2 indikator kinerja program yaitu Persentase organisasi yang menindaklanjuti kesepakatan pendewasaan usia perkawinan yang mana pada triwulan I ditargetkan 3 organisasi dan sudah terealisasi 3 organisasi dengan capaian 100%, dan pada indikator Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif pada triwulan I ditargetkan 78,40 % PUS dan sudah terealisasi 78,40% dengan capaian 100%. Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif berasal dari jumlah PUS yang ber KB menggunakan alat kontrasepsi sebanyak 37,238 dan jumlah PUS sebesar 47.498 (Data capaian berasal dari laporan Statistik Rutin BKKBN). Untuk pencapaian program tersebut ada 8 kegiatan dengan 2 kegiatan yang bersumber pada Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dengan sasaran remaja/anak berusia 15-19 tahun yang diberikan sosialisasi dan edukasi tentang pendewasaan usia perkawinan dan kegiatan Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana dengan sasaran Pasangan Usia Subur, serta 6 kegiatan yang bersumber pada Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pada Program Peningkatan Keluarga Sejahtera memiliki 2 indikator kinerja program yaitu persentase kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif dan persentase instansi KB yang menyelenggarakan kegiatan sinkronisasi dan keterpaduan program KKBPK. Pada indikator persentase kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif pada triwulan I ditargetkan 50,17% kelompok kegiatan, akan tetapi pada triwulan I ini hanya terealisasi 48,13 % dengan capaian kinerja sebesar 95,93 %. Sedangkan pada persentase instansi KB yang menyelenggarakan kegiatan

sinkronisasi dan keterpaduan program KKBPK belum terealisasi dikarenakan akan dilaksanakan pada triwulan II. Akan tetapi untuk mendukung indikator ini pada triwulan I sudah dilaksanakan beberapa kegiatan seperti rapat koordinasi teknis bulanan bidang PPKS yang diikuti oleh Bidang Keluarga Berencana dan seluruh PKB se-Kab HSS, memonitor laporan pengendalian lapangan 11 kecamatan, meentry data laporan pengendalian lapangan 11 kecamatan dan membuat laporan bulanan hasil dari laporan pengendalian lapangan 11 kecamatan.

Tabel 3.3

PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	5	6	7	10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	
Meningkatkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pangarusutamaan gender serta perlindungan anak			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,98	0	0	0	89,98	0				0	0		
	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,96	0	0	0	90,58	0				0	0		
			Persentase Desa / Kelurahan Layak Anak	Persen	2,03	0,67	1,35	0	2,03	0,67				100 %	100 %		
		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase SKPD yang menerapkan anggaran yang responsif gender	Persen	36,84	0	36,84	0	0	0				100 %	100 %		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	5	6	7	10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14
			Pelaksanaan PUG di tingkat daerah	SKPD	10	0	10	0	0	0				100 %			
			Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan	Persen	8,11	0	5,95	8,11	0	0				100 %			
			Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan	organisasi	6	0	3	6	0	0				100 %			
			Program Peningkatan Pelindungan Anak	Persen	100	100	100	100	100	100				100 %			
			Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak	buah	2	0	1	0	2	0				100 %			
			Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persen	27,78	5,56	5,56	7,41	9,26	5,56				100 %			

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	5	6	7	10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14
		Pelayanan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah indikator yang terpenuhi	kluster	15	3	3	4	5	3				100 %			

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas, pencapaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebagai tujuan sasaran strategis yaitu meningkatkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pangarusutamaan gender serta perlindungan anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada triwulan 1 ini ada realisasi yang tidak bisa dilaporkan sebagai laporan Realisasi sasaran karena bentuknya kegiatan selama setahun karena merupakan hasil Survey dari BPS, sehingga output/keluaran akan disampaikan pada triwulan 4 (empat). Pada tabel diatas mempunyai 4 program yaitu Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan, Program Peningkatan Perlindungan Anak dan Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.

Pada program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan mempunyai indikator kinerja program Persentase SKPD yang menerapkan anggaran yang responsif gender yang mana pada triwulan I belum terealisasi dikarenakan kegiatan dijadwalkan pada triwulan II.

Untuk Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan mempunyai indikator kinerja program yaitu Persentase organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang aktif yang mana pada triwulan I belum ada realisasi dikarenakan target pencapaian dijadwalkan pada triwulan II. Akan tetapi untuk mendukung indikator tersebut pada triwulan I dilaksanakan sosialisasi perlindungan dalam rumah tangga serta pendampingan pelaksanaan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang melaporkan atau pun yang terdata.






Program Peningkatan Perlindungan Anak mempunyai indikator kinerja program persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan, dimana pada triwulan I ini ditargetkan 100% dan sudah terealisasi 100% dengan jumlah kasus anak yang dilaporkan 5 kasus dan sudah diselesaikan 5 kasus. Untuk mendukung penurunan kasus pada anak dibentuk Tim Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak dengan anggota antara lain terdiri dari Jaksa anak, Pengacara, Kepolisian, RUTAN, Pengadilan Agama, Dinas Pendidikan, Kemenag, Peksos/Dinas Sosial, terlaksananya sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

(PATBM) yang mana pada triwulan I masih tahap pembinaan pada salah satu PATBM untuk menjadi PATBM yang aktif.





Pada program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak mempunyai indikator kinerja program yaitu Tingkat pemenuhan aspek Desa/Kelurahan Layak Anak berbasis Klaster, dimana pada triwulan I ditargetkan 5,56 % dan sudah terealisasi 5,56% dengan perhitungan 3 indikator sudah terealisasi pada triwulan I dari 15 indikator dengan capaian kinerja 100%. Untuk mendukung pencapaian tersebut sudah dilaksanakan Pembinaan pada Desa/Kelurahan yang menginisiasi menjadi Desa/kelurahan Layak Anak, Pembinaan Puskesmas dengan pelayanan ramah anak, Terbinanya Sekolah yang menginisiasi menjadi Sekolah Ramah Anak, Terlaksananya Rapat evaluasi Kabupaten Layak Anak dan Terlaksananya kegiatan forum anak di Kab. HSS.

Dari keseluruhan hasil capaian kinerja urusan/bidang terkait yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, rangkuman capaian dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2019
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KAB. HSS

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan	Status	Keterangan
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50		
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Predikat AKIP	Predikat	81,89 (A)	0	0	0	81,89 (A))	0		Capaian target di akhir (TW IV)
Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja	Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia < 20 tahun	Persen	73,02	0	0	0	73,02	0		Capaian target di akhir (TW IV)
Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,96	0	0	0	90,58	0		Capaian target di akhir (TW IV)
	Persentase Desa / Kelurahan Layak Anak	Persen	2,03	0,67	1,35	0	2,03	0,67		

Keterangan:

-  Capaian > 100 %
-  Capaian > 90% - 100 %
-  Capaian > 75% - 90 %
-  Capaian < 50 %

Berdasarkan Tabel 3.5 di atas, indikator sasaran yang pertama yaitu Indeks Reformasi Birokrasi pencapaian realisasi sama dengan target atau dengan kata lain tercapai 100%, begitu juga indikator sasaran ke 5 (lima) yaitu Persentase desa/kelurahan layak anak pencapaian kinerjanya 100% dikarenakan pada triwulan I masih dalam proses pembinaan untuk desa/kelurahan layak anak.

Sedangkan untuk indikator kinerja sasaran ke dua yaitu predikat AKIP realisasi ditargetkan pada triwulan IV karena pada triwulan tersebut baru akan dilakukan penilaian oleh Inspektorat. Untuk indikator ke 3 (tiga) dan 4 (empat) yaitu persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia < 20 tahun dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunggu hasil survey dari Susenas untuk indikator ke 3 dan hasil survey dari Badan Pusat Statistik (BPS)

3.2. Realisasi Anggaran

Pada bagian ini akan diuraikan pagu anggaran dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Di dalamnya terdapat alokasi anggaran, realisasi keuangan, persentasi capaian dan sisa anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan Triwulan I Tahun Anggaran 2019 yang diambil dari Laporan Fisik dan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Total Pagu Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp. 6.225.505.700,00 dan Realisasi anggaran pada Triwulan I Tahun 2019 Bidang Keluarga Berencana sebesar Rp. 118.875.500,00, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera sebesar Rp. 1.980.000,00, Bidang Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp. 1.31.000,00, Bidang Perlindungan Anak sebesar Rp. 7.188.690,00, dan Sekretariat sebesar Rp. 238.842.314,00. Adapun rincian Alokasi dan Realisasi Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
CAPAIAN REALISASI KEUANGAN TRIWULAN I TAHUN 2019
BERDASARKAN URUSAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KAB. HSS

1. Kesekretariatan (layanan penunjang perangkat daerah)

Sasaran/ Program/Kegiatan	Pagu	TARGET RENCANA BELANJA				REALISASI KEUANGAN				CAPAIAN TARGET RENCANA BELANJA (%)				CAPAIAN REALISASI KEUANGAN (%)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1.475.551.750	540.793.200	408.322.450	263.591.750	262.844.350	238.842.314	0	0	0	36,65%	27,67%	17,86%	17,81%	16,19%	0	0	0,00%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	599.432.850	153.880.300	143.081.100	145.130.300	157.341.150	53.093.922	0	0	0	25,67	23,87	24,21%	26,25 %	8,86%	0	0	0,00%
Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	44.545.200	11.324.500	11.074.500	11.074.500	11.071.700	10.483.400	0	0	0	25,42%	24,86%	24,86%	24,85%	23,53%	0	0	0,00%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	63.600.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000	5.787.983	0	0	0	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	9,10%	0	0	0,00%
Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	14.000.000	0	0	2.700.000	11.300.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	19,29%	80,71%	0,00%	0	0	0,00%
Penyediaan makanan dan minuman	28.104.000	10.700.800	5.001.600	3.700.800	8.700.800	2.760.000	0	0	0	38,08%	17,80%	13,17%	30,96%	9,82%	0	0	0,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Tekni	45.850.000	15.125.000	10.275.000	10.925.000	9.525.000	9.150.000	0	0	0	32,99%	22,41%	23,83%	20,77%	19,96%	0	0	0,00%

Sasaran/ Program/Kegiatan	Pagu	TARGET RENCANA BELANJA				REALISASI KEUANGAN				CAPAIAN TARGET RENCANA BELANJA (%)				CAPAIAN REALISASI KEUANGAN (%)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
s Lainnya																	
Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	403.333.650	100.830.000	100.830.000	100.830.000	100.843.650	24.912.539	0	0	0	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	6,18%	0	0	0,00%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	242.829.000	165.729.000	25.700.000	25.700.000	25.700.000	39.368.492	0	0	0	68,25%	10,58%	10,58%	10,58%	16,21%	0	0	0,00%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	80.239.000	80.239.000	0	0	0	32.306.000	0	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,26%	0	0	0,00%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	94.520.000	23.645.000	23.625.000	23.625.000	23.625.000	6.312.492	0	0	0	25,02%	24,99%	24,99%	24,99%	6,68%	0	0	0,00%
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	68.070.000	61.845.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000	750.000	0	0	0	90,86%	3,05%	3,05%	3,05%	1,10%	0	0	0,00%
Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.610.000	2.206.500	2.401.500	2.606.500	1.440.000	477.500	0	0		22,96%	24,99%	27,12%	24,93%	4,97%	0	0	0,00%
Penyusunan Dokumen Keuangan	4.700.000	1.129.000	1.124.000	1.329.000	1.118.000	0	0	0	0	24,02%	23,91%	28,28%	23,79%	0,00%	0	0	0,00%
Penyusunan Dokumen AKIP	4.910.000	1.077.500	1.277.500	1.277.500	1.277.500	477.500	0	0	0	21,95%	26,02%	26,02%	26,02%	9,73%	0	0	0,00%
Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	623.679.900	218.977.400	237.139.850	90.154.950	77.407.700	145.902.400	0	0	0	35,11%	38,02%	14,46%	12,41%	23,39%	0	0	0,00%
Pembinaan Program KBKR	54.937.900	43.837.900	5.900.000	5.200.000	0	745.000	0	0	0	79,80%	10,74%	9,47%	0,00%	1,36%	0	0	0,00%

Sasaran/ Program/Kegiatan	Pagu	TARGET RENCANA BELANJA				REALISASI KEUANGAN				CAPAIAN TARGET RENCANA BELANJA (%)				CAPAIAN REALISASI KEUANGAN (%)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga	56.076.700	35.880.700	600.000	19.396.000	200.000	10.900.000	0	0	0	63,99%	1,07%	34,59%	0,36%	19,44%	0	0	0,00%
Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat	483.315.300	139.258.800	230.639.850	36.208.950	77.207.700	134.257.400	0	0	0	28,81%	47,72%	7,49%	15,97%	27,78%	0	0	0,00%
Partisipasi Anak	29.350.000	0	0	29.350.000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0	0	0,00%

Pada tabel 3.6, untuk kesekretariatan, Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bidang urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah (Sekretariat). Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan pagu dana sebesar Rp. 9.610.000,- , dengan target triwulan I sebesar Rp. 2.206.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 477.500,- sehingga capaian target rencana belanja sebesar 22,96% dan capaian realisasi keuangan sebesar 4,97%.

Kemudian untuk Program Pelayanan Administrasi Kantor, dengan pagu Rp. 599.432.850,-. dengan target triwulan I sebesar Rp. 153.880.300,-. dan realisasi keuangan sebesar Rp. 53.093.922,-, sehingga capaian target rencana belanja sebesar 25,67% dan capaian realisasi keuangan sebesar 8,86%. Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan pagu Rp. 242.829.000,-. dengan target triwulan I sebesar Rp. 165.729.000,-. dan realisasi keuangan sebesar Rp. 39.368.492,-, sehingga capaian target rencana belanja sebesar 68,25 % dan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 16,21% .

Pada Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah yang merupakan program “sapu jagad” dimana kegiatan yang ada pada program ini merupakan kegiatan yang ada pada masing-masing bidang yang tidak mempunyai indikator khusus. Adapun pagu pada program ini sebesar Rp. 623.679.900,00 dengan target pada triwulan I Rp. 218.977.400,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 145.902.400 sehingga capaian target rencana belanja sebesar 35,11% dan capaian realisasi keuangan sebesar 23,39%.

2. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sasaran/ Program/Kegiatan	Pagu	TARGET RENCANA BELANJA				REALISASI KEUANGAN				CAPAIAN TARGET RENCANA BELANJA (%)				CAPAIAN REALISASI KEUANGAN (%)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja	4.584.721.150	417.902.000	2.303.666.640	1.134.136.210	729.016.300	120.855.500	0	0	0	9,12%	50,25%	24,74%	15,90%	2,64%	0	0	0,00%
Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja	4.51.712.500	409.739.50	2.270.091.390	1.121.991.210	719.890.400	118.875.500	0	0	0	9,06%	50,20%	24,81%	15,92%	2,63%	0	0	0,00%
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	39.978.600	13.815.000	19.332.000	6.831.600	0	12.575.500	0	0	0	34,56%	48,36%	17,09%	0,00%	31,46%	0	0	0,00%
Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana	259.507.900	69.281.500	72.428.000	70.586.500	47.211.900	56.800.000	0	0	0	26,70%	27,91%	27,20%	18,19%	21,89%	0	0	0,00%
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Penyuluhan KB (DAK)	1.085.159.000	0	1.085.159.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0,00%
Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK NF)	955.796.460	99.295.000	358.766.460	287.985.000	209.750.000	49.500.000	0	0	0	10,39%	37,54%	30,13%	21,95%	5,18%	0	0	0,00%
Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan (DAK NF)	40.500.000	4.500.000	13.500.000	13.500.000	9.000.000	0	0	0	0	11,11%	33,33%	33,33%	22,22%	0,00%	0	0	0,00%
Operasional Penggerakan Program KKBPK di	985.600.000	109.515.000	328.585.000	328.500.000	219.000.000	0	0	0	0	11,11%	33,34%	33,33%	22,22%	0,00%	0	0	0,00%

Sasaran/ Program/Kegiatan	Pagu	TARGET RENCANA BELANJA				REALISASI KEUANGAN				CAPAIAN TARGET RENCANA BELANJA (%)				CAPAIAN REALISASI KEUANGAN (%)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Kampung KB (DAK NF)																	
Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK NF)	267.170.540	14.668.000	96.310.930	118.593.110	37.598.500	0	0	0	0	5,49%	36,05%	44,39%	14,07%	0,00%	0	0	0,00%
Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) (DAK NF)	888.000.000	98.665.000	296.010.000	295.995.000	197.330.000	0	0	0	0	11,11%	33,33%	33,33%	22,22%	0,00%	0	0	0,00%
Program Peningkatan Keluarga Sejahtera	63.008.650	8.162.500	33.575.250	12.145.000	9.125.900	1.980.000	0	0	0	12,95%	53,29%	19,28%	14,48%	3,14%	0	0	0,00%
Pembinaan kelompok ketahanan keluarga	41.302.750	6.182.500	30.605.250	4.515.000	0	0	0	0	0	14,97%	74,10%	10,93%	0,00%	0,00%	0	0	0,00%
Penyusunan Data Kependudukan dan Keluarga	21.705.900	1.980.000	2.970.000	7.630.000	9.125.900	1.980.000	0	0	0	9,12%	13,68%	35,15%	42,04%	9,12%	0	0	0,00%

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang memiliki sasaran Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja didukung dengan 2 (dua) program yaitu Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dibawah koordinasi Bidang Keluarga Berencana dimana pagu pada program ini sebesar Rp. 4.521.712.500,- yang merupakan perpaduan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 299.486.500,- dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 4.222.226.000,- dengan target pada Triwulan I sebesar Rp. 409.739.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 118.875.500,- sehingga capaian target rencana belanja sebesar 9,06% dan capaian realisasi keuangan sebesar 2,63%.

Untuk program Peningkatan Keluarga Sejahtera dibawah koordinasi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera memiliki pagu sebesar Rp. 63.008.650,- dengan target pada Triwulan I sebesar Rp. 8.162.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.980.000,- sehingga capaian target rencana belanja sebesar 12,95% dan capaian realisasi keuangan sebesar 3,14%.

3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran/ Program/Kegiatan	Pagu	TARGET RENCANA BELANJA				REALISASI KEUANGAN				CAPAIAN TARGET RENCANA BELANJA (%)				CAPAIAN REALISASI KEUANGAN (%)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	165.232.800	22.772.600	56.294.350	64.843.350	21.322.500	8.319.690	0	0	0	13,78%	34,07%	39,24%	12,90%	5,04%	0	0	0,00%
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	38.497.500	0	29.003.750	9.493.750	0	0	0	0	0	0,00%	75,34%	24,66%	0,00%	0,00%	0	0	0,00%
Pelaksanaan Manajemen PUG di tingkat	38.497.500	0	29.003.750	9.493.750	0	0	0	0	0	0,00%	75,34%	24,66%	0,00%	0,00%	0	0	0,00%
PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN	10.045.000	2.262.500	3.912.500	2.632.500	1.237.500	1.131.000	0	0	0	22,52%	38,95%	26,21%	12,32%	11,26%	0	0	0,00%
Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan	10.045.000	2.262.500	3.912.500	2.632.500	1.237.500	1.131.000	0	0	0	22,52%	38,95%	26,21%	12,32%	11,26%	0	0	0,00%
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK DAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK	92.724.300	10.428.100	18.603.100	45.058.100	18.635.000	5.715.300	0	0	0	11,25%	20,06%	48,59%	20,10%	6,16%	0	0	0,00%
Pelayanan Pemenuhan Hak Anak	92.724.300	10.428.100	18.603.100	45.058.100	18.635.000	5.715.300	0	0	0	11,25%	20,06%	48,59%	20,10%	6,16%	0	0	0,00%
PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN ANAK	23.966.000	10.082.000	4.775.000	7.659.000	1.450.000	1.473.390	0	0	0	42,07%	19,92%	31,96%	6,05%	6,15%	0	0	0,00%
Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak	23.966.000	10.082.000	4.775.000	7.659.000	1.450.000	1.473.390	0	0	0	42,07%	19,92%	31,96%	6,05%	6,15%	0	0	0,00%

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang memiliki sasaran meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak didukung dengan 4 (empat) program yaitu Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan dan Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dibawah koordinasi Bidang Pemberdayaan Perempuan, Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Program Peningkatan Perlindungan Anak dibawah koordinasi Bidang Perlindungan Anak.

Pada Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan memiliki pagu sebesar Rp. 38.497.500,- dengan target pada Triwulan I sebesar Rp. 0,- dikarenakan kegiatan Pelaksanaan Manajemen PUG di tingkat daerah dijadwalkan pada triwulan II sehingga tidak ada realisasi keuangan. Untuk program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan memiliki pagu sebesar Rp. 10.045.000,- dengan target pada Triwulan I sebesar Rp. 2.262.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.131.000,- sehingga capaian target rencana belanja sebesar 4,66% dan capaian realisasi keuangan sebesar 2,33%.

Pada Bidang Perlindungan Anak terdapat Program Pemenuhan Hak Anak yang memiliki pagu sebesar Rp. 92.724.300,- dengan target pada Triwulan I sebesar Rp. 10.428.100,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.715.300,- sehingga capaian target rencana belanja sebesar 11,25% dan capaian realisasi keuangan sebesar 6,16% dan Program Peningkatan Perlindungan Anak yang memiliki pagu sebesar Rp. 23.966.000,- dengan target pada Triwulan I sebesar Rp. 10.082.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.473.390,- sehingga capaian target rencana belanja sebesar 42,07% dan capaian realisasi keuangan sebesar 6,15%.

Tabel 3.7
CAPAIAN REALISASI KEUANGAN TRIWULAN I TAHUN 2019
BERDASARKAN URUSAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KAB. HSS

Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator	REALISASI ANGGARAN (%)				REALISASI KINERJA (%)				REALISASI KINERJA (%)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
SEKRETARIAT													
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Predikat AKIP	16,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan Pelayanan	8,86	0	0	0	100	0	0	0	11,29	0	0	0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kepuasan Pelayanan	16,21	0	0	0	100	0	0	0	6,17	0	0	0
Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP; Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah	4,97	0	0	0	55,67	0	0	0	11,20	0	0	0
Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan Pelayanan	23,39	0	0	0	100	0	0	0	4,28	0	0	0
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja	Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia < 20 tahun	2,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase organisasi yang menindaklanjuti kesepakatan pendewasaan usia perkawinan	2,63	0	0	0	2,5	5,0	0	0	0,95	0	0	0

Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator	REALISASI ANGGARAN (%)				REALISASI KINERJA (%)				REALISASI (%)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
	Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	2,63	0	0	0	78,40	0	0	0	29,81	0	0	0
Program Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif	3,14	0	0	0	50,17	0	0	0	15,98	0	0	0
	Persentase instansi KB yang menyelenggarakan kegiatan sinkronisasi dan keterpaduan program KKBPK	3,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0,19	0	0
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	5,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Persentase Desa / Kelurahan Layak Anak	5,04	0	0	0	0,67	0	0	0	0,13	0	0	0
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase SKPD yang menerapkan anggaran yang responsif gender	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program peningkatan perlindungan hak perempuan	Persentase organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang aktif	11,26		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas hidup anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	6,16	0	0	0	5,56	0	0	0	0,9	0	0	0
Program peningkatan perlindungan anak	Tingkat pemenuhan aspek desa/kelurahan layak anak berbasis klaster	6,15	0	0	0	100	0	0	0	16,26	0	0	0

BAB IV

PENUTUP

Laporan Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Triwulan I ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Perpres Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Triwulan I ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2019 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 yang ingin di capai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100% dan 0% atau belum mencapai target;
- 2) Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 0% atau belum mencapai target;
- 3) Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 0% dan 0,67% atau belum mencapai target;

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian 3 (tiga) sasaran tersebut, mayoritas pencapaian sasaran belum mampu mencapai target dikarenakan pada triwulan I Tahun 2017 ini masih banyak kegiatan

yang belum dilaksanakan dan akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu pada Triwulan IV (merupakan hasil sensus BPS dan Susenas).

Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 6.225.505.700,00 sedangkan realisasi anggaran pada Triwulan I Tahun 2017 sebesar Rp. 368.017.504,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 5,9%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 5.857.488.196,00.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan Triwulan I Tahun 2019 ini, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kita semua khususnya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sebagai gambaran Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada lintas sektor terkait lainnya baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, 1 April 2019

Kepala Dinas PPKBPPPA



Drs. Hj. Is Susilastuti

Pembina Utama Muda

NIP. 19601219 198503 2 006



LAPORAN KINERJA TRIWULAN II

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	3

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis	8
2.2 Indikator Kinerja Utama	11
2.3 Perjanjian Kinerja	15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	27
3.2 Realisasi Anggaran	47

BAB IV PENUTUP

DAFTAR TABEL

2.1	Indikator Kinerja Utama Tahun 2019	12
2.2	Perjanjian Kinerja Dinas PPKBPPPA	16
3.1	Pencapaian Kinerja Sekretariat Triwulan I	28
3.2	Pencapaian Kinerja Triwulan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	34
3.3	Pencapaian Kinerja Triwulan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	40
3.4	Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2019 Dinas PPKBPPPA	46
3.5	Capaian Realisasi Keuangan Triwulan I Kesekretariatan Tahun 2019	48
3.6	Capaian Realisasi Anggaran dan Kinerja Triwulan	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, maka pembagian urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mencakup :

1. Sub Bidang Pengendalian Penduduk, yakni: a) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, b) Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota.
2. Sub Bidang Keluarga Berencana, yakni: a) Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local, b) Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), c) Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota, d) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB
3. Sub Bidang Keluarga Sejahtera, yakni: a) Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, b) Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Sedangkan pembagian urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencakup :

1. Sub Bidang Kualitas Hidup Perempuan, yakni: a) Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota, b) Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota, c)

Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.

2. Sub Bidang Perlindungan Perempuan, yakni: a) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota, b) Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota, c) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota,
3. Sub Bidang Kualitas Keluarga, yakni: a) Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota, b) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota, c) Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota,
4. Sub Bidang Sistem Data Gender dan Anak, yakni Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota.
5. Sub Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA), yakni: a) Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota, b) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/kota,
6. Sub Bidang Perlindungan Khusus Anak, yakni: a) Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota, b) Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota, c) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:



Penetapan rencana strategis program dan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;



Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan lainnya yang diberikan kepala daerah



Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas PPKBPPPA



Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi



Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas PPKBPPPA



Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas PPKBPPPA

1.2 Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan dasar Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

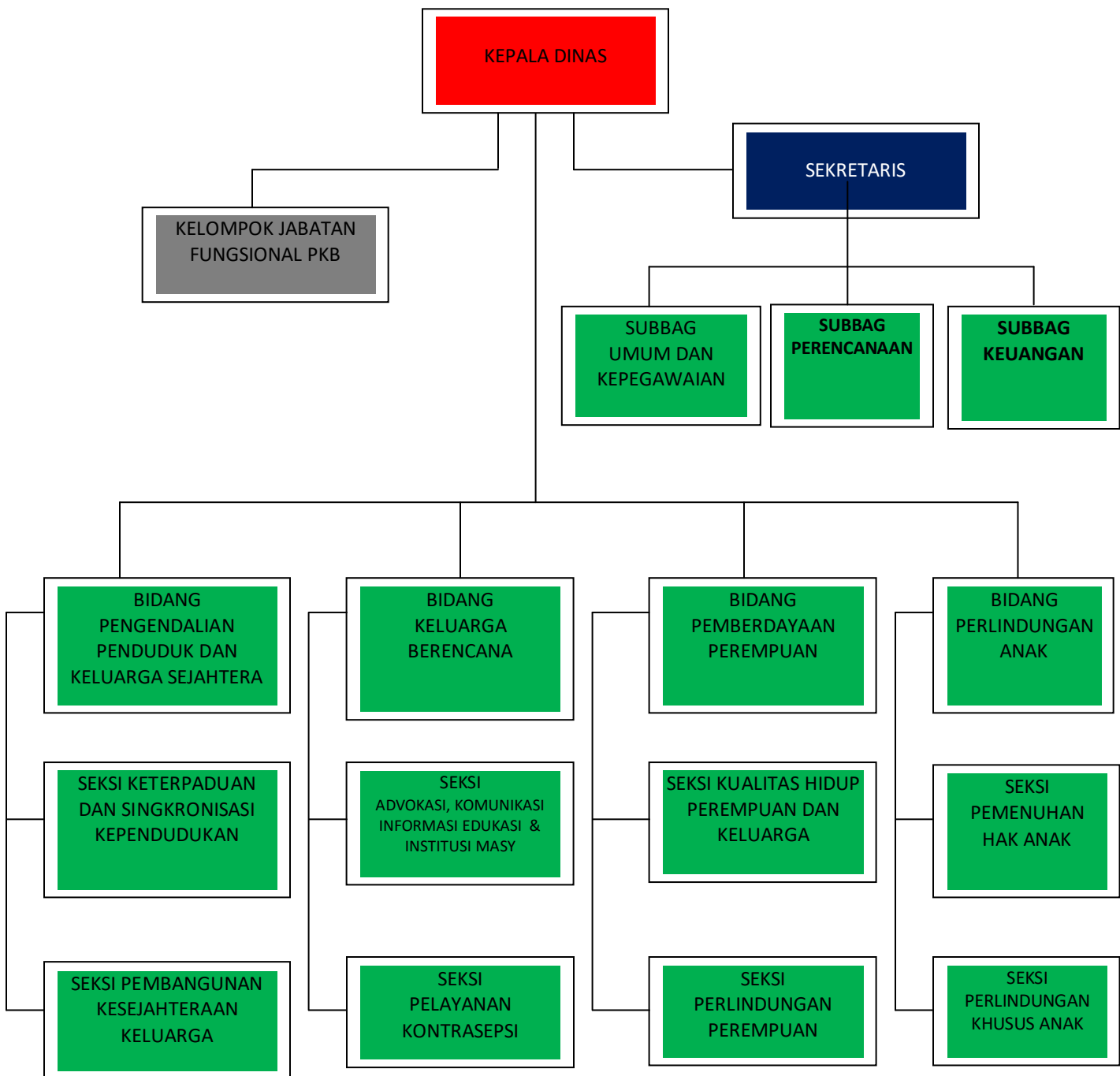
Berpedoman Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta tugas pembantuan lainnya yang diberikan kepala daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. perumusan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. evaluasi dan pelaporan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tergambar pada Gambar 2.1 di bawah ini.



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas PPKBPPPA

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa perumusan permasalahan perangkat daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah dimasa datang.

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap tujuan dan sasaran perangkat daerah. Hal ini untuk menjamin konsistensi serta sinergitas perangkat daerah antar wilayah dan antara pusat dan daerah, yang melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) kabupaten, provinsi, dan nasional dalam proses perumusannya

Identifikasi permasalahan perangkat daerah dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa permasalahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

1. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Belum optimalnya organisasi yang menindaklanjuti kesepakatan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP);
- b. Meningkatkan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif;
- c. Belum optimalnya kelompok kegiatan ketahanan keluarga.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan meningkatkan umur harapan hidup, harapan lama sekolah dan pendapatan per kapita perempuan;
- b. Belum optimalnya peran perempuan dalam pemerintahan;
- c. Belum optimalnya tingkat pemenuhan aspek desa/kelurahan layak anak terkait dengan status kota layak anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyusun Laporan Kinerja Pemerintahan (LAKIP) atau Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

^{d.} Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II SKPD ini dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Dalam laporan kinerja disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka

mencapai Indikator Kinerja Utama SKPD yang ditetapkan dalam Renja-SKPD.

^{e.} Laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berfungsi sebagai alat untuk mendorong instansi pemerintah / perangkat daerah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan secara baik dan benar (*Good Government*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan program secara transparan serta dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (RPJMD 2018-2023).

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2018-2023. Penetapan jangka waktu tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati Hulu Sungai Selatan terkait dengan penetapan/kebijakan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melalui tahapan-tahapan hasil rumusan bersama seluruh komponen/unit kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan dokumen kerja SKPD yang memuat program dan kegiatan serta target dan indikator yang hendak dicapai untuk periode 1 (satu) tahun .

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi dan kebijakan yang digunakan dalam rangka pencapaian

tujuan. Dengan perencanaan strategis, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan dapat membangun strategi sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang. Dengan penetapan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Berpedoman isu strategis RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, khususnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas, Berbasis Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terlihat belum sedemikian optimal. Hal ini terbukti dari koordinasi lintas kategorial serta akuntabilitas aparatur perangkat daerah yang masih perlu ditingkatkan. Mengingat besarnya afirmasi dan atensi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Disamping itu, keberhasilan program pimpinan perangkat daerah dan pembangunan perangkat daerah pada level teknis sangat bergantung pada kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan perangkat daerah tersebut. Oleh karena itu, perwujudan tata pemerintahan yang baik sangat perlu untuk ditingkatkan. Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis. Dimana berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi, maka dirumuskan isu-isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 5 (lima) tahun kedepan, yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Aksesibilitas dan Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya

Perwujudan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditandai dengan kemampuan masyarakat mengakses kebutuhan dasar seperti kesehatan. Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dapat didefinisikan melalui perspektif jarak maupun keterjangkauan layanan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri sampai pada tahun 2017 teridentifikasi bahwa beberapa kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi

dengan optimal. Pada urusan kesehatan beberapa permasalahan juga masih perlu untuk diperhatikan. Seperti halnya kualitas pelayanan kesehatan yang masih belum optimal dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal ini dapat terlihat dengan tingginya usia kawin pertama kurang dari 20 tahun di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kondisi-kondisi tersebut tentu memberikan *pressure* tersendiri terhadap pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sehingga pembangunan manusia mengalami perlambatan. Dengan demikian maka, perwujudan aksesibilitas serta kualitas pelayanan di bidang kesehatan perlu untuk dikedepankan mengingat sumber daya manusia yang baik merupakan wujud nyata dari cita-cita UUD 1945 yaitu kesejahteraan masyarakat.

2. Peningkatan Optimalnya Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan dan Wawasan Lingkungan
Peran strategis pembangunan level *bottom* banyak diakomodir Desa, garda terdepan pelayanan yang bersentuhan dengan masyarakat adalah desa, sehingga kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di desa menjadi sangat penting untuk ditingkatkan. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan karakter dan pondasi perekonomian serta peningkatan pemberdayaan masyarakat di perdesaan masih belum berjalan optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya kapasitas kelembagaan di desa sehingga kualitas pengelolaan desa menjadi tidak begitu efektif dan efisien. Oleh karena itu, perluasan jangkauan pelayanan melalui peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar perlu untuk diupayakan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Jika memperhatikan data, isu perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender mengalami progress positif. Momentum positif terjadi khususnya pada peningkatan penyelesaian pengaduan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan semakin meningkatnya peran perempuan dalam organisasi dan pembangunan. Hal ini memberikan sinyal positif bahwa perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender mendapat respon positif di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kondisi ini tentu harus dipertahankan dan perlu mendapatkan perhatian khusus sehingga momentum positif tersebut dapat *sustain* dan semakin berkualitas.

3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas, Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis

Tuntutan pembangunan modern memaksa perangkat daerah beradaptasi dengan teknologi informasi. Sehingga pelayanan dengan berbasis teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Hal ini mampu mengakomodir belum optimalnya pelayanan publik serta paradigma mainstream masyarakat yaitu urusan pelayanan di pemerintah daerah sangat birokratif dan berbelit. Sampai pada tahun 2019, penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih belum berjalan optimal. Sehingga masih perlu mendapatkan proporsi afirmasi lebih. Inilah sebabnya mengapa pelayanan publik berbasis teknologi informasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, khususnya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih perlu untuk ditingkatkan.

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, maka dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2019
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kab. Hulu Sungai Selatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	SUMBER DATA
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Komponen penilaian terdiri dari pengungkit 60% dan hasil 40%	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah urusan Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Predikat AKIP	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20%	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	SUMBER DATA
				Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3	Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja	Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia < 20 tahun	<p>Alasan Pemilihan : Persentase rata-rata usia kawin pertama masuk dalam indikator kinerja adalah dalam rangka melaksanakan program KB serta pengendalian penduduk dengan sasaran para remaja untuk tidak kawin muda / pendewasaan usia perkawinan (PUP)</p> <p>Cara Perhitungan Indikator : $\frac{\text{Jumlah wanita kawin pertama usia } < 20 \text{ tahun}}{\text{Jumlah total perkawinan}} \times 100\%$</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Bidang KB - Laporan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
4	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	<p>Alasan Pemilihan : IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan yang diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan gender. Dengan IPG dapat mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.</p> <p>Cara Perhitungan Indikator : $IPG = 1/3 (X EDE(1) + X EDE(2) + I inc-dis)$</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Bidang Pemberdayaan Perempuan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	SUMBER DATA
			Keterangan : X EDE(1) = X EDE untuk harapan hidup I inc-dis = Indeks distribusi penghasilan	
		Persentase Desa / Kelurahan Layak Anak	<p>Alasan Pemilihan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B ayat 2 UUD Negara RI tahun 1945); 2. UU NO. 35 th 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 3. Permen Pemberdayaan Perempuan No. 13 th 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten Kota Layak Anak Di Desa/Kelurahan <p>Cara Perhitungan Indikator : $\frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan Layak Anak}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$</p>	Laporan Bidang Perlindungan Anak

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja aparatur sipil negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah (*top-down*) dan ke samping (*horizontal-diagonal*) dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapi dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Kepala SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*);
- d. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Bupati Hulu Sungai Selatan dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KAB. HULU SUNGAI SELATAN

2.2.1 SEKRETARIAT (URUSAN LAYANAN/PENUNJANG RUTIN)

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		Predikat AKIP	Predikat	81,89 (A)	0	0	0	81,89 (A)	
		1	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah	Persen	100 %		100%	100%	
		1.1	Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	15	5	9	12	15
		1.2	Penyusunan Dokumen Keuangan	Dokumen Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	12	8	10	11	12

Pada tabel 2.2, dapat dijelaskan bahwa sekretariat merupakan urusan layanan/urusan rutin. Dimana tujuan merupakan Misi 5 (lima) dari RPJMD 2018 – 2023. Yang dari Indeks Reformasi Birokrasi target sebesar 23,50. Untuk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mendukung hasil dari Indeks Reformasi Birokrasi, yaitu Nilai / Predikat AKIP sebesar 81,89. Dengan Perjanjian Kinerja dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari 1 program yaitu Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan 2 (dua) kegiatan yaitu : Penyusunan Dokumen AKIP sebanyak 15 (sebelas) dokumen dan Penyusunan Dokumen Keuangan sebanyak 12 (dua belas) dokumen.

Aspek pemenuhan dokumen-dokumen AKIP yaitu :

Nama Dokumen		Jumlah	
1	Renstra	1	dokumen
2	Berita Acara Reviu Renstra	1	dokumen
3	Cascading Kinerja Tahun 2019	1	dokumen
4	Renja 2019 (Murni, Perubahan)	2	dokumen
5	IKU + SK 2019	1	dokumen
6	PK Murni 2019 Ess II s.d Ess IV Dan Jabatan Fungsional (Staf)	1	dokumen
7	PK Perubahan 2019 Ess II s.d Ess IV Dan Jabatan Fungsional (Staf)	1	dokumen
8	Rencana Aksi 2019	1	dokumen
9	Capaian Kinerja Triwulan Th. 2019	4	dokumen
10	Laporan Kinerja (Lkj) Tahun 2019	1	dokumen
11	Peta Strategi & Struktur Organisasi serta Template Format Keselarasan Kinerja	1	dokumen
Jumlah		15	dokumen

Untuk Aspek pemenuhan dokumen-dokumen AKIP, pemasangan ditarget di triwulan diambil berdasarkan dokumen berurutan. Dan pada triwulan 1 mempunyai target lebih besar dibandingkan dengan triwulan lain yaitu 10, dikarenakan penyusunan dokumen inti seperti Renstra, Renja, Dokumen Cascading, SK IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan dokumen pendukung lainnya terlebih dahulu dibuat, karena sebagai dasar pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Aspek pemenuhan untuk Penyusunan Dokumen Keuangan yaitu :

Nama Dokumen		Jumlah	
1	Renstra	1	dokumen
2	Renja	1	dokumen
3	RKBMD pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan	2	dokumen
4	PRA RKA Murni dan Perubahan	2	dokumen
5	RKA Murni	1	dokumen
6	RKA Perubahan	1	dokumen
7	DPA	1	dokumen
8	Laporan Triwulan	1	dokumen
9	Laporan Prognosis Semesteran 1	1	dokumen
10	Laporan Tahunan (CALAK)	1	dokumen
Jumlah		12	dokumen

Sedangkan untuk Aspek pemenuhan untuk Penyusunan Dokumen Keuangan, pemasangan di target di triwulan diambil berdasarkan dokumen berurutan. Dan pada triwulan 1 mempunyai target lebih besar dibandingkan dengan triwulan lain yaitu 8, dikarenakan penyusunan dokumen inti seperti Renstra, Renja, RKBMD pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan, Dokumen PRA RKA Murni dan Perubahan, RKA Murni, DPA, Laporan Triwulan, terlebih dahulu dibuat, karena sebagai dasar pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari segi keuangan dan pelaksanaan kegiatan.

2.2.2 URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	5	6	7	10	11	12	13	14
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
Menurunkan pernikahan di bawah usia 20 tahun			Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia ≤ 20 tahun	Persen	73,02	0	0	0	73,02
	Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja		Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia < 20 tahun	Persen	73,02	0	0	0	73,02
		Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Persentase organisasi yang menindaklanjuti kesepakatan pendewasaan usia perkawinan	Persen	10	2,5	5,0	7,5	2,5
			Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	Persen	78,89	70	75	78,9	78,99
		Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah remaja teradvokasi dan menerima Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja	orang	357	140	257	307	357
		Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana	Jumlah PUS yang ber KB menggunakan alat kontrasepsi	PUS	34.612	34.312	34.412	34.512	34.812

Tujuan	Sasaran		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan			
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2		5	6	7	10	11	12	13	14
			Program Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif	Persen	60,2	50,17	53,51	56,86	21,08
				Persentase instansi KB yang menyelenggarakan kegiatan sinkronisasi dan keterpaduan program KKBPK	Persen	18,18		9,09		18,18
			Pembinaan kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif	kelompok	180	150	160	170	180
			Penyusunan data kependudukan dan keluarga	Jumlah instansi KB yang menyelenggarakan program KKBPK	buah	2	0	1	0	2

Pada tabel 2.2.2 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dijelaskan bahwa tujuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah menurunkan pernikahan di bawah usia 20 tahun. Sebagai alur pendukung dari tujuan Dinas maka disusun program urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu:

1. Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dengan target:
 - a. Persentase organisasi yang menindaklanjuti kesepakatan pendewasaan usia perkawinan sebesar 10% dan,
 - b. Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif sebesar 78,89 %
2. Program Peningkatan Keluarga Sejahtera dengan target:
 - a. Persentase kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif sebesar 60,2 %, dan
 - b. Persentase instansi KB yang menyelenggarakan kegiatan sinkronisasi dan keterpaduan program KKBPK sebesar 18,18 %

Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) mempunyai 2 kegiatan yaitu:

- 1) Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dengan target 357 orang, target triwulan I sebanyak 140 orang, target triwulan II sebanyak 257 orang, target triwulan III sebanyak 307 orang dan target triwulan IV sebanyak 357 orang. Target pada triwulan adalah hasil kumulatif pada tiap triwulan.
- 2) Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana dengan target 34.612 PUS, target triwulan I sebanyak 34.312 PUS, target triwulan II sebanyak 34.412 PUS, target triwulan III sebanyak 34.512 PUS dan target triwulan IV sebanyak 34.612 PUS. Target pada triwulan adalah hasil kumulatif pada tiap triwulan.

Program Peningkatan Keluarga Sejahtera mempunyai 2 kegiatan yaitu:

- 1) Pembinaan kelompok kegiatan ketahanan keluarga dengan target 180 kelompok, target triwulan I sebanyak 150 kelompok, target triwulan II sebanyak 160 kelompok, target triwulan III sebanyak 170 kelompok, dan target triwulan IV sebanyak 180 kelompok. Target pada triwulan adalah hasil kumulatif pada tiap triwulan.

- 2) Penyusunan data kependudukan dan keluarga dengan target 2 instansi, dilaksanakan pada triwulan II dan triwulan IV. Target pada triwulan IV adalah hasil komulatif pada tiap triwulan.

2.2.3. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	5	6	7	10	11	12	13	14
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
Meningkatkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pangarusutamaan gender serta perlindungan anak			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,27	0	0	0	90,27
	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,27	0	0	0	90,27
			Persentase Desa / Kelurahan Layak Anak	Persen	2,03	0,67	1,35	0	2,03
		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase SKPD yang menerapkan anggaran yang responsif gender	Persen	36,84	0	36,84	0	0
		Pelaksanaan PUG di tingkat daerah	Jumlah SKPD yang perencanaan dan penganggaran responsif gender	SKPD	10	0	10	0	0

			Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan	Persentase organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang aktif	Persen	8,11	0	5,95	8,11	0
			Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan	Jumlah organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang dibina	organisasi	6	0	3	6	0
			Program Peningkatan Pelindungan Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	Persen	100	100	100	100	100
			Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak	Jumlah PATBM desa yang aktif	buah	2	0	1	0	2
			Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Tingkat pemenuhan aspek desa/kelurahan layak anak berbasis kluster	Persen	27,78	5,56	5,56	7,41	9,26
			Pelayanan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah indikator yang terpenuhi	kluster	15	3	3	4	5

Pada tabel 2.2.3 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa tujuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Meningkatkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pangarusutamaan gender serta perlindungan anak. Sebagai alur pendukung dari tujuan Dinas maka disusun program urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu:

1. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan target:
Persentase SKPD yang menerapkan anggaran yang responsif gender sebesar 36,84%,
2. Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan dengan target:
Persentase organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang aktif sebesar 8,11 %,
3. Program Peningkatan Perlindungan Anak dengan target:
Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan 100 %, dan
4. Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dengan target:
Tingkat pemenuhan aspek desa/kelurahan layan anak berbasis kluster sebesar 27,78%.

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan mempunyai 1 kegiatan yaitu:

- 1) Pelaksanaan Pangarusutamaan Gender (PUG) dengan target 10 SKPD dimana kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II. Adapun 10 SKPD yang menjadi target adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Inspektorat, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian, dan Dinas Sosial

Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan mempunyai 1 kegiatan yaitu:

- 1) Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dengan target 6 organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang akan dilaksanakan pada triwulan II dan pada

triwulan III. Organisasi perempuan yang akan dibina yaitu Dharma Wanita Persatuan Kab. HSS, Gabungan Isteri Wakil Rakyat (GATRIWARA) Kab. HSS, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kab. HSS, Muslimat NU, Salimah, dan Katalia.

Program Peningkatan Perlindungan Anak mempunyai 1 kegiatan yaitu:

- 1) Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dengan target 2 Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) desa yang aktif, dimana akan dilaksanakan pada Triwulan I dan Triwulan II dengan masing-masing 1 PATBM desa yang aktif.

Program Peningkatan Perlindungan Anak mempunyai 1 kegiatan yaitu:

- 1) Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dengan target 2 Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) desa yang aktif, dimana akan dilaksanakan pada Triwulan I dan Triwulan II dengan masing-masing 1 PATBM desa yang aktif.

Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak mempunyai 1 kegiatan yaitu:

- 1) Pelayanan Pemenuhan Hak Anak dengan target 15 indikator yang terpenuhi, target triwulan I sebanyak 3 indikator, target triwulan II sebanyak 3 indikator, target triwulan III sebanyak 4 indikator dan target triwulan IV sebanyak 5 indikator.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK), juga tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. Dengan berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan menetapkan tujuan dan sasaran.

Pada bab ini akan disajikan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama satu triwulan yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan pada target Triwulan II serta realisasi anggaran Triwulan II (dua) tahun 2019.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka tujuan sasaran pada Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pencapaian Indikator Kinerja Utama terdapat pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran seperti pada tabel berikut.

TABEL 3.1

PENCAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT TRIWULAN II

Tujuan	Sasaran		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2		5	6	7	10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi				Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50						
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			Predikat AKIP	Predikat	81,89 (A)	0	0	0	81,89 (A)	0	0						
		1	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP	Persen	79,8	0	0	0	81,46	0	0						
				Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah	Persen	100%	66,67%	83,33%	91,66%	100%	66,67%	83,33%			100 %	100 %		
		1.1	Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	15	5	9	12	15	5	9			100 %	100 %		
		1.2	Penyusunan Dokumen Keuangan	Dokumen Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	12	3	6	9	12	3	6			100 %	100 %		
		2	Program Pelayanan Administrasi	Tingkat Kepuasan Pelayanan	Persen	100	100	100	100	100	100	100			100 %	100 %		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	5	6	7	10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14
			Perkantoran														
		2.1	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun	1 tahun	0,25 tahun	0,50 tahun	0,75 tahun	1 tahun	0,25 tahun	0,50 tahun			100 %	100 %	
		2.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun	1 tahun	0,25 tahun	0,50 tahun	0,75 tahun	1 tahun	0,25 tahun	0,50 tahun			100 %	100 %	
		2.3	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun	1 tahun	0	0	0,50 tahun	1 tahun	0	0			0	0	
		2.4	Penyediaan makanan dan minuman	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun	1 tahun	0,25 tahun	0,50 tahun	0,75 tahun	1 tahun	0,25 tahun	0,50 tahun			100 %	100 %	
		2.5	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun	1 tahun	0,25 tahun	0,50 tahun	0,75 tahun	1 tahun	0,25 tahun	0,50 tahun			100 %	100 %	
		2.6	Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun	1 tahun	0,25 tahun	0,50 tahun	0,75 tahun	1 tahun	0,25 tahun	0,50 tahun			100 %	100 %	
		3	Program Peningkatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan	Persen	100	100	100	100	100	100	100			100 %	100 %	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	5	6	7	10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14
			Sarana dan Prasarana Aparatur														
		3.1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor kondisi baik	tahun	1 tahun	0,5 tahun	1 tahun	0	0	0,5 tahun	1 tahun			100 %	100 %	
		3.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Mobil dan kendaraan operasional kondisi baik	tahun	1 tahun	0,25 tahun	0,50 tahun	0,75 tahun	1 tahun	0,25 tahun	0,50 tahun			100 %	100 %	
		3.3	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor kondisi baik	tahun	1 tahun	0,25 tahun	0,50 tahun	0,75 tahun	1 tahun	0,25 tahun	0,50 tahun			100 %	100 %	
		4	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan	Persen	100	100	100	100	100	100	100			100 %	100 %	
		4.1	Pembinaan Program KBKR	Jumlah kegiatan KBKR	kegiatan	5 kegiatan	2 kegiatan	4 kegiatan	5 kegiatan	0	2 kegiatan	4 kegiatan			100 %	100 %	
		4.2	Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga	Jumlah kegiatan ketahanan keluarga	kegiatan	3 kegiatan	2 kegiatan	0	3 kegiatan	0	2 kegiatan	0			100 %	100 %	

Tujuan	Sasaran		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2		5	6	7	10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14
			Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat	Jumlah kegiatan peran serta dan partisipasi masyarakat	kegiatan	5 kegiatan	1 kegiatan	3 kegiatan	4 kegiatan	5 kegiatan	1 kegiatan	3 kegiatan			100 %	100 %		
		4.3	Partisipasi Anak	Jumlah kegiatan partisipasi anak	kegiatan	2 kegiatan	0	0	2 kegiatan	0	0	0			100 %	100 %		

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, pencapaian kinerja urusan kesekretariatan, sebagai tujuan sasaran strategis yaitu Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada triwulan 1 ini realisasi yang ada tidak bisa dilaporkan sebagai laporan Realisasi sasaran karena bentuknya kegiatan selama setahun, sehingga output/keluaran akan disampaikan pada triwulan 4 (empat). Pada tabel diatas mempunyai program utama sebanyak 1 program dengan kegiatan utama 2 buah. Untuk kegiatan rutin program pendukung terdapat 3 buah dan kegiatan pendukung sebanyak 13 buah yang dilaksanakan sesuai rutin pengelolaan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dan yang terkait dengan Sasaran Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan Indikator Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah dengan kegiatan Penyusunan Dokumen AKIP dan Penyusunan Dokumen Keuangan.

Pada indikator kinerja sasaran pertama Indeks Reformasi Birokrasi hasil capaian kami target Triwulan 4 namun masih belum bisa diukur karena masih tahap persiapan kegiatan. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak melakukan pelayanan publik langsung, melainkan Indeks Reformasi Birokrasi yang diukur adalah pelayanan rutin Sekretariat kepada bidang-bidang baik dalam hal urusan ketatausahaan maupun urusan kepegawaian. Sedangkan indikator kinerja sasaran yang kedua yaitu Nilai/Peringkat AKIP hasil capaian juga kami target pada triwulan 4 masih belum bisa diukur karena hasil penilaian evaluasi Laporan AKIP oleh Kemenpan RB dilakukan pada triwulan 4.

Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, memiliki target kegiatan 70,37% atau jumlah 19 dokumen dari total jumlah 27 dokumen, dimana 9 untuk Dokumen Penyusunan AKIP dan 10 Dokumen dari penyusunan Dokumen Keuangan. Dari Kegiatan

Penyusunan AKIP, telah dilaksanakan sebanyak 9 di Triwulan II yaitu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

	Nama Dokumen		Jumlah
1	Renstra	1	dokumen
2	Renja 2019 (Murni)	1	dokumen
3	IKU + SK 2019	1	dokumen
4	Cascading 2019)	1	dokumen
5	PK Murni 2019 S.D Ess Iv Dan Jabatan Fungsional (Pelaksana)	1	dokumen
6	Pra RKA 2020	1	dokumen
7	Capaian Kinerja Triwulan Th. 2019	1	dokumen
8	LKj Triwulan	2	dokumen
	Jumlah	9	dokumen

Sedangkan untuk Penyusunan Dokumen Keuangan, pada Triwulan II sebanyak 3 Dokumen yaitu Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan per bulan selama 3 bulan.

Pada indikator kinerja program kami target di tiap triwulan pada aspek pemenuhan dokumen untuk kegiatan pelaporan AKIP yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan setiap Triwulan dan Akhir Tahun, serta aspek pemenuhan dokumen untuk pelaporan keuangan yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan setiap Triwulan, Semester dan Akhir.

Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran di targetkan pada triwulan II 5 kegiatan dari 6 kegiatan yang ada dan sudah dilaksanakan 5 kegiatan dengan capaian 100 % yaitu kegiatan penyediaan jasa dan administrasi perkantoran, kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, kegiatan penyediaan makan dan minuman, kegiatan rapat-rapat koordinasi, konsultasi dengan lapangan serta kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya.

Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di targetkan pada triwulan II 3 kegiatan dan sudah dilaksanakan 3 kegiatan dengan capaian 100 % yaitu kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

Pada Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah di targetkan pada triwulan I 3 kegiatan dari 4 kegiatan dan sudah dilaksanakan 3 kegiatan dengan capaian 100 % yaitu kegiatan pembinaan

program KBKR, kegiatan penyelenggaraan Ketahanan Keluarga serta kegiatan peran serta dan partisipasi masyarakat.

TABEL 3.2
PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	5	6	7	10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
Menurunkan pernikahan di bawah usia 20 tahun			Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia ≤ 20 tahun	Persen	73,02	0	0	0	73,02	0	0			0	0		
	Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja		Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia < 20 tahun	Persen	73,02	0	0	0	73,02	0	0			0	0		
		Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Persentase organisasi yang menindaklanjuti kesepakatan pendewasaan usia perkawinan	Persen	10	2,5	5,0	7,5	10	2,5	5,0			100 %	5,0		
			Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	Persen	78,89	78,40	78,65	78,9	78,99	78,40	78,56			100 %	99,88%		
		Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi	Jumlah remaja teradvokasi dan menerima Komunikasi, Informasi dan Edukasi	orang	357	140	257	307	357	201	311			143,7 %	121,01%		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	5	6	7	10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14
		Remaja (KRR)	Kesehatan Reproduksi Remaja														
		Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana	Jumlah PUS yang ber KB menggunakan alat kontrasepsi	PUS	34.612	34.312	34.412	34.512	34.812	37.238	37.655			108,29%	109,42%		
		Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Penyuluhan KB (DAK FISIK)	Jumlah Balai KKB Kecamatan	Balai KKB Kec	11	4	8	11	11	0	8			0	8		
		Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK NF)	Jumlah balai KKB Kec. yang mendapat dukungan operasional keg. program KKBPK	Balai KKB Kec	11	4	8	11	11	4	8			100%	8		
		Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan (DAK NF)	Jumlah faskes keluarga berencana yang mendapatkan bantuan alat dan obat kontrasepsi (Alokon)	Faskes KB	26	9	18	26	26	9	18			100%	18		
		Operasional Penggerakan Program KKBPK di Kampung KB (DAK NF)	Jumlah kampung KB yang mendapat dukungan integrasi program KKBPK dan program lainnya	Kampung KB	22	7	14	22	22	0	14			0	14		

Tujuan	Sasaran		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2		5	6	7	10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14
			Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) (DAK NF)	Jumlah kader PPKBD di desa yang mendapat dukungan program KKBPB	Kader PPKBD	148	50	100	148	148	50	100			100%	100%		
				Jumlah kader Sub PPKBD di desa yang mendapat dukungan program KKBPB	Kader Sub PPKBD													
			Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK NF)	Jumlah Media KIE terfasilitasi	buah	11	4	8	11	11	4	8			100%	100%		
			Program Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif	Persen	60,2	50,17	53,51	56,86	60,20	48,13	50,00			95,93 %	93,44%		
				Persentase instansi KB yang menyelenggarakan kegiatan sinkronisasi dan keterpaduan program KKBPB	Persen	18,18	0	9,09	0	18,18	0	9,09			0	100%		
			Pembinaan kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif	kelompok	180	150	160	170	180	154	160			102,67%	100%		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	5	6	7	10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14
			Penyusunan data kependudukan dan keluarga	instansi	2	0	1	0	2	0	1			0	100 %		

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas, pencapaian kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sebagai tujuan sasaran strategis yaitu menurunkan pernikahan di bawah usia 20 tahun pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada triwulan II ini realisasi yang ada tidak bisa dilaporkan sebagai laporan Realisasi sasaran karena bentuknya kegiatan selama setahun karena merupakan hasil Survey Susenas, sehingga output/keluaran akan disampaikan pada triwulan 4 (empat). Pada tabel diatas mempunyai 2 program yaitu Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dan Program Peningkatan Keluarga Sejahtera.

Pada Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) memiliki 2 indikator kinerja program yaitu Persentase organisasi yang menindaklanjuti kesepakatan pendewasaan usia perkawinan yang mana pada triwulan II ditargetkan 3 organisasi dan sudah terealisasi 3 organisasi dengan capaian 100% total organisasi yang menindaklanjuti kesepakatan pendewasaan usia perkawinan sampai Triwulan II sebanyak 6 organisasi, dan pada indikator Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif pada triwulan II ditargetkan 78,40 % PUS dan sudah terealisasi 78,40% dengan capaian 100%. Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif berasal dari jumlah PUS yang ber KB menggunakan alat kontrasepsi sebanyak 37,815 dan jumlah PUS sebesar 48.134 (Data capaian berasal dari laporan Statistik Rutin BKKBN). Untuk pencapaian program tersebut ada 8 kegiatan dengan 2 kegiatan yang bersumber pada Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dengan sasaran remaja/anak berusia 15-19 tahun yang diberikan sosialisasi dan edukasi tentang pendewasaan usia perkawinan dan kegiatan Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana dengan sasaran Pasangan Usia Subur, serta 6 kegiatan yang bersumber pada Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pada Program Peningkatan Keluarga Sejahtera memiliki 2 indikator kinerja program yaitu persentase kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif dan persentase instansi KB yang menyelenggarakan kegiatan sinkronisasi dan keterpaduan program KKBPK. Pada indikator persentase kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif pada triwulan II ditargetkan 53,51% kelompok kegiatan, akan tetapi pada triwulan II ini

hanya terealisasi 50,00 % dengan capaian kinerja sebesar 93,44%. Sedangkan pada persentase instansi KB yang menyelenggarakan kegiatan sinkronisasi dan keterpaduan program KKBPK sudah terealisasi sesuai target yaitu 1 instansi dengan capaian 100%. Untuk mendukung indikator ini pada triwulan II sudah dilaksanakan beberapa kegiatan seperti rapat koordinasi teknis bulanan bidang PPKS yang diikuti oleh Bidang Keluarga Berencana dan seluruh PKB se-Kab HSS, memonitor laporan pengendalian lapangan 11 kecamatan, meentry data laporan pengendalian lapangan 11 kecamatan dan membuat laporan bulanan hasil dari laporan pengendalian lapangan 11 kecamatan.

Tabel 3.3

PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	5	6	7	10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	
Meningkatkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pangarusutamaan gender serta perlindungan anak			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,98	0	0	0	89,98	0	0			0	0		
	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan perempuan dan anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,96	0	0	0	90,58	0	0			0	0		
			Persentase Desa / Kelurahan Layak Anak	Persen	2,03	0,67	1,35	0	2,03	0,67	1,35			100 %	100 %		
		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase SKPD yang menerapkan anggaran yang responsif gender	Persen	36,84	0	36,84	0	0	0	36,84			100 %	100 %		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	5	6	7	10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14
			Pelaksanaan PUG di tingkat daerah	SKPD	10	0	10	0	0	0	10			0	100 %		
			Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan	Persen	8,11	0	5,95	8,11	0	0	5,95			0	100 %		
			Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan	organisasi	6	0	3	6	0	0	3			0	100 %		
			Program Peningkatan Pelindungan Anak	Persen	100	100	100	100	100	100	100			100%	100 %		
			Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak	buah	2	0	1	0	2	0	1			0	100 %		
			Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persen	27,78	5,56	5,56	7,41	9,26	5,56	5,56			100 %	100 %		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	5	6	7	10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14
		Pelayanan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah indikator yang terpenuhi	kluster	15	3	3	4	5	3	3			100 %	100 %		

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas, pencapaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebagai tujuan sasaran strategis yaitu meningkatkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pangarusutamaan gender serta perlindungan anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada triwulan II ini ada realisasi yang tidak bisa dilaporkan sebagai laporan Realisasi sasaran karena bentuknya kegiatan selama setahun karena merupakan hasil Survey dari BPS, sehingga output/keluaran akan disampaikan pada triwulan 4 (empat). Pada tabel diatas mempunyai 4 program yaitu Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan, Program Peningkatan Perlindungan Anak dan Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.

Pada program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan mempunyai indikator kinerja program Persentase SKPD yang menerapkan anggaran yang responsif gender yang mana pada triwulan II sudah dilaksanakan kegiatan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender. Adapun SKPD yang mengikuti kegiatan tersebut yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Inspektorat, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian, Dinas Sosial. Selain kegiatan tersebut juga dilaksanakan rapat Koordinasi Pangarusutamaan Gender (PUG) dengan 4 driver PUG yaitu Inspektorat, Bakeuda, Bappelitbangda dan Dinas PPKBPPPA.





Untuk Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan mempunyai indikator kinerja program yaitu Persentase organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang aktif yang mana pada triwulan II sudah dilaksanakan sosialisasi dengan beberapa organisasi yaitu Dharma Wanita Persatuan Kab. HSS, Gabungan Isteri Wakil Rakyat (GATRIWARA) Kab. HSS dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kab. HSS. Untuk mendukung indikator tersebut pada triwulan II juga dilaksanakan sosialisasi perlindungan perempuan dalam rumah tangga yang dilaksanakan di kecamatan Loksado.

Program Peningkatan Perlindungan Anak mempunyai indikator kinerja program persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan, dimana pada triwulan II ini ditargetkan 100% dan sudah terealisasi 100% dengan jumlah kasus anak yang dilaporkan 1 kasus dan sudah diselesaikan 1 kasus. Untuk mendukung penurunan kasus pada anak dibentuk Tim Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak dengan anggota antara lain terdiri dari Jaksa anak, Pengacara, Kepolisian, RUTAN, Pengadilan Agama, Dinas Pendidikan, Kemenag, Peksos/Dinas Sosial, terlaksananya sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang mana pada triwulan II sudah dibentuk PATBM pada kelurahan kandang barat menjadi PATBM yang aktif.





Pada program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak mempunyai indikator kinerja program yaitu Tingkat pemenuhan aspek Desa/Kelurahan Layak Anak berbasis Klaster, dimana pada triwulan II ditargetkan 5,56 % dan sudah terealisasi 5,56% dengan perhitungan total 6 indikator sudah terealisasi sampai pada triwulan II dari 15 indikator dengan capaian kinerja 100%. Untuk mendukung pencapaian tersebut sudah dilaksanakan Pembinaan pada Desa/Kelurahan yang menginisiasi menjadi Desa/kelurahan Layak Anak, Pembinaan Puskesmas dengan pelayanan ramah anak, Terbinanya Sekolah yang menginisiasi menjadi Sekolah Ramah Anak, Terlaksananya Rapat evaluasi Kabupaten Layak Anak dan Terlaksananya kegiatan forum anak di Kab. HSS.

Dari keseluruhan hasil capaian kinerja urusan/bidang terkait yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, rangkuman capaian dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2019
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KAB. HSS

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan		Status	Keterangan
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50		
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Predikat AKIP	Predikat	81,89 (A)	0	0	0	81,89 (A)	0	0		Capaian target di akhir (TW IV)
Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja	Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia < 20 tahun	Persen	73,02	0	0	0	73,02	0	0		Capaian target di akhir (TW IV)
Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,96	0	0	0	90,58	0	0		Capaian target di akhir (TW IV)
	Persentase Desa / Kelurahan Layak Anak	Persen	2,03	0,67	1,35	0	2,03	0,67	1,35		

Keterangan:

-  Capaian > 100 %
-  Capaian > 90% - 100 %
-  Capaian > 75% - 90 %
-  Capaian < 50 %

Berdasarkan Tabel 3.5 di atas, indikator sasaran yang pertama yaitu Indeks Reformasi Birokrasi pencapaian realisasi sama dengan target atau dengan kata lain tercapai 100%, begitu juga indikator sasaran ke 5 (lima) yaitu Persentase desa/kelurahan layak anak pencapaian kinerjanya 100% dikarenakan pada triwulan I masih dalam proses pembinaan untuk desa/kelurahan layak anak.

Sedangkan untuk indikator kinerja sasaran ke dua yaitu predikat AKIP realisasi ditargetkan pada triwulan IV karena pada triwulan tersebut baru akan dilakukan penilaian oleh Inspektorat. Untuk indikator ke 3 (tiga) dan 4 (empat) yaitu persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia < 20 tahun dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunggu hasil survey dari Susenas untuk indikator ke 3 dan hasil survey dari Badan Pusat Statistik (BPS)

3.2. Realisasi Anggaran

Pada bagian ini akan diuraikan pagu anggaran dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Di dalamnya terdapat alokasi anggaran, realisasi keuangan, persentasi capaian dan sisa anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan Triwulan I Tahun Anggaran 2019 yang diambil dari Laporan Fisik dan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Total Pagu Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp. 6.225.505.700,00 dan Realisasi anggaran pada sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 Bidang Keluarga Berencana sebesar Rp. 532.999.060,00, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera sebesar Rp. 31.161.200,00, Bidang Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp. 33.735.750,00, Bidang Perlindungan Anak sebesar Rp. 30.457.415,00, dan Sekretariat sebesar Rp. 658.483.420,00. Adapun rincian Alokasi dan Realisasi Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
CAPAIAN REALISASI KEUANGAN TRIWULAN I TAHUN 2019
BERDASARKAN URUSAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KAB. HSS

1. Kesekretariatan (layanan penunjang perangkat daerah)

Sasaran/ Program/Kegiatan	Pagu	TARGET RENCANA BELANJA				REALISASI KEUANGAN				CAPAIAN TARGET RENCANA BELANJA (%)				CAPAIAN REALISASI KEUANGAN (%)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1.475.551.750	540.793.200	408.322.450	263.591.750	262.844.350	238.842.314	419.641.106	0	0	36,65%	27,67%	17,86%	17,81%	16,19%	28,44%	0	0,00%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	599.432.850	153.880.300	143.081.100	145.130.300	157.341.150	53.093.922	120.656.856	0	0	25,67	23,87	24,21%	26,25%	8,86%	20,13%	0	0,00%
Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	44.545.200	11.324.500	11.074.500	11.074.500	11.071.700	10.483.400	9.625.900	0	0	25,42%	24,86%	24,86%	24,85%	23,53%	21,61%	0	0,00%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	63.600.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000	5.787.983	8.744.984	0	0	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	9,10%	13,75%	0	0,00%
Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	14.000.000	0	0	2.700.000	11.300.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	19,29%	80,71%	0,00%	0,00%	0	0,00%
Penyediaan makanan dan minuman	28.104.000	10.700.800	5.001.600	3.700.800	8.700.800	2.760.000	3.240.000	0	0	38,08%	17,80%	13,17%	30,96%	9,82%	11,53%	0	0,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya	45.850.000	15.125.000	10.275.000	10.925.000	9.525.000	9.150.000	11.850.000	0	0	32,99%	22,41%	23,83%	20,77%	19,96%	25,85%	0	0,00%

Sasaran/ Program/Kegiatan	Pagu	TARGET RENCANA BELANJA				REALISASI KEUANGAN				CAPAIAN TARGET RENCANA BELANJA (%)				CAPAIAN REALISASI KEUANGAN (%)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	403.333.650	100.830.000	100.830.000	100.830.000	100.843.650	24.912.539	87.195.972	0	0	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	6,18%	21,62%	0	0,00%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	242.829.000	165.729.000	25.700.000	25.700.000	25.700.000	39.368.492	77.129.300	0	0	68,25%	10,58%	10,58%	10,58%	16,21%	31,76%	0	0,00%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	80.239.000	80.239.000	0	0	0	32.306.000	13.844.000	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,26%	17,25%	0	0,00%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	94.520.000	23.645.000	23.625.000	23.625.000	23.625.000	6.312.492	11.923.300	0	0	25,02%	24,99%	24,99%	24,99%	6,68%	12,61%	0	0,00%
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	68.070.000	61.845.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000	750.000	51.362.000	0	0	90,86%	3,05%	3,05%	3,05%	1,10%	75,45%	0	0,00%
Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.610.000	2.206.500	2.401.500	2.606.500	1.440.000	477.500	2.503.300	0	0	22,96%	24,99%	27,12%	24,93%	4,97%	26,05%	0	0,00%
Penyusunan Dokumen Keuangan	4.700.000	1.129.000	1.124.000	1.329.000	1.118.000	0	925.800	0	0	24,02%	23,91%	28,28%	23,79%	0,00%	19,70%	0	0,00%
Penyusunan Dokumen AKIP	4.910.000	1.077.500	1.277.500	1.277.500	1.277.500	477.500	1.577.500	0	0	21,95%	26,02%	26,02%	26,02%	9,73%	32,13%	0	0,00%
Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	623.679.900	218.977.400	237.139.850	90.154.950	77.407.700	145.902.400	219.351.650	0	0	35,11%	38,02%	14,46%	12,41%	23,39%	35,17%	0	0,00%
Pembinaan Program KBKR	54.937.900	43.837.900	5.900.000	5.200.000	0	745.000	34.601.300	0	0	79,80%	10,74%	9,47%	0,00%	1,36%	62,98%	0	0,00%
Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga	56.076.700	35.880.700	600.000	19.396.000	200.000	10.900.000	2.080.700	0	0	63,99%	1,07%	34,59%	0,36%	19,44%	3,71%	0	0,00%

Sasaran/ Program/Kegiatan	Pagu	TARGET RENCANA BELANJA				REALISASI KEUANGAN				CAPAIAN TARGET RENCANA BELANJA (%)				CAPAIAN REALISASI KEUANGAN (%)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat	483.315.300	139.258.800	230.639.850	36.208.950	77.207.700	134.257.400	182.669.650	0	0	28,81%	47,72%	7,49%	15,97%	27,78%	37,80 %	0	0,00%
Partisipasi Anak	29.350.000	0	0	29.350.000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%

Pada tabel 3.6, untuk kesekretariatan, Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bidang urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah (Sekretariat). Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan pagu dana sebesar Rp. 9.610.000,- , dengan target triwulan II sebesar Rp. 2.401.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.503.300,- sehingga capaian target rencana belanja sebesar 24,99% dan capaian realisasi keuangan sebesar 26,05%.

Kemudian untuk Program Pelayanan Administrasi Kantor, dengan pagu Rp. 599.432.850,-. dengan target triwulan II sebesar Rp. 143.081.000,-. dan realisasi keuangan sebesar Rp. 120.656.856,-, sehingga capaian target rencana belanja sebesar 23,87% dan capaian realisasi keuangan sebesar 20,13%. Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan pagu Rp. 242.829.000,-. dengan target triwulan I sebesar Rp. 25.700.000,-. dan realisasi keuangan sebesar Rp. 77.129.300,-, sehingga capaian target rencana belanja sebesar 10,58% dan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 31,76% .

Pada Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah yang merupakan program “sapu jagad” dimana kegiatan yang ada pada program ini merupakan kegiatan yang ada pada masing-masing bidang yang tidak mempunyai indikator khusus. Adapun pagu pada program ini sebesar Rp. 623.679.900,00 dengan target pada triwulan I Rp. 237.139.850,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 219.351.650,- sehingga capaian target rencana belanja sebesar 38,02% dan capaian realisasi keuangan sebesar 35,17%.

2. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sasaran/ Program/Kegiatan	Pagu	TARGET RENCANA BELANJA				REALISASI KEUANGAN				CAPAIAN TARGET RENCANA BELANJA (%)				CAPAIAN REALISASI KEUANGAN (%)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja	4.584.721.150	417.902.000	2.303.666.640	1.134.136.210	729.016.300	120.855.500	443.304.760	0	0	9,12%	50,25%	24,74%	15,90%	2,64%	9,67%	0	0,00%
Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja	4.51.712.500	409.739.50	2.270.091.390	1.121.991.210	719.890.400	118.875.500	414.123.560	0	0	9,06%	50,20%	24,81%	15,92%	2,63%	9,16%	0	0,00%
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	39.978.600	13.815.000	19.332.000	6.831.600	0	12.575.500	0	0	0	34,56%	48,36%	17,09%	0,00%	31,46%	0,00%	0	0,00%
Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana	259.507.900	69.281.500	72.428.000	70.586.500	47.211.900	56.800.000	28.950.000	0	0	26,70%	27,91%	27,20%	18,19%	21,89%	11,16%	0	0,00%
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Penyuluhan KB (DAK)	1.085.159.000	0	1.085.159.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%
Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK NF)	955.796.460	99.295.000	358.766.460	287.985.000	209.750.000	49.500.000	223.825.560	0	0	10,39%	37,54%	30,13%	21,95%	5,18%	23,42%	0	0,00%
Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan (DAK NF)	40.500.000	4.500.000	13.500.000	13.500.000	9.000.000	0	780.000	0	0	11,11%	33,33%	33,33%	22,22%	0,00%	1,93%	0	0,00%
Operasional Penggerakan Program KKBPK di	985.600.000	109.515.000	328.585.000	328.500.000	219.000.000	0	58.450.000	0	0	11,11%	33,34%	33,33%	22,22%	0,00%	5,93%	0	0,00%

Sasaran/ Program/Kegiatan	Pagu	TARGET RENCANA BELANJA				REALISASI KEUANGAN				CAPAIAN TARGET RENCANA BELANJA (%)				CAPAIAN REALISASI KEUANGAN (%)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Kampung KB (DAK NF)																	
Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK NF)	267.170.540	14.668.000	96.310.930	118.593.110	37.598.500	0	46.258.000	0	0	5,49%	36,05%	44,39%	14,07%	0,00%	17,31%	0	0,00%
Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) (DAK NF)	888.000.000	98.665.000	296.010.000	295.995.000	197.330.000	0	55.860.000	0	0	11,11%	33,33%	33,33%	22,22%	0,00%	6,29%	0	0,00%
Program Peningkatan Keluarga Sejahtera	63.008.650	8.162.500	33.575.250	12.145.000	9.125.900	1.980.000	29.181.200	0	0	12,95%	53,29%	19,28%	14,48%	3,14%	46,31%	0	0,00%
Pembinaan kelompok ketahanan keluarga	41.302.750	6.182.500	30.605.250	4.515.000	0	0	26.211.200	0	0	14,97%	74,10%	10,93%	0,00%	0,00%	63,46%	0	0,00%
Penyusunan Data Kependudukan dan Keluarga	21.705.900	1.980.000	2.970.000	7.630.000	9.125.900	1.980.000	2.970.000	0	0	9,12%	13,68%	35,15%	42,04%	9,12%	13,68%	0	0,00%

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang memiliki sasaran Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja didukung dengan 2 (dua) program yaitu Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dibawah koordinasi Bidang Keluarga Berencana dimana pagu pada program ini sebesar Rp. 4.521.712.500,- yang merupakan perpaduan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 299.486.500,- dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 4.222.226.000,- dengan target pada Triwulan II sebesar Rp. 2.270.091.390,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 414.123.560,- sehingga capaian target rencana belanja sebesar 50,20% dan capaian realisasi keuangan sebesar 9,16%.

Untuk program Peningkatan Keluarga Sejahtera dibawah koordinasi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera memiliki pagu sebesar Rp. 63.008.650,- dengan target pada Triwulan II sebesar Rp. 33.575.250,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.181.200,- sehingga capaian target rencana belanja sebesar 53,29% dan capaian realisasi keuangan sebesar 46,31%.

3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran/ Program/Kegiatan	Pagu	TARGET RENCANA BELANJA				REALISASI KEUANGAN				CAPAIAN TARGET RENCANA BELANJA (%)				CAPAIAN REALISASI KEUANGAN (%)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	165.232.800	22.772.600	56.294.350	64.843.350	21.322.500	8.319.690	55.873.475	0	0	13,78%	34,07%	39,24%	12,90%	5,04%	33,82%	0	0,00%
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	38.497.500	0	29.003.750	9.493.750	0	0	29.003.750	0	0	0,00%	75,34%	24,66%	0,00%	0,00%	75,34%	0	0,00%
Pelaksanaan Manajemen PUG di tingkat	38.497.500	0	29.003.750	9.493.750	0	0	29.003.750	0	0	0,00%	75,34%	24,66%	0,00%	0,00%	75,34%	0	0,00%
PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN	10.045.000	2.262.500	3.912.500	2.632.500	1.237.500	1.131.000	3.601.000	0	0	22,52%	38,95%	26,21%	12,32%	11,26%	35,85%	0	0,00%
Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan	10.045.000	2.262.500	3.912.500	2.632.500	1.237.500	1.131.000	3.601.000	0	0	22,52%	38,95%	26,21%	12,32%	11,26%	35,85%	0	0,00%
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK DAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK	92.724.300	10.428.100	18.603.100	45.058.100	18.635.000	5.715.300	18.196.700	0	0	11,25%	20,06%	48,59%	20,10%	6,16%	19,62%	0	0,00%
Pelayanan Pemenuhan Hak Anak	92.724.300	10.428.100	18.603.100	45.058.100	18.635.000	5.715.300	18.196.700	0	0	11,25%	20,06%	48,59%	20,10%	6,16%	19,62%	0	0,00%
PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN ANAK	23.966.000	10.082.000	4.775.000	7.659.000	1.450.000	1.473.390	5.072.025	0	0	42,07%	19,92%	31,96%	6,05%	6,15%	21,16%	0	0,00%
Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak	23.966.000	10.082.000	4.775.000	7.659.000	1.450.000	1.473.390	5.072.025	0	0	42,07%	19,92%	31,96%	6,05%	6,15%	21,16%	0	0,00%

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang memiliki sasaran meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak didukung dengan 4 (empat) program yaitu Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan dan Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dibawah koordinasi Bidang Pemberdayaan Perempuan, Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Program Peningkatan Perlindungan Anak dibawah koordinasi Bidang Perlindungan Anak.

Pada Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan memiliki pagu sebesar Rp. 38.497.500,- dengan target pada Triwulan II sebesar Rp. 29.003.750,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.003.750. Untuk program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan memiliki pagu sebesar Rp. 10.045.000,- dengan target pada Triwulan II sebesar Rp. 3.912.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.601.000,- sehingga capaian target rencana belanja sebesar 38,95% dan capaian realisasi keuangan sebesar 35,85%.

Pada Bidang Perlindungan Anak terdapat Program Pemenuhan Hak Anak yang memiliki pagu sebesar Rp. 92.724.300,- dengan target pada Triwulan II sebesar Rp. 18.603.100,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 18.196.700,- sehingga capaian target rencana belanja sebesar 20,06% dan capaian realisasi keuangan sebesar 19,62% dan Program Peningkatan Perlindungan Anak yang memiliki pagu sebesar Rp. 23.966.000,- dengan target pada Triwulan II sebesar Rp. 4.775.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.072.025,- sehingga capaian target rencana belanja sebesar 19,92% dan capaian realisasi keuangan sebesar 21,16%.

Tabel 3.6
CAPAIAN REALISASI ANGGARAN DAN KINERJA TRIWULAN TAHUN 2019
BERDASARKAN URUSAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KAB. HSS

Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator	REALISASI ANGGARAN (%)				REALISASI KINERJA (%)				REALISASI (%)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
SEKRETARIAT													
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Predikat AKIP	16,19	28,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan Pelayanan	8,86	20,13	0	0	100	100	0	0	11,29	4,97	0	0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kepuasan Pelayanan	16,21	31,76	0	0	100	100	0	0	6,17	3,15	0	0
Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP; Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah	4,97	26,05	0	0	55,67	70,37	0	0	11,20	2,7	0	0
Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan Pelayanan	23,39	35,17	0	0	100	100	0	0	4,28	2,84	0	0
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja	Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia < 20 tahun	2,64	9,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase organisasi yang menindaklanjuti kesepakatan pendewasaan usia perkawinan	2,63	9,16	0	0	2,5	5,0	0	0	0,95	0,55	0	0

Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator	REALISASI ANGGARAN (%)				REALISASI KINERJA (%)				REALISASI (%)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
	Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	2,63	9,16	0	0	78,40	78,65	0	0	29,81	8,59	0	0
Program Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif	3,14	46,31	0	0	50,17	53,51	0	0	15,98	1,16	0	0
	Persentase instansi KB yang menyelenggarakan kegiatan sinkronisasi dan keterpaduan program KKBPK	3,14	46,31	0	0	0	9,09	0	0	0	0,19	0	0
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	5,04	33,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Persentase Desa / Kelurahan Layak Anak	5,04	33,82	0	0	0,67	1,35	0	0	0,13	0,04	0	0
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase SKPD yang menerapkan anggaran yang responsif gender	0,00	75,34	0	0	0	36,84	0	0	0	0,49	0	0
Program peningkatan perlindungan hak perempuan	Persentase organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang aktif	11,26	35,85	0	0	0	5,95	0	0	0	0,17	0	0
Program pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas hidup anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	6,16	19,62	0	0	5,56	5,56	0	0	0,9	0,28	0	0
Program peningkatan perlindungan anak	Tingkat pemenuhan aspek desa/kelurahan layak anak berbasis klaster	6,15	21,16	0	0	100	100	0	0	16,26	4,73	0	0

BAB IV

PENUTUP

Laporan Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Triwulan II ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Perpres Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Triwulan II ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2019 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 yang ingin di capai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100% dan 0% atau belum mencapai target;
- 2) Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 0% atau belum mencapai target;
- 3) Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 0% dan 1,35% atau belum mencapai target;

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian 3 (tiga) sasaran tersebut, mayoritas pencapaian sasaran belum mampu mencapai target dikarenakan pada triwulan II Tahun 2019 ini masih banyak kegiatan

yang belum dilaksanakan dan akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu pada Triwulan IV (merupakan hasil sensus BPS dan Susenas).

Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 6.225.505.700,00 sedangkan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 sebesar Rp. 1.286.836.845,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 20,67%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 4.938.668.855,00.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan Triwulan II Tahun 2019 ini, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kita semua khususnya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sebagai gambaran Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada lintas sektor terkait lainnya baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, 1 Juli 2019

Kepala Dinas PPKBPPPA



Drs. Hj. Is Susilastuti

Pembina Utama Muda

NIP. 19601219 198503 2 006



LAPORAN KINERJA INDIVIDU

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	3

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis	8
2.2 Indikator Kinerja Utama	11
2.3 Perjanjian Kinerja	15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	27
3.2 Realisasi Anggaran	47

BAB IV PENUTUP

DAFTAR TABEL

2.1	Indikator Kinerja Utama Tahun 2019	12
2.2	Perjanjian Kinerja Dinas PPKBPPPA	16
3.1	Pencapaian Kinerja Sekretariat Triwulan I	28
3.2	Pencapaian Kinerja Triwulan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	34
3.3	Pencapaian Kinerja Triwulan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	40
3.4	Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2019 Dinas PPKBPPPA	46
3.5	Capaian Realisasi Keuangan Triwulan I Kesekretariatan Tahun 2019	48
3.6	Capaian Realisasi Anggaran dan Kinerja Triwulan	47



LAPORAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN I

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	3

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis	8
2.2 Indikator Kinerja Utama	11
2.3 Perjanjian Kinerja	15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	27
3.2 Realisasi Anggaran	47

BAB IV PENUTUP

DAFTAR TABEL

2.1	Indikator Kinerja Utama Tahun 2019	12
2.2	Perjanjian Kinerja Dinas PPKBPPPA	16
3.1	Pencapaian Kinerja Sekretariat Triwulan I	28
3.2	Pencapaian Kinerja Triwulan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	34
3.3	Pencapaian Kinerja Triwulan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	40
3.4	Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2019 Dinas PPKBPPPA	46
3.5	Capaian Realisasi Keuangan Triwulan I Kesekretariatan Tahun 2019	48
3.6	Capaian Realisasi Anggaran dan Kinerja Triwulan	47

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : Dra. Hj. IS SUSILASTUTI
NIP : 19601219 198503 2 006
PANGKAT / GOL : PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
JABATAN : KEPALA DINAS PPPKBPPPA
TRIWULAN : I Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

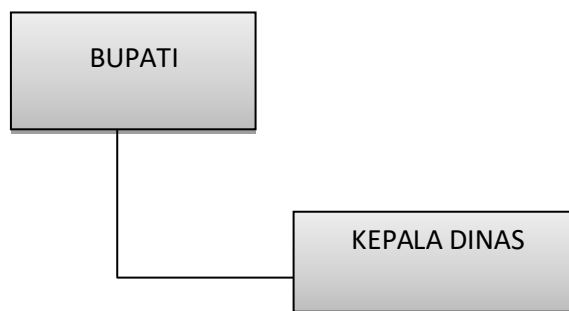
A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPKBPPPA) serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. perumusan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- e. evaluasi dan pelaporan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

Akuntabilitas Kinerja Dinas PPKBPPPA dapat dilihat pada uraian berikut:

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Triwulan : I

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Program	Anggaran				
1	Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja	1	Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia < 20 tahun	73.02	72.18	73.02	73.02	409,739,500		
						Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	71	8,162,500		
2	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89.98	90.58	89.98	90.58	-		
						Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	2,262,500			
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	3	Persentase Desa / Kelurahan Layak Anak	2.03	3.38	2.03	3.38	10,082,000		
						7	Peringkat Kabupaten Layak Anak	2 desa / kel pratama madya	2 desa / kel pratama madya	10,428,100
						4	Predikat AKIP	A	A	153,880,300
						79.41	79.41	82.55	165,729,000	
										218,977,400
										2,206,500

B. Capaian Kinerja 2019
Triwulan : I

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Program	Anggaran	Realisasi	Serapan Anggaran (%)	
1	Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja	1 Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia < 20 tahun	73.02	73.02	0	0	Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	409,739,500	118,875,500	29.01	
							Program Peningkatan Keluarga Sejahtera	8,162,500	1,980,000	24.26	
2	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	2 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89.98	90.58	0	0	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	-			
							Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan	2,262,500	1,131,000	49.99	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	3 Persentase Desa / Kelurahan Layak Anak	2.03	3.38	1	0,68	Program Peningkatan Pelindungan Anak	10,082,000	1,473,390	14.61	
							7 Peningkatan Kebahagiaan Layak Anak				
		4 Predikat AKIP	A	A	0	0	0	Program Administrasi Perkantoran	153,880,300	53,093,922	34.50
								Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	165,729,000	39,845,992	24.04
								Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	218,977,400	145,902,400	66.63
								Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2,206,500	477,500	21.64
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I						0	RATA-RATA SERAPAN ANGGARAN		35.50		

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No	Capaian	Interpretasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan I 2019 di atas capaian Kepala Dinas dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator rata-rata mencapai 0,17%, dengan rata-rata serapan anggaran 35,50%, adapun rincian capaian kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran : Menurunnya usia perkawinan pertama usia <20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja, capaian kinerja 0%.

- Indikator Kinerja :

Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia <20 tahun, belum tercapai (0), karena belum dilakukan survey tahun 2019.

2. Sasaran: Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak, capaian kinerja 0.

Indikator :

- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) tercapai (0), target yang ditetapkan 90,27. Pencapaian nol karena belum memasuki jadwal Survei yang dilakukan oleh BPS. Jadwal pelaksanaan survei setiap akhir atau awal tahun berikutnya.

- b. Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak tercapai 1 desa atau 0,68%

3. Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, tercapai (0)

Indikator: Predikat AKIP A, tercapai (0) karena penilaian oleh Kementerian PAN RB dilakukan di akhir tahun 2019

D. Rencana Tindak Lanjut

Langkah-langkah atau tindak lanjut untuk mengatasi sasaran dan indikator sasaran yang belum tercapai.

Sasaran yang tidak tercapai dari uraian di atas tidak ada. Sasaran yang masih belum tercapai karena belum jadwal pelaksanaan sesuai dengan jadwal target yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (\checkmark).

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan :

Berdasarkan capaian triwulan I tahun 2019 diperoleh hasil rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 0,17% dari target yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tidak ada. Berkat kerjasama dan koordinasi yang baik antar bidang di Dinas PPKBPPPA sehingga pelaksanaan pencapaian sasaran diselesaikan sesuai jadwal waktu yang telah disepakati.

C. Saran/masukan

1. Meningkatkan koordinasi antara masing-masing bidang.
2. Meningkatkan komitmen penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja dengan berpedoman pada perjanjian kerja yang telah disepakati dengan atasan langsung.
3. Meningkatkan *performance* kerja di level bawah (Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas) untuk mendukung percepatan dan kualitas kinerja Program.

Kandangan, 1 April 2019

Mengetahui,

Atasan Langsung

Bupati Hulu Sungai Selatan,



Drs. H. ACHMAD FIKRY, MAP

Kepala Dinas PPKBPPPA,



Drs. Hj. Is SUSILASTUTI

Pembina Utama Muda

NIP. 19601219 198503 2 006

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : MOCH. ADIB, SKM.M.Kes
NIP : 19700624 199602 1 001
PANGKAT / GOL : PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
JABATAN : Sekretaris Dinas PPPKBPPPA
TRIWULAN : I Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

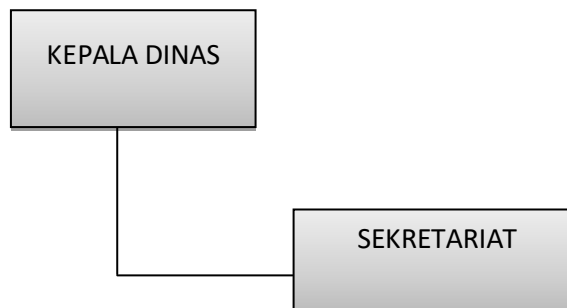
A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, program, dan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi;
- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- f. pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. koordinasi penyusunan laporan kinerja, program dan kegiatan;
- h. pembinaan dan pemberian dukungan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat dapat dilihat pada uraian berikut:

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Triwulan : I

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran	Indek Kepuasan Pelayanan	Indek	82	Program Administrasi Perkantoran	599,433,350	Program Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	44,545,200
								Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	63,600,000
								Penyediaan makanan dan minuman	28,104,000
								Rapat-Rapat koordinasi, konsultasi dan lapangan	403,334,150
								Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya	45,850,000
								Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	14,000,000
					Peningkatan Sarana dan Prasarana	242,829,000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90,239,000
								Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	58,070,000
								Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	94,520,000
					Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	585,703,700	Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Pembinaan Program KBKR	54,937,900
								Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga	56,076,700
								Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat	445,339,100
Partisipasi Anak	29,350,000								
2	Meningkatnya pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan Keuangan Daerah	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP	persen	80,96	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9,610,000	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Dokumen AKIP	4,910,000
		Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen	persen	100				Penyusunan Dokumen Keuangan	4,700,000

B. Capaian Kinerja 2019
Triwulan : I

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Program	Anggaran	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	Serapan Anggaran (%)
1	Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran	Indek Kepuasan Pelayanan	Indek	82	0	0	Program Administrasi Perkantoran	599,433,350	Program Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	44,545,200	Rp 10,483,400.00	23.53
										Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	63,600,000	Rp 5,787,983.00	9.10
										Penyediaan makanan dan minuman	28,104,000	Rp 2,760,000.00	9.82
										Rapat-Rapat koordinasi, konsultasi dan lapangan	403,334,150	Rp 24,912,539.00	6.18
										Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya	45,850,000	Rp 9,150,000.00	19.96
										Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	14,000,000	Rp -	-
							Peningkatan Sarana dan Prasarana	242,829,000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90,239,000	Rp 32,306,000.00	35.80
										Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	58,070,000	750,000	1.29
										Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	94,520,000	6,312,492	6.68
							Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	585,703,700	Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Pembinaan Program KBKR	54,937,900	745,000.00	1.36
Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga	56,076,700	10,900,000	19.44										
Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat	445,339,100	134,257,400	30.15										
Partisipasi Anak	29,350,000		-										
2	Meningkatnya pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan Keuangan Daerah	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP	persen	80,96	0	0	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9,610,000	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Dokumen AKIP	4,910,000	-	-
		Tingkat pemenuhan aspek kualitas	persen	100	0	0				Penyusunan Dokumen Keuangan	4,700,000	477,500.00	10.16
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I						0	RATA-RATA SERAPAN ANGGARAN						11.56

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No	Capaian	Interpretasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan I 2019 di atas capaian Sekretaris dari 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator baru mencapai 0%, dengan serapan anggaran 11,56%, adapun rincian capaian kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran : Meningkatnya Pemenuhan Aspek Kualitas Dokumen AKIP dan Keuangan Daerah, capaian kinerja 0%.

- Indikator Kinerja :

- a. Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP, belum tercapai (0), karena belum dilakukan evaluasi nilai AKIP untuk tahun 2019. Inspektorat melakukan evaluasi nilai AKIP 2019 pada tahun 2020. Sementara nilai AKIP tahun 2018 yang keluar pada tahun 2019, Dinas PPPKBPPAperikan memperoleh nilai AKIP sebesar 80,11 atau kategori A.
- b. Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen keuangan daerah, tercapai 0%. Hal ini karena penilaian kualitas dokumen dilakukan setelah tahun 2019 berakhir.

2. Sasaran: Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran, capaian kinerja 100.

Indikator : Indeks Kepuasan Pelayanan tercapai (0), target yang ditetapkan 82. Pencapaian nol karena belum memasuki jadwal Survei Indeks Kepuasan Masyarakat. Jadwal pelaksanaan survei pada semester 1 (bulan Juni) dan semester 2 (bulan Desember).

D. Rencana Tindak Lanjut

Langkah-langkah atau tindak lanjut untuk mengatasi sasaran dan indikator sasaran yang belum tercapai.

Sasaran yang tidak tercapai dari uraian di atas tidak ada. Sasaran yang masih belum tercapai karena belum jadwal pelaksanaan sesuai dengan jadwal target yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (\checkmark).

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan :

Berdasarkan capaian triwulan I tahun 2019 diperoleh hasil rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 0% dari target yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tidak ada. Berkat kerjasama dan koordinasi yang baik antar bidang di Dinas PPKBPPPA sehingga pelaksanaan pencapaian sasaran diselesaikan sesuai jadwal waktu yang telah disepakati.

C. Saran/masukan


1. Meningkatkan koordinasi antara masing-masing bidang.
2. Meningkatkan komitmen penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja dengan berpedoman pada perjanjian kerja yang telah disepakati dengan atasan langsung.
3. Meningkatkan *performance* kerja di level bawah (Pejabat Pengawas) untuk mendukung percepatan dan kualitas kinerja Program.

Kandangan, 1 April 2019

Mengetahui,

Atasan Langsung

Kepala Dinas PPKBPPPA,


Dra. Hj. Is SUSILASTUTI
Pembina Utama Muda
NIP. 19601219 198503 2 006

Sekretaris,


MOCH. ADIB, SKM, M.Kes.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700624 199602 1001

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : Drs. H. Ermansyah
NIP : 19661022 199503 1 003
PANGKAT / GOL : Pembina / IVa
JABATAN : Kabid Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera
Triwulan : I Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

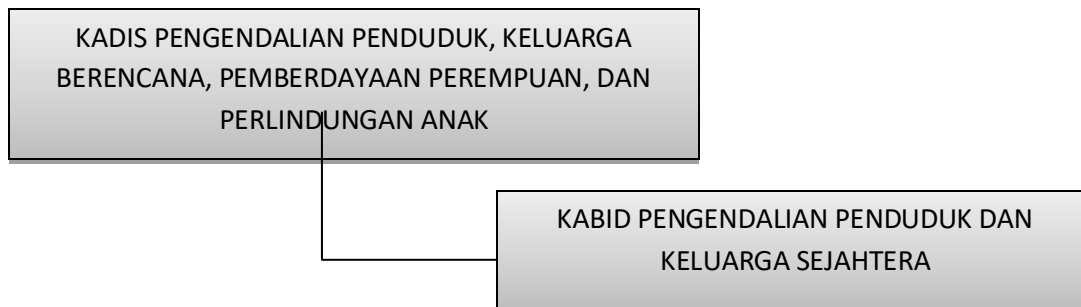
A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan teknis pelaksanaan program yang berprinsip keterpaduan dan sinkronisasi program kependudukan serta pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. Penyusunan program pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program yang berprinsip keterpaduan dan sinkronisasi program kependudukan serta pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. Pelaksanaan program yang berprinsip keterpaduan dan sinkronisasi program kependudukan serta pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program yang berprinsip keterpaduan dan sinkronisasi program kependudukan serta pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program yang berprinsip keterpaduan dan sinkronisasi program kependudukan serta pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas di atas Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN
KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA :
Triwulan : I

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TRIWULAN			IV	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
			I	II	III				
1	2	3						8	
1	Meningkatnya kelompok kegiatan ketahanan keluarga terhadap instansi KB yang menyelenggarakan program KKBPK	1 Persentase kelompok kegiatan Ketahanan keluarga yang aktif 2 Persentase instansi KB yang Menyelenggarakan kegiatan Sinkronisasi dan keterpaduan Program KKBPK	50,17	53,51	56,86	60,20	Program Peningkatan Keluarga sejahtera	1 Pembinaan kelompok Kegiatan ketahanan keluarga 2 Penyusunan data Kependudukan dan keluarga	41.302.750 21.705.900

B. Capaian Kinerja 2019
Triwulan : I

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Capaian Kinerja		Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
1	2	3	4	7		8	9	10	11
1	Meningkatnya kelompok ketahanan keluarga	Persentase kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif	50,17	48,13		Program Peningkatan Keluarga Sejahtera	1 Pembinaan kelompok Kegiatan ketahana keluarga	63.008.650	12.000.000
		Persentase instansi KB yang menyelenggarakan kegiatan sinkronisasi dan keterpaduan program KKBPK	9,09	9,09			2 Penyusunan data Kependudukan dan keluarga	21.705.900	2.970.000

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

1. Sasaran : Tersedianya Kelompok Ketahan Keluarga yang berkualitas , Pada triwulan I sudah dilaksanakan kegiatan Lomba BKB,BKR,BKL,UPPKS,PIK Remaja Jalur Pendidikan, PIK Remaja Masyarakat dan Orang Tua Hebat , Lomba ini dilaksanakan yaitu :
 - Untuk meningkatkan Kegiatan Ketahanan Keluarga agar terciptanya keluarga yang berkualitas sehingga terciptanya masyarakat yang makmur dan sejahtera.
 - Kegiatan ini dilaksanakan terlebih dulu dikarenakan dalam rangka menghadapi lomba Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan
 - Agar mendorong aktifitas para orang tua dan remaja agar giat melaksanakan program Ketahanan keluarga dalam menciptakan keluarga yang berkualitas menuju keluarga yang berketahanan.

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Peningkatan Keluarga Sejahtera melalui Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga dengan serapan anggaran sebesar Rp 56.076.700,-

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja tersebut diatas yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarganya dan hanya menjalani hidup dengan apa adanya.

2. Pada triwulan I sudah dilaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung indikator di atas, seperti rapat koordinasi teknis bulanan bidang PPKS yang diikuti oleh Bidang Keluarga Berencana dan seluruh PLKB se-Kab HSS, memonitor laporan pengendalian lapangan 11 kecamatan, meentry data laporan pengendalian lapangan 11 kecamatan dan membuat laporan bulanan hasil dari laporan pengendalian lapangan 11 kecamatan.

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Peningkatan Keluarga Sejahtera melalui Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Kependudukan Berwawasan KKBPK (kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga) dengan serapan anggaran sebesar Rp 2.970.000,-

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja tersebut diatas yaitu belum adanya perjanjian kerjasama dengan instansi yang berkomitmen terhadap kependudukan.

D. Rencana Tindak lanjut

Tindak lanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan tersebut adalah :

1. Pendekatan dan memberikan pengertian kepada Keluarga di masyarakat tentang pentingnya meningkatkan kualitas keluarga yang berketahanan.
2. Tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah membuat perjanjian kerjasama dengan instansi yang berkomitmen terhadap kependudukan.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan I tahun 2019 capaian kinerja sasaran mencapai 100,00% dikarenakan jadwal pelaksanaan sasaran kegiatan dan indikator sasaran terjadwal pada triwulan IV. Pada triwulan I sudah dilaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung indikator di atas.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja hanya pada penjadualan kegiatan Lomba Poktan yang harus dilaksanakan di triwulan I, karena untuk menyesuaikan kegiatan lomba di tingkat provinsi yang dilaksanakan di awal triwulan II.

C. Saran/masukan

- Untuk kegiatan poktan akan dilaksanakan pembinaan intensif setelah evaluasi hasil lomba,
- Untuk kegiatan Keterpaduan dan sinkronisasi, perlu melakukan pendekatan stockholder dan instansi terkait.

Tanggal, 01 April 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kadis PPKBPPPA,



Dra. Hj. IS SUSILASTUTI
Pembina Utama Muda
NIP.19601219 198503 2 006

Kabid. Dalduk dan Keluarga
sejahtera



Drs. H. ERMANSYAH
Pembina
NIP.19661022 199503 1 003

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : **SYAHRIL SOFIAN**
NIP : 196803051993121002
PANGKAT / GOL : PEMBINA (IV/a)
JABATAN : KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana,
Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Triwulan : I Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

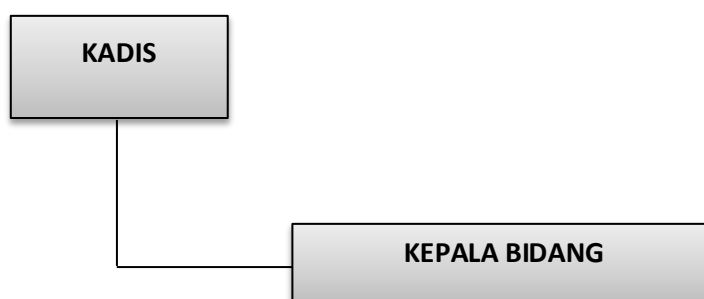
Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2017 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah tugas Kepala Bidang Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- b. Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan Juklak dan Juknis serta SOP, mengenai pembinaan serta pengendalian serta pelayanan keluarga berencana;
- c. Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, pendayagunaan petugas dan Kader Lini lapangan KB
- d. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan advokasi, komunikasi, informasi serta edukasi keluarga berencana;
- e. Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan pelayanan kontrasepsi, pengelolaan alat kontrasepsi dan kesehatan reproduksi;
- f. Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan Tim Mobil Unit Pelayanan KB (Muyan KB) dan Tim Keluarga Berencana Keliling;

- g. Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pelayanan Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengembangan peran serta institusi masyarakat pedesaan di bidang keluarga berencana;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang Tugas;

Untuk melaksanakan tugas diatas Sub. Bagian Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Aparatur Daerah mempunyai fungsi :

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA :

Triwulan : I

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Program	Kegiatan	Anggaran
				1	2	3			
1	2	3	4	5			6	7	8
1	Meningkatnya Kesertaan Peserta Keluarga Berencana	Persentase organisasi yang menindaklanjuti kesepakatan pendewasaan usia perkawinan	Kegiatan (10%) 12/120	0	3	0	Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja	Revitalisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	39.978.500
		Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB Aktif	Persen (78,99%)	78,13	78,30	78,40		Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana	259.507.900

B. Capaian Kinerja 2019
Triwulan : I

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran (%)
				1	2	3	1	2	3						
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10	11	12
1	Meningkat-nya Kesertaan Peserta Keluarga Berencana	Persentase organisasi yang menindak-lanjuti kesepakatan pendewasaan usia perkawinan	Kegiatan (10%) 12/120	0	3	0	0	3	0	100%	Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja	Revitalisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	39.978.500	12.575,500	0,31%
		Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB Aktif	Persen (78,99%)	78,13	78,30	78,40	78,13	78,30	78,40	100%		Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana	259.507.900	56.800.000	21,89%

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan I 2019 di atas rata-rata capaian kinerja Bidang Keluarga Berencana Dinas PPKBPPA Kab. Hulu Sungai Selatan dari 2 (dua) Sasaran dan 2 (dua) indikator sasaran dapat mencapai 100,00% atau melebihi target dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut:

Sasaran : Meningkatnya Kesertaan Peserta Keluarga Berencana

1. Persentase organisasi yang menindak-lanjuti kesepakatan pendewasaan usia perkawinan meningkat sama dengan 100%.

Indikator Kinerja :

- Revitalisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja melalui Kegiatan Revitalisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dengan serapan anggaran sebesar Rp. 12.575.500

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut diatas yaitu belum terjalannya kerjasama yang lebih kuat dan serta pemahaman antar organisasi yang melaksanakan program tersebut.

2. Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB Aktif tercapai, capaian kinerja sama dengan 100%

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja melalui Kegiatan Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana dengan serapan anggaran sebesar Rp. .000.000

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut diatas yaitu masih banyaknya pasangan usia subur yang droup out atau angka Unmeednet atau jumlah pasangan usia subur yang tidak ingin punya anak tetapi

tidak ber KB. Atau tidak menggunakan dan memakai alat atau obat kontrasepsi.

D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi kegiatan sosialisasi kepada SKPD dengan mendorong keterlibatan Pimpinan SKPD dalam menetapkan anggaran untuk mendukung terfasilitasinya kegiatan MOU yang telah disepakati, dengan menuangkan dalam bentuk kegiatan yang lebih kongret. Sedangkan pada organisasi kemasarakan perlu dilakukan pendekatan intensif untuk lebih mempererat hubungan kerjasama sehingga terbentuk sinergitas sesuai apa yang dituangkan dala MOU.
2. Merekomendasikan dan mengusulkan kepada Tim Anggaran Kabupten Hulu Sungai Selatan, untuk meningkatkan pembiyaan operasional dan kegiatan pada SKPD secara optimal.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√).

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Tahun I tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100,00% (sesuai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, antara lain:

1. Belum optimal jumlah kegiatan yang menyetuh langsung pada obyek sasaran baik pada remaja, anak maupun orang tua. Karena keterbatasan pembiayaan
2. Masih Kecilnya angka pemakaian alat kontrasepsi Metode Jangka Panjang (MKJP) pada Pasangan Usia Subur.

C. Saran/masukan

1. Mendorong keterlibatan pimpinan SKPD dalam mengintensifkan Program nyata yang dituangkan dalam Kegiatan pada RKA SKPDnya masing-masing untuk mendukung program ini;

Tanggal, 01 April 2019

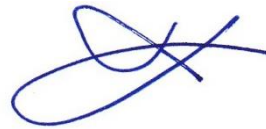
Mengetahui,
Atasan Langsung

Kepala Dinas PPKBPPPA,



Dra. Hj IS SUSILASTUTI
Pembina Utama Muda
NIP.196012191985032006

Kepala Bidang Keluarga
Berencana,



SYAHRIL SOFIAN
Pembina
NIP.198603051993121002

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : Hj. NOORHADINI ULFAH, SKM
NIP : 19700120 199303 2 006
PANGKAT / GOL : Pembina/ IV a
JABATAN : Kabid Pemberdayaan Perempuan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS.
Triwulan : I Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

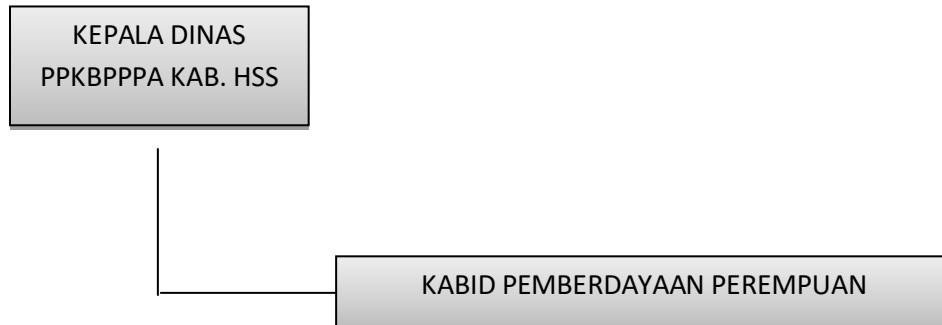
A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bawah tugas Sub. Bagian Perlindungan Perempuan adalah sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pengembangan lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga dan perempuan;
- b. penyusunan program pembinaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pengembangan lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga dan perempuan;
- c. pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pengembangan lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga dan perempuan;
- d. koordinasi, pembinaan dan pengembangan program peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pengembangan lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga dan perempuan;
- e. pengawasan dan pengendalian program peningk
- f. atan kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pengembangan lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga dan perempuan;

- g. evaluasi dan pelaporan program peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pengembangan lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga dan perempuan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)



BAB II

**AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN
KINERJA JABATAN**

A. PERJANJIAN KINERJA :

Triwulan : I

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Program	Kegiatan	Anggaran
				1	2	3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya penguatan kelembagaan, koordinasi jaringan kerja perempuan	Persentase SKPD yang menerapkan anggaran yang responsif gender	SKPD	-	-	-	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Pelaksanaan PUG di tingkat daerah	67.014.500,-
2	Meningkatnya penguatan kelembagaan, koordinasi jaringan kerja perempuan	Persentase organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang aktif	organisasi	-	-	-	Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan	Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan	10.045.000,-

B. CAPAIAN KINERJA 2019

Triwulan : I

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran (%)
				1	2	3	1	2	3						
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya penguatan kelembagaan, koordinasi jaringan kerja perempuan	Persentase SKPD yang menerapkan anggaran yang responsif gender	SKPD	-	-	-	-	-	-	-	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Pelaksanaan PUG di tingkat daerah	67.014.500,-	-	-
2	Meningkatnya penguatan kelembagaan, koordinasi jaringan kerja perempuan	Persentase organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang aktif	organisasi	-	-	-	-	-	-	-	Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan	Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan	10.045.000,-	1.131.000,-	11,26%

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja 26

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan I 2019 di atas, capaian kinerja untuk bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Hulu Sungai Selatan dari 2 (dua) Sasaran dan 1 (dua) indikator sasaran belum sampai pada penjadwalan target pencapaian yang direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan II, akan tetapi ada beberapa kegiatan yang menunjang dalam pencapaian target sasaran indikator tersebut yang telah dilaksanakan dan mencapai 100,00% atau melebihi target dengan ringan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Untuk seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga

Sasaran : Terlaksananya MoU peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Indikator Kinerja : Jumlah SKPD yang perencanaan dan penganggaran responsif gender (target pencapaian dimulai pada triwulan II), kegiatan yang mendukung dalam pelaksanaan antara lain :

- Jumlah Surat Keputusan Bupati yang berkaitan tentang P2WKSS dan KSI, tercapai (100%)
- Jumlah Pembinaan terhadap desa P2WKSS dan KSI, terlaksana (100%).
- Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan bulanan Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Tahun 2019 disusun dan disampaikan tepat waktu, tercapai (100%)
- Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan triwulan Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Tahun 2019 disusun dan disampaikan tepat waktu, tercapai (100%)

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah melalui kegiatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat dengan serapan anggaran sebesar Rp. 134.257.400,- dan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan melalui Kegiatan Pelaksanaan PUG di tingkat daerah dengan serapan anggaran sebesar Rp. 0,- (karena penjadwalan kegiatan dimulai pada triwulan II)

2. Untuk seksi Perlindungan Perempuan

Sasaran : Tersedianya layanan perlindungan perempuan

Indikator Kinerja : Jumlah organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan dibina (target pencapaian dimulai pada triwulan II), kegiatan yang mendukung dalam pelaksanaan antara lain :

- Jumlah desa yang mendapat sosialisasi perlindungan perempuan dalam rumah tangga, tercapai (100%)
- Jumlah pendampingan pelaksanaan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang melaporkan atau pun yang terdata, melebihi target (300%).
- Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan bulanan Seksi Perlindungan Perempuan Tahun 2019 disusun dan disampaikan tepat waktu, tercapai (100%)
- Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan triwulan Seksi Perlindungan Perempuan Tahun 2019 disusun dan disampaikan tepat waktu, tercapai (100%)

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan melalui Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dengan serapan anggaran sebesar Rp. 1.131.000,-

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut diatas yaitu masih kurangnya SDM yang memahami dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan juga masih kurangnya SDM dalam pelayanan maupun pendampingan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan sehingga dalam penyelesaian dan pendampingannya memerlukan tenaga dan waktu yang cukup lama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut:

1. Perlunya Sumber Daya Manusia yang SDM yang memahami dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan masih kurangnya SDM dalam pelayanan maupun pendampingan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan sehingga dalam penyelesaian dan pendampingannya memerlukan tenaga dan waktu yang cukup lama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (✓).

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan I tahun 2019 capaian belum dapat dilaksanakan karena terjadwal pada triwulan II akan tetapi kegiatan yang mendukung dalam pelaksanaan tugas kualitas hidup perempuan dan keluarga yaitu kegiatan peningkatan peran serta partisipasi masyarakat sudah terlaksana 100% dan juga kegiatan pelayanan penyelenggaraan perlindungan perempuan sudah terlaksana 100%.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja yaitu masih kurangnya sumber daya manusia yang memahami dan terlatih dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan kurangnya SDM dalam pelayanan maupun pendampingan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan sehingga dalam penyelesaian dan pendampingannya memerlukan tenaga dan waktu yang cukup lama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

C. Saran/masukan

Perlunya sumber daya manusia yang terlatih dan memahami dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender serta dalam pelayanan maupun pendampingan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tanggal, 01 April 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kepala Dinas PPKBPPPA,



Dra. Hj. IS SUSILASTUTI
Pembina Utama Muda
NIP. 19601219 198503 2 006

Kabid. Pemberdayaan Perempuan,



Hj. NOORHADINI ULFAH, SKM
Pembina Tk. I
NIP. 19640701 198712 2 005

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

Nama	Hj. Tatik Sri Rahayu, Spt, MP
NIP	19681007 199803 2 002
Pangkat / Gol	Pembina / IVa
Jabatan	Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS
Triwulan	I Tahun 2019

BAB I PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

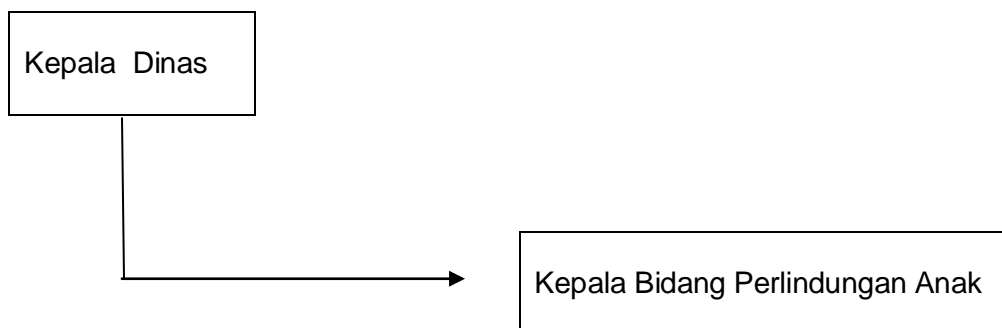
Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa tugas Kepala Bidang Perlindungan anak mempunyai tugas melaksanakan

- (1) Pembinaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program perlindungan anak, pemenuhan hak anak, dan pengembangan lembaga layanan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program perlindungan anak, pemenuhan hak anak, dan pengembangan lembaga layanan anak;
 - b. Penyusunan program perlindungan anak, pemenuhan hak anak, dan pengembangan lembaga layanan anak;
 - c. Pelaksanaan program perlindungan anak, pemenuhan hak anak, dan pengembangan lembaga layanan anak;
 - d. Pengawasan dan pengendalian program perlindungan anak, pemenuhan hak anak, dan pengembangan layanan anak;

- e. koordinasi, pembinaan dan pengembangan program peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemberdayaan dan Evaluasi dan pelaporan program perlindungan anak, pemenuhan hak anak, dan pengembangan lembaga layanan anak; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas diatas Kepala Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas :

B. Struktur Jabatan (Peta Jabatan)



BAB II

**AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN
KINERJA JABATAN**

A. PERJANJIAN KINERJA :

Triwulan : I

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Program	Kegiatan	Anggaran
				1	2	3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan yang terselesaikan	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	Persen	100%	100%	100%	Program Peningkatan Perlindungan Anak	Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak	23.966.000
2	Meningkatnya penguatan kelembagaan, koordinasi jaringan kerja Desa/Kelurahan Layak Anak	Tingkat pemenuhan aspek Desa/Kelurahan Layak Anak berbasis Klaster	Persen	1,85	1,85	1,85	Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Pelayanan Pemenuhan hak Anak	92.724.300

B. CAPAIAN KINERJA 2019

Triwulan : I

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran (%)
				1	2	3	1	2	3						
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan yang terselesaikan	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100%	Program Peningkatan Perlindungan Anak	Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak	23.966.000	1.473.390	22.492.610
2	Meningkatnya penguatan kelembagaan, koordinasi jaringan kerja Desa/Kelurahan Layak Anak berbasis Klaster	Tingkat pemenuhan aspek Desa/Kelurahan Layak Anak berbasis Klaster	Persen	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	100%	Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Pelayanan Pemenuhan hak Anak	92.724.300	5.715.300	87.009.300

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan II 2019 di atas, capaian kinerja Bidang Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Hulu Sungai Selatan dari 2 (dua) Sasaran dan 2 (dua) indikator sasaran telah dilaksanakan dan mencapai 100 % dengan perincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. Kasi Perlindungan Khusus Anak

Sasaran : Tersedianya perlindungan terhadap anak (adanya Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkedudukan di Kab. HSS dan di bawah kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS).

Indikator Kinerja : Terbentuk serta terbinanya Perlindungan Anak Terpadu (PATBM) di Desa/Kelurahan. Dengan jumlah keseluruhan 48 PATBM yang tersebar di wilayah Kab. HSS.

kegiatan yang mendukung dalam pelaksanaan antara lain :

- Terbentuknya Tim Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak dengan anggota antara lain terdiri dari Jaksa anak, Pengacara, Kepolisian, RUTAN, Pengadilan Agama, Dinas Pendidikan, Kemenag, Peksos/Dinas Sosial, tercapai (100%)
- Terlaksananya rapat Koordinasi Perlindungan Perempuan dan anak, tercapai (100%)
- Terlaksananya sosialisasi PATBM dan terbinanya PATBM di wilayah Kab, HSS terlaksana (100%).

- Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan bulanan Seksi Perlindungan Anak Tahun 2019 disusun dan disampaikan tepat waktu, tercapai (100%)
- Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan triwulan Seksi Perlindungan Anak Tahun 2019 disusun dan disampaikan tepat waktu, tercapai (100%)

Capaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Peningkatan Perlindungan Anak melalui Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dengan serapan anggaran sebesar Rp. 1.473.390,00

Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja tersebut antara lain : masih kurangnya SDM yang paham tentang penanganan kasus dan perlindungan anak serta kurangnya petugas pendamping kasus anak sehingga dalam penyelesaian dan pendampingan kasus anak masih memerlukan tenaga dari luar dan dengan waktu penyelesaian yang agak panjang.

2. Kasi Pemenuhan Hak Anak

Sasaran : Tersedianya Desa dan Kelurahan Layak Anak

Indikator Kinerja : Jumlah indikator Desa/Kelurahan Layak anak yang terpenuhi, kegiatan yang mendukung dalam pelaksanaan antara lain :

- Pembinaan pada Desa/Kelurahan yang menginisiasi menjadi Desa/kelurahan Layak Anak, tercapai (100%)
- Pembinaan Puskesmas dengan pelayanan ramah anak, tercapai (100%).
- Tersedianya Sekolah Ramah Anak (SRA) berdasarkan standarisasi Kementerian PP-PA (Penghargaan SRA Tahun 2019), tercapai (100%).
- Terbinanya Sekolah yang menginisiasi menjadi Sekolah Ramah Anak, terlaksana (100%)

- Tersedianya Ruang Bermain Ramah Anak yang tersertifikasi oleh Kementerian PP-PA di Kab. HSS (Penghargaan Kementerian PP-PA Tahun 2019), tercapai (100%)
- Terlaksananya Rapat evaluasi Kabupaten Layak Anak, tercapai (100%)
- Terlaksananya kegiatan forum anak di Kab. HSS, tercapai (100%)
- Jumlah desa/kelurahan yang mendapat sosialisasi tentang Desa/Kelurahan layak Anak terlaksana (100%)
- Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan bulanan Seksi Perlindungan Anak Tahun 2019 disusun dan disampaikan tepat waktu, tercapai (100%)
- Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan triwulan Seksi Pemenuhan Hak Anak Tahun 2019 disusun dan disampaikan tepat waktu, tercapai (100%)

Capaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak melalui Kegiatan Pelayanan Pemenuhan Hak Anak dengan serapan anggaran sebesar Rp. 5.715.300.000,-

Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja tersebut antara lain : masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang dapat melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap Desa/Kelurahan Layak Anak, sekolah yang meninisiasi menjadi sekolah ramah anak, serta memahami tentang pelayanan Puskesmas yang ramah anak. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang dapat melakukan pembinaan terhadap Forum Anak di tingkat Desa/ Kelurahan dan Kecamatan se Kabupaten Hulu Sungai selatan.

D. Rencana Tindaklanjut

Tindaklanjut atau langkah-langkah dalam mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran adalah :

1. Perlunya Sumber Daya Manusia yang memahami tentang pelaksanaan program Desa/Kelurahan Layak Anak, SDM yang memahami tentang Sekolah Ramah Anak, Puskesmas dengan pelayanan yang ramah anak beserta indikator pendukung lain di dalamnya sehingga terwujud Kabupaten Layak Anak

E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (✓).

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan I tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100,00% (sesuai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja yaitu masih kurangnya sumberdaya manusia yang memahami dan terlatih dalam pembinaan Desa/Kelurahan Layak Anak serta kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pendampingan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak sehingga dalam penyelesaian kasus memerlukan tenaga dari luar Dinas sehingga perlu waktu yang agak panjang untuk koordinasi.

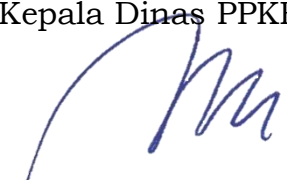
C. Saran/masukan

Adanya Sumber Daya Manusia yang menguasai bidangnya dan terlatih baik dalam pembinaan Desa/Kelurahan Layak Anak maupun dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

Tanggal, 1 April 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kepala Dinas PPKBPPPA,


Dra. Hj. IS SUSILASTUTI
Pembina Utama Muda
NIP.19601219 198503 2 006

Kepala Bidang Perlindungan Anak


Hj. TATIK SRI RAHAYU, SPt, MP
Pembina
NIP.19681007 199303 2 002

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : Dra. Nursinah
NIP : 19640411 199403 2 009
PANGKAT / GOL : Penata Tk. I /III / d
JABATAN : Kasi Keterpaduan dan Sinkronisasi Kependudukan
Triwulan : I Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa tugas Sub. Bagian Keterpaduan dan Sinkronisasi Kependudukan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Keterpaduan dan Sinkronisasi Kependudukan
- b. Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan, keterpaduan, dan Sinkronisasi Kependudukan, termasuk pemetaan keluarga sejahtera
- c. Menyusun bahan penyusunan rencana keterpaduan dan sinkronisasi program kependudukan, termasuk pemetaan keluarga sejahtera
- d. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan keterpaduan dan sinkronisasi program kependudukan, kependudukan termasuk pemetaan keluarga sejahtera
- e. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan keterpaduan dan sinkronisasi program kependudukan, termasuk pemetaan keluarga sejahtera
- f. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan keterpaduan dan sinkronisasi program kependudukan, termasuk pemetaan keluarga sejahtera
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera sesuai bidang tugas

Untuk melaksanakan tugas di atas Sub. Bagian Keterpaduan dan Sinkronisasi Kependudukan mempunyai fungsi :

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN
KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA :
Triwulan : I

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Program	Kegiatan	Anggaran
				1	2	3			
1	2	3	4	5			6	7	8
1	Tersedianya institusi KB yang melaksanakan KKBPK dan instansi yang terkait yang berkomitmen terhadap kependudukan	Jumlah instansi KB yang menyelenggarakan program KKBPK	Kegiatan	0	0	0	Program Peningkatan Keluarga Sejahtera	Penyelenggaraan Pembangunan Kependudukan berwawasan KKBPK (kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga)	21.705.900,-

B. Capaian Kinerja 2019
Triwulan : I

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran (%)
				1	2	3	1	2	3						
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10	11	12
1	Tersedianya institusi KB yang melaksanakan KKBPK dan instansi yang terkait yang berkomitmen terhadap kependudukan	Jumlah instansi KB yang menyelenggarakan program KKBPK	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0.00%	Program Peningkatan Keluarga Sejahtera	Penyelenggaraan Pembangunan Kependudukan berwawasan KKBPK (kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga)	21.705.900,-	2.970.000	13,68%

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan I 2019 di atas capaian kinerja pada Sub. Bagian Keterpaduan dan Sinkronisasi Kependudukan dari 1 (satu) Sasaran dan 1 (satu) indikator sasaran belum mencapai 100,00% ini dikarenakan target penjadwalan pada sasaran kegiatan dan indikator sasaran tersebut berada pada triwulan II dan IV, akan tetapi ada sasaran kegiatan dan indikator sasaran lain yang mendukung kegiatan tersebut diatas yang telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran : Tersedianya institusi KB yang melaksanakan KKBPK dan instansi yang terkait yang berkomitmen terhadap kependudukan belum mencapai 100,00%, dikarenakan sasaran kegiatan dan indikator sasaran terjadwal pada triwulan II dan IV.

Pada triwulan I sudah dilaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung indikator di atas, seperti rapat koordinasi teknis bulanan bidang PPKS yang diikuti oleh Bidang Keluarga Berencana dan seluruh PLKB se-Kab HSS, memonitor laporan pengendalian lapangan 11 kecamatan, meentry data laporan pengendalian lapangan 11 kecamatan dan membuat laporan bulanan hasil dari laporan pengendalian lapangan 11 kecamatan.

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Peningkatan Keluarga Sejahtera melalui Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Kependudukan Berwawasan KKBPK (kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga) dengan serapan anggaran sebesar Rp 2.970.000,- atau 13,68 %.

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja tersebut diatas yaitu belum adanya perjanjian kerjasama dengan instansi yang berkomitmen terhadap kependudukan.

D. Rencana Tindak lanjut

Tindak lanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah membuat perjanjian kerjasama dengan instansi yang berkomitmen terhadap kependudukan.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√).

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Tahun I tahun 2019 capaian kinerja sasaran belum mencapai 100,00% dikarenakan jadwal pelaksanaan sasaran kegiatan dan indikator sasaran terjadwal pada triwulan II dan IV. Pada triwulan I sudah dilaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung indikator di atas.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tidak ada permasalahan karena belum dilaksanakan.

C. Saran/masukan

-

Tanggal, 01 April 2019

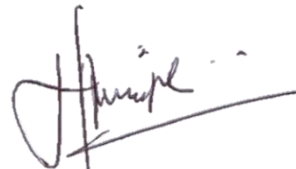
Mengetahui,
Atasan Langsung

Kabid. Dalduk dan Keluarga sejahtera,



Drs. H. ERMANSYAH
Pembina Tk. I
NIP.19661022 199503 1 003

Kasi Keterpaduan dan Sinkronisasi
Kependudukan,



Dra. NURSINAH
Penata Tk. I
NIP.19640411 199403 2 009

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : Hj Rakhmawati
NIP : 19690629 198903 2 007
PANGKAT / GOL : Penata Tk. I /III / d
JABATAN : Kasi Pembangunan Kesejahteraan Keluarga
Triwulan : I Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa tugas Sub. Bagian Keterpaduan dan Sinkronisasi Kependudukan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan mengevaluasi Program Seksi Pembangunan Kesejahteraan Keluarga
- b. Mengembangkan Kegiatan Program Peningkatan Ketahanan Keluarga Keluarga dan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga
- c. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan program dengan Instansi terkait yang berkenaan dengan kegiatan Program Peningkatan Ketahanan keluarga sejahtera
- d. Menyelenggarakan Sosialisasi dan Pembinaan serta Pengawasan kepada Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,UPPKS,PIK/R Jalur Pendidikan,PIK/R Jalur Masyarakat)
- e. Melakukan Evaluasi dan menganalisa kegiatan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga serta meningkatkan Ketahanan Keluarga
- f. Membuat Laporan hasil kegiatan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera sesuai bidang tugas

Untuk melaksanakan tugas di atas Sub. Bagian Pembangunan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA :
Triwulan : I

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Program	Kegiatan	Anggaran
				1	2	3			
1	2	3	4	5			6	7	8
1	Terlaksananya Pelayanan Ketatausahaan Administrasi Umum dan Kepegawaian	Lomba Kelompok Ketahanan Keluarga	Kegiatan		1		Program Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga	56.076.700

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Program	Kegiatan	Anggaran
				1	2	3			
1	2	3	4	5			6	7	8
2	Meningkatkan Kualitas Kelompok Ketahanan Keluarga	Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga yang terdata	Kegiatan	50	50	50	Program Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pelatihan Kelompok Ketahanan Keluarga Bina Keluarga Remaja (BKR)	

B. Capaian Kinerja 2019
Triwulan : I

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran (%)
				1	2	3	1	2	3						
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10	11	12
1	Terlaksananya Pelayanan Ketatausahaan Administrasi Umum dan Kepegawaian	Lomba Kelompok Ketahanan Keluarga	Kegiatan		1			1		100 %	Program Peningkatan Keluarga Sejahtera	Lomba / Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga	56.076.700	12.000.000	21.40

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran (%)
				1	2	3	1	2	3						
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10	11	12
	Meningkatkan Kualitas Kelompok Ketahanan Keluarga	Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga yang terdata	Kegiatan	50	50	50	50	50	54	102,67 %	Program Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pelatihan/ Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga	41.302.750,-	6.615.500	16.02

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan I 2019 di atas capaian kinerja pada Seksi Pembangunan Kesejahteraan Keluarga 1 (satu) Sasaran yaitu Meningkatkan Kualitas Kelompok Ketahanan Keluarga dengan indikator kegiatan jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga yang aktif dimana pada triwulan I indikator sasaran tercapai 102,67%. Adapun kegiatan yang mendukung tersebut diatas yang telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran : Tersedianya Kelompok Ketahan Keluarga yang berkualitas, Pada triwulan I sudah dilaksanakan kegiatan Lomba BKB, BKR, BKL,UPPKS,PIK Remaja Jalur Pendidikan, PIK Remaja Masyarakat dan Orang Tua Hebat , Lomba ini dilaksanakan yaitu :
 - Untuk meningkatkan Kegiatan Ketahanan Keluarga agar terciptanya keluarga yang berkualitas sehingga terciptanya masyarakat yang makmur dan sejahtera.
 - Kegiatan ini dilaksanakan terlebih dulu dikarenakan dalam rangka menghadapi lomba Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan
 - Agar mendorong aktifitas para orang tua dan remaja agar giat melaksanakan program Ketahanan keluarga dalam menciptakan keluarga yang berkualitas menuju keluarga yang berketahanan.

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Peningkatan Keluarga Sejahtera melalui Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga dengan serapan anggaran sebesar Rp 6.615.500,- atau sekitar 16,02%.

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja tersebut diatas yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarganya dan hanya menjalani hidup dengan apa adanya.

D. Rencana Tindaklanjut

Tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan tersebut adalah :

1. Pendekatan dan memberikan pengertian kepada Keluarga di masyarakat tentang pentingnya meningkatkan kualitas keluarga yang berketahanan.
2. Kerjasama dengan PKB Kecamatan melakukan pembinaan dengan cara Sosialisasi kepada Kelompok Ketahanan Keluarga dan masyarakat.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√).

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan I tahun 2019 capaian kinerja sasaran mencapai 102,67% untuk pelaksanaan Kegiatan Lomba Ketahanan Keluarga. Akan tetapi ada kegiatan yang masih belum dilaksanakan akan tetapi dilaksanakan pada triwulan II.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, yang belum dilaksanakan adalah karena kegiatan lomba didahulukan untuk memudahkan pembinaan menghadapi lomba Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.

C. Saran/masukan

-

Tanggal, 01 April 2019

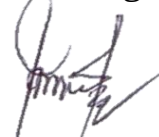
Mengetahui,
Atasan Langsung

Kabid.Dalduk dan Keluarga Sejahtera,



Drs. H. ERMANSYAH
Pembina Tk. I
NIP.19661022 199503 1 003

Kasi Pembangunan Kesejahteraan
Keluarga,



Hj. RAKHMAWATI
Penata Tk. I
NIP.19690629 198903 2 007

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : MAULIDY RIFANI
NIP : 19660717 198903 1 006
PANGKAT / GOL : Penata Tk. I (III/d)
JABATAN : Kepala Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan
Institusi Masyarakat
TRIWULAN : I Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/201/KUM/2018 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa tugas Kepala Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Institusi Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Institusi Masyarakat;
- b. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data dan bahan mengenai advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE), pembinaan peran serta masyarakat dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan pembinaan petugas lini lapangan;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan mengenai strategi pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan pembinaan petugas lini lapangan;
- d. Melaksanakan kegiatan pembinaan/penyuluhan, serta advokasi, KIE program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- e. Melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan pembinaan petugas lini lapangan;
- f. Menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi, lembaga swadaya masyarakat terkait dalam rangka pembinaan dan pengembangan serta pengendalian pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan pembinaan petugas lini lapangan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Bidang Keluarga Berencana sesuai bidang tugas.

B. Struktur jabatan (peta jabatan)



BAB II
 AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN
 KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA :
 Triwulan : I

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Triwulan (kumulatif)	Program	Kegiatan	Anggaran
				I			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terlaksananya advokasi konseling dan promosi KBKR	Jumlah remaja/anak berusia 15-19 tahun yang diberikan sosialisasi dan edukasi tentang pendewasaan usia perkawinan.	Orang	140	Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	39.978.600

Target tersebut diatas adalah kumulatif (sampai dengan triwulan I) adalah 140 orang, Jumlah remaja/anak berusia 15-19 tahun yang diberikan sosialisasi dan edukasi tentang pendewasaan usia perkawinan

B. Capaian Kinerja 2019
Triwulan : I

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	Capaian Kinerja	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran (%)
				I	I						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terlaksananya advokasi konseling dan promosi KBKR	Jumlah remaja/anak berusia 15-19 tahun yang diberikan sosialisasi dan edukasi tentang pendewasaan usia perkawinan	Orang	140	201	143,57%	Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	39.978.600	12.575.500	31,94%

Disamping melaksanakan kinerja tersebut diatas, kami juga sebagai Kepala Seksi Advokasi, KIE dan Institusi Masyarakat pada triwulan I Tahun 2019 dilaksanakan juga kinerja dengan capainya sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1	Menghimpun, mengolah dan menganalisa data IMP.	Dokumen	1	1	100
2	Menghimpun, mengolah dan menganalisa data PKB/PLKB	Dokumen	1	1	100
3	Menghimpun Data IMP dan Poktan yang dibina atasan yang dilaksanakan.	Dokumen	1	1	100
4	Menyiapkan/ membuat Bahan KIE	Dokumen	1	1	100
5	Menyiapkan Buku Materi/ Poster/ Leaflet/ Baliho/Spanduk/DII	Dokumen	1	1	100
6	Membagi Buku Materi/ Poster/ Leaflet/DII	Dokumen	1	1	100
7	Melaksanakan KIE melalui Media Sosial	Dokumen	2	2	100
8	Memfasilitasi Pemasangan Baliho	Dokumen	1	1	100
9	Melaksanakan KIE dengan Mopen KKB	Dokumen	1	1	100
10	Melaksanakan Pembinaan ke Petugas Lini Lapangan, Petugas Pengelola Klinik KB dan Kader Lini Lapangan/IMP	Dokumen	1	1	100
11	Memfasilitasi/Melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas PPKBD	Dokumen	1	0	0
12	Memfasilitasi/Melaksanakan kegiatan Capacity Building Pendewasaan Usia Perkawinan	Dokumen	2	2	100
13	Evaluasi Bulanan kegiatan pelaksanaan kegiatan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan pembinaan petugas lini lapangan	Dokumen	1	1	100
14	Kunjungan Pembinaan Program Terpadu Kecamatan Sayang Ibu (KSI) Tahun 2019	Kunjungan	2	2	100
15	Manilai Lomba IMP, Penyuluh KB Berprestasi dan Pasangan KB Lestari Tk.Kab.HSS Tahun 2019	Kegiatan	2	2	100
Jumlah Capaian					93,33%

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sebagai berikut :

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan I 2019 di atas maka capaian kinerja Seksi Advokasi, KIE dan Institusi Masyarakat Dinas PPKBPPPA Kab. Hulu Sungai Selatan dengan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran dan 1 (satu) indikator sasaran Terlaksananya Advokasi Konseling dan Promosi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sebesar 143,57%.

Indikator Kinerja :

- Jumlah remaja/anak berusia 15-19 tahun yang diberikan sosialisasi dan edukasi tentang pendewasaan usia perkawinan, tercapai (143,57%)
2. Terlaksananya capaian kinerja kegiatan Kasi Advokasi, Komunkasi, Informasi, Edukasi dan Institusi Masyarakat dibidang Keluarga Berencana, sesuai dengan petunjuk teknis untuk ketepatan sasaran program sebesar 93,33%

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah melalui Kegiatan Pembinaan Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) dengan serapan anggaran sebesar Rp.745.000,-

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- Waktu pelaksanaan Advokasi Konseling dan Promosi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) dan kegiatan lainnya berubah, karena mengganggu proses kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah, maka pelaksanaannya dimajukan atau dimundurkan, sehingga berdampak pada pencapaian kinerja.

D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam menghadapi kendala pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Advokasi dan koordinasi dengan Dinas Terkait terutama Dinas Pendidikan Kab. HSS, Kantor Kementerian Agama Kab. HSS, Kepala-Kepala Sekolah untuk SLTP/SLTA se-Kab.HSS, Koordinator Penyuluh KKB Kecamatan se-Kab.HSS, serta SKPD/Instansi terkait lainnya.
2. Menjadwalkan kembali rencana kegiatan disesuaikan dengan Kegiatan Belajar Mengajar di SLTP dan SLTA.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√).

BAB III
PENUTUP

Bahwa Kepala Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Institusi Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/201/KUM/2018 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, telah melaksanakan tugas dengan pencapaian kinerja sasaran kegiatan Advokasi Konseling dan Promosi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) pada Triwulan I Tahun 2019 adalah sebesar 143,57%.

Demikian laporan kinerja pegawai ini dibuat sebagai kewajiban sebagai pejabat pengawas dilingkungan Pemerintah kabupaten Hulu Sungai Selatan.

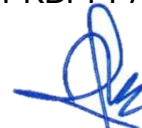
Kandangan, 04 April 2019

Mengetahui Atasan Langsung,
Kepala Bidang Keluarga Berencana
Dinas PPKBPPPA Kab. HSS,



SYAHRIL SOFIAN, S.Pi
P e m b i n a
NIP. 19680305 199312 1 002

Kepala Seksi
Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi
dan Institusi Masyarakat,
Dinas PPKBPPPA Kab. HSS,



MAULIDY RIFANI, S.Mn
Penata Tingkat I
NIP. 19660717 198903 1 006

LAPORAN KINERJA PEGAWAI

TRIWULAN I TAHUN 2019

NAMA : **RAKHMAD RIZALI, S.Kep**
NIP : **19830318 200501 1 003**
PANGKAT / GOL : **PENATA (III/c)**
JABATAN : **Kepala Seksi Pelayanan Kontrasepsi pada
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak**

DAFTAR ISI

	Halaman
Cover	1
Daftar Isi	2
Daftar tabel dan Gambar.....	3
BAB I Pendahuluan.....	4
A. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
B. Struktur Jabatan.....	5
BAB II Akuntabilitas Kinerja Jabatan	6
A. Perjanjian Kinerja.....	6
B. Capaian Kinerja.....	6
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	7
D. Rencana Tindak Lanjut.....	11
D. Tanggapan Atasan Langsung.....	11
BAB III Penutup	12

DAFTAR TABEL dan GAMBAR

Tabel	halaman
Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja	6
Tabel 2.2. Capaian Kinerja.....	6
Tabel 2.3. Metode penyimpulan capaian kinerja.....	7
Tabel 2.4. Target Kinerja berdasar topuksi.....	10
Gambar	
Gambar 1.1 Struktur Jabatan	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

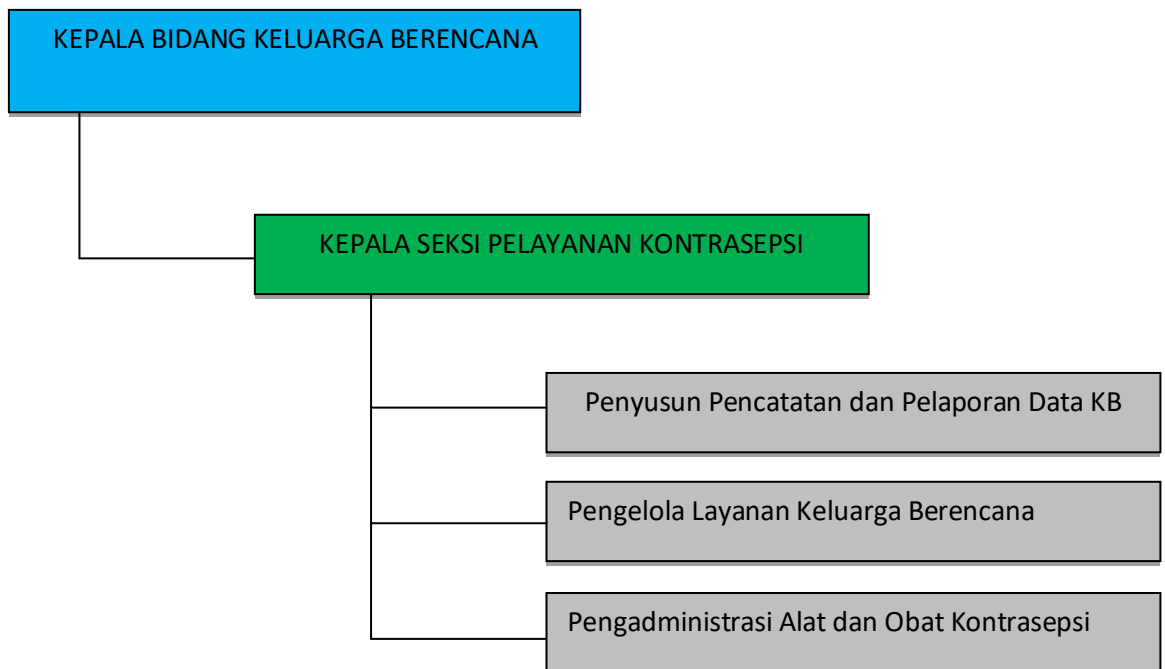
Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pasal 17 menyatakan tugas Seksi Pelayanan Kontrasepsi adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Kontrasepsi;
- b. menghimpun, mengolah dan menganalisa data dan bahan mengenai pelaksanaan pelayanan Kontrasepsi;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembinaan mengenai strategi pelaksanaan pengendalian dan pembinaan akseptor Keluarga Berencana dan pelayanan kontrasepsi;
- d. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program operasional, pengendalian, pembinaan serta strategi pelaksanaan pengendalian dan pembinaan akseptor Keluarga Berencana dan pelayanan kontrasepsi;
- e. melaksanakan kegiatan Pelayanan Kontrasepsi, melalui Tim Keliling Keluarga Berencana, Tim Mobil Unit Pelayanan Keluarga Berencana maupun pada kegiatan momentum terhadap Pasangan Usia Subur;
- f. melaksanakan pengelolaan, penyimpanan, penyaluran/distribusi alat kontrasepsi pada gudang alokon Keluarga Berencana Kabupaten;
- g. melaksanakan evaluasi dan analisis pelaksanaan kegiatan, pelayanan kontrasepsi, dan pengelolaan alat dan obat kontrasepsi Keluarga Berencana;

- h. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi, lembaga swadaya masyarakat, kader dalam pelaksanaan pelayanan kontrasepsi; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana sesuai bidang tugas.

B. Struktur Jabatan

Seksi Pelayanan Kontrasepsi berada pada Bidang Keluarga Berencana dan idealnya memiliki 3 Pelaksana berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, namun karena keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang ada maka hanya ada satu orang Pelaksana. Meskipun demikian diharapkan tidak mengganggu pencapaian target, sehingga *outcome* yang diharapkan bisa optimal. Struktur jabatan bisa dilihat pada gambar 1.1 berikut :



Gambar 1.1 Struktur Jabatan

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Program	Kegiatan	Anggaran
				1	2	3			
1	2	3	4	5			6	7	8
1	Terlaksananya pelayanan KBKR yang merata dan berkualitas	Jumlah PUS yang ber KB menggunakan alat kontrasepsi	Peserta KB Aktif		34312		Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana	Rp 259.507.900

B. Capaian Kinerja

Tabel 2.2 Capaian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran (%)
				1	2	3	1	2	3						
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10	11	12
1	Terlaksananya pelayanan KB KR yang merata dan berkualitas	Jumlah PUS yang ber KB menggunakan alat kontrasepsi	Peserta KB Aktif		34312			37158		108,29%	Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana	Rp 259.507.900	Rp 56.800.000	21,89%

Keterangan : Data Capaian Kinerja berdasarkan laporan Statistik Rutin BKKBN pada <http://aplikasi.bkkbn.go.id/SR>

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja berdasar pada *output* dengan standar 100 dan diinterpretasikan dengan mencapai, tidak mencapai, dan atau melebihi target. Interpretasi tersebut bisa dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Metode penyimpulan capaian kinerja

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan I 2019 capaian kinerja Seksi Pelayanan Kontrasepsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari Sasaran dan indikator sasaran mencapai 108,29%.

Capaian kegiatan lainnya yang dilaksanakan pada Triwulan I adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Penyuluhan KB (DAK Fisik)

Belum ada realisasi sesuai perencanaan, selanjutnya proses survei, pembuatan kontrak, reviu APIP sebagai salah satu syarat penyaluran tahap pertama sedang berjalan.

- 2) Kegiatan Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK Non Fisik – BOKB)

Beberapa kegiatan terealisasi, namun karena kendala sumber daya dan beberapa kesalahan pelaporan serta pertanggungjawaban sehingga proses realisasi menjadi terhambat.

- 3) Kegiatan Operasional Penggerakan Program KKBPK di Kampung KB (DAK Non Fisik – BOKB)

Secara umum kegiatan yang dilaksanakan di Kampung KB masih didominasi oleh kegiatan KKBPK, sementara kegiatan dari instansi lintas sektor relatif terbatas; sarana yang ada di Kampung KB umumnya masih terbatas pada sarana KIE kegiatan KKBPK dan sarana KIE dari Kesehatan sementara sarana dari instansi lintas sektor lainnya tidak banyak ditemukan di Kampung KB; dan secara umum, pembinaan Kampung KB masih bersifat sektoral dan belum terjadwal dan belum terkoordinasi. Karena inilah kegiatan di Kampung KB tidak optimal dan pada akhirnya mempengaruhi realisasi.

4) Kegiatan Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK Non Fisik – BOKB)

Beberapa kegiatan terealisasi, namun beberapa kesalahan pelaporan serta pertanggungjawaban sehingga proses realisasi menjadi terhambat.

5) Kegiatan Operasional Pembinaan Program KB bagi Masyarakat oleh Kader PPKBD dan Sub PPKBD (DAK Non Fisik – BOKB)

Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) adalah wadah masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan Program KKBPK baik dalam bentuk kelompok/organisasi maupun perorangan yang mempunyai pengaruh di masyarakat. IMP ditingkat desa/kelurahan yang dikenal dengan nama PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kota), sedangkan IMP tingkat dusun/RW disebut Sub PPKBD.

kader IMP merupakan sumber daya manusia lokal yang sangat penting dan menjadi satu kekuatan yang dapat diandalkan untuk tetap dapat mempertahankan keberhasilan program KB di masyarakat seiring dengan terus menurunnya jumlah Penyuluh KB yang aktif karena pindah dan pensiun.

Sekarang ini, Kader IMP secara faktual telah lahir dan hadir namun belum nampak kompetensi yang dimiliki serta belum

terlibat dan berperan serta secara aktif sebagaimana semestinya. Sehingga kekurangan dan kelemahan baik dalam pelaksanaan maupun pelaporan di lapangan menjadi kendala pada kegiatan ini.

6) Kegiatan Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi ke Faskes (DAK Non Fisik – BOKB)

Beberapa kegiatan terealisasi namun realisasi keuangan belum ada, selanjutnya kendala sumber daya manusia yang sangat terbatas juga menjadi suatu masalah sehingga proses realisasi menjadi terhambat.

Output enam kegiatan tersebut mempunyai tujuan spesifik untuk mencapai indikator perkegiatan. Namun secara umum *outcome* seluruh rangkaian kegiatan adalah untuk mempertahankan Jumlah PUS yang ber-KB menggunakan alat kontrasepsi (Peserta KB Aktif) dan menambah Jumlah PUS yang ber-KB (Peserta KB baru). Oleh karena itu ada saling keterkaitan antara kegiatan dengan perjanjian kinerja pada tabel 2.1.

Selanjutnya untuk menunjang Perjanjian Kinerja disusunlah target kinerja (bisa dilihat pada tabel 2.4) yang disesuaikan dengan tupoksi dan kegiatan tambahan lainnya. Dalam hal ini setiap item tupoksi dijabarkan dengan beberapa item kegiatan dengan target kinerja yang realistis. Setiap item target kinerja tersebut pada bertujuan spesifik pada setiap tupoksi. *Output* yang diharapkan adalah terealisasinya target kinerja yang direncanakan. *Outcome* dari seluruh rangkaian kegiatan juga untuk mempertahankan Jumlah PUS yang ber-KB menggunakan alat kontrasepsi (Peserta KB Aktif) dan menambah Jumlah PUS yang ber-KB (Peserta KB baru). Dengan demikian, perjanjian kinerja pada tabel 2.1 bisa direalisasikan melalui rangkaian kegiatan pada target kinerja berdasar tupoksi dan enam kegiatan yang sudah disebutkan terdahulu.

Tabel 2.4 Target Kinerja berdasar topuksi

NO	TOPUKSI		TARGET KINERJA	SATUAN	Jan	Feb	Mar
1	menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Kontrasepsi	1.1	Menyusun Pra RKA T.A 2020	Dokumen			3
		1.2	Menyusun RKA pergeseran T.A 2019	Dokumen		2	
2	menghimpun, mengolah dan menganalisa data dan bahan mengenai pelaksanaan pelayanan Kontrasepsi	2.1	Membuat Laporan pelaksanaan pelayanan kontrasepsi	Dokumen		1	1
3	menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembinaan mengenai strategi pelaksanaan pengendalian dan pembinaan akseptor Keluarga Berencana dan pelayanan kontrasepsi	3.1	Membuat Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Dokumen			1
		3.2	Membuat Petunjuk Teknis Pelayanan kontrasepsi	Dokumen		1	
		3.3	Membuat SOP Pelayanan Kontrasepsi	Dokumen		1	
4	melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program operasional, pengendalian, pembinaan serta strategi pelaksanaan pengendalian dan pembinaan akseptor Keluarga Berencana dan pelayanan kontrasepsi	4.1	Melakukan Pembinaan Faskes Klinik KB	Kegiatan		1	1
		4.2	Membuat Laporan Hasil Pembinaan Faskes Klinik KB	Dokumen		1	1
5	melaksanakan kegiatan Pelayanan Kontrasepsi, melalui Tim Keliling Keluarga Berencana, Tim Mobil Unit Pelayanan Keluarga Berencana maupun pada kegiatan momentum terhadap Pasangan Usia Subur	5.1	Membuat perencanaan kebutuhan kegiatan pelayanan KB Gratis melalui MUYAN KB	Kegiatan			1
		5,2	Memfasilitasi kegiatan Pelayanan KB Gratis melalui MUYAN KB	Kegiatan			1
		5,3	Membuat Laporan Pelaksanaan Pelayanan KB Gratis melalui MUYAN KB	Dokumen			
6	melaksanakan pengelolaan, penyimpanan, penyaluran/distribusi alat kontrasepsi pada gudang alokon Keluarga Berencana Kabupaten	6.1	Membuat Pedoman pengendalian dan pendistribusian Alokon	Dokumen		1	
		6.2	Menganalisa Kebutuhan Alokon pada Faskes Klinik KB	Dokumen		1	1
		6.3	Mendistribusikan Alokon ke Faskes KB	Kegiatan		1	1
7	melaksanakan evaluasi dan analisis pelaksanaan kegiatan, pelayanan kontrasepsi, dan pengelolaan alat dan obat kontrasepsi Keluarga Berencana	7.1	Membuat Laporan Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan kontrasepsi akhir tahun	Dokumen			
8	menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi, lembaga swadaya masyarakat, kader dalam pelaksanaan pelayanan kontrasepsi	8.1	Melakukan Rapat monitoring dan evaluasi bulanan	kegiatan		1	1

D. Rencana Tindak lanjut

Langkah-langkah atau tindak lanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi beberapa kegiatan yang belum terealisasi sesuai target.
2. Perencanaan target perlu memperhatikan asas *challenging but achievable* dengan bahasa lain target tidak boleh terlalu tinggi sehingga tidak mungkin tercapai atau terlalu rendah sehingga dengan mudah bisa tercapai.
3. Angka capaian kinerja yang melebihi target harus didiskusikan secara kritis, kontekstual, dan ilmiah.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

kinerja dapat selalu ditingkatkan

dan pertahankan yang sudah tercapai

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (✓).

BAB III

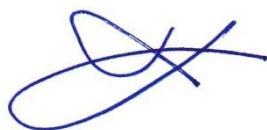
PENUTUP

Capaian kinerja Triwulan I 2019 capaian kinerja Seksi Pelayanan Kontrasepsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari Sasaran dan indikator sasaran mencapai 108,29%. Angka capaian yang melebihi ini dicapai berkat kerja sama yang baik antara para pihak. Keterpaduan program dan kegiatan pada seksi ini juga menopang pencapaian tersebut. Meskipun ada beberapa kegiatan yang belum optimal namun tidak mengurangi *output* capaian. Akan tetapi hal itu akan menjadi dasar evaluasi dan perbaikan pada triwulan selanjutnya. Dengan demikian, sinkronisasi dan keterpaduan kegiatan dengan indikator sasaran menjadi sangat penting serta adanya keberlanjutan kegiatan yang juga tidak kalah penting.

Tanggal, 01 April 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kepala Bidang Keluarga Berencana,



SYAHRIL SOFIAN

Pembina

NIP.197107261997032005

Kepala Seksi Pelayanan
Kontrasepsi,



RAKHMAD RIZALI, S.Kep

Penata

NIP.19830318 200501 1 003

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : NURUL YUDA
NIP : 19700120 199303 2 006
PANGKAT / GOL : PENATA (III/c)
JABATAN : Kasi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS.
Triwulan : I Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bawah tugas Sub. Bagian Perlindungan Perempuan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan kajian pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan pengelolaan data/informasi gender;
- c. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, pengelolaan data/ informasi gender;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, pengelolaan data/ informasi gender;
- e. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, pengelolaan data/ informasi gender;
- f. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta pengolahan, analisis dan penyajian data/ informasi gender;
- g. menyiapkan pelembagaan pengarusutamaan gender;
- h. menyiapkan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga;

- i. melaksanakan upaya peningkatan kesetaraan gender pada keluarga;
- j. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai bidang tugas.

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)



BAB II**AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN
KINERJA JABATAN****A. PERJANJIAN KINERJA :**

Triwulan : I

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Program	Kegiatan	Anggaran
				1	2	3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terlaksananya MoU peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Jumlah SKPD yang perencanaan dan penganggaran responsif gender	SKPD	-	-	-	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Pelaksanaan PUG di tingkat daerah	67.014.500,-
2	Terlaksananya pelayanan, penatausahaan administrasi umum, dan kepegawaian	Jumlah kegiatan peran serta dan partisipasi masyarakat	Kegiatan	-	-	1	Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat	445.339.100,-

B. CAPAIAN KINERJA 2019

Triwulan : I

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran (%)
				1	2	3	1	2	3						
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10	11	12
1	Terlaksananya MoU peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan perempuan	Jumlah SKPD yang perencanaan dan penganggaran responsif gender	SKPD	-	-	-	-	-	-	-	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Pelaksanaan PUG di tingkat daerah	67.014.500,-	-	-
2	Terlaksananya pelayanan, penatausahaan administrasi umum, dan kepegawaian	Jumlah kegiatan peran serta dan partisipasi masyarakat	Kegiatan	-	-	1	-	-	1	100%	Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat	445.339.100,-	134.257.400	27.78

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja 26

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan I 2019 di atas, capaian kinerja Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Hulu Sungai Selatan dari 2 (dua) Sasaran dan 1 (dua) indikator sasaran belum sampai pada penjadwalan target pencapaian yang direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan II, akan tetapi ada beberapa kegiatan yang menunjang dalam pencapaian target sasaran indikator tersebut yang telah dilaksanakan dan mencapai 100,00% atau melebihi target dengan ringan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran : Terlaksananya MoU peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
Indikator Kinerja : Jumlah SKPD yang perencanaan dan penganggaran responsif gender (target pencapaian dimulai pada triwulan II),
Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan melalui Kegiatan Pelaksanaan PUG di tingkat daerah dengan serapan anggaran sebesar Rp. 0,- (karena penjadwalan kegiatan dimulai pada triwulan II)
2. Sasaran : Terlaksananya pelayanan, penatausahaan administrasi umum, dan kepegawaian
Indikator Kinerja : Jumlah kegiatan peran serta dan partisipasi masyarakat kegiatan yang mendukung dalam pelaksanaan antara lain :

- Jumlah Surat Keputusan Bupati yang berkaitan tentang P2WKSS dan KSI, tercapai (100%)
- Jumlah Pembinaan terhadap desa P2WKSS dan KSI, terlaksana (100%).
- Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan bulanan Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Tahun 2019 disusun dan disampaikan tepat waktu, tercapai (100%)
- Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan triwulan Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Tahun 2019 disusun dan disampaikan tepat waktu, tercapai (100%)

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah melalui kegiatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat dengan serapan anggaran sebesar Rp. 134.257.400,-

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut diatas yaitu masih kurangnya SDM yang memahami dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut:

1. Perlunya Sumber Daya Manusia yang SDM yang memahami dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (✓).

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan I tahun 2019 capaian belum dapat dilaksanakan karena terjadwal pada triwulan II akan tetapi kegiatan yang mendukung dalam pelaksanaan tugas kualitas hidup perempuan dan keluarga yaitu kegiatan peningkatan peran serta partisipasi masyarakat sudah terlaksana 100%.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja yaitu masih kurangnya sumber daya manusia yang memahami dan terlatih dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

C. Saran/masukan

Perlunya sumber daya manusia yang terlatih dan memahami dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tanggal, 01 April 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kabid
Pemberdayaan Perempuan,



Hj. NOORHADINI ULFAH, SKM

Pembina Tk. I

NIP. 19640701 198712 2 005

Kasi
Kualitas Hidup Perempuan dan
Keluarga,



NURUL YUDA

Penata

NIP. 19700120 199303 2 006

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : NOPSIARTI, SP
NIP : 19821109 200604 2 011
PANGKAT / GOL : PENATA TK. I (III/d)
JABATAN : Kasi Perlindungan Perempuan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS.
Triwulan : I Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bawah tugas Sub. Bagian Perlindungan Perempuan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan kajian kebijakan pencegahan dan perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan kebijakan pengelolaan data/informasi di bidang perlindungan perempuan;
- c. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pencegahan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan pengelolaan data/informasi di bidang perlindungan perempuan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pencegahan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan pengelolaan data/informasi perlindungan perempuan;
- e. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi dan distribusi kebijakan pencegahan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan pengelolaan data/ informasi perlindungan perempuan;
- f. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan;
- g. melaporkan penerapan kebijakan pencegahan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan pengelolaan data/informasi perlindungan perempuan; dan

h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai bidang tugas.

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)



BAB II

**AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN
KINERJA JABATAN**

A. PERJANJIAN KINERJA :

Triwulan : I

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Program	Kegiatan	Anggaran
				1	2	3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tersedianya layanan perlindungan perempuan	Jumlah organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan dibina	organisasi	-	-	-	Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan	Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan	10.045.000,-

B. CAPAIAN KINERJA 2019

Triwulan : I

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran (%)
				1	2	3	1	2	3						
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10	11	12
1	Tersedianya layanan perlindungan perempuan	Jumlah organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan dibina	organisasi	-	-	-	-	-	-	-	Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan	Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan	10.045.000,-	1.131.000,-	11,26%

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja 26

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan I 2019 di atas, capaian kinerja Seksi Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Hulu Sungai Selatan dari 1 (satu) Sasaran dan 1 (satu) indikator sasaran belum sampai pada penjadwalan target pencapaian yang direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan II, akan tetapi ada beberapa kegiatan yang menunjang dalam pencapaian target sasaran indikator tersebut yang telah dilaksanakan dan mencapai 100,00% atau melebihi target dengan ringan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran : Tersedianya layanan perlindungan perempuan

Indikator Kinerja : Jumlah organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan dibina (target pencapaian dimulai pada triwulan II), kegiatan yang mendukung dalam pelaksanaan antara lain :

- Jumlah desa yang mendapat sosialisasi perlindungan perempuan dalam rumah tangga, tercapai (100%)
- Jumlah pendampingan pelaksanaan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang melaporkan atau pun yang terdata, melebihi target (300%).
- Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan bulanan Seksi Perlindungan Perempuan Tahun 2019 disusun dan disampaikan tepat waktu, tercapai (100%)
- Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan triwulan Seksi Perlindungan Perempuan Tahun 2019 disusun dan disampaikan tepat waktu, tercapai (100%)

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan melalui Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dengan serapan anggaran sebesar Rp. 1.131.000,-

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut diatas yaitu masih kurangnya SDM dalam pelayanan maupun pendampingan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan sehingga dalam penyelesaian dan pendampingannya memerlukan tenaga dan waktu yang cukup lama.

D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut:

1. Perlunya Sumber Daya Manusia yang mendukung dalam pelayanan dan pendampingan Perlindungan Perempuan yang sudah terlatih dalam penanganan kasus.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (\surd).

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan I tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100,00% (sesuai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja yaitu masih kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam penanganan dan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan sehingga pelayanan dengan cepat terselesaikan.

C. Saran/masukan

Perlunya sumber daya manusia yang terlatih dalam penanganan dan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Tanggal, 01 April 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kabid
Pemberdayaan Perempuan,



Hj. NOORHADINI ULFAH, SKM

Pembina Tk. I
NIP. 19640701 198712 2 005

Kasi
Perlindungan Perempuan,



NOPSIARTI, SP

Penata Tk. I
NIP.19821109 200604 2 011

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : HJ. NANI TRISNAWATI, S. Kep., MM
NIP : 19720225 199503 2 003
PANGKAT / GOL : PEMBINA (IV/a)
JABATAN : Kasi Pemenuhan Hak Anak Dinas PPKBPPPA
Triwulan : I Tahun 2019

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bawah tugas Seksi Pemenuhan hak Anak Bidang Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemenuhan Hak Anak;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Perumusan dan kajian pemenuhan hak anak;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakn pengelolaan data/informasi dan pemenuhan hak anak;
- d. melaksanakan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengelolaan data/informasi dan pemenuhan hak anak;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi,, bimbingan teknis, supervisi dan distribusi kebijakan pengelolaan data/informasi, pemenuhan hak anak;
- f. memantau dan melaporkan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak;
- g. menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga Pemerintah, non Pemerintah, dan dunia usaha;
- h. memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pembentukan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, pembentukan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup;
- i. memnatau perkembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- j. memantau perkembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;

- k. menyiapkan penguatan dan pengembanagn lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- l. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak sesuai dengan bidang tugas.

Untuk melaksanakan tugas diatas Kasi Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA :

Triwulan : I

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Program	Kegiatan	Anggaran
				1	2	3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tersedianya desa dan kelurahan Layak Anak	Jumlah indikator desa/kelurahan layak anak yang terpenuhi	Variabel indikator	1	1	1	Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Pelayanan Pemenuhan Hak Anak	92.724.300
		Jumlah Konsep Pra RKA tentang Pemenuhan Hak Anak yang disusun	dokumen	0	0	0			
		Jumlah konsep SK Sekolah Ramah Anak (SRA)	dokumen	0	0	1			
		Jumlah Konsep bahan dan perlengkapan untuk rapat kegiatan Pemenuhan Hak Anak	dokumen	1	0	1			

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Program	Kegiatan	Anggaran
				1	2	3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Konsep bahan dan perlengkapan untuk rapat pengurus Forum Anak Daerah	dokumen	0	1	0			
		Jumlah Konsep bahan dan perlengkapan untuk rapat Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	dokumen	0	0	0			
		Jumlah pelaksanaan sosialisasi Perlindungan Anak /Pemenuhan Hak Anak yang disiapkan	kali	0	1	1			
		Jumlah bahan Evaluasi KLA	dokumen	0	0	0			

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Program	Kegiatan	Anggaran
				1	2	3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Laporan Evaluasi KLA	dokumen	0	0	0			
		Jumlah pembentukan kelembagaan Forum Anak Desa yang disiapkan	kelompok	0	1	0			
		Jumlah pembinaan Forum Anak Desa	kelompok	1	1	0			
		Jumlah pembinaan Forum Anak Kecamatan	kali	0	0	0			

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Program	Kegiatan	Anggaran
				1	2	3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Puskesmas Ramah Anak yang dibina	kali	0	0	1			
		Jumlah Sekolah Ramah Anak yang dibina	kali	0	0	1			
		Jumlah Laporan Realisasi Fisik & Keuangan Kegiatan per Triwulan	laporan	0	0	1			
		Jumlah Laporan Realisasi Fisik & Keuangan Kegiatan Bulanan	laporan	1	1	1			

B. Capaian Kinerja 2019

Triwulan : I

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran (%)
				1	2	3	1	2	3						
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10	11	12
1	Tersedianya desa dan kelurahan Layak Anak	Jumlah indikator desa/kelurahan layak anak yang terpenuhi	Variabel indikator	1	1	1	1	1	1	100%	Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Pelayanan Pemenuhan Hak Anak	92.724.300	5,715.000	6,16
	Jumlah Konsep Pra RKA tentang Pemenuhan Hak Anak yang disusun	dokumen	0	0	0	0	0	0	100%						
	Jumlah konsep SK Sekolah Ramah Anak (SRA)	dokumen	0	0	1	0	0	1	100%						
	Jumlah Konsep bahan dan perlengkapan	dokumen	1	0	1	1	0	1	100%						

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran (%)
				1	2	3	1	2	3						
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10	11	12
		untuk rapat kegiatan Pemenuhan Hak Anak													
		Jumlah Konsep bahan dan perlengkapan untuk rapat pengurus Forum Anak Daerah	dolumen	0	1	0	0	1	0	100%					
		Jumah Konsep bahan dan perlengkapan untuk rapat Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA)sesuai dengan ketentuan yang berlaku	dokumen	0	0	0	0	0	0	100%					

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran (%)
				1	2	3	1	2	3						
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10	11	12
		Jumlah sosialisasi Perlindungan Anak /Pemenuhan Hak Anak yang dilaksanakan	kali	0	1	1	0	1	1	100%					
		Jumlah bahan Evaluasi KLA yang disiapkan	dokumen	0	0	0	0	0	0	100%					
		Jumlah Laporan Evaluasi KLA	dokumen	0	0	0	0	0	0	100%					

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran (%)
				1	2	3	1	2	3						
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10	11	12
		Jumlah kelembagaan Forum Anak Desa yang dibentuk	kelompok	0	1	0	0	1	0	100%					
		Jumlah pembinaan Forum Anak Desa	kelompok	1	1	1	1	1	1	100%					
		Jumlah Forum Anak Kecamatan yang dibina	kali	0	0	0	1	1	1	100%					

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran (%)
				1	2	3	1	2	3						
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10	11	12
		Jumlah Puskesmas Ramah Anak yang dibina	kali	0	0	1	0	0	1	100%					
		Jumlah Sekolah Ramah Anak yang dibina	kali	0	0	1	0	0	1	100%					
		Jumlah Realisasi Fisik & Keuangan Kegiatan per Triwulan	laporan	0	0	1	0	0	1	100%					

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran (%)
				1	2	3	1	2	3						
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10	11	12
		Jumlah Laporan Realisasi Fisik & Keuangan Kegiatan Bulanan	laporan	1	1	1	1	1	1	100%					

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan I 2019 di atas rata-rata capaian kinerja Seksi Pemenuhan Hak Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Hulu Sungai Selatan dari 1 (satu) Sasaran dan 16 (enam belas) indikator sasaran dapat mencapai 100,00% atau melebihi target dengan ringan capaian kinerja sebagai berikut:

Sasaran : Tersedianya desa dan kelurahan Layak Anak

1. Indikator Kinerja :

- Jumlah indikator desa/kelurahan layak anak yang terpenuhi tercapai (100%)
- Jumlah Konsep Pra RKA tentang Pemenuhan Hak Anak yang disusun (100%)
- Jumlah konsep SK Sekolah Ramah Anak/SRA) (100%)
- Jumlah Konsep bahan dan perlengkapan untuk rapat kegiatan Pemenuhan Hak Anak (100%)
- Jumlah Konsep bahan dan perlengkapan untuk rapat pengurus Forum Anak Daerah (100%)
- Jumlah Konsep bahan dan perlengkapan untuk rapat Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku (100%)
- Jumlah sosialisasi Perlindungan Anak / Pemenuhan Hak Anak yang dilaksanakan (100%)
- Jumlah Jumlah bahan Evaluasi KLA yang disiapkan (100%)
- Jumlah Laporan Evaluasi KLA (100%)
- Jumlah kelembagaan Forum Anak Desa yang dibentuk (100%)

- Jumlah pembinaan Forum Anak Desa yang dibina (100%)
- Jumlah Forum Anak Kecamatan yang dibina (100%)
- Jumlah Puskesmas Ramah Anak yang dibina (100%)
- Jumlah Sekolah Ramah Anak yang dibina(100%)
- Jumlah Realisasi Fisik & Keuangan Kegiatan per Triwulan (100%)
- Jumlah Laporan Realisasi Fisik & Keuangan Kegiatan Bulanan (100%)

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak melalui Kegiatan Pelayanan Pemenuhan Hak Anak dengan serapan anggaran sebesar Rp. 5,715.000,-

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut diatas yaitu pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan karena disesuaikan dengan kondisi di lapangan karena kurangnya koordinasi pihak terkait dan masih terbatasnya peran Forum Anak Daerah dalam keterlibatan pembinaan Forum Anak Desa dan Kecamatan sehingga berdampak pada keterlambatan dalam mengajukan realisasi keuangan .

D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi koordinasi dengan pihak terkait (sekolah dan masyarakat) dan SKPD lintas sektor.
2. Optimalisasi peran serta Forum Anak Daerah (FAD) dalam pembinaan Forum Anak Desa dan Kecamatan.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (✓).

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Tahun I tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100,00% (sesuai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, antara lain:

1. Koordinasi dengan pihak terkait (sekolah dan masyarakat kurang optimal
2. Masih terbatasnya peran Forum Anak Daerah dalam keterlibatan pembinaan Forum Anak Desa dan Kecamatan

B. Saran/masukan

1. Optimalisasi koordinasi dengan pihak terkait (sekolah dan masyarakat) dan SKPD lintas sektor.
2. Memotivasi Forum Anak Daerah (FAD) untuk mengoptimalkan peran sertanya dalam pembinaan Forum Anak Desa dan Kecamatan.

Tanggal, 01 April 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kepala Bidang Perlindungan Anak,



Hj. TATIK SRI RAHAYU, S.Pt., MP

Pembina

NIP. 19681007 199803 2 002

Kasi Pemenuhan Hak Anak,



Hj. NANI TRISNAWATI, S. Kep., MM

Pembina

NIP.19780225 1995033 2 003

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : LAILY DIMIATI, S.Sos
NIP : 19731116 200804 2 001
PANGKAT / GOL : PENATA (III/c)
JABATAN : Kasi Perlindungan Khusus Anak Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS.
Triwulan : I Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bawah tugas Sub. Bagian Perlindungan Khusus Anak adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan Khusus Anak.
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan perlindungan khusus anak dan kebijakan pengelolaan data/ informasi kekerasan terhadap anak
- c. menyusun bahan pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak dan pengelolaan data/ informasi kekerasan terhadap anak.
- d. menyusun bahan pelaksanaan perumusan kajian kebijakan perlindungan khusus anak dan pengelolaan data/informasi kekerasan terhadap anak.
- e. menyusun bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan perlindungan khusus anak dan pengelolaan data/ informasi kekerasan terhadap anak.
- f. menyusun bahan fasilitasi, sosialisasi, dan distribusi kebijakan perlindungan khusus anak dan pengelolaan data/ informasi kekerasan terhadap anak.
- g. menyusun bahan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan perlindungan khusus anak dan pengelolaan data/informasi kekerasan terhadap anak.
- h. memantau dan melaporkan penerapan kebijakan perlindungan khusus anak dan kebijakan pengelolaan data/ informasi kekerasan terhadap anak
- i. menyusun bahan evaluasi upaya pencegahan kekerasan terhadap anak pada lembaga Pemerintah, non Pemerintah, dan dunia usaha
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak sesuai bidang tugas.

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA :

Triwulan : I

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Program	Kegiatan	Anggaran
				1	2	3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tersedianya layanan perlindungan anak	Persentase Penanganan kasus korban kekerasan terhadap anak yang terselesaikan oleh P2TP2A	Jumlah Kasus	1	1	1	Program Peningkatan Perlindungan Anak	Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak	23.966.000,-
		Jumlah PATBM yang dibentuk dan di bina	Desa	-	1	1			

B. CAPAIAN KINERJA 2019

Triwulan : I

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran (%)
				1	2	3	1	2	3						
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10	11	12
1	Tersedianya layanan perlindungan Anak	Persentase Penanganan kasus korban kekerasan terhadap anak yang terselesaikan oleh P2TP2A	Jumlah Kasus	1	1	1	1	3	1	-	Program Peningkatan Perlindungan Anak	Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak	23.966.000,-	7.820.415,-	32,63
		Jumlah PATBM yang dibentuk dan di bina	Desa	-	1	1		1	1						

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja 26

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan I 2019 di atas, capaian kinerja Seksi Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Hulu Sungai Selatan dari 1 (satu) Sasaran dan 1 (satu) indikator sasaran sudah sesuai sampai pada penjadwalan target pencapaian yang direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan II, akan tetapi ada beberapa kegiatan yang menunjang dalam pencapaian target sasaran indikator tersebut yang telah dilaksanakan dan mencapai 100,00% atau melebihi target dengan ringan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran : Tersedianya layanan perlindungan anak

Indikator Kinerja : Persentase penanganan kasus korban kekerasan anak yang terselesaikan oleh P2TP2A (target pencapaian dimulai pada triwulan II), kegiatan yang mendukung dalam pelaksanaan antara lain :

- Jumlah perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) yang dibentuk atau dibina, tercapai (100%)
- Jumlah pendampingan pelaksanaan penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang melaporkan atau pun yang terdata, (100%).
- Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan bulanan Seksi Perlindungan anak Tahun 2019 disusun dan disampaikan tepat waktu, tercapai (100%)
- Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan triwulan Seksi Perlindungan khusus Anak Tahun 2019 disusun dan disampaikan tepat waktu, tercapai (100%)

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Peningkatan Perlindungan Anak melalui Kegiatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dengan serapan anggaran sebesar Rp. 7.820.415,-

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut diatas yaitu masih kurangnya SDM dalam pelayanan maupun pendampingan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak sehingga dalam penyelesaian dan pendampingannya memerlukan tenaga dan waktu yang cukup lama.

D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut:

1. Perlunya Sumber Daya Manusia yang mendukung dalam pelayanan dan pendampingan Perlindungan Perempuan yang sudah terlatih dalam penanganan kasus.
2. Perlunya kerjasama masyarakat / desa untuk dibentuk Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (\surd).

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan I tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100,00% (sesuai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja yaitu masih kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam penanganan dan pendampingan kasus kekerasan terhadap anak sehingga pelayanan cepat terselesaikan.

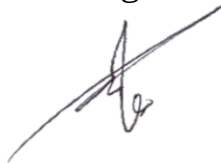
C. Saran/masukan

Perlunya sumber daya manusia yang terlatih dalam penanganan dan pendampingan kasus kekerasan terhadap anak.

Tanggal, 01 April 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kabid
Perlindungan Anak,



Hj. TATIK SRI RAHAYU, S.Pt, MP

Pembina Tk. I

NIP. 19681007 199803 2 002

Kasi
Perlindungan Khusus Anak



LAILY DIMIATI, S.Sos

Penata

NIP.19731116 200804 2 001

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : DESSYANNA PUSPITASARI, S.Psi
NIP : 19801222 201101 2 005
PANGKAT / GOL : Penata (III/c)
JABATAN : Kepala Sub. Bagian Perencanaan Dinas PPKBPPA
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Triwulan : I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

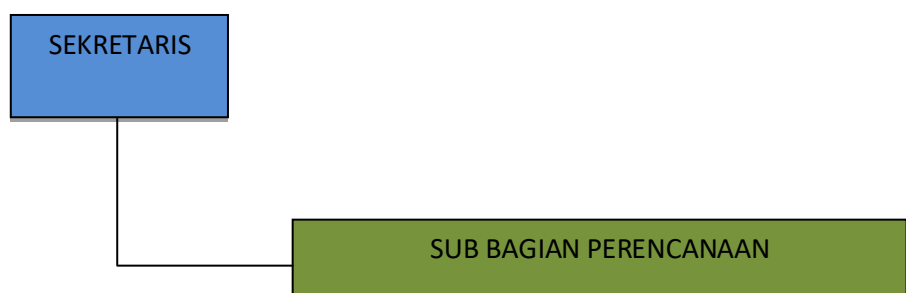
Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Stuktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa tugas Sub. Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut :

1. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan;
2. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan perubahan anggaran;
5. melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang;

6. menyusun rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyusunan rencana anggaran belanja dan rencana pendapatan dan penerimaan;
8. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan kinerja;
9. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data yang berhubungan dengan bidang perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan;
10. menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kegiatan Dinas, baik laporan rutin maupun laporan insidental;
11. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Perencanaan; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai bidang tugas

Untuk melaksanakan tugas diatas Sub. Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJAKINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Triwulan : I

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Terpenuhinya dokumen AKIP dari aspek kualitas	Dokumen AKIP memenuhi aspek kualitas	Dokumen	7	Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Dokumen AKIP	4.910.000

B. Capaian Kinerja 2019

Triwulan : I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran (%)
1	Terpenuhinya dokumen AKIP dari aspek kualitas	Dokumen AKIP memenuhi aspek kualitas	Dokumen	7	7	100	Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Dokumen AKIP	4.910.000	477.500	9,73
Rata-rata Capaian Kinerja Triwulan I				7	7	100					

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan I Tahun 2019 di atas capaian kinerja Sub. Bagian Perencanaan indikator sasaran dapat mencapai 100% dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran : Terpenuhinya dokumen AKIP dari aspek kualitas, capaian kinerja 100%.

Indikator Kinerja :

- Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas (Renstra, Renja, Dokumen IKU, Cascading, PK Murni, Pra RKA, LKj Triwulan I) tercapai (100%)

D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi sasaran dan indikator sasaran yang tdak tercapai.

Sasaran yang tidak tercapai dari uraian diatas tidak ada. Semua dokumen AKIP dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (\surd).

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan I tahun 2019 diperoleh capaian kinerja sasaran 100% dari target yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja tidak ada. Berkat kerjasama dan koordinasi yang baik antar bidang di Dinas PPKBPPPA sehingga dokumen AKIP dapat diselesaikan tepat waktu.

C. Saran/masukan

Meningkatkan koordinasi antara pelaksana pengumpul data dengan masing-masing bidang sesuai dengan SOP Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja.

Tanggal, 5 April 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung
Sekretaris,



MOCH. ADIB, SKM, M.Kes
Pembina Tk.I
NIP. 19700624 199602 1 001

Kepala Sub Bidang Perencanaan,



Dessyanna Puspitasari, S.Psi
Penata
NIP. 19801222 201101 2 005

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : RUSNAWATI, SKM
NIP : 19740321 200212 2 003
PANGKAT/GOL : PENATA/IIIc
JABATAN : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PPKBPPPA KAB.
HSS
TRIWULAN : I Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

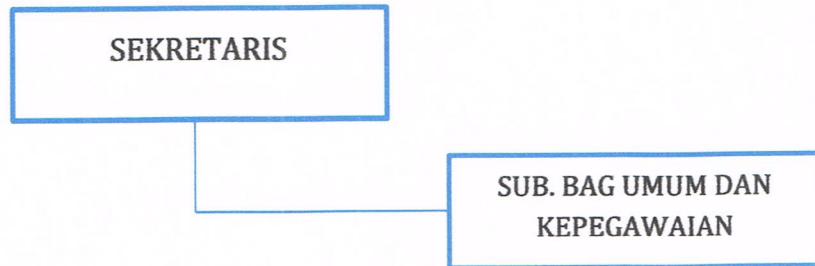
A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai usulan masing-masing bidang;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang;
- e. Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- f. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- g. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- h. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian, meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- l. Menyiapkan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi DUK, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;

- m. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) PADA Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugas.

B. Struktur Jabatan



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut :

- A. Perjanjian Kinerja
Triwulan I
- B. Capaian Kinerja
Triwulan I

Indikator	Satuan	Target	Program	Kegiatan	Anggaran
Pelayanan administrasi sesuai standar	Bulan	3	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa dan administrasi kantor	Rp 44.545.200,00
um n				Penyediaan jasa komunikasi,sumber air dan listrik	Rp 63.600.000,00
				Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Rp 14.000.000,00
				Penyediaan makanan dan minuman	Rp 28.104.000,00
				Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya	Rp 45.850.000,00
				Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan lapangan	Rp 403.333.650,00
			Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 80.239.000,00
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp 94.520.000,00
				Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 68.070.000,00
					Rp 842.261.850,00

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran
Pelayanan administrasi sesuai standar	Bulan	3	100	100	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa dan administrasi kantor	Rp 44.545.200,00	Rp 10.483.400,00	0,24
						Penyediaan jasa komunikasi,sumber air dan listrik	Rp 63.600.000,00	Rp 5.787.983,00	0,09
						Penyebartuasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Rp 14.000.000,00	Rp -	0,00
						Penyediaan makanan dan minuman	Rp 28.104.000,00	Rp 2.760.000,00	0,10
						Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya	Rp 45.850.000,00	Rp 9.150.000,00	0,20
						Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan lapangan	Rp 403.333.650,00	Rp 24.912.539,00	0,06
					Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 80.239.000,00	Rp 32.306.000,00	0,40
						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp 94.520.000,00	Rp 6.312.492,00	0,07
						Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 68.070.000,00	Rp 850.000,00	0,01
							Rp 842.261.850,00	Rp 92.562.414,00	12,89

san Langsung

Kandangan, 31 Maret 2019

PPTK



M, M. Kes

Rusnawati, SKM

199602 1 001

NIP. 19740321 200212 2 003

C. Evaluasi dan Analisa Kinerja

Metode penyimpulan Capaian Kinerja sbb

No	Capaian	Interprestasi
1	> 100%	Melebihi target
2	= 100%	Mencapai target
3	<100%	Tidak mencapai target

Berdasarkan tabel capaian kinerja triwulan I 2019 di atas, untuk capaian sub bagian umum dan kepegawaian mencapai 100% dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran : Terlaksananya pelayanan penatausahaan administrasi umum dan kepegawaian, capaian kinerja adalah 100%

Indikator Kinerja :

- Pelayanan administrasi sesuai target, tercapai 100%, Sementara kegiatan penyebarluasan informasi tugas pokok dan fungsi SKPD masih 0 % dikarenakan belum jadwal pelaksanaan.

D. Rencana Tindak Lanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi sasaran dan indikator sasaran yang tidak tercapai.

Sasaran yang tidak tercapai dari uraian di atas tidak ada, pelayanan administrasi sesuai standar sudah dapat direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan.

E. Tanggapan Atasan Langsung

<input type="checkbox"/>	Laporan Kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Laporan diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

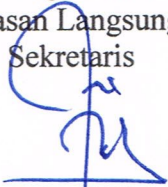
Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dengan mencontreng (y)

BAB III
PENUTUP

- A. Kesimpulan
Pada Triwulan I Tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran adalah 100%
- B. Permasalahan
Adanya mekanisme internal
Adanya mekanisme revisi anggaran Kas dengan dokumen pelaksanaan anggaran
Adanya mekanisme pengadaan barang dan jasa
Yang memperlambat proses realisasi dan penyerapan
- C. Saran/Masukan
Perbaikan termasuk merevisi beberapa peraturan agar permasalahan yang ada dapat teratasi dengan baik, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Kandangan, 31 Maret 2019

Mengetahui :
Atasan Langsung
Sekretaris


MOCH. ADIB, SKM, M. Kes
NIP. 19700624 199602 1 001

Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian
Dinas PPKBPPA Kab. HSS


RUSNAWATI, SKM
NIP. 19740321 200212 2 003

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : Hernyanti
NIP : 19820103 2007012 004
PANGKAT / GOL : Penata Muda / III/a
JABATAN : Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas
PPKBPPPA Kab. HSS
TRIWULAN : I Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

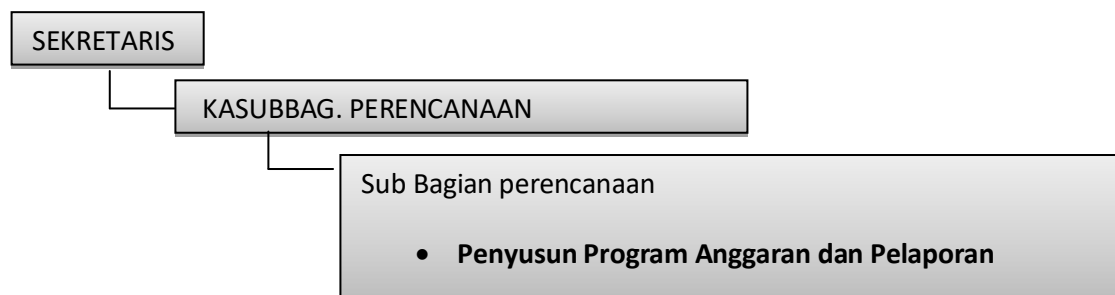
A. Uraian Tugas

Berdasarkan keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/201/KUM/2018 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bahwa tugas Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan Perencanaan adalah sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan dan mengirim lembar usulan kegiatan ke masing-masing unit kerja sebagai bahan penyusunan RKA
- b. Menerima dan mengumpulkan bahan usulan rencana kegiatan dan anggaran yang telah diisi oleh pejabat yang berwenang sebagai bahan penyusunan RKA
- c. Membuat dan menyerahkan konsep usulan rencana kegiatan dan anggaran kepada atasan untuk dikoreksi kebenarannya
- d. Menginput data usulan rencana kegiatan dan anggaran ke dalam aplikasi RKA sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
- e. Meminta pengesahan/persetujuan RKA kepada pejabat/Instansi yang berwenang untuk kelancaran pelaksanaan operasionalnya
- f. Mengirim usulan rencana kegiatan dan anggaran tahun depan dan semua kelengkapan data pendukung dari masing-masing unit kerja, sebagai bahan pembuatan RKA sesuai dengan tugas dan fungsi (tusi) yang mengacu pada Renstra SKPD

- g. Menerima dan mengumpulkan laporan akuntabilitas dari masing-masing unit kerja
- h. Menyortir dan mengklasifikasikan informasi dari laporan akuntabilitas kinerja masing-masing unit kerja
- i. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan
- j. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan lain LKPJ yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan
- k. Menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) murni dan perubahan
- l. Menyiapkan bahan e-planning
- m. Menyiapkan bahan e-budgeting
- n. Menyiapkan bahan e-monev

B. Struktur jabatan (peta jabatan)



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja :

Triwulan : I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terlaksananya kegiatan penyusunan program anggaran dan pelaporan yang meliputi penyiapan dan pengumpulan bahan, penginputan data, koordinasi dan penyusunan pelaporan, dibagian perencanaan, sesuai dengan pedoman kerja untuk tertib administrasi perencanaan	Jumlah data dan bahan usulan kegiatan yang dikirim ke masing-masing unit kerja sebagai bahan penyusunan RKA	Dokumen	1
		Jumlah bahan usulan rencana kegiatan dan anggaran yang telah diisi oleh pejabat yang berwenang	Dokumen	2
		Jumlah data usulan rencana kegiatan dan anggaran sesuai petunjuk dan pedoman yang berlaku	Dokumen	1
		Jumlah konsep usulan rencana kegiatan anggaran untuk dikoreksi atasan	Dokumen	1
		Jumlah bahan-bahan LPPD yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan	Dokumen	1
		Jumlah bahan e-planing	kegiatan	28
		Jumlah bahan e budgeting	Dokumen	2
		Jumlah bahan e monev	Dokumen	3

B. Capaian kinerja 2019

Triwulan : I

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1	Terlaksananya kegiatan penyusunan program anggaran dan pelaporan yang meliputi penyiapan dan pengumpulan bahan, penginputan data, koordinasi dan penyusunan pelaporan dibidang pengelola bahan perencanaan, sesuai dengan pedoman kerja untuk tertib administrasi perencanaan	Jumlah data dan bahan usulan kegiatan yang dikirim ke masing-masing unit kerja sebagai bahan penyusunan RKA	Dokumen	1	1	100
		Jumlah bahan usulan rencana kegiatan dan anggaran yang telah diisi oleh pejabat yang berwenang	Dokumen	2	2	100
		Jumlah data usulan rencana kegiatan dan anggaran sesuai petunjuk dan pedoman yang berlaku	Dokumen	1	1	100
		Jumlah konsep usulan rencana kegiatan anggaran untuk dikoreksi atasan	Dokumen	1	1	100
		Jumlah bahan-bahan LPPD yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan	Dokumen	1	1	100
		Jumlah bahan e-planing kegiatan	kegiatan	28	28	100
		Jumlah bahan e budgeting	Dokumen	2	2	100
		Jumlah bahan e monev	Dokumen	3	3	100
Rata-rata Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2019						100

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100 %	Melebihi Target
2	=100 %	Mencapai Target
3	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja triwulan I tahun 2019 di atas telah capai capaian kinerja Penyusunan program Anggaran dan Pelaporan dari 1 (satu) Sasaran dan 8 (delapan) indikator sasaran sudah dapat mencapai 100% atau telah sesuai target dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran : Terlaksananya kegiatan penyusunan yang meliputi penyiapan dan pengumpulan bahan, koordinasi dan penyusunan pelaporan dibagian penyusunan program anggaran dan pelaporan, sesuai dengan pedoman kerja untuk tertib administrasi perencanaan, capaian kinerja 100%.

Indikator Kinerja :

- Jumlah data dan bahan usulan kegiatan yang dikirim ke masing-masing unit kerja sebagai bahan penyusunan RKA, tercapai (100%).
- Jumlah bahan usulan rencana kegiatan dan anggaran yang telah diisi oleh pejabat yang berwenang, tercapai (100%)
- Jumlah data usulan rencana kegiatan dan anggaran sesuai petunjuk dan pedoman yang berlaku (100%)
- Jumlah konsep usulan rencana kegiatan anggaran untuk dikoreksi atasan, tercapai (100%)
- Jumlah bahan-bahan LPPD yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan, (100%)
- Jumlah bahan e-planing
- Jumlah bahan e budgeting
- Jumlah bahan e monev

D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi sasaran dan indicator yang tidak tercapai dari uraian diatas tidak ada. Semua berkas dan laporan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

E. Tanggapan Atasan Langsung

	Laporan kurang baik
√	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain.....(ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan :

Berdasarkan capaian triwulan I tahun 2019 diperoleh hasil capaian kinerja sasaran sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja kurang optimal berkat kerja sama dan koordinasi yang baik antar pelaksana dan atasan langsung serta bidang di Dinas PPKBPPA sehingga berkas dan laporan dapat diselesaikan tepat waktu

C. Saran/ masukan :

1. Lebih meningkatkan lagi kerjasama Bagian Perencanaan dengan Bidang
2. Lebih meningkatkan lagi koordinasi antar bawahan dan atasan langsung;
3. Data capaian kinerja yang dikirimkan harus dikoordinasikan terlebih dahulu kepada pejabat yang membidangi dan dengan pihak-pihak yang terkait.

Kandangan, 1 April 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kepala Sub Bagian Perencanaan
Perencanaan



Dessyanna Puspitasari, S. Psi
Penata (III/c)
NIP. 19801222 201101 2 005

Penyusunan Prog Angg Pelaporan
Perencanaan



Hernyanti, S. Sos
Penata Muda (III/a)
NIP. 19820103 200701 2 004

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : LINA RAINA
NIP : 19740717 199403 2 003
PANGKAT / GOL. : Penata Muda Tingkat I, III/b
JABATAN : Pengelola Kepegawaian
Dinas PPKBPPPA Kab. HSS
TRIWULAN : I Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

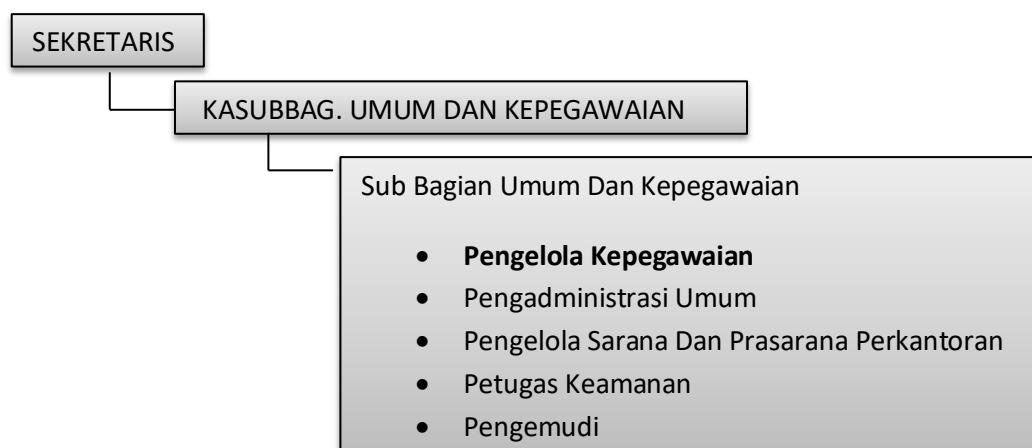
A. Uraian Tugas

Berdasarkan keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/201/KUM/2018 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bahwa tugas Pengelola Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- a. Meneliti dan mencatat dalam buku pen jagaan data pegawai yang akan mengalami perubahan kenaikan pangkat dan perubahan kenaikan gaji berkala sebagai acuan pelaksanaan tugas
- b. Menghimpun dan menyiapkan berkas lampiran untuk proses Kenaikan Pangkat dan perubahan kenaikan gaji berkala serta pelaksanaan prosesnya
- c. Menghimpun dan menyiapkan berkas lampiran untuk proses pensiun serta pelaksanaan prosesnya
- d. Meneliti, mencatat dan mendistribusikan SK Kenaikan Pangkat dan Kenaikan gaji lerkala kepada pegawai yang bersangkutan sebagai pemberitahuan
- e. Melakukan analisa kebutuhan diklat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi pegawai
- f. Meneliti dan menyusun konsep usulan mengikuti Diklat bagi pegawai yang telah memenuhi syarat dalam rangka pengembangan ketrampilan pegawai
- g. Menghimpun, meneliti dan mengadministrasikan dan memelihara naskah dinas kepegawaian perorangan yang mengalami perubahan, penambahan ke dalam file pribadi peroangan guna tertib administrasi.

- h. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (Nominatif) sesuai dengan perubahan data perorangguna mengetahui posisi pegawai yang bersangkutan
- i. Memproses dan mengadministrasikan surat ijin cuti pegawai
- j. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep rencana kebutuhan pegawai
- k. Mengelola absensi pegawai
- l. Mengelompokkan data kepegawaian sesuai masalahnya untuk memudahkan dalam pelaksanaan tugas
- m. Mengendalikan data kepegawaian yang telah dikelompokkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas
- n. Mengkoordinasikan dengan unit-unit kerja terkait dan atau instansi lain dalam rangka pengelolaan data kepegawaian agar dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal
- o. Menyajikan data kepegawaian sesuai permintaan pimpinan secara berkala sebagai bahan informasi
- p. Membuat laporan hasil kegiatan operasional sebagai bahan masukan untuk perbaikan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis

B. Struktur jabatan (peta jabatan)



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja :

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Triwulan : I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
				Januari	Februari	Maret
1	Terlaksananya kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan dibidang kepegawaian , sesuai dengan pedoman kerja untuk tertib administrasi kepegawaian	Jumlah bahan kerja dan data yang berkaitan dengan pengelolaan kepegawaian yang harus disiapkan	Dokumen	5	5	5
		Jumlah kegiatan koordinasi pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	2
		Jumlah kegiatan penyusunan laporan pengelolaan kepegawaian yang dilakukan	Laporan	1	1	1
		Jumlah penyusunan pelaporan pelaksanaan pekerjaan kepada atasan yang dilaksanakan	Laporan	1	1	1

B. Capaian kinerja 2019

Triwulan : I

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target			Realisasi	Capaian kinerja (%)
				Januari	Februari	Maret		
1	Terlaksananya kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan dibidang kepegawaian , sesuai dengan pedoman kerja untuk tertib administrasi kepegawaian	Jumlah bahan kerja dan data yang berkaitan dengan pengelolaan kepegawaian yang harus disiapkan	Dokumen	5	5	5	15	100
		Jumlah kegiatan koordinasi pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	2	6	100
		Jumlah kegiatan penyusunan laporan pengelolaan kepegawaian yang dilakukan	Laporan	1	1	1	3	100
		Jumlah penyusunan pelaporan pelaksanaan pekerjaan kepada atasan yang dilaksanakan	Laporan	1	1	1	3	100
Rata-rata Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2019								100

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100 %	Melebihi Target
2	=100 %	Mencapai Target
3	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja triwulan I tahun 2019 di atas telah capai capaian kinerja pengelola kepegawaian dari 1 (satu) Sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran sudah dapat mencapai 100% atau telah sesuai target dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran : Terlaksananya kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan dibidang kepegawaian , sesuai dengan pedoman kerja untuk tertib administrasi kepegawaian, capaian kinerja 100%.

Indikator Kinerja :

- Jumlah bahan kerja dan data yang berkaitan dengan pengelolaan kepegawaian yang harus disiapkan, tercapai (100%).
- Jumlah kegiatan koordinasi pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan, tercapai (100%)
- Jumlah kegiatan penyusunan laporan pengelolaan kepegawaian yang dilakukan, tercapai (100%)
- Jumlah penyusunan pelaporan pelaksanaan pekerjaan kepada atasan yang dilaksanakan, tercapai (100%)

D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi sasaran dan indicator yang tidak tercapai dari uraian diatas tidak ada. Semua berkas dan laporan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

E. Tanggapan Atasan Langsung

	Laporan kurang baik
√	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain.....(ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan :

Berdasarkan capaian triwulan I tahun 2019 diperoleh hasil capaian kinerja sasaran sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tidak ada berkat kerja sama dan koordinasi yang baik antar pelaksana dan atasan langsung serta antar bidang di Dinas PPKBPPA sehingga berkas dan laporan dapat diselesaikan tepat waktu

C. Saran/ masukan :

1. Lebih meningkatkan lagi koordinasi antar bawahan dan atasan langsung;
2. Data capaian kinerja yang dikirimkan harus dikoordinasikan terlebih dahulu kepada pejabat yang membidangi dan dengan pihak-pihak yang terkait.

Kandangan, 1 April 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kepala Sub Bagian Kepegawaian



Hj. RUSNAWATI, SKM
Penata (III/c)
NIP. 19740321 200212 2 003

Pengelola Kepegawaian



LINA RAINA
Penata Muda Tk. 1 (III/b)
NIP. 19740717 199403 2 003

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : Hj. ANETA LESFIANI, A. Md
NIP : 19700531 199103 2 006
PANGKAT /GOL : Penata Muda Tk. I/III/b
JABATAN : PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA
TRIWULAN : I Tahun 2019

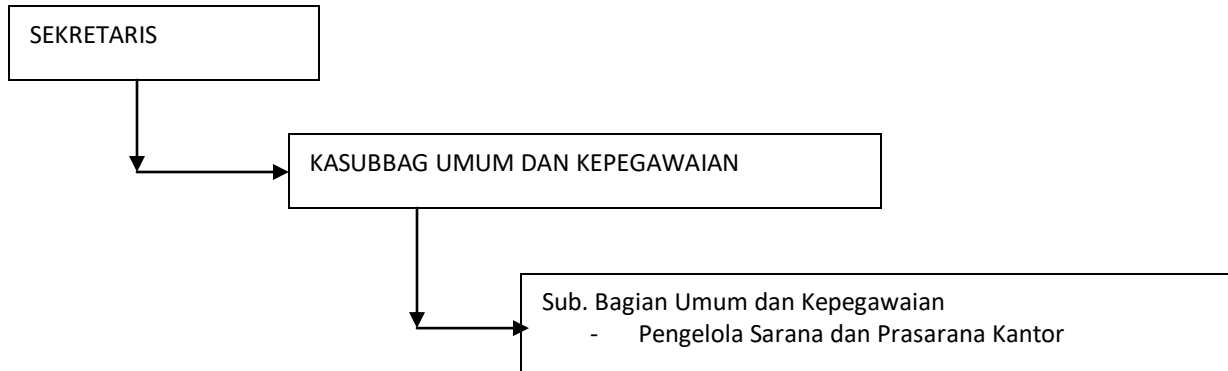
BAB I PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas

Berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/201/KUM/2018 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bahwa tugas Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor adalah sebagai berikut :

- a. Mengontrol keadaan gedung dan halaman kantor untuk mengetahui bagian yang rusak dan kotor untuk segera diperbaiki dan dibersihkan
- b. Menerima dan mengumpulkan laporan kerusakan gedung dan halaman kantor yang telah disetujui atasan untuk segera dikerjakan
- c. Mengecek kerusakan gedung dan halaman kantor yang dilaporkan untuk memastikan kebenarannya dan menentukan bahan yang perlu diganti atau memperbaiki
- d. Memperbaiki dan mengganti bagian gedung dan halaman kantor yang rusak agar menjadi baik
- e. Meminta tanda tangan pimpinan unit kerja atau melaporkan kerusakan sebagai tanda bukti perbaikan yang telah diselesaikan
- f. Memelihara kondisi gedung dan halaman kantor serta memperbaiki bagian gedung yang rusak agar tetap terpelihara dan terjaga kebersihannya
- g. Mengawasi pekerjaan perbaikan gedung dan halaman kantor yang diperbaiki oleh pihak lain untuk mengetahui perkembangan perbaikannya
- h. Melaporkan perbaikan gedung dan halaman kantor baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pemborong sebagai bahan masukkan bagi atasan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis
- j. Menyelenggarakan Akuntansi Barang Milik Negara di lingkungan Satuan Kerja
- k. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah
- l. Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang
- m. Menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang
- n. Mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang dalam berita acara
- o. Menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang
- p. Membuat Kartu Inventaris Ruangan semesteran dan tahunan
- q. Melakukan Stock Opname barang persediaan

B.Struktur Jabatan (peta jabatan)



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja
Triwulan I : 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terlaksananya kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan ,koordinasi dan penyusunan laporan di Bidang Sarana dan Prasarana kantor sesuai dengan petunjuk teknis untuk kelancaran tugas.	1. Jumlah bahan kerja dan data yang berkaitan dengan pengelolaan Program yang harus disiapkan	Dokumen	3
		2. Jumlah kegiatan Koodinasi pengelolaan yang di laksanakan	Kegiatan	3
		3. Jumlah Kegiatan penyusunan laporan pengelolaan yang di lakukan	Laporan	3
		4. Jumlah Penyusunan pelaporan pelaksanaan pekerjaan kepada atasan yang di laksanakan.	Laporan	3

B. Capaian Kinerja 2019
Triwulan I : 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	Terlaksananya kegiatan Pengelolaan dalam Penyiapan bahan	Jumlah bahan kerja dan data yang berkaitan dengan pengelolaan Program yang harus di siapkan	Dokumen	3	3	100
2	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah kegiatan Koodinasi pengelolaan yang di laksanakan	Kegiatan	3	3	100
3	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Kegiatan penyusunan laporan pengelolaan yang di lakukan	Laporan	3	3	100
4	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan yang di lakukan	Laporan	3	3	100

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	100%	Melebihi Target
2	=100%	Mencapai Target
3	100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan I tahun 2019 di atas rata –rata capaian kinerja Pengelola Sarana dan Prasarana kantor dari 1(satu) sasaran dan 4 (empat) indikator Sasaran dapat mencapai 100% dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran : Terlaksananya kegiatan Pengelolaan dalam Penyiapan bahan , capain kinerja 100%
Indikator Kinerja :
 - Jumlah bahan kerja dan data yang berkaitan dengan pengelolaan Program yang harus di siapkan , tercapai (100%).
2. Sasaran : Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Bidang Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor , capaian kinerja 100%
Indikator Kinerja :
 - Jumlah kegiatan Koodinasi pengelolaan yang di laksanakan , tercapai (100%)
3. Sasaran : Terlaksananya Penyusunan Laporan Kegiatan Bidang Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor , capaian kinerja 100%
Indikator Kinerja :
 - Jumlah Kegiatan penyusunan laporan pengelolaan yang di lakukan , tercapai (100%)
4. Sasaran : Terlaksananya Penyusunan Laporan Kegiatan Bidang Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor, capaian kinerja 100%
 - Indikator Kinerja : Jumlah Kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan yang di lakukan , tercapai (100%)

D. Rencana Tindak Lanjut

Capaian kinerja Triwulan I tahun 2019 di atas rata-rata capaian kinerja Pengurus Barang Pembantu

Prasarana Kantor dari 1 (satu) Sasaran dan 4 (empat) Indikator Sasaran dapat mencapai 100%.
Diharapkan untuk Triwulan berikutnya supaya dapat ditingkatkan dan lebih baik lagi

E.Tanggapan Atasan Langsung

Laporan Kurang Baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain.....(ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat di isi sesuai kebutuhan yang di perlukan dengan mencentang (v)

**BAB III
PENUTUP**

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan I 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100% mencapai target yang telah ditetapkan.


B. Permasalahan :

Permasalahan yang di hadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja : Pengiriman bahan / data oleh bidang kadang terlambat.

C. Saran / Masukan :

Ada percepatan dalam pengiriman bahan / data

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kasubbag Umum & Kepegawaian



Hj. Rusnawati, SKM
Penata / III/c
19742103 200212 2 003

Kandangan, 1 April 2019

Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor



Hj. Aneta Lesfiyani. A. Md
Penata Muda / III/b
19700531 199103 2 006

24

LINA RAINA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lina Raina', located in the top right corner of the page.

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : AHMAD SAYUTI
NIP : 19720901 200604 1 015
PANGKAT / GOL : Pengatur Tk.I (II/d)
JABATAN : Pengemudi pada Dinas PPKBPPPA
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
TRIBUNAN : I Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas

Berdasarkan hasil Analisis Jabatan di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bawah tugas Pengemudi adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan kegiatan menyiapkan bahan kelengkapan kerja yang berkaitan dengan peralatan kendaraan bermotor untuk kegiatan mengemudikan kendaraan dinas, sesuai dengan pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
- b. Melakukan kegiatan pelayanan antar jemput pejabat atau pegawai, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan agar pelaksanaan kerja berjalan lancar;
- c. Melakukan kegiatan pelayanan transportasi lainnya yang bersipat kedinasan, sesuai dengan juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan pengemudi;
- d. Membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada atasan sesuai dengan pedoman kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan bahan masukan serta kebijakan pimpinan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas agar kegiatan berjalan lancar.

B. Struktur jabatan (peta jabatan)



BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Tribulan : I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terlaksananya kegiatan menyiapkan bahan kelengkapan kerja yang berkaitan dengan peralatan kendaraan bermotor untuk kegiatan mengemudikan kendaraan dinas, sesuai dengan pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan	Jumlah bahan kelengkapan kerja yang berkaitan dengan peralatan kendaraan bermotor untuk kegiatan mengemudikan kendaraan dinas, sesuai dengan pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan	Peralatan kerja	55
2	Terlaksananya kegiatan pelayanan antar jemput pejabat atau pegawai, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan agar pelaksanaan kerja berjalan lancar	Jumlah kegiatan pelayanan antar jemput pejabat atau pegawai, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan agar pelaksanaan kerja berjalan lancar	Kegiatan	55
3	Terlaksananya kegiatan pelayanan transportasi lainnya yang bersipat kedinasan, sesuai dengan juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan pengemudi	Jumlah kegiatan pelayanan transportasi lainnya yang bersipat kedinasan, sesuai dengan juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan pengemudi	Kegiatan	6
4	Terlaksananya pembuatan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada atasan sesuai dengan pedoman kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan bahan masukan serta kebijakan pimpinan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada atasan sesuai dengan pedoman kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan bahan masukan serta kebijakan pimpinan	Laporan	3
5	Terlaksananya tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas agar kegiatan berjalan lancar	Jumlah tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas agar kegiatan berjalan lancar	Kegiatan	55

B. Capaian kinerja 2019

Tribulan : I

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1	Terlaksananya kegiatan menyiapkan bahan kelengkapan kerja yang berkaitan dengan peralatan kendaraan bermotor untuk kegiatan mengemudikan kendaraan dinas, sesuai dengan pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan	Jumlah bahan kelengkapan kerja yang berkaitan dengan peralatan kendaraan bermotor untuk kegiatan mengemudikan kendaraan dinas, sesuai dengan pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan	Peralatan kerja	55	55	100
2	Terlaksananya kegiatan pelayanan antar jemput pejabat atau pegawai, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan agar pelaksanaan kerja berjalan lancar	Jumlah kegiatan pelayanan antar jemput pejabat atau pegawai, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan agar pelaksanaan kerja berjalan lancar	Kegiatan	55	55	100
3	Terlaksananya kegiatan pelayanan transportasi lainnya yang bersipat kedinasan, sesuai dengan juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan pengemudi	Jumlah kegiatan pelayanan transportasi lainnya yang bersipat kedinasan, sesuai dengan juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan pengemudi	Kegiatan	6	6	100
4	Terlaksananya pembuatan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada atasan sesuai dengan pedoman kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan bahan masukan serta kebijakan pimpinan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada atasan sesuai dengan pedoman kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan bahan masukan serta kebijakan pimpinan	Laporan	3	3	100

5	Terlaksanannya tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas agar kegiatan berjalan lancar	Jumlah tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas agar kegiatan berjalan lancar	Kegiatan	55	55	100
Rata-rata Capaian Kinerja Tribulan I Tahun 2019						100

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100 %	Melebihi Target
2	=100 %	Mencapai Target
3	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja tribulan I tahun 2019 di atas rata-rata capaian kinerja Pengemudi dari 5 (lima) sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja. Sasaran dapat mencapai 100% atau mencapai target dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran : Terlaksanannya kegiatan menyiapkan bahan kelengkapan kerja yang berkaitan dengan peralatan kendaraan bermotor untuk kegiatan mengemudikan kendaraan dinas, sesuai dengan pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, capaian kinerja 100%.

Indikator Kinerja :

- Jumlah kegiatan menyiapkan bahan kelengkapan kerja yang berkaitan dengan peralatan kendaraan bermotor untuk kegiatan mengemudikan kendaraan dinas, sesuai dengan pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, mencapai target (100%).

2. Sasaran : Terlaksanannya kegiatan pelayanan antar jemput pejabat atau pegawai, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan agar pelaksanaan kerja berjalan lancar, capaian kinerja 100%.

Indikator Kinerja :

- Jumlah kegiatan pelayanan antar jemput pejabat atau pegawai, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan agar pelaksanaan kerja berjalan lancar, mencapai target (100%)

3. Sasaran : Terlaksanannya kegiatan pelayanan transportasi lainnya yang bersipat kedinasan, sesuai dengan juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan pengemudi, capaian kinerja 100%.

Indikator Kinerja :

- Jumlah kegiatan pelayanan transportasi lainnya yang bersipat kedinasan, sesuai dengan juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan pengemudi, mencapai target (100%).
4. Sasaran : Terlaksananya pembuatan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada atasan sesuai dengan pedoman kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan bahan masukan serta kebijakan pimpinan, capaian kinerja 100%.
- Indikator kinerja :
- Jumlah laporan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada atasan sesuai dengan pedoman kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan bahan masukan serta kebijakan pimpinan, mencapai target (100%)
5. Sasaran : Terlaksananya tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas agar kegiatan berjalan lancar, capaian kinerja 100%.
- Indikator kinerja :
- Jumlah laporan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas agar kegiatan berjalan lancar, mencapai target (100%)

D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk meningkatkan sasaran dan indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya kegiatan menyiapkan bahan kelengkapan kerja yang berkaitan dengan peralatan kendaraan bermotor untuk kegiatan mengemudikan kendaraan dinas, sesuai dengan pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Indikator Kinerja : jumlah kegiatan menyiapkan bahan kelengkapan kerja yang berkaitan dengan peralatan kendaraan bermotor untuk kegiatan mengemudikan kendaraan dinas, sesuai dengan pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, dengan cara menyimpan bahan kerja dan peralatan pada tempatnya (lemari atau meja).
2. Terlaksananya kegiatan pelayanan antar jemput pejabat atau pegawai, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan agar pelaksanaan kerja berjalan lancar. Indikator Kinerja : jumlah kegiatan pelayanan antar jemput pejabat atau pegawai, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan agar pelaksanaan kerja berjalan lancar, dengan cara melakukan pelayanan prima dan tepat waktu.
3. Terlaksananya kegiatan pelayanan transportasi lainnya yang bersipat kedinasan, sesuai dengan juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan pengemudi. Indikator Kinerja : jumlah kegiatan pelayanan transportasi lainnya yang bersipat kedinasan, sesuai dengan juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan pengemudi, dengan cara melakukan pelayanan prima dan tepat waktu.
4. Terlaksananya pembuatan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada atasan sesuai dengan pedoman kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan bahan masukan serta kebijakan pimpinan. Indikator kinerja : jumlah laporan hasil pelaksanaan pekerjaan

kepada atasan sesuai dengan pedoman kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan bahan masukan serta kebijakan pimpinan, dengan cara membuat penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang dibuat pada setiap akhir tahun pada tahun berjalan.

5. Terlaksanannya tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas agar kegiatan berjalan lancar. Indikator kinerja : jumlah laporan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas agar kegiatan berjalan lancar, dengan cara melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai petunjuk atasan yang berwenang.

E. Tanggapan Atasan Langsung

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang ().

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Tribulan I tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100% (mencapai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, antara lain :

tidak ada lemari atau meja untuk menyimpan bahan kerja dan peralatan pada tempatnya.

C. Saran/ masukan :

Adanya lemari atau meja untuk menyimpan bahan kerja dan peralatan pada tempatnya.

Tanggal, April 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian,



Hj. RUSNAWATI, SKM
Penata III/c
NIP. 19740321 200212 2 003

Pengemudi,



AHMAD SAYUTI
Pengatur Tk.I(II/d)
NIP. 19720901 200604 1 015

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : RIDUANSYAH
NIP : 19820108 201001 1 004
PANGKAT / GOL. : Pengatur Muda Tingkat I, II/b
JABATAN : Petugas Keamanan Kantor
Dinas PPKBPPPA Kab.HSS
TRIWULAN : I Tahun 2019

BAB I

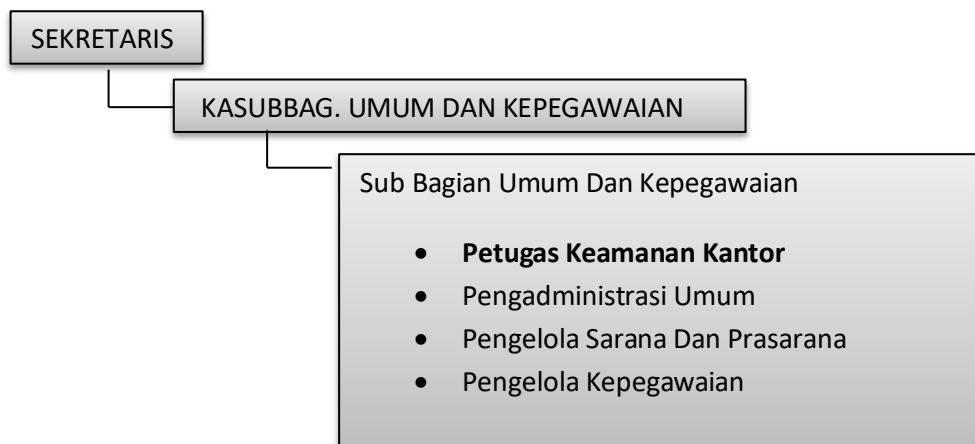
PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas

Berdasarkan keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/201/KUM/2018 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bahwa tugas Petugas Keamanan Kantor adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga kantor pada waktu malam hari mulai pukul 19.00 WIB s/d 06,30 WIB setiap har
- b. Melakukan pengontrolan lingkungan sekitar kantor untuk memastikan kondisi keamanan kantor
- c. Menyalakan & mematikan lampu kantor setelah jaga malam
- d. Memeriksa kunci-kunci pintu dan pagar kantor
- e. Membuat laporan tentang kejadian-kejadian penting selama masa penjagaan pada buku laporan
- f. Mengisi buku serah terima jaga tentang kondisi / keadaan kantor saat berjaga, baik dengan penjaga keamanan sebelum / sesudahnya maupun dengan pramu kantor
- g. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh atasan sesuai bidangnya baik lisan maupun tertulis

B. Struktur jabatan (peta jabatan)



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja :

Triwulan : II

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
				Januari	Februari	Maret
1	Terlaksananya tugas yang meliputi kegiatan keamanan, penertiban untuk kenyamanan dilingkungan kantor sesuai dengan petunjuk pelaksanaan agar kegiatan berjalan lancar	Jumlah bahan kerja dan data yang berkaitan dengan bidang keamanan yang harus disiapkan	Peralatan	1	1	1
		Jumlah kegiatan pengamanan kantor	Kegiatan	1	1	1
		Jumlah kegiatan penertiban untuk kenyamanan lingkungan kantor	Kegiatan	1	1	1
		Jumlah penyusunan pelaporan pelaksanaan pekerjaan kepada atasan yang dilaksanakan	Laporan	1	1	1

B. Capaian kinerja 2019

Triwulan : I

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target			Realisasi	Capaian kinerja (%)
				Januari	Februari	Maret		
1	Terlaksananya tugas yang meliputi kegiatan keamanan, penertiban untuk kenyamanan dilingkungan kantor sesuai dengan petunjuk pelaksanaan agar kegiatan berjalan lancar	Jumlah bahan kerja dan data yang berkaitan dengan bidang keamanan yang harus disiapkan	Peralatan	3	3	3	9	100
		Jumlah kegiatan pengamanan kantor	Kegiatan	1	1	1	3	100
		Jumlah kegiatan penertiban untuk kenyamanan lingkungan kantor	Kegiatan	1	1	1	3	100
		Jumlah penyusunan pelaporan pelaksanaan pekerjaan kepada atasan yang dilaksanakan	Laporan	1	1	1	3	100
Rata-rata Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2019							100	

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100 %	Melebihi Target
2	=100 %	Mencapai Target
3	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja triwulan I tahun 2019 di atas telah capai capaian kinerja Petugas Keamanan Kantor dari 1 (satu) Sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran sudah dapat mencapai 100% atau telah sesuai target dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran : Terlaksananya tugas yang meliputi kegiatan keamanan, penertiban untuk kenyamanan dilingkungan kantor sesuai dengan petunjuk pelaksanaan agar kegiatan berjalan lancar, capaian kinerja 100%.

Indikator Kinerja :

- Jumlah bahan kerja dan data yang berkaitan dengan bidang keamanan yang harus disiapkan, tercapai (100%).
- Kegiatan pengamanan kantor, tercapai (100%)
- Jumlah kegiatan penertiban untuk kenyamanan lingkungan kantor, tercapai (100%)
- Jumlah penyusunan pelaporan pelaksanaan pekerjaan kepada atasan yang dilaksanakan, tercapai (100%)

D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi sasaran dan indicator yang tidak tercapai dari uraian diatas tidak ada. Semua berkas dan laporan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

E. Tanggapan Atasan Langsung

	Laporan kurang baik
√	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain.....(ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan :

Berdasarkan capaian triwulan I tahun 2019 diperoleh hasil capaian kinerja sasaran sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tidak ada berkat kerja sama dan koordinasi yang baik antar pelaksana dan atasan langsung serta antar bidang di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Hulu Sungai Selatan sehingga berkas dan laporan dapat diselesaikan tepat waktu

C. Saran/ masukan :

1. Lebih meningkatkan lagi koordinasi antar bawahan dan atasan langsung;
2. Data capaian kinerja yang dikirimkan harus dikoordinasikan terlebih dahulu kepada pejabat yang membidangi dan dengan pihak-pihak yang terkait.

Kandangan, 1 April 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kepala Sub Bagian Kepegawaian



Hj. RUSNAWATI, SKM
Penata (III/c)
NIP. 19740321 200212 2 003

Petugas Keamanan Kantor



RIDUANSYAH
Pengatur Muda (II/a)
NIP. 19820108 201001 1 004

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : AKHMAD NORMALIADI, S. Sos
NIP : 19781111 200604 1 021
PANGKAT / GOL : Penata Muda Tk. I (III/b)
JABATAN : Bendahara Pengeluaran pada Dinas PPKBPPPA Kab. HSS
TRIWULAN : I Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

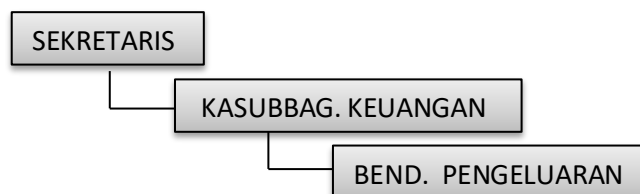
A. Uraian Tugas

Berdasarkan keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa tugas bahwa tugas Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

- a. Mempelajari peraturan yang berhubungan dengan tugas bendahara sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas dan untuk mencegah terjadinya kesalahan
- b. Mempelajari DPA dan Petunjuk Operasional (PO) agar dapat mengetahui macam dan jumlah kegiatan untuk tahun anggaran yang berlaku
- c. Membuat dan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk mendapatkan SP2D baik SP2D GO maupun SP2D LS
- d. Menyetorkan dan menyelesaikan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atau Giro ke Bank tepat pada waktu yang ditentukan
- e. Menerima, membukukan dan menyimpan uang yang diterima dari Bank, Kas Negara atau tagihan dari pihak lain untuk menjaga keamanan uang
- f. Membayarkan uang sesuai dengan mata anggaran dan ketentuan yang berlaku atas persetujuan PPK/KPA
- g. Membukukan semua penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- h. Menyetorkan pajak ke Kas Negara seperti pajak Pendapatan dan PPH sesuai dengan ketentuan
- i. Membukukan semua penerimaan dan pengeluaran anggaran belanja rutin untuk Tertib administrasi
- j. Menyimpan semua bukti penerimaan dan pengeluaran serta pertanggung jawabannya sebagai tanda bukti untuk pemeriksa keuangan apabila sewaktu-waktu ada pemeriksaan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis

B. Struktur jabatan (peta jabatan)



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja :

Triwulan : I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terlaksananya kegiatan penerimaan, pengeluaran dan pembukuan terkait dengan transaksi keuangan, sesuai dengan pedoman kerja untuk tertib administrasi keuangan	Jumlah bahan kerja dan data yang berkaitan dengan pengelolaan program keuangan yang harus disiapkan	Dokumen	45
		Jumlah kegiatan penerimaan keuangan	Kegiatan	6
		Jumlah kegiatan pengeluaran keuangan	Laporan	9
		Jumlah kegiatan pembukuan transaksi keuangan	Laporan	6
		Jumlah penyusunan pelaporan pelaksanaan pekerjaan kepada	Laporan	6

B. Capaian kinerja 2019

Triwulan : I

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1	Terlaksananya kegiatan penerimaan, pengeluaran dan pembukuan terkait dengan transaksi keuangan, sesuai dengan pedoman kerja untuk tertib administrasi keuangan	Jumlah bahan kerja dan data yang berkaitan dengan pengelolaan program keuangan yang harus disiapkan	Dokumen	45	45	100
		Jumlah kegiatan penerimaan keuangan	Kegiatan	6	6	100
		Jumlah kegiatan pengeluaran keuangan	Laporan	9	9	100
		Jumlah kegiatan pembukuan transaksi keuangan	Laporan	6	6	100
		Jumlah penyusunan pelaporan pelaksanaan pekerjaan kepada atasan yang dilaksanakan	Laporan	6	6	100
<i>Rata-rata Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2019</i>						100

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100 %	Melebihi Target
2	=100 %	Mencapai Target
3	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja triwulan I tahun 2019 di atas telah capai capaian kinerja Bendahara Pengeluaran dari 1 (satu) Sasaran dan 5 (lima) indikator sasaran sudah dapat mencapai 100% atau telah sesuai target dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran : Terlaksananya kegiatan penerimaan, pengeluaran dan pembukuan terkait dengan transaksi keuangan, sesuai dengan pedoman kerja untuk tertib administrasi keuangan, capaian kinerja 100%.

Indikator Kinerja :

- Jumlah bahan kerja dan data yang berkaitan dengan pengelolaan program keuangan yang harus disiapkan, tercapai (100%).
- Jumlah kegiatan penerimaan keuangan, tercapai (100%)
- Jumlah kegiatan pengeluaran keuangan, tercapai (100%)
- Jumlah kegiatan pembukuan transaksi keuangan, tercapai (100%)
- Jumlah penyusunan pelaporan pelaksanaan pekerjaan kepada atasan yang dilaksanakan, tercapai (100%)

D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi sasaran dan indicator yang tidak tercapai dari uraian diatas tidak ada. Semua berkas dan laporan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

E. Tanggapan Atasan Langsung

	Laporan kurang baik
√	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain.....(ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan :

Berdasarkan capaian triwulan I tahun 2019 diperoleh hasil capaian kinerja sasaran sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tidak ada berkat kerja sama dan koordinasi yang baik antar pelaksana dan atasan langsung serta antar bidang di Dinas PPKBPPA Kab. HSS sehingga berkas dan laporan dapat diselesaikan tepat waktu

C. Saran/ masukan :

1. Perlunya mempertahankan kinerja yang ada karena telah mampu mencapai target yang ditetapkan;
2. Data capaian kinerja yang dikirimkan harus dikoordinasikan terlebih dahulu kepada pejabat yang membidangi dan dengan pihak-pihak yang terkait.
3. Dalam pelaksanaannya harus didukung oleh sarana dan prasarana yang menunjang

Kandangan, 1 April 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung
Plh. Kepala Sub Bagian Keuangan



DESSYANNA PUSPITASARI, S. Psi
Penata (III/c)
NIP. 19801222 201001 2 005

Bendahara Pengeluaran



AKHMAD NORMALIADI, S. Sos
Penata Muda Tk. 1 (III/b)
NIP. 19781111 200604 1 021

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : RUSMANSYAH
NIP : 19830813 201001 1 004
PANGKAT / GOL : Pengatur /IIC
JABATAN : Pengelola Keuangan pada Dinas PPKBPPPA HSS
TRIWULAN : I Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

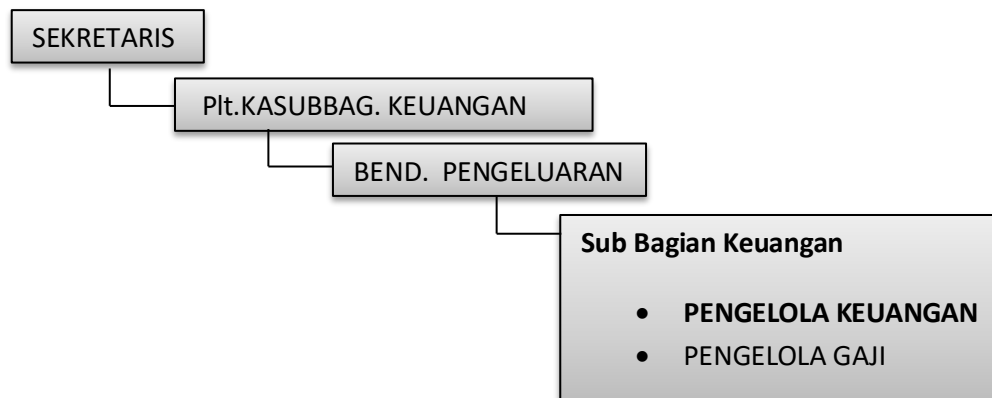
A. Uraian Tugas

Berdasarkan keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa tugas bahwa tugas Pengelola Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengagendakan SPP dan Surat Setoran Pajak sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;
- b. Menyusun dan membuat rincian pengambilan uang dari Bendahara sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai alat kendali;
- c. Membukukan setiap transaksi ke dalam Buku Kas Umum, Buku Kas Harian, Buku Bank, Buku Panjar, Buku Wasdit dan Buku Pajak sesuai sistem pembukuan agar mudah dikendalikan;
- d. Melaporkan Pajak Bulanan (SPT Masa) dan Pajak Tahunan (SPT Tahunan) kepada kantor pajak sebagai bukti pembayaran pajak;
- e. Membuat bukti potong pajak penghasilan Pasal 21 sesuai peraturan perpajakan sebagai bukti pembayaran pajak penghasilan
- f. Menerima dan mengumpulkan SPM dan SP2D untuk dicatat ke dalam buku kendali dan diinput ke aplikasi SAI sebagai bahan penyusunan laporan tahunan
- g. Menerima dan mempelajari data objek kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka membuat objek kerja

- h. Membuat laporan realisasi anggaran
- i. Menyiapkan data beban kerja yang telah diselesaikan untuk dituangkan ke dalam konsep laporan tahunan
- j. Melaporkan kepada pimpinan bahan konsep laporan tahunan untuk dikoreksi kebenarannya dan mengadakan perbaikan konsep
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis

B. Struktur jabatan (peta jabatan)



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja :

Triwulan : I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terlaksananya kegiatan pengelolaan yang meliputi persiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan dibidang pengelolaan keuangan, sesuai dengan pedoman kerja untuk tertib administrasi keuangan	Jumlah SPP dan Surat Setoran Pajak sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi	Dokumen	15
		JumlahSPM dan SP2D untuk dicatat kedalam buku kendali	Dokumen	15
		Jumlah pengarsipan laporan bulanan	Dokumen	3
		Jumlah mengarsipkan SPJ	SPJ	300
		Jumlah mengarsipkan SP2D	Dokumen	15
		Jumlah mengarsipkan SPM	Dokumen	15

B. Capaian kinerja 2019

Triwulan : I

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1	Terlaksananya kegiatan pengelolaan yang meliputi pernyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan dibidang pengelolaan keuangan, sesuai dengan pedoman kerja untuk tertib administrasi keuangan	Jumlah SPP dan Surat Setoran Pajak sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi	Dokumen	15	15	100
		JumlahSPM dan SP2D untuk dicatat kedalam buku kendali	Dokumen	15	15	100
		Jumlah pengarsipan laporan bulanan	Dokumen	3	3	100
		Jumlah mengarsipkan SPJ	SPJ	300	300	100
		Jumlah mengarsipkan SP2D	Dokumen	15	15	100
		Jumlah mengarsipkan SPM	Dokumen	15	15	100

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100 %	Melebihi Target
2	=100 %	Mencapai Target
3	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja triwulan I tahun 2019 di atas telah capai capaian kinerja pengelola keuangan dari 1 (satu) Sasaran dan 6 (enam) indikator sasaran sudah dapat mencapai 100% atau telah sesuai target dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran : Terlaksananya kegiatan pengelolaan yang meliputi pernyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan dibidang pengelolaan keuangan, sesuai dengan pedoman kerja untuk tertib administrasi keuangan, capaian kinerja 100%.

Indikator Kinerja :

- Jumlah SPP dan surat setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi, tercapai (100%).
- Jumlah SPM dan SP2D untuk dicatat kedalam Buku Kendali, tercapai (100%)
- Jumlah Pengarsipan Laporan Bulanan, tercapai (100%)
- Jumlah mengarsipkan SPJ, tercapai (100%)
- Jumlah mengarsipkan SP2D, tercapai (100%)
- Jumlah mengarsipkan SPM, tercapai (100%)

D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi sasaran dan indicator yang tidak tercapai dari uraian diatas tidak ada. Semua berkas dan laporan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

E. Tanggapan Atasan Langsung

	Laporan kurang baik
√	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain.....(ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan :

Berdasarkan capaian triwulan I tahun 2019 diperoleh hasil capaian kinerja sasaran sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tidak ada berkat kerja sama dan koordinasi yang baik antar pelaksana dan atasan langsung serta antar bidang di Dinas PPKBPPPA sehingga berkas dan laporan dapat diselesaikan tepat waktu

C. Saran/ masukan :

1. Perlunya mempertahankan kinerja yang ada karena telah mampu mencapai target yang ditetapkan;
2. Data capaian kinerja yang dikirimkan harus dikoordinasikan terlebih dahulu kepada pejabat yang membidangi dan dengan pihak-pihak yang terkait.
3. Dalam pelaksanaannya harus didukung oleh sarana dan prasarana yang menunjang

Kandangan, 1 April 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung
Plh. Kepala Sub Bagian Keuangan



Dessyanna Puspitasari, S. Psi
Penata (III/c)
NIP. 19801222 201101 2 005

Pengelola Keuangan



RUMANSYAH
Pengatur
NIP. 19781111 201001 1 004

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : MAGDALENA, SE
NIP : 19630920 200604 2 002
PANGKAT / GOL : Penata Muda (III/a)
JABATAN : Pengelola Keuangan pada Dinas PPKBPPPA HSS
TRIWULAN : I Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

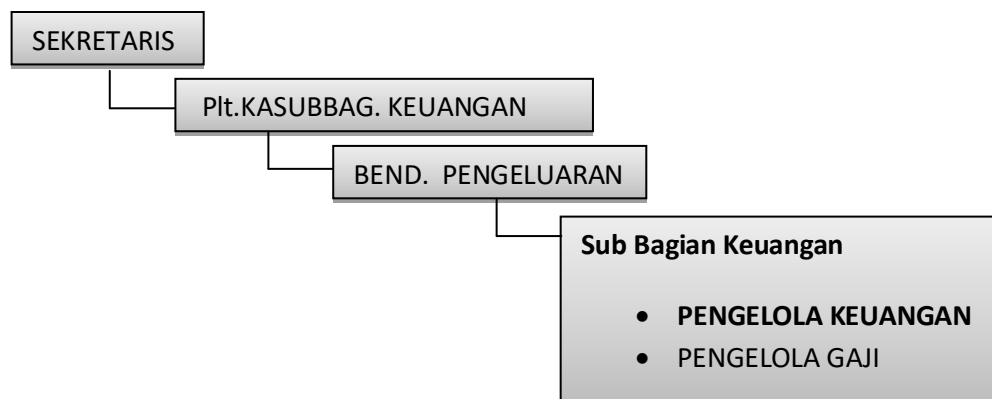
A. Uraian Tugas

Berdasarkan keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/201/KUM/2018 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bahwa tugas Pengelola Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengagendakan SPP dan Surat Setoran Pajak sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;
- b. Menyusun dan membuat rincian pengambilan uang dari Bendahara sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai alat kendali;
- c. Membukukan setiap transaksi ke dalam Buku Kas Umum, Buku Kas Harian, Buku Bank, Buku Panjar, Buku Wasdit dan Buku Pajak sesuai sistem pembukuan agar mudah dikendalikan;
- d. Melaporkan Pajak Bulanan (SPT Masa) dan Pajak Tahunan (SPT Tahunan) kepada kantor pajak sebagai bukti pembayaran pajak;
- e. Membuat bukti potong pajak penghasilan Pasal 21 sesuai peraturan perpajakan sebagai bukti pembayaran pajak penghasilan
- f. Menerima dan mengumpulkan SPM dan SP2D untuk dicatat ke dalam buku kendali dan diinput ke aplikasi SAI sebagai bahan penyusunan laporan tahunan
- g. Menerima dan mempelajari data objek kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka membuat objek kerja

- h. Membuat laporan realisasi anggaran
- i. Menyiapkan data beban kerja yang telah diselesaikan untuk dituangkan ke dalam konsep laporan tahunan
- j. Melaporkan kepada pimpinan bahan konsep laporan tahunan untuk dikoreksi kebenarannya dan mengadakan perbaikan konsep
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis

B. Struktur jabatan (peta jabatan)



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja :

Triwulan : I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terlaksananya kegiatan pengelolaan yang meliputi persiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan dibidang pengelolaan keuangan, sesuai dengan pedoman kerja untuk tertib administrasi keuangan	Jumlah SPP dan Surat Setoran Pajak sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi	Dokumen	15
		JumlahSPM dan SP2D untuk dicatat kedalam buku kendali	Dokumen	15
		Jumlah pengarsipan laporan bulanan	Dokumen	3
		Jumlah mengarsipkan SPJ	SPJ	300
		Jumlah mengarsipkan SP2D	Dokumen	15
		Jumlah mengarsipkan SPM	Dokumen	15

B. Capaian kinerja 2019

Triwulan : I

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1	Terlaksananya kegiatan pengelolaan yang meliputi persiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan dibidang pengelolaan keuangan, sesuai dengan pedoman kerja untuk tertib administrasi keuangan	Jumlah SPP dan Surat Setoran Pajak sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi	Dokumen	15	15	100
		JumlahSPM dan SP2D untuk dicatat kedalam buku kendali	Dokumen	15	15	100
		Jumlah pengarsipan laporan bulanan	Dokumen	3	3	100
		Jumlah mengarsipkan SPJ	SPJ	300	300	100
		Jumlah mengarsipkan SP2D	Dokumen	15	15	100
		Jumlah mengarsipkan SPM	Dokumen	15	15	100
						100

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100 %	Melebihi Target
2	=100 %	Mencapai Target
3	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja triwulan I tahun 2019 di atas telah capai capaian kinerja pengelola keuangan dari 1 (satu) Sasaran dan 6 (enam) indikator sasaran sudah dapat mencapai 100% atau telah sesuai target dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran : Terlaksananya kegiatan pengelolaan yang meliputi persiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan dibidang pengelolaan keuangan, sesuai dengan pedoman kerja untuk tertib administrasi keuangan, capaian kinerja 100%.

Indikator Kinerja :

- Jumlah SPP dan surat setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi, tercapai (100%).
- Jumlah SPM dan SP2D untuk dicatat kedalam Buku Kendali, tercapai (100%)
- Jumlah Pengarsipan Laporan Bulanan, tercapai (100%)
- Jumlah mengarsipkan SPJ, tercapai (100%)
- Jumlah mengarsipkan SP2D, tercapai (100%)
- Jumlah mengarsipkan SPM, tercapai (100%)

D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi sasaran dan indicator yang tidak tercapai dari uraian diatas tidak ada. Semua berkas dan laporan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

E. Tanggapan Atasan Langsung

	Laporan kurang baik
√	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain.....(ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan :

Berdasarkan capaian triwulan I tahun 2019 diperoleh hasil capaian kinerja sasaran sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tidak ada berkat kerja sama dan koordinasi yang baik antar pelaksana dan atasan langsung serta antar bidang di Dinas PPKBPPA sehingga berkas dan laporan dapat diselesaikan tepat waktu

C. Saran/ masukan :

1. Perlunya mempertahankan kinerja yang ada karena telah mampu mencapai target yang ditetapkan;
2. Data capaian kinerja yang dikirimkan harus dikoordinasikan terlebih dahulu kepada pejabat yang membidangi dan dengan pihak-pihak yang terkait.
3. Dalam pelaksanaannya harus didukung oleh sarana dan prasarana yang menunjang

Kandangan, 1 April 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung
Pih. Kepala Sub Bagian Keuangan



Dessyanna Puspitasari, S. Psi
Penata (III/c)
NIP. 19801222 201101 2 005

Pengelola Keuangan



Magdalena, SE
Penata Muda (III/a)
NIP. 19630920 200604 2 002

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : DARMIYATIE
NIP : 197702051997032003
PANGKAT / GOL. : Penata Muda Tingkat I, III/b
JABATAN : Penyusun Pencatatan dan Pelaporan KB
Dinas PPKBPPPA Kab. HSS
TRIWULAN : I Tahun 2019

BAB I

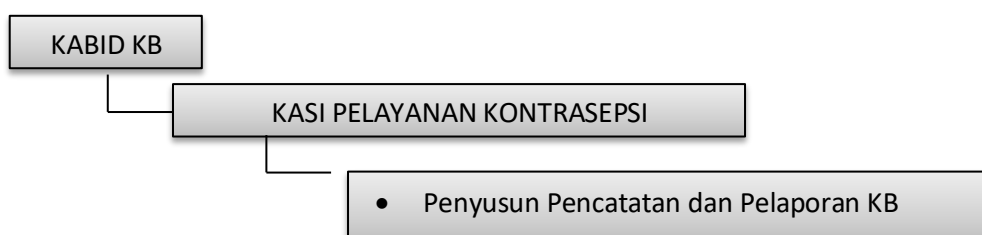
PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas

Berdasarkan keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/201/KUM/2018 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bahwa tugas Penyusun Pencatatan dan Pelaporan KB adalah sebagai berikut:

- a. Menerima data objek kerja di bidang pencatatan dan pelaporan data KB
- b. Mengklasifikasikan data objek kerja di bidang pencatatan dan pelaporan data KB
- c. Menelaah data objek kerja di bidang pencatatan dan pelaporan data KB
- d. Merekapitulasi sesuai kebutuhan
- e. Membuat Berkas SPJ
- f. Penyerahan
- g. Mengarsipkan
- h. Menggolongkan
- i. Menyimpan
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan

B. Struktur jabatan (peta jabatan)



AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja :

Triwulan : I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terlaksananya kegiatan Pelayanan Peserta KB Sesuai Standar	Jumlah konsep rencana kegiatan seksi pelayanan kontrasepsi yang disiapkan	Konsep	1
		Jumlah data dan bahan pelaksanaan pelayanan kontrasepsi yang disiapkan	paket	1
		Jumlah Petunjuk teknis, SOP dan pembinaan mengenal strategi pelaksanaan pengendalian dan pembinaan akseptor KB dan pelayanan kontrasepsi yang diarsipkan	Dokumen	1
		Jumlah konsep / rencana program operasional dan pengendalian mengenai pembinaan serta strategi pelaksanaan pengendalian dan pembinaan akseptor KB dan pelayanan kontrasepsi yang diarsipkan	konsep	1
		Jumlah kegiatan pelayanan kontrasepsi yang dilaksanakan	Kegiatan	1
		Jumlah pengelolaan, penyimpanan, penyaluran / distribusi alat kontrasepsi pada gudang Alokon KB yang dilaporkan	Laporan	1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
		Jumlah laporan evaluasi dan analisis pelaksanaan kegiatan, pelayanan kontrasepsi, dan pengelolaan alat dan obat kontrasepsi yang diarsipkan ;	laporan	1
		Jumlah dokumen pengetikan dan administrasi kerjasama dengan instansi lembaga swadaya masyarakat, kader dalam pelaksanaan pelayanan kontrasepsi	Dokumen	1

B. Capaian kinerja 2019

Triwulan : I

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1	Terlaksananya kegiatan Pelayanan Peserta KB Sesuai Standar	Jumlah konsep rencana kegiatan seksi pelayanan kontrasepsi yang disiapkan	Konsep	1	1	100
		Jumlah data dan bahan pelaksanaan pelayanan kontrasepsi yang disiapkan	paket	1	1	100
		Jumlah Petunjuk teknis, SOP dan pembinaan mengenal strategi pelaksanaan pengendalian dan pembinaan akseptor KB dan pelayanan kontrasepsi yang diarsipkan	Dokumen	1	1	100

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
		Jumlah konsep / rencana program operasional dan pengendalian mengenai pembinaan serta strategi pelaksanaan pengendalian dan pembinaan akseptor KB dan pelayanan kontrasepsi yang diarsipkan	konsep	1	1	100
		Jumlah kegiatan pelayanan kontrasepsi yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	100
		Jumlah jumlah pengelolaan, penyimpanan, penyaluran / distribusi alat kontrasepsi pada gudang Alokon KB yang dilaporkan	Laporan	1	1	100
		Jumlah laporan evaluasi dan analisis pelaksanaan kegiatan, pelayanan kontrasepsi, dan pengelolaan alat dan obat kontrasepsi yang diarsipkan ;	laporan	1	1	100

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
		Jumlah dokumen pengetikan dan administrasi kerjasama dengan instansi lembaga swadaya masyarakat, kader dalam pelaksanaan pelayanan kontrasepsi	Dokumen	1	1	100
Rata-rata Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2019						100

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100 %	Melebihi Target
2	=100 %	Mencapai Target
3	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja triwulan I tahun 2019 di atas telah capai capaian kinerja Penyusun Pencatatan dan Pelaporan KB dari 1 (Satu) Sasaran dan 8 (delapan) indikator sasaran sudah dapat mencapai 100% atau telah sesuai target dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran : Terlaksananya kegiatan Pelayanan Peserta KB Sesuai Standar , capaian kinerja 100%.

Indikator Kinerja :

- Jumlah konsep rencana kegiatan seksi pelayanan kontrasepsi yang disiapkan, yang harus disiapkan, tercapai (100%).
- Jumlah data dan bahan pelaksanaan pelayanan kontrasepsi yang disiapkan yang dilaksanakan, tercapai (100%)
- Jumlah Petunjuk teknis, SOP dan pembinaan mengenal strategi pelaksanaan pengendalian dan pembinaan akseptor KB dan pelayanan kontrasepsi yang diarsipkan yang dilakukan, tercapai (100%)

- Jumlah konsep / rencana program operasional dan pengendalian mengenai pembinaan serta strategi pelaksanaan pengendalian dan pembinaan akseptor KB dan pelayanan kontrasepsi yang diarsipkan, tercapai (100%)
- Jumlah kegiatan pelayanan kontrasepsi yang dilaksanakan , tercapai (100%)
- Jumlah jumlah pengelolaan, penyimpanan, penyaluran / distribusi alat kontrasepsi pada gudang Alokon KB yang dilaporkan, tercapai (100%)
- Jumlah laporan evaluasi dan analisis pelaksanaan kegiatan, pelayanan kontrasepsi, dan pegelolaan alat dan obat kontrasepsi yang diarsipkan, tercapai (100%)
- Jumlah dokumen pengetikan dan administrasi kerjasama dengan instansi lembaga swadaya masyarakat, kader dalam pelaksanaan pelayanan kontrasepsi yang dilaksanakan, tercapai (100%)

D. Rencana Tindak lanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi sasaran dan indicator yang tidak tercapai dari uraian diatas tidak ada. Semua berkas dan laporan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

E. Tanggapan Atasan Langsung

	Laporan kurang baik
√	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain.....(ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan :

Berdasarkan capaian triwulan I tahun 2019 diperoleh hasil capaian kinerja sasaran sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tidak ada berkat kerja sama dan koordinasi yang baik antar pelaksana dan atasan langsung serta antar bidang di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga berkas dan laporan dapat diselesaikan tepat waktu

C. Saran/ masukan :

Kandangan, April 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kasi PELKON,



Rakhmad Rizali, S.Kep
Penata (III/c)
NIP. 19830318 200501 1 003

PENYUSUN PENCATATAN
DAN PELAPORAN KB,



Darmiyatie
Penata Muda Tk. 1 (III/b)
NIP. 19770205 199703 2 003

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : MUHAMMAD TALHAH, SKM
NIP : 19750515 200003 1 007
PANGKAT/GOLONGAN : PENATA / III C
JABATAN : ANALIS KESEJAHTERAAN KELUARGA PADA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK
& PEREMPUAN
TRIWULAN : I TAHUN 2019

BAB I

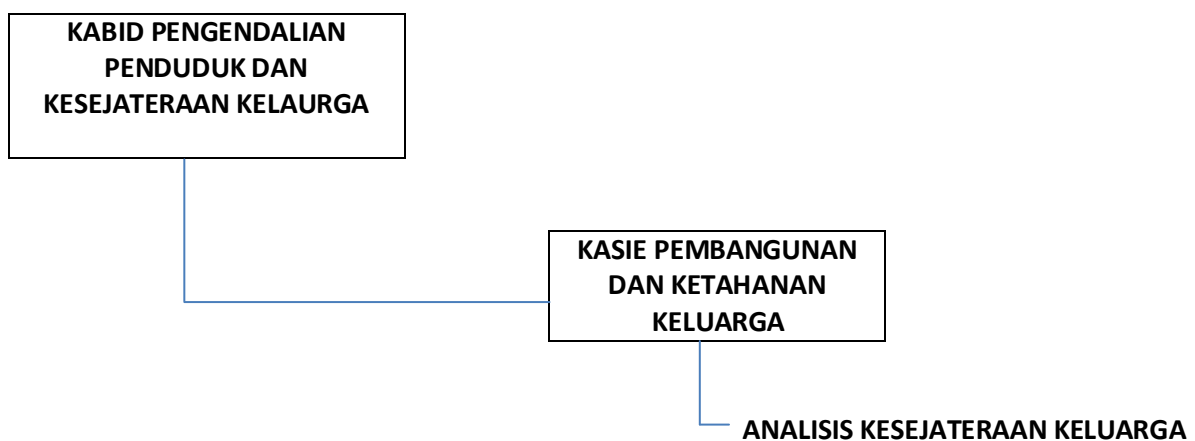
PENDAHULUAN

A. URAIAN TUGAS

Berdasarkan hasil Analisis jabatan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindung Anak dan Perempuan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Menerima pelaporan, mencatat, dan mendokumentasikan program pembangunan dan kesejahteraan keluarga.
- b. Menyiapkan bahan dan pengadministrasian pelaporan program kesejahteraan keluarga.
- c. Mencatat dan mendokumentasikan pelaporan program kesejahteraan keluarga.
- d. Mengumpulkan bahan dan data kependudukan program pembangunan ketahanan dan kesejatraan keluarga, peningkatan peran serta organisasi pembangunan keluarga.
- e. Menyiapkan bahan untuk kegiatan pembinaan dan pengendalian pembangunan ketahanan da dan pengendalian kesejahteraan keluarga, peningkatan peran serta organisasi pembangunan keluarga.
- f. Membuat laporan tahunan dalam rangka pembinaan dan pengendalian pembangunan ketahanan dan kesejateraan keluarga, peningkatan peran serta organisasi pembangunan keluarga.
- g. Menganalisis data laporan dalam rangka pembinaan dan pengendalian pembangunan ketahanan dan kesejateraan keluarga, peningkatan peran serta organisasi pembangunan keluarga.
- h. Melaksanakan feed back laporan ke Penyuluh Keluarga Berencana tiap kecamatan dalam rangka pembinaan dan pengendalian pembangunan ketahanan dan kesejateraan keluarga, peningkatan peran serta organisasi pembangunan keluarga.
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejateraan Keluarga sesuai dengan bidang tugasnya.

B. STRUKTUR JABATAN (PETA JABATAN)



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KERJA

TRIWULAN : I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terlaksananya pelaporan, pencacatan , dan mendokumentasikan program pembangunan kesejahteraan keluarga 1.1. Membuat rekap penerimaan bulanan 1.2. Membuat rekap laporan tahunan.	Jumlah dokumen schedule penyusunan laporan program pembangunan kesejahteraan keluarga	Dokumen	3
2	Menyiapkan bahan atau Formulir pengadministrasian pelaporan program kesejahteraan keluarga 2.1. Menyiapkan Formulir Laporan Bulanan 2.2. Menyiapkan Formulir Laporan Tahunan	Jumlah dokumen bahan atau formulir program pembangunan kesejahteraan keluarga	Dokumen	3
3	Terlaksananya pencatatan dan pelaporan program kesejahteraan keluarga untuk laporan Bulanan dan Tahunan 3.1. Membuat laporan Bulanan 3.2. Membuat Laporan Tahunan.	Jumlah Laporan Bulanan dan Tahunan untuk program pembangunan kesejahteraan keluarga	Dokumen	3
4	Terlaksananya pengumpulan data kependudukan program pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, peran serta organisasi pembangunan keluarga. 4.1. Mengumpulkan data dibidang pengendalian penduduk dan kesejahteraan penduduk. 4.2. Menyajikan data dalam bentuk Laporan. 4.3. Memberikan analisis data tentang pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, peran serta organisasi pembangunan keluarga. 4.4. menginventarisir dan ikut dalam pembinaan BKB, BKR, PIK Remaja dan unit pendukung lainnya.	Jumlah bahan-bahan yang dikumpulkan dan data-data yang disajikan.	Dokumen	3

5	Terlaksananya pengetikan surat-surat badan PPKS dan bahan laporan kegiatan pembangunan dan pembangunan dan kesejahteraan keluarga.	Jumlah surat dan draf laporan	Dukomen	15
---	--	-------------------------------	---------	-----------

B. CAPAIAN KINERJA

TRIWULAN : I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Terlaksananya pelaporan, pencacatan , dan mendokumentasikan program pembangunan kesejahteraan keluarga 1.3. Membuat rekap penerimaan bulanan 1.4. Membuat rekap laporan tahunan.	Jumlah dokumen schedule penyusunan laporan program pembangunan kesejahteraan keluarga	Dokumen	3	3	100
2	Menyiapkan bahan atau Formulir pengadministrasian pelaporan program kesejahteraan keluarga 2.3. Menyiapkan Formulir Laporan Bulanan 2.4. Menyiapkan Formulir Laporan Tahunan	Jumlah dokumen bahan atau formulir program pembangunan kesejahteraan keluarga	Dokumen	3	3	100
3	Terlaksananya pencatatan dan pelaporan program kesejahteraan keluarga untuk laporan Bulanan dan Tahunan 3.3. Membuat laporan Bulanan 3.4. Membuat Laporan Tahunan.	Jumlah Laporan Bulanan dan Tahunan untuk program pembangunan kesejahteraan keluarga	Dokumen	3	3	100

4	<p>Terlaksananya pengumpulan data kependudukan program pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, peran serta organisasi pembangunan keluarga.</p> <p>4.1. Mengumpulkan data dibidang pengendalian penduduk dan kesejahteraan penduduk.</p> <p>4.2. Menyajikan data dalam bentuk Laporan.</p> <p>4.3. Memberikan analisis data tentang pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, peran serta organisasi pembangunan keluarga.</p> <p>4.4. menginventarisir dan ikut dalam pembinaan BKB, BKR, PIK Remaja dan unit pendukung lainnya.</p>	Jumlah bahan-bahan yang dikumpulkan dan data-data yang disajikan.	Dokumen	3	3	100
5	Terlaksananya pengetikan surat-surat bidan PPKS dan bhan laporan kegiatan pembangunan dan pembangunan dan kesejahteraan keluarga.	Jumlah surat dan draf laporan	Dukomen	15	15	100

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb :

No	Capaian Kinerja	Interprestasi
1	➤ 100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan table capaian kinerja Triwulan I dan II Tahun 2019 semuanya mencapai Target yang telah dsetujui oleh atasan yaitu 100%.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Langkah-langkah atau tindak lanjut untuk mengatakan untuk mempertahankan capaian Target tersebut adalah dengan tetap menjalin kerjasama sesama rekan kerja dan atasan lanngsung, sehingga keharmonisan suasana kerja tetap terjaga.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Secara umum Tanggapan Atasan langsung atas hasil laporan dan Capaian target kinerja **sudah Baik.**

BAB III PENUTUP

A. KESEIMPULAN

Pada Triwulan I Tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sudah tercapai 100% (sesuai Target yang telah ditetapkan).

B. PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Target dan indicator Kinerja adalah sering terlambatnya pengiriman Laporan dan PKB-PKB kecamatan sehingga data yang diperoleh sering terlambat dan penginputan laporan sering terlambat.

C. SARAN DAN MASUKAN

1. Adanya percepatan dalam pengiriman laporan.
2. Perlu peningkatan kerjasama sesama rekan kerja dan Atasan langsung.

Kandangan, April 2019

Mengetahui :
Atasan langsung

Kasi Pembangunan dan Kesejahteraan Keluarga



Hj. RAKHMAWATI
NIP. 19690629 198903 2 007

Analisis Kesejahteraan Keluarga



MUHAMMAD TALHAH, SKM
NIP. 19750515 200003 1 007

Annual

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : H. Sayuti Rachman ,SKM
NIP : 196608051989031016
PANGKAT / GOL : Penata Tk. I /III / d
JABATAN : Penyusun Bahan Data Kependudukan dan KB
Triwulan : I Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan berdasarkan Anjab bahwa tugas Sub. Bagian Keterpaduan dan Sinkronisasi Kependudukan Jabatan Penyusun Bahan Data dan Kependudukan dan KB adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan kerja dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas
2. Melakukan kegiatan pengklarifikasian bahan dan data
3. Melakukan Pengklarifikasian bahan dan data
Melakukan kegiatan penelaahan untuk penyusunan naskah rapat
4. Melaksanakan penyusunan pelaporan pelaksanaan pekerjaan kepada atasan
5. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan oleh atasan

Untuk melaksanakan tugas di atas Sub. Bagian Keterpaduan dan Sinkronisasi Kependudukan Jabatan penyusun bahan data kependudukan dan KB mempunyai fungsi :

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Triwulan		
				I	II	III
1	2	3	4	5		
1	Memonitor pengiriman laporan kependudukan dan KB secara online	Jumlah kegiatan monitoring	Kegiatan	3	3	
2	Menerima Pelaporan kependudukan dan KB	Jumlah dokumen	Dokumen	3	3	
3	Mencatat dan mendokumentasikan laporan kependudukan dan KB	Terlaksana pencatatan dan pendokumentasian laporan	Kegiatan	2	2	
4	Mengumpulkan bahan data kependudukan	Terhimpunnya bahan dan data data kependudukan	dokumen	0	1	
5	Mengumpulkan bahan dan data Keluarga berencana	Terhimpunnya bahan dan data-data bahan dokumen KB	Dokumen	0	1	
6	Membukukan dan mendokumentasikan bahan data kependudukan dan KB	Kegiatan	Kegiatan	0	0	
7	Menyiapkan bahan,data kegiatan forum diskusi keterpaduan dan sinkronisasi kependudukan	Dokumen	Dokumen	0	0	
8	Mentiapkan surat-surat untuk kegiatan diskusi keterpaduan dan sinkronisasi kependudukan	Dokumen	Dokumen	0	0	
9	Mengantar/membagi surat-surat undangan kegiatan diskusi keterpaduan dan sinkronisasi kependudukan	Dokumen	Dokumen	0	0	
10	Melaksanakan tugas lainnya yang dibedrikan oleh atasan langsung	Kegiatan	Kegiatan	3	3	

B. CAPAIAN KINERJA :
Triwulan : I

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		
				Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5		
1	Memonitor pengiriman laporan kependudukan dan KB secara online	Jumlah kegiatan monitoring	Kegiatan	3	3	100
2	Menerima Pelaporan kependudukan dan KB	Jumlah dokumen	Dokumen	3	3	100
3	Mencatat dan mendokumentasikan lap;oran kependudukan dan KB	Kegiatan	Kegiatan	2	2	100
4	Mengumpulkan bahan data kependudukan	Jumlah kegiatan pengumpulan bahan Dokumen kependudukan	dokumen	1	1	100
5	Mengumpulkan bahan dan data Keluarga berencana	Jumlah kegiatan pengumpulan bahan dokumen KB	Dokumen	1	1	100
6	Membukukan dan mendokumentasikan nahan data kependudukan dan KB	Kegiatan	Kegiatan	0	0	0
7	Menyiapkan bahan,data kegiatan forum diskusi keterpaduan dan sinkronisasi kependudukan	Dokumen	Dokumen	0	0	0
8	Mentiapkan surat-surat untuk kegiatan diskusi keterpaduan dan sinkronisasi kependudukan	Dokumen	Dokumen	0	0	0
9	Mengantar/membagi surat-surat undangan kegiatan diskusi keterpaduan dan sinkronisasi kependudukan	Dokumen	Dokumen	0	0	0
10	Melaksanakan tugas lainnya yang dibedrikan oleh atasan langsung	Kegiatan	Kegiatan	3	3	100

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan I 2019 di atas capaian kinerja pada jabatan penyusun bahan data kependudukan di Triwulan I Alhamdulillah mencapai 100,00% , dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran : Kegiatan monitoring rutin laporan kependudukan dan KB, jumlah Kecamatan yang dimonitor adalah 11 kecamatan sudah seluruhnya termonitor dan laporan yang masuk sudah seluruh kecamatan
2. Sasaran : Penyampaian laporan dari 11 kecamatan sudah terealisasi 100 %
3. Sasaran : Pencatatan dan pendokumentasian laporan kependudukan dan KB sudah terlaksana dengan baik capaian 100 %

D. Rencana Tindaklanjut

Tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah membuat perjanjian kerjasama dengan instansi yang berkomitmen terhadap kependudukan.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan I tahun 2019 capaian kinerja sasaran sudah memenuhi target 100 %

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja masih adanya Kecamatan yang lambat mengisi form laporan kegiatan dan mengirimkannya Kabupaten

C. Saran/masukan

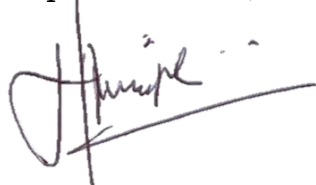
1. Untuk petugas PKB dikecamatan, agar dalam pengisian Form laporan Dan pengiriman/penyampaiannya ke kabupten lebih tepat waktu.

Tanggal, 01 April 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kasi Keterpaduan dan Sinkronisasi

Kependudukan,



Dra. NURSINAHH

Penata Tk. I

NIP.19640411 199403 2 009

Penyusun Bahan Data
Kependudukan dan KB



H. Sayuti Rachman, SKM

Penata Tk. I

NIP.19660805 198903 1 016



LAPORAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN II

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	3

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis	8
2.2 Indikator Kinerja Utama	11
2.3 Perjanjian Kinerja	15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	27
3.2 Realisasi Anggaran	47

BAB IV PENUTUP

DAFTAR TABEL

2.1	Indikator Kinerja Utama Tahun 2019	12
2.2	Perjanjian Kinerja Dinas PPKBPPPA	16
3.1	Pencapaian Kinerja Sekretariat Triwulan I	28
3.2	Pencapaian Kinerja Triwulan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	34
3.3	Pencapaian Kinerja Triwulan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	40
3.4	Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2019 Dinas PPKBPPPA	46
3.5	Capaian Realisasi Keuangan Triwulan I Kesekretariatan Tahun 2019	48
3.6	Capaian Realisasi Anggaran dan Kinerja Triwulan	47

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : Dra. Hj. IS SUSILASTUTI
NIP : 19601219 198503 2 006
PANGKAT / GOL : PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
JABATAN : KEPALA DINAS PPPKBPPPA
TRIWULAN : II Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

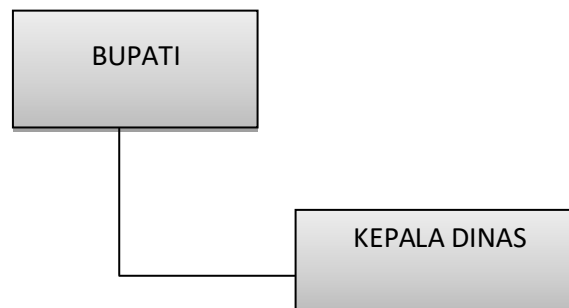
A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPKBPPPA) serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. perumusan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. evaluasi dan pelaporan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

Akuntabilitas Kinerja Dinas PPKBPPPA dapat dilihat pada uraian berikut:

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Triwulan : II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Program	Anggaran	
1	Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja	1	Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia < 20 tahun	73.02 72.18	Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	4,521,712,500	
					Program Peningkatan Keluarga Sejahtera	63,008,650	
2	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89.98 90.58	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	38,497,500	
					Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan	10,045,000	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	3	Persentase Desa / Kelurahan Layak Anak	2.03 2 desa / kel pratama madya	3.38 2 desa / kel pratama madya	Program Peningkatan Pelindungan Anak	23,966,000
						7	Peringkat Kabupaten Layak Anak
		4	Predikat AKIP	A 79.41	A 82.55	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	599,432,850
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	242,829,000
						Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	623,679,900
						Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9,610,000
						Jumlah	6,225,505,700

B. Capaian Kinerja 2019
Triwulan : II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Program	Anggaran	Realisasi	Serapan Anggaran (%)	
1	Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja	1 Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia < 20 tahun	73.02	73.02	72.18	0	0	Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	4,521,712,500	532,999,060	11.79
								Program Peningkatan Keluarga Sejahtera	63,008,650	31,161,200	49.46
2	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	2 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89.98	90.58	0	0	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	38,497,500	29,003,750	75.34	
							Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan	10,045,000	4,732,000	47.11	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	3 Persentase Desa / Kelurahan Layak Anak	2.03	3.38	1	0,68	Program Peningkatan Perlindungan Anak	23,966,000	6,545,415	27.31	
		7 Peringkat Kabupaten Layak Anak	2 desa / kel pratama madya	2 desa / kel pratama madya			Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	92,724,300	23,912,000	25.79	
		4 Predikat AKIP	A	A	0	0	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	599,432,850	173,750,778	28.99	
			79.41	82.55	0.00	0.00	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	242,829,000	116,497,792	47.98	
							Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	623,679,900	365,254,050	58.56	
							Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9,610,000	2,980,000	31.01	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II						0.17	RATA-RATA SERAPAN ANGGARAN	6,225,505,771	1,286,836,045	40.33	

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No	Capaian	Interpretasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan II 2019 di atas capaian Kepala Dinas dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator rata-rata mencapai 0,17%, dengan rata-rata serapan anggaran 40,33%, adapun rincian capaian kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran : Menurunnya usia perkawinan pertama usia <20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja, capaian kinerja 0%.

- Indikator Kinerja :

Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia <20 tahun, belum tercapai (0), karena belum dilakukan survey tahun 2019.

2. Sasaran: Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak, capaian kinerja 0.

Indikator :

- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) tercapai (0), target yang ditetapkan 90,58. Pencapaian nol karena belum memasuki jadwal Survei yang dilakukan oleh BPS. Jadwal pelaksanaan survei setiap akhir atau awal tahun berikutnya.

- b. Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak tercapai 1 desa atau 0,68%

3. Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, tercapai (0)

Indikator: Predikat AKIP A, tercapai (0) karena penilaian oleh Kementerian PAN RB dilakukan di akhir tahun 2019

D. Rencana Tindak Lanjut

Langkah-langkah atau tindak lanjut untuk mengatasi sasaran dan indikator sasaran yang belum tercapai.

Sasaran yang tidak tercapai dari uraian di atas tidak ada. Sasaran yang masih belum tercapai karena belum jadwal pelaksanaan sesuai dengan jadwal target yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

E. Tanggapan Atasan Langsung

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang ().

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan :

Berdasarkan capaian triwulan II tahun 2019 diperoleh hasil rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 0,17% dari target yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tidak ada. Berkat kerjasama dan koordinasi yang baik antar bidang di Dinas PPKBPPPA sehingga pelaksanaan pencapaian sasaran diselesaikan sesuai jadwal waktu yang telah disepakati.

C. Saran/masukan

1. Meningkatkan koordinasi antara masing-masing bidang.
2. Meningkatkan komitmen penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja dengan berpedoman pada perjanjian kerja yang telah disepakati dengan atasan langsung.
3. Meningkatkan *performance* kerja di level bawah (Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas) untuk mendukung percepatan dan kualitas kinerja Program.

Kandangan, 1 Juli 2019

Mengetahui,

Atasan Langsung

Bupati Hulu Sungai Selatan,

Kepala Dinas PPKBPPPA,



Drs. H. ACHMAD FIKRY, MAP



Drs. Hj. Is SUSILASTUTI

Pembina Utama Muda

NIP. 19601219 198503 2 006

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : MOCH. ADIB, SKM,M.Kes
NIP : 19700624 199602 1 001
PANGKAT / GOL : PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
JABATAN : Sekretaris Dinas PPPKBPPPA
TRIWULAN : II Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

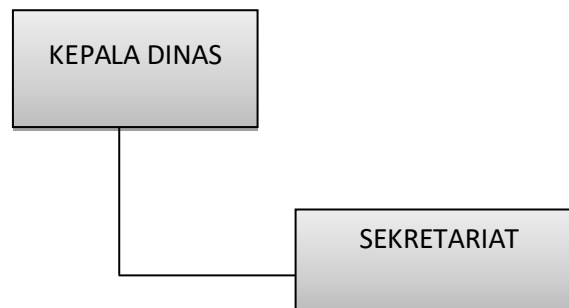
A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, program, dan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi;
- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- f. pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. koordinasi penyusunan laporan kinerja, program dan kegiatan;
- h. pembinaan dan pemberian dukungan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat dapat dilihat pada uraian berikut:

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Triwulan : II

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran	Indek Kepuasan Pelayanan	Indek	82	Program Administrasi Perkantoran	599,433,350	Program Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	44,545,200
								Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	63,600,000
								Penyediaan makanan dan minuman	28,104,000
								Rapat-Rapat koordinasi, konsultasi dan lapangan	403,334,150
								Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya	45,850,000
								Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	14,000,000
					Peningkatan Sarana dan Prasarana	242,829,000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90,239,000
								Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	58,070,000
								Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	94,520,000
					Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	585,703,700	Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Pembinaan Program KBKR	54,937,900
Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga	56,076,700								
Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat	445,339,100								
Partisipasi Anak	29,350,000								
2	Meningkatnya pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan Keuangan Daerah	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP	persen	80,96	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9,610,000	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Dokumen AKIP	4,910,000
		Tingkat pemenuhan aspek kualitas	persen	100				Penyusunan Dokumen Keuangan	4,700,000

B. Capaian Kinerja 2019

Triwulan : II

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Program	Anggaran	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	Serapan Anggaran (%)
1	Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran	Indek Kepuasan Pelayanan	Indek	82	82	100	Program Administrasi Perkantoran	599,433,350	Program Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	44,545,200	20,109,300	45.14
										Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	63,600,000	14,532,967	22.85
										Penyediaan makanan dan minuman	28,104,000	6,000,000	21.35
										Rapat-Rapat koordinasi, konsultasi dan lapangan	403,334,150	112,108,511	27.80
										Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya	45,850,000	21,000,000	45.80
										Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	14,000,000	0	-
							Peningkatan Sarana dan Prasarana	242,829,000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90,239,000	46,150,000	51.14
										Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	58,070,000	52,112,000	89.74
										Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	94,520,000	18,235,792	19.29
							Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	585,703,700	Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Pembinaan Program KBKR	54,937,900	35,346,300	64.34
Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga	56,076,700	12,980,700	23.15										
Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat	445,339,100	316,927,050	71.17										
Partisipasi Anak	29,350,000		-										
2	Meningkatnya pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan Keuangan Daerah	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP	persen	80,96	0	0	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9,610,000	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Dokumen AKIP	4,910,000	2,055,000	41.85
		Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan	persen	100	0	0				Penyusunan Dokumen Keuangan	4,700,000	925,800	19.70
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I						33.33	RATA-RATA SERAPAN ANGGARAN						36.22

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No	Capaian	Interpretasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan II 2019 di atas capaian Sekretaris dari 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator dapat mencapai 33,33% dengan serapan anggaran rata-rata 36,11%. Adapun rincian capaian kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran : Meningkatnya Pemenuhan Aspek Kualitas Dokumen AKIP dan Keuangan Daerah, capaian kinerja 0%.
 - Indikator Kinerja :
 - a. Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP, belum tercapai (0), karena belum dilakukan evaluasi nilai AKIP untuk tahun 2019. Inspektorat melakukan evaluasi nilai AKIP 2019 pada tahun 2020. Sementara nilai AKIP tahun 2018 yang keluar pada tahun 2019, Dinas PPPKBPPAperikan memperoleh nilai AKIP sebesar 80,11 atau kategori A.
 - b. Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen keuangan daerah, tercapai 0%. Hal ini karena penilaian kualitas dokomen dilakukan setelah tahun 2019 berakhir.
2. Sasaran: Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran, capaian kinerja 100.

Indikator : Indeks Kepuasan Pelayanan tercapai (100), target yang ditetapkan 82 dan tercapai 82. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat telah dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan survei pada semester 1 (bulan Juni) dan akan dilakukan survey ulang pada semester 2 (bulan Desember).

D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindak lanjut untuk mengatasi sasaran dan indikator sasaran yang belum tercapai.

Sasaran yang tidak tercapai dari uraian di atas tidak ada. Sasaran yang masih belum tercapai karena belum jadwal pelaksanaan sesuai dengan jadwal target yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

E. Tanggapan Atasan Langsung

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang ().

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan :

Berdasarkan capaian triwulan II tahun 2019 diperoleh hasil rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 33,33% dari target yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tidak ada. Berkat kerjasama dan koordinasi yang baik antar bidang di Dinas PPKBPPPA sehingga pelaksanaan pencapaian sasaran diselesaikan sesuai jadwal waktu yang telah disepakati.

C. Saran/masukan


1. Meningkatkan koordinasi antara masing-masing bidang.
2. Meningkatkan komitmen penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja dengan berpedoman pada perjanjian kerja yang telah disepakati dengan atasan langsung.
3. Meningkatkan *performance* kerja di level bawah (Pejabat Pengawas) untuk mendukung percepatan dan kualitas kinerja Program.

Kandangan, 1 Juli 2019


Mengetahui,

Atasan Langsung

Kepala Dinas PPKBPPPA,


Dra. Hj. Is SUSILASTUTI
Pembina Utama Muda
NIP. 19601219 198503 2 006

Sekretaris,


MOCH. ADIB, SKM, M.Kes.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700624 199602 1001

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : Drs. H. Ermansyah
NIP : 19661022 199503 1 003
PANGKAT / GOL : Pembina / IVa
JABATAN : Kabid Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera
Triwulan : II Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

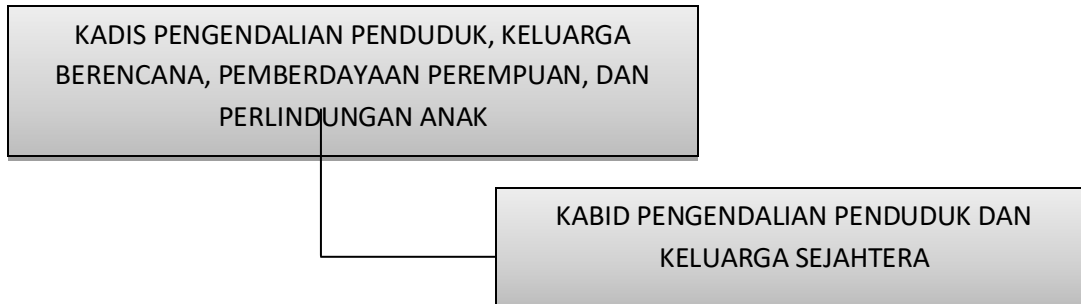
A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan teknis pelaksanaan program yang berprinsip keterpaduan dan sinkronisasi program kependudukan serta pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. Penyusunan program pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program yang berprinsip keterpaduan dan sinkronisasi program kependudukan serta pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. Pelaksanaan program yang berprinsip keterpaduan dan sinkronisasi program kependudukan serta pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program yang berprinsip keterpaduan dan sinkronisasi program kependudukan serta pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program yang berprinsip keterpaduan dan sinkronisasi program kependudukan serta pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas di atas Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN
KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA :
Triwulan : II

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TRIWULAN			IV	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
			I	II	III				
1	2	3					8	7	8
1	Meningkatnya kelompok kegiatan ketahanan keluarga terhadap instansi KB yang menyelenggarakan program KKBPK	<p>1 Persentase kelompok kegiatan Ketahanan keluarga yang aktif</p> <p>2 Persentase instansi KB yang Menyelenggarakan kegiatan Sinkronisasi dan keterpaduan Program KKBPK</p>	50,17	53,51	56,86	60,20	Program Peningkatan Keluarga sejahtera	<p>1 Pembinaan kelompok Kegiatan ketahanan keluarga</p> <p>2 Penyusunan data Kependudukan dan keluarga</p>	<p>41.302.750</p> <p>21.705.900</p>

B. Capaian Kinerja 2019
Triwulan : II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Capaian Kinerja		Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
1	2	3	4	7		8	9	10	11
1	Meningkatnya kelompok ketahanan keluarga	Persentase kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif	53,51	50,00		Program Peningkatan Keluarga Sejahtera	1 Pembinaan kelompok Kegiatan ketahanan keluarga	63.008.650	16.909.250
		Persentase instansi KB yang menyelenggarakan kegiatan sinkronisasi dan keterpaduan program KKBPK	9,09	9,09			2 Penyusunan data Kependudukan dan keluarga	21.705.900	990.000

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan II 2019 di atas capaian kinerja pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera dari 1 (satu) Sasaran strategis dan 2 (dua) indikator dimana untuk indikator kedua yaitu Persentase instansi KB yang menyelenggarakan kegiatan sinkronisasi dan keterpaduan program KKBPK sudah mencapai 100,00%, akan tetapi untuk indikator yang pertama yaitu Persentase kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif target kegiatan ada sasaran kegiatan tidak mencapai target yaitu sebesar 93,44%. Adapun kegiatan yang mendukung indikator tersebut diatas yang telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran : Tersedianya Kelompok Ketahan Keluarga yang berkualitas , Pada triwulan II dilaksanakan kegiatan Pelatihan Pengelola Kelompok PIK Remaja Jalur Pendidikan dan PIK Remaja Jalur Masyarakat ,BKB, BKR, Orientasi Pendidik Sebaya dan BKL.

Pelatihan ini dilaksanakan adalah ;

- Untuk meningkatkan Kegiatan Ketahanan Keluarga agar terciptanya keluarga yang berkualitas sehingga terciptanya masyarakat yang makmur dan sejahtera.
- Kegiatan untuk meningkatkan Administrasi pengelolaan dalam kelompok Ketahanan Keluarga.
- Meningkatkan jumlah kelompok Ketahanan Keluarga.
- Agar mendorong aktifitas para orang tua dan remaja agar giat melaksanakan program Ketahanan keluarga dalam menciptakan keluarga yang berkualitas menuju keluarga yang berketahanan.

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Peningkatan Keluarga Sejahtera melalui Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga dengan serapan anggaran sebesar Rp 41.302.750,-

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja tersebut diatas yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kualitas dan

ketahanan keluarganya dan hanya menjalani hidup dengan apa adanya serta masih rendahnya Pendidikan dan penghasilan ekonomi keluarga.

D. Rencana Tindak lanjut

Tindak lanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan tersebut adalah :

1. Pendekatan dan memberikan pengertian kepada Keluarga di masyarakat tentang pentingnya meningkatkan kualitas keluarga yang berketahanan.

1. Kerjasama dengan PKB Kecamatan melakukan pembinaan dengan cara Sosialisasi kepada Kelompok Ketahanan Keluarga dan masyarakat
2. diadakan pelatihan pengelolaan Kelompok ketahanan keluarga

E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√).

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan II tahun 2019 dilaksanakan Pelatihan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Pelatihan Pengelola Kelompok PIK Remaja Jalur Pendidikan dan PIK Remaja Jalur Masyarakat serta kegiatan Orientasi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya. capaian kinerja sasaran tidak mencapai 100 %.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, yang belum dilaksanakan adalah karena adanya kegiatan yang bersamaan jadwal waktunya dengan kegiatan di Provinsi Kalimantan Selatan serta kegiatan lainnya.

B. Saran/masukan

- Untuk penyesuaian dengan kegiatan provinsi, diharapkan perlunya penugasan peserta yang nantinya dapat optimal menyerap dan menyampaikan hasil pertemuan di tingkat provinsi secara baik.
- Terkait kegiatan keterpaduan dan sinkronisasi dalam hal kerjasama dengan instansi atau ormas lain, perlu sosialisasi program kependudukan.

Tanggal, 01 Juli 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kadis PPKBPPPA,



Dra. Hj. IS SUSILASTUTI
Pembina Utama Muda
NIP.19601219 198503 2 006

Kabid. Dalduk dan Keluarga
sejahtera



Drs. H. ERMANSYAH
Pembina
NIP.19661022 199503 1 003

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : **SYAHRIL SOFIAN**
NIP : 196803051993121002
PANGKAT / GOL : PEMBINA (IV/a)
JABATAN : KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana,
Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Triwulan : II Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

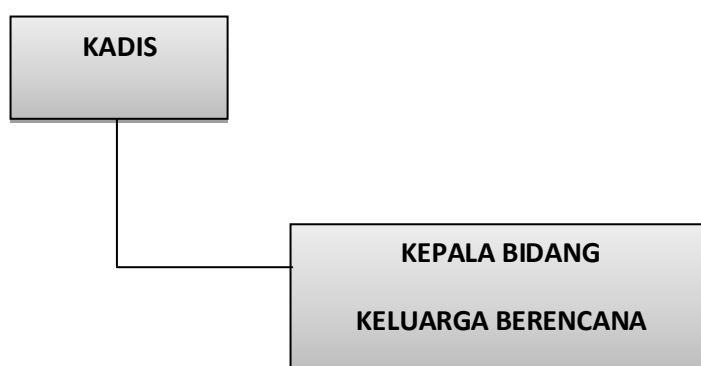
Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2017 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah tugas Kepala Bidang Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- b. Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan Juklak dan Juknis serta SOP, mengenai pembinaan serta pengendalian serta pelayanan keluarga berencana;
- c. Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, pendayagunaan petugas dan Kader Lini lapangan KB
- d. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan advokasi, komunikasi, informasi serta edukasi keluarga berencana;
- e. Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan pelayanan kontrasepsi, pengelolaan alat kontrasepsi dan kesehatan reproduksi;
- f. Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan Tim Mobil Unit Pelayanan KB (Muyan KB) dan Tim Keluarga Berencana Keliling;

- g. Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pelayanan Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengembangan peran serta institusi masyarakat pedesaan di bidang keluarga berencana;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang Tugas;

Untuk melaksanakan tugas diatas Sub. Bagian Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Aparatur Daerah mempunyai fungsi :

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA :

Triwulan : II

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Program	Kegiatan	Anggaran
				1	2	3			
1	2	3	4	5			6	7	8
1	Meningkatnya Kesertaan Peserta Keluarga Berencana	Persentase organisasi yang menindaklanjuti kesepakatan pendewasaan usia perkawinan	Kegiatan (10%) 12/120	0	0	3	Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja	Revitalisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	39.978.500
		Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB Aktif	Persen (78,99%)	78,13	78,30	78,40		Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana	259.507.900
								Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Penyuluhan KB (DAK FISIK)	1.085.159.000
								Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK NF)	955.796.460

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Program	Kegiatan	Anggaran
				1	2	3			
1	2	3	4	5			6	7	8
							Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja	Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan (DAK NF)	40.500.000
								Operasional Penggerakan Program KKBP di Kampung KB (DAK NF)	985.600.000
								Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) (DAK NF)	888.000.000
								Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK NF)	267.170.540

B. Capaian Kinerja 2019
Triwulan : II

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran (%)
				1	2	3	1	2	3						
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10	11	12
1	Meningkat-nya Kesertaan Peserta Keluarga Berencana	Persentase organisasi yang menindak-lanjuti kesepakatan pendewasaan usia perkawinan	Kegiatan (10%) 12/120	0	0	3	0	0	3	100%	Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja	Revitalisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	39.978.500	12,575,500	31,46%
		Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB Aktif	Persen (78,99%)	78,49	78,55	78,65	78,49	78,55	78,65	100%		Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana	259.507.900	85.750.000	33,04%
													Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Penyuluhan KB (DAK FISIK)	1.085.159.000	0

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran (%)
				1	2	3	1	2	3						
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10	11	12
											Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja	Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK NF)	955.796.460	273.325.560	28,60%
											Kesehatan Reproduksi Remaja	Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan (DAK NF)	40.500.000	780.000	1,93%
												Operasional Penggerakan Program KKBPK di Kampung KB (DAK NF)	985.600.000	58.450.000	5,93%
												Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) (DAK NF)	888.000.000	55.860.000	6,29%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran (%)
				1	2	3	1	2	3						
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10	11	12
											Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK NF)	267.170.540	46.258.000	17,31%	

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan II 2019 di atas rata-rata capaian kinerja Bidang Keluarga Berencana Dinas PPKBPPPA Kab. Hulu Sungai Selatan dari 2 (dua) Sasaran dan 8 (delapan) indikator sasaran dapat mencapai 100,00% atau melebihi target dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut:

Sasaran : Meningkatkan Kesertaan Peserta Keluarga Berencana

1. Persentase organisasi yang menindak-lanjuti kesepakatan pendewasaan usia perkawinan meningkat sama dengan 100%.

Indikator Kinerja :

- Revitalisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja melalui Kegiatan Revitalisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dengan serapan anggaran sebesar Rp. 12.575.500

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut diatas yaitu belum terjalinnya kerjasama yang lebih kuat dan serta pemahaman antar organisasi yang melaksanakan program tersebut.

2. Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB Aktif tercapai, capaian kinerja sama dengan 100%

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Keluarga

Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja melalui Kegiatan Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana dengan serapan anggaran sebesar Rp. 85.750.000,-

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut diatas yaitu masih banyaknya pasangan usia subur yang drop out atau angka Unmeednet atau jumlah pasangan usia subur yang tidak ingin punya anak tetapi tidak ber KB. Atau tidak menggunakan dan memakai alat atau obat kontrasepsi.

3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Penyuluhan KB (DAK FISIK), capaian kinerja 0%. dengan serapan anggaran sebesar Rp. 0,-
4. Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK NF), capaian kinerja 28,60%. dengan serapan anggaran sebesar Rp. 273.325.560,-
5. Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan (DAK NF) capaian kinerja 1,93%. dengan serapan anggaran sebesar Rp.780.000,-
6. Operasional Penggerakan Program KKBPK di Kampung KB (DAK NF), capaian kinerja 5,93%. dengan serapan anggaran sebesar Rp. 58.450.000,-
7. Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) (DAK NF), capaian kinerja 6,29%. dengan serapan anggaran sebesar Rp. 55.860.000 ,-
8. Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK NF), capaian kinerja 17,31%. dengan serapan anggaran sebesar Rp. 46.258.000,-

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut diatas yaitu masih rendahnya serapan keuangan untuk Dana BOKB DAK NON Fisik, dikarenakan petugas pelaksana kegiatan ditingkat lapangan sangat terbatas jumlah Sumberdaya manusianya.

Sedangkan Serapan untuk Dana DAK Fisik belum dilaksanakan pada semester ini, tetapi telah dilakukan proses kontrak pengadaannya.

D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi kegiatan dengan lebih memberdayakan petugas lapangan yang ada serta melakukan terobosan dengan mempercepat proses penelitian SPJ Kegiatan serta mempersiapkan dana talangan berupa BON keuangan.
2. Merekomendasikan untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan pengadaan barang jasa secara optimal kepada PPTK dan PPK kegiatan.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√).

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan II tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100,00% (sesuai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, antara lain:

1. Belum optimal beberapa kegiatan yang menyetuh langsung pada obyek sasaran baik pada remaja, anak maupun orang tua. Karena keterbatasan pembiayaan
2. Masih Kecilnya angka pemakaian alat kontrasepsi Metode Jangka Panjang (MKJP) pada Pasangan Usian Subur.
3. Masih rendahnya serapan keuangan ditingkat lapangan pada kegiatan DAK Non Fisik untuk Biaya Operasional KB, sehingga tidak banyak mengangkat capaian program.

C. Saran/masukan

Mengintensifkan Kegiatan pada RKA untuk mendukung program yang dibuat dan ditetapkan;

Tanggal, 01 Juli 2019

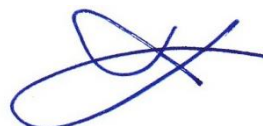
Mengetahui,
Atasan Langsung

Kepala Dinas PPKBPPPA,



Dra. Hj IS SUSILASTUTI
Pembina Utama Muda
NIP.196012191985032006

Kepala Bidang Keluarga
Berencana,



SYAHRIL SOFIAN
Pembina
NIP.198603051993121002

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : Hj. NOORHADINI ULFAH, SKM
NIP : 19700120 199303 2 006
PANGKAT / GOL : Pembina/ IV a
JABATAN : Kabid Pemberdayaan Perempuan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS.
Triwulan : II Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

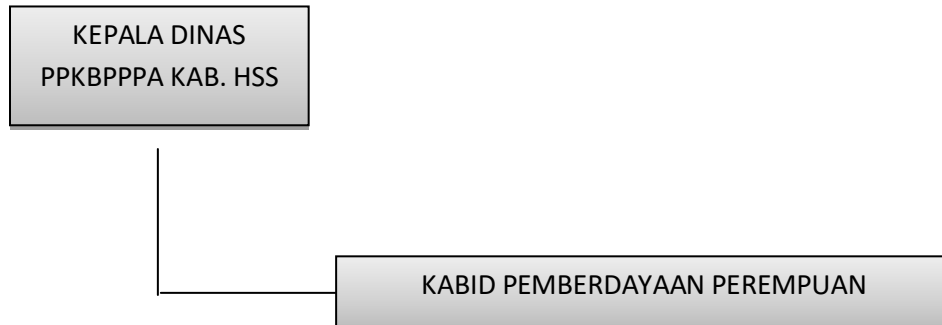
A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bawah tugas Sub. Bagian Perlindungan Perempuan adalah sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pengembangan lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga dan perempuan;
- b. penyusunan program pembinaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pengembangan lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga dan perempuan;
- c. pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pengembangan lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga dan perempuan;
- d. koordinasi, pembinaan dan pengembangan program peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pengembangan lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga dan perempuan;
- e. pengawasan dan pengendalian program peningk
- f. atan kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pengembangan lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga dan perempuan;

- g. evaluasi dan pelaporan program peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pengembangan lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga dan perempuan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)



BAB II**AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN
KINERJA JABATAN****A. PERJANJIAN KINERJA :**

Triwulan : II

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Program	Kegiatan	Anggaran
				1	2	3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya penguatan kelembagaan, koordinasi jaringan kerja perempuan	Persentase SKPD yang menerapkan anggaran yang responsif gender	SKPD	-	-	36.84	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Pelaksanaan PUG di tingkat daerah	67.014.500,-
2	Meningkatnya penguatan kelembagaan, koordinasi jaringan kerja perempuan	Persentase organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang aktif	organisasi	-	-	5.95	Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan	Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan	10.045.000,-

B. CAPAIAN KINERJA 2019

Triwulan : II

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran (%)
				1	2	3	1	2	3						
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya penguatan kelembagaan, koordinasi jaringan kerja perempuan	Persentase SKPD yang menerapkan anggaran yang responsif gender	SKPD	-	-	36.84	-	-	36.84	100%	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Pelaksanaan PUG di tingkat daerah	67.014.500,-	29.003.750,-	75.34%
2	Meningkatnya penguatan kelembagaan, koordinasi jaringan kerja perempuan	Persentase organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang aktif	organisasi	-	-	5.95	-	-	5.95	100%	Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan	Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan	10.045.000,-	4.732.000,-	47.11%

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan II 2019 di atas, capaian kinerja untuk bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Hulu Sungai Selatan dari 2 (dua) Sasaran dan 2 (dua) indikator sasaran telah dilaksanakan dan mencapai 100,00% dengan ringan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Untuk seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga

Sasaran : Terlaksananya MoU peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Indikator Kinerja : Jumlah SKPD yang perencanaan dan penganggaran responsif gender tercapai 100% yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Inspektorat, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian, Dinas Sosial.

kegiatan yang mendukung dalam pelaksanaan antara lain :

- Jumlah SKPD yang mendapat pelatihan perencanaan dan Penganggaran yang responsive gender sebanyak 10 SKPD, tercapai (100%)
- Terlaksananya rapat Koordinasi PUG dan Kegiatan pelaksanaan untuk 10 SKPD, tercapai (100%)
- Jumlah Pembinaan terhadap desa P2WKSS dan KSI, terlaksana (100%).

- Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan bulanan Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Tahun 2019 disusun dan disampaikan tepat waktu, tercapai (100%)
- Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan triwulan Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Tahun 2019 disusun dan disampaikan tepat waktu, tercapai (100%)

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan melalui Kegiatan Pelaksanaan PUG di tingkat daerah dengan serapan anggaran sebesar Rp. 29.003.750,- serta Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah melalui kegiatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat dengan serapan anggaran sebesar Rp. 316.927.050,-.

2. Untuk seksi Perlindungan Perempuan

Sasaran : Tersedianya layanan perlindungan perempuan

Indikator Kinerja : Jumlah organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan dibina, kegiatan yang mendukung dalam pelaksanaan antara lain :

- Jumlah Organisasi yang dibina antara lain Dharma Wanita Persatuan Kab. HSS, Gabungan Isteri Wakil Rakyat (GATRIWARA) Kab. HSS dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kab. HSS, tercapai (100%)
- Menyusun konsep Pra RKA kegiatan Perlindungan Perempuan untuk TA. 2020, terlaksana (100%)
- Jumlah desa/kecamatan yang mendapat sosialisasi perlindungan perempuan dalam rumah tangga, yaitu kecamatan Loksado terlaksana (100%)
- Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan bulanan Seksi Perlindungan Perempuan Tahun 2019 disusun dan disampaikan tepat waktu, tercapai (100%)

- Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan triwulan Seksi Perlindungan Perempuan Tahun 2019 disusun dan disampaikan tepat waktu, tercapai (100%)

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan melalui Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dengan serapan anggaran sebesar Rp. 4.732.000,-

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut diatas yaitu masih kurangnya SDM yang memahami dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan juga masih kurangnya SDM dalam pelayanan maupun pendampingan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan sehingga dalam penyelesaian dan pendampingannya memerlukan tenaga dan waktu yang cukup lama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut:

1. Perlunya Sumber Daya Manusia yang memahami dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah dan masih kurangnya SDM dalam pelayanan maupun pendampingan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan sehingga dalam penyelesaian dan pendampingannya memerlukan tenaga dan waktu yang cukup lama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (✓).

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan II tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100,00% (sesuai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja yaitu masih kurangnya sumber daya manusia yang memahami dan terlatih dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan kurangnya SDM dalam pelayanan maupun pendampingan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan sehingga dalam penyelesaian dan pendampingannya memerlukan tenaga dan waktu yang cukup lama.

C. Saran/masukan

Perlunya sumber daya manusia yang terlatih dan memahami dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah serta perlunya Sumber daya manusia yang terlatih dalam pelayanan maupun pendampingan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tanggal, 01 Agustus 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kepala Dinas PPKBPPPA,

Kabid. Pemberdayaan Perempuan,



Dra. Hj. IS SUSILASTUTI

Pembina Utama Muda
NIP. 19601219 198503 2 006



Hj. NOORHADINI ULFAH, SKM

Pembina Tk. I
NIP. 19640701 198712 2 005

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

Nama	Hj. Tatik Sri Rahayu, SPt, MP
NIP	19681007 199803 2 002
Pangkat / Gol	Pembina / IVa
Jabatan	Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS
Triwulan	II Tahun 2019

BAB I PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

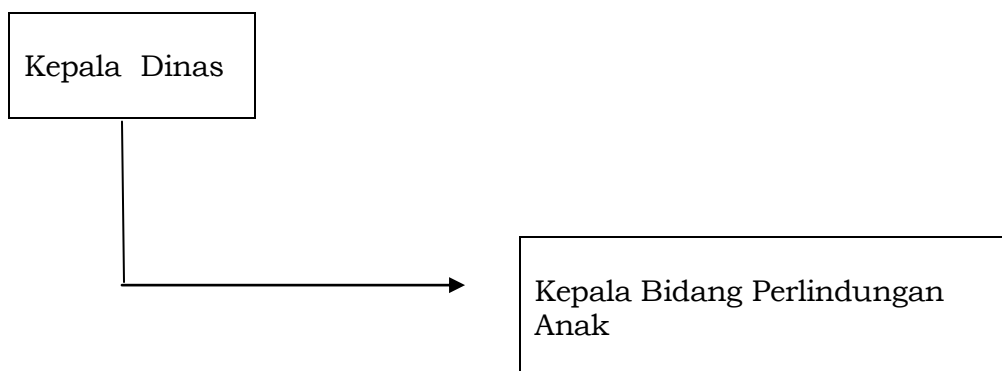
Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa tugas Kepala Bidang Perlindungan anak mempunyai tugas melaksanakan

- (1) Pembinaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program perlindungan anak, pemenuhan hak anak, dan pengembangan lembaga layanan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program perlindungan anak, pemenuhan hak anak, dan pengembangan lembaga layanan anak;
 - b. Penyusunan program perlindungan anak, pemenuhan hak anak, dan pengembangan lembaga layanan anak;
 - c. Pelaksanaan program perlindungan anak, pemenuhan hak anak, dan pengembangan lembaga layanan anak;
 - d. Pengawasan dan pengendalian program perlindungan anak, pemenuhan hak anak, dan pengembangan layanan anak;

- e. koordinasi, pembinaan dan pengembangan program peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemberdayaan dan Evaluasi dan pelaporan program perlindungan anak, pemenuhan hak anak, dan pengembangan lembaga layanan anak; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas diatas Kepala Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas :

B. Struktur Jabatan (Peta Jabatan)



BAB II

**AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN
KINERJA JABATAN**

A. PERJANJIAN KINERJA :

Triwulan : II

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Program	Kegiatan	Anggaran
				1	2	3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan yang terselesaikan	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	Persen	100%	100%	100%	Program Peningkatan Perlindungan Anak	Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak	23.966.000
2	Meningkatnya penguatan kelembagaan, koordinasi jaringan kerja Desa/Kelurahan Layak Anak	Tingkat pemenuhan aspek Desa/Kelurahan Layak Anak berbasis Klaster	Persen	1,85	1,85	1,85	Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Pelayanan Pemenuhan hak Anak	92.724.300

B. CAPAIAN KINERJA 2019

Triwulan : II

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran (%)
				1	2	3	1	2	3						
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan yang terselesaikan	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100%	Program Peningkatan Perlindungan Anak	Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak	23.966.000	6.545.415	17.420.585
2	Meningkatnya penguatan kelembagaan, koordinasi jaringan kerja Desa/Kelurahan Layak Anak	Tingkat pemenuhan aspek Desa/Kelurahan Layak Anak berbasis Klaster	Persen	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	100%	Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Pelayanan Pemenuhan hak Anak	92.724.300	23.912.000	68.812300

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan II 2019 di atas, capaian kinerja Bidang Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Hulu Sungai Selatan dari 2 (dua) Sasaran dan 2 (dua) indikator sasaran telah dilaksanakan dan mencapai 100 % dengan perincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. Kasi Perlindungan Anak

Sasaran : Tersedianya perlindungan terhadap anak (adanya Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkedudukan di Kab. HSS dan di bawah kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS).

Indikator Kinerja : Terbentuk serta terbinanya Perlindungan Anak Terpadu (PATBM) di Desa/Kelurahan. Dengan jumlah keseluruhan 48 PATBM yang tersebar di wilayah Kab. HSS.

kegiatan yang mendukung dalam pelaksanaan antara lain :

- Terbentuknya Tim Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak dengan anggota antara lain terdiri dari Jaksa anak, Pengacara, Kepolisian, RUTAN, Pengadilan Agama, Dinas Pendidikan, Kemenag, Peksos/Dinas Sosial, tercapai (100%)
- Terlaksananya rapat Koordinasi Perlindungan Perempuan dan anak, tercapai (100%)
- Terlaksananya sosialisasi PATBM dan terbinanya PATBM di wilayah Kab, HSS terlaksana (100%).

- Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan bulanan Seksi Perlindungan Anak Tahun 2019 disusun dan disampaikan tepat waktu, tercapai (100%)
- Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan triwulan Seksi Perlindungan Anak Tahun 2019 disusun dan disampaikan tepat waktu, tercapai (100%)

Capaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Peningkatan Perlindungan Anak melalui Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dengan serapan anggaran sebesar Rp. 14.857.000,-

Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja tersebut antara lain : masih kurangnya SDM yang paham tentang penanganan kasus dan perlindungan anak serta kurangnya petugas pendamping kasus anak sehingga dalam penyelesaian dan pendampingan kasus anak masih memerlukan tenaga dari luar dan dengan waktu penyelesaian yang agak panjang.

2. Kasi Pemenuhan Hak Anak

Sasaran : Tersedianya Desa dan Kelurahan Layak Anak

Indikator Kinerja : Jumlah indikator Desa/Kelurahan Layak anak yang terpenuhi, kegiatan yang mendukung dalam pelaksanaan antara lain :

- Pembinaan pada Desa/Kelurahan yang menginisiasi menjadi Desa/kelurahan Layak Anak, tercapai (100%)
- Pembinaan Puskesmas dengan pelayanan ramah anak, tercapai (100%).
- Tersedianya Sekolah Ramah Anak (SRA) berdasarkan standarisasi Kementerian PP-PA (Penghargaan SRA Tahun 2019), tercapai (100%).
- Terbinanya Sekolah yang menginisiasi menjadi Sekolah Ramah Anak, terlaksana (100%)

- Tersedianya Ruang Bermain Ramah Anak yang tersertifikasi oleh Kementerian PP-PA di Kab. HSS (Penghargaan Kementerian PP-PA Tahun 2019), tercapai (100%)
- Terlaksananya Rapat evaluasi Kabupaten Layak Anak, tercapai (100%)
- Terlaksananya kegiatan forum anak di Kab. HSS, tercapai (100%)
- Jumlah desa/kelurahan yang mendapat sosialisasi tentang Desa/Kelurahan layak Anak terlaksana (100%)
- Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan bulanan Seksi Pemenuhan Hak Anak Tahun 2019 disusun dan disampaikan tepat waktu, tercapai (100%)
- Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan triwulan Seksi Pemenuhan Hak Anak Tahun 2019 disusun dan disampaikan tepat waktu, tercapai (100%)

Capaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak melalui Kegiatan Pelayanan Pemenuhan Hak Anak dengan serapan anggaran sebesar Rp. 23.912.000,-

Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja tersebut antara lain : masih kurangnya SDM yang dapat melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap Desa/Kelurahan Layak Anak, sekolah yang meninisiasi menjadi sekolah ramah anak, memahami tentang pelayanan Puskesmas yang ramah anak. Kurangnya SDM yang dapat melakukan pembinaan terhadap Forum Anak di tingkat Desa/ Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai selatan.

D. Rencana Tindaklanjut

Tindaklanjut atau langkah-langkah dalam mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran adalah :

1. Perlunya Sumber Daya Manusia yang memahami tentang pelaksanaan program atau kegiatan Desa/Kelurahan Layak Anak sehingga pada pelaksanaan di lapangan dapat melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap Sekolah Ramah Anak, Puskesmas dengan pelayanan yang ramah anak serta melakukan pembinaan terhadap Forum Anak dari tingkat Desa/Kelurahan. Kecamatan hingga Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang akhirnya dapat menyujudkan Kabupaten Layak Anak.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√).

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan II tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100,00% (sesuai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja yaitu masih kurangnya sumberdaya manusia yang memahami dan terlatih dalam pembinaan Desa/Kelurahan Layak Anak serta kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pendampingan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak sehingga dalam penyelesaian kasus memerlukan tenaga dari luar Dinas pada akhirnya perlu waktu yang agak panjang untuk koordinasi.

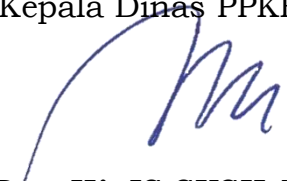
C. Saran/masukan

Adanya Sumber Daya Manusia yang menguasai bidangnya dan terlatih baik dalam pembinaan Desa/Kelurahan Layak Anak dan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

Tanggal, 1 Juli 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kepala Dinas PPKBPPPA,


Dra. Hj. IS SUSILASTUTI
Pembina Utama Muda
NIP.19601219 198503 2 006

Kepala Bidang Perlindungan Anak


Hj. TATIK SRI RAHAYU, SPT, MP
Pembina
NIP.19681007 199303 2 002

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : Dra. Nursinah
NIP : 19640411 199403 2 009
PANGKAT / GOL : Penata Tk. I /III / d
JABATAN : Kasi Keterpaduan dan Sinkronisasi Kependudukan
Triwulan : II Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa tugas Sub. Bagian Keterpaduan dan Sinkronisasi Kependudukan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Keterpaduan dan Sinkronisasi Kependudukan
- b. Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan, keterpaduan, dan Sinkronisasi Kependudukan, termasuk pemetaan keluarga sejahtera
- c. Menyusun bahan penyusunan rencana keterpaduan dan sinkronisasi program kependudukan, termasuk pemetaan keluarga sejahtera
- d. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan keterpaduan dan sinkronisasi program kependudukan, kependudukan termasuk pemetaan keluarga sejahtera
- e. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan keterpaduan dan sinkronisasi program kependudukan, termasuk pemetaan keluarga sejahtera
- f. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan keterpaduan dan sinkronisasi program kependudukan, termasuk pemetaan keluarga sejahtera
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera sesuai bidang tugas

Untuk melaksanakan tugas di atas Sub. Bagian Keterpaduan dan Sinkronisasi Kependudukan mempunyai fungsi :

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN
KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA :
Triwulan : II

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Program	Kegiatan	Anggaran
				1	2	3			
1	2	3	4	5			6	7	8
1	Tersedianya institusi KB yang melaksanakan KKBPK dan instansi yang terkait yang berkomitmen terhadap kependudukan	Jumlah instansi KB yang menyelenggarakan program KKBPK	Kegiatan	0	0	1	Program Peningkatan Keluarga Sejahtera	Penyelenggaraan Pembangunan Kependudukan berwawasan KKBPK (kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga)	21.705.900,-

B. Capaian Kinerja 2019
Triwulan : II

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran (%)
				1	2	3	1	2	3						
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10	11	12
1	Tersedianya institusi KB yang melaksanakan KKBPK dan instansi yang terkait yang berkomitmen terhadap kependudukan	Jumlah instansi KB yang menyelenggarakan program KKBPK	Kegiatan	0	0	1	0	0	1	100%	Program Peningkatan Keluarga Sejahtera	Penyelenggaraan Pembangunan Kependudukan berwawasan KKBPK (kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	21.705.900,-		

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan I 2019 di atas capaian kinerja pada Sub. Bagian Keterpaduan dan Sinkronisasi Kependudukan dari 1 (satu) Sasaran dan 1 (satu) indikator sasaran sudah mencapai 100,00% adapun kegiatan yang mendukung kegiatan tersebut diatas yang sudah dilaksanakan dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran : Tersedianya institusi KB yang melaksanakan KKBPK dan instansi yang terkait yang berkomitmen terhadap kependudukan sudah mencapai 100,00%.

Pada triwulan II sudah dilaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung indikator di atas, seperti rapat koordinasi teknis bulanan bidang PPKS yang diikuti oleh Bidang Keluarga Berencana dan seluruh PLKB se-Kab HSS, memonitor laporan pengendalian lapangan 11 kecamatan, meentry data laporan pengendalian lapangan 11 kecamatan dan membuat laporan bulanan hasil dari laporan pengendalian lapangan 11 kecamatan.

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Peningkatan Keluarga Sejahtera melalui Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Kependudukan Berwawasan KKBPK (kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga) dengan serapan anggaran sebesar Rp 990.000,-

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja tersebut diatas yaitu belum adanya perjanjian kerjasama dengan instansi yang berkomitmen terhadap kependudukan.

D. Rencana Tindaklanjut

Tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah membuat perjanjian kerjasama dengan instansi yang berkomitmen terhadap kependudukan.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√).

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Tahun II tahun 2019 capaian kinerja sasaran sudah mencapai 100,00%. Selain itu pada triwulan II ini sudah dilaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung indikator diatas.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tidak ada permasalahan.

C. Saran/masukan

-

Tanggal, 01 Juli 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kabid. Dalduk dan Keluarga sejahtera,

Kasi Keterpaduan dan Sinkronisasi
Kependudukan,



Drs. H. ERMANSYAH
Pembina Tk. I
NIP.19661022 199503 1 003



Dra. NURSINAH
Penata Tk. I
NIP.19640411 199403 2 009

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : Hj Rakhmawati
NIP : 19690629 198903 2 007
PANGKAT / GOL : Penata Tk. I /III / d
JABATAN : Kasi Pembangunan Kesejahteraan Keluarga
Triwulan : II Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa tugas Sub. Bagian Pembangunan Kesejahteraan Keluarga adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan mengevaluasi Program Seksi Pembangunan Kesejahteraan Keluarga
- b. Mengembangkan Kegiatan Program Peningkatan Ketahanan Keluarga Keluarga dan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga
- c. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan program dengan Instansi terkait yang berkenaan dengan kegiatan Program Peningkatan Ketahanan keluarga sejahtera
- d. Menyelenggarakan Sosialisasi dan Pembinaan serta Pengawasan kepada Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,UPPKS,PIK/R Jalur Pendidikan,PIK/R Jalur Masyarakat)
- e. Melakukan Evaluasi dan menganalisa kegiatan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga serta meningkatkan Ketahanan Keluarga
- f. Membuat Laporan hasil kegiatan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera sesuai bidang tugas Untuk melaksanakan tugas di atas Sub. Bagian Pembangunan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :

A. Struktur Jabatan (peta jabatan)



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN
KINERJA JABATAN

A.PERJANJIAN KINERJA :

Triwulan : II

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Program	Kegiatan	Anggaran
				1	2	3			
1	2	3	4	5			6	7	8
1	Meningkatkan Kualitas Kelompok Ketahanan Keluarga	Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga yang aktif	Kegiatan	53	53	54	Program Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pelatihan Kelompok Ketahanan Keluarga Bina Keluarga Remaja (BKR)	41.302.750

B. Capaian Kinerja 2019
Triwulan : II

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran (%)
				1	2	3	1	2	3						
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Kualitas Kelompok Ketahanan Keluarga	Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga yang aktif	Kelompok	53	53	54	52	53	55	100 %	Program Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pelatihan/ Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga	41.302.750,-	16.909.250	40.93

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan II 2019 di atas capaian kinerja pada Seksi Pembangunan Kesejahteraan Keluarga 1 (satu) Sasaran yaitu Meningkatkan Kualitas Kelompok Ketahanan Keluarga dengan indikator kegiatan jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga yang aktif dimana pada triwulan II ini tercapai 160 kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif dari target 160 kelompok kegiatan ketahanan atau sekitar 100%. Adapun untuk mendukung kegiatan tersebut diatas yang telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran : Tersedianya Kelompok Ketahan Keluarga yang berkualitas, pada triwulan II dilaksanakan kegiatan Pelatihan Pengelola Kelompok PIK Remaja Jalur Pendidikan dan PIK Remaja Jalur Masyarakat, BKB, BKR, Orientasi Pendidik Sebaya dan BKL.

Pelatihan ini dilaksanakan adalah ;

- Untuk meningkatkan Kegiatan Ketahanan Keluarga agar terciptanya keluarga yang berkualitas sehingga terciptanya masyarakat yang makmur dan sejahtera.
- Kegiatan untuk meningkatkan Administrasi pengelolaan dalam kelompok Ketahanan Keluarga.
- Meningkatkan jumlah kelompok Ketahanan Keluarga.
- Agar mendorong aktifitas para orang tua dan remaja agar giat melaksanakan program Ketahanan keluarga dalam menciptakan keluarga yang berkualitas menuju keluarga yang berketahanan.

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Peningkatan Keluarga Sejahtera melalui Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga dengan serapan anggaran sebesar Rp. 16.909.250,- atau sekitar 40,93 %.

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja tersebut diatas yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarganya dan hanya menjalani hidup dengan apa adanya serta masih rendahnya Pendidikan dan penghasilan ekonomi keluarga.

D. Rencana Tindaklanjut

Tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan tersebut adalah :

1. Pendekatan dan memberikan pengertian kepada Keluarga di masyarakat tentang pentingnya meningkatkan kualitas keluarga yang berketahanan.

2. Kerjasama dengan PKB Kecamatan melakukan pembinaan dengan cara Sosialisasi kepada Kelompok Ketahanan Keluarga dan masyarakat
3. diadakan pelatihan pengelolaan Kelompok ketahanan keluarga

E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√).

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan II tahun 2019 dilaksanakan Pelatihan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Pelatihan Pengelola Kelompok PIK Remaja Jalur Pendidikan dan PIK Remaja Jalur Masyarakat serta kegiatan Orientasi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya. capaian kinerja sasaran sebesar 100 %.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, yang belum dilaksanakan adalah karena adanya kegiatan pelatihan pelatihan di Provinsi Kalimantan Selatan serta kegiatan lainnya.

C. Saran/masukan

-

Tanggal, 01 Juli 2019

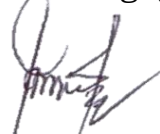
Mengetahui,
Atasan Langsung

Kabid.Dalduk dan Keluarga Sejahtera,



Drs. H. ERMANSYAH
Pembina Tk. I
NIP.19661022 199503 1 003

Kasi Pembangunan Kesejahteraan
Keluarga,



Hj. RAKHMAWATI
Penata Tk. I
NIP.19690629 198903 2 007

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : MAULIDY RIFANI
NIP : 19660717 198903 1 006
PANGKAT / GOL : Penata Tk. I (III/d)
JABATAN : Kepala Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan
Institusi Masyarakat
TRIWULAN : II Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/201/KUM/2018 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa tugas Kepala Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Institusi Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Institusi Masyarakat;
- b. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data dan bahan mengenai advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE), pembinaan peran serta masyarakat dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan pembinaan petugas lini lapangan;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan mengenai strategi pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan pembinaan petugas lini lapangan;
- d. Melaksanakan kegiatan pembinaan/penyuluhan, serta advokasi, KIE program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- e. Melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan pembinaan petugas lini lapangan;
- f. Menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi, lembaga swadaya masyarakat terkait dalam rangka pembinaan dan pengembangan serta pengendalian pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan pembinaan petugas lini lapangan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Bidang Keluarga Berencana sesuai bidang tugas.

B. Struktur jabatan (peta jabatan)



BAB II
 AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN
 KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA :
 Triwulan : II

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Triwulan (kumulatif)	Program	Kegiatan	Anggaran
				II			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terlaksananya advokasi konseling dan promosi KBKR	Jumlah remaja/anak berusia 15-19 tahun yang diberikan sosialisasi dan edukasi tentang pendewasaan usia perkawinan.	orang	257	Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	39.978.600

Target tersebut diatas adalah kumulatif (sampai dengan triwulan II) adalah 257 orang, Jumlah remaja/anak berusia 15-19 tahun yang diberikan sosialisasi dan edukasi tentang pendewasaan usia perkawinan.

B. Capaian Kinerja 2019
Triwulan : II

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	Capaian Kinerja	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran (%)
				II	II						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terlaksananya advokasi konseling dan promosi KBKR	Jumlah remaja/anak berusia 15-19 tahun yang diberikan sosialisasi dan edukasi tentang pendewasaan usia perkawinan	orang	257	311	121,01%	Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	39.978.600	12.575.500	31,46%

Disamping melaksanakan kinerja tersebut diatas, kami juga sebagai Kepala Seksi Advokasi, KIE dan Institusi Masyarakat pada triwulan II Tahun 2019 dilaksanakan juga kinerja dengan capainya sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1	Menyusun dokumen pra RKA TA 2020 Seksi Advokasi, Komunika-si, Informasi, Edukasi & Institusi Masyarakat harus disiapkan.	Dokumen	1	1	100
2	Menghimpun, mengolah dan menganalisa data IMP.	Dokumen	1	1	100
3	Menghimpun, mengolah dan menganalisa data PKB/PLKB	Dokumen	1	1	100
4	Menghimpun Data IMP dan Poktan yang dibina atasan yang dilaksanakan.	Dokumen	1	1	100
5	Menyiapkan/membuat Bahan KIE	Dokumen	3	3	100
6	Menyiapkan Buku Materi/ Poster/ Leaflet/ Baliho/Spanduk/DII	Dokumen	1	1	100
7	Membagi Buku Materi/ Poster/ Leaflet/DII	Dokumen	1	1	100
8	Melaksanakan KIE melalui Media Sosial	Dokumen	3	3	100
9	Melaksanakan KIE dengan Mopen KKB	Dokumen	1	1	100
10	Melaksanakan kegiatan Pembinaan/ Advokasi, KIE Program Kespro & PUP	Dokumen	2	2	100
11	Melaksanakan Pembinaan/ Penyuluhan, Advokasi & KIE ke Kelompok Kegiatan	Dokumen	3	3	100
12	Melaksanakan Pembinaan ke Tugas Lini Lapangan dan Kader Lini Lapangan/ IMP	Dokumen	3	3	100
13	Memfasilitasi/Melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas PPKBD	Dokumen	0	1	100
14	Memfasilitasi/ Melaksanakan kegiatan Forum Diskusi Terarah Program Kespro Remaja	Dokumen	1	0	0
15	Evaluasi Bulanan kegiatan pelaksanaan kegiatan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan pembinaan petugas lini lapangan	Dokumen	3	3	100
16	Menyiapkan proses Tindak lanjut kesepakatan PUP lintas sektor, SKPD terkait dan stake holder.	Dokumen	2	2	100
17	Kunjungan Pembinaan Program Terpadu Kecamatan Sayang Ibu (KSI) Tahun 2019	Kunjung-an	3	3	100
Jumlah Capaian					94,12%

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sebagai berikut :

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan II 2019 di atas rata-rata capaian kinerja Seksi Advokasi, KIE dan Institusi Masyarakat Dinas PPKBPPA Kab. Hulu Sungai Selatan dengan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran dan 1 (satu) indikator sasaran, Terlaksana Advokasi Konseling dan Promosi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) sebesar 121,01%.

Indikator Kinerja :

- Jumlah remaja/anak berusia 15-19 tahun yang diberikan sosialisasi dan edukasi tentang pendewasaan usia perkawinan, tercapai (121,01%)
2. Terlaksananya capaian kinerja kegiatan Kasi Advokasi, Komunkasi, Informasi, Edukasi dan Institusi Masyarakat dibidang Keluarga Berencana, sesuai dengan petunjuk teknis untuk ketepatan sasaran program sebesar 94,12%

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah melalui Kegiatan Pembinaan Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) dengan serapan anggaran sebesar Rp.35.346.300,-.

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- Waktu pelaksanaan Advokasi Konseling dan Promosi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) dan kegiatan lainnya berubah, karena mengganggu proses kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah, maka pelaksanaannya dimajukan atau dimundurkan, sehingga berdampak pada pencapaian kinerja.
- Uang persediaan di bendahara pengeluaran pada saat mau melaksanakan kegiatan tidak cukup, sehingga mengusahakan pinjaman pihak lain atau pelaksanaan dimundurkan.

D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam menghadapi kendala pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Advokasi dan koordinasi dengan Dinas Terkait terutama Dinas Pendidikan Kab. HSS, Kantor Kementerian Agama Kab. HSS, Kepala-Kepala Sekolah untuk SLTP/SLTA se-Kab.HSS, Koordinator Penyuluh KKB Kecamatan se-Kab.HSS, serta SKPD/Instansi terkait lainnya.
2. Menjadwalkan kembali rencana kegiatan disesuaikan dengan Kegiatan Belajar Mengajar di SLTP dan SLTA.
3. Pemberitahuan lebih awal kepada bendahara pengeluaran untuk membon uang persediaan yang ada bendahara pengeluaran, sehingga dapat cukup disediakan dan pelaksanaan dapat sesuai waktu yang ditetapkan.

E. Tanggapan Atasan Langsung

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (\checkmark).

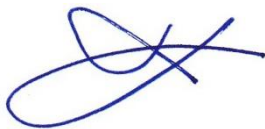
BAB III
PENUTUP

Bahwa Kepala Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Institusi Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/201/KUM/2018 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, telah melaksanakan tugas dengan pencapaian kinerja sasaran kegiatan Advokasi Konseling dan Promosi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) pada Triwulan II Tahun 2019 adalah sebesar 121,01%.

Demikian laporan kinerja pegawai ini dibuat sebagai kewajiban sebagai pejabat pengawas dilingkungan Pemerintah kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, 04 Juli 2019

Mengetahui Atasan Langsung,
Kepala Bidang Keluarga Berencana
Dinas PPKBPPPA Kab. HSS,



SYAHRIL SOFIAN, S.Pi
P e m b i n a
NIP. 19680305 199312 1 002

Kepala Seksi
Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi
dan Institusi Masyarakat,
Dinas PPKBPPPA Kab. HSS,



MAULIDY RIFANI, S.Mn
Penata Tingkat I
NIP. 19660717 198903 1 006

LAPORAN KINERJA PEGAWAI
TRIWULAN II TAHUN 2019

NAMA : **RAKHMAD RIZALI, S.Kep**

NIP : **19830318 200501 1 003**

PANGKAT / GOL : **PENATA (III/c)**

JABATAN : **Kepala Seksi Pelayanan Kontrasepsi pada
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak**

DAFTAR ISI

	Halaman
Cover	1
Daftar Isi	2
Daftar tabel dan Gambar	3
BAB I Pendahuluan.....	4
A. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
B. Struktur Jabatan.....	5
BAB II Akuntabilitas Kinerja Jabatan	6
A. Perjanjian Kinerja.....	6
B. Capaian Kinerja.....	6
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	7
D. Rencana Tindak Lanjut.....	11
D. Tanggapan Atasan Langsung.....	11
BAB III Penutup	12

DAFTAR TABEL dan GAMBAR

Tabel	halaman
Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja	6
Tabel 2.2. Capaian Kinerja.....	6
Tabel 2.3. Metode penyimpulan capaian kinerja.....	7
Tabel 2.4. Target Kinerja berdasar topuksi.....	10
Gambar	
Gambar 1.1 Struktur Jabatan	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

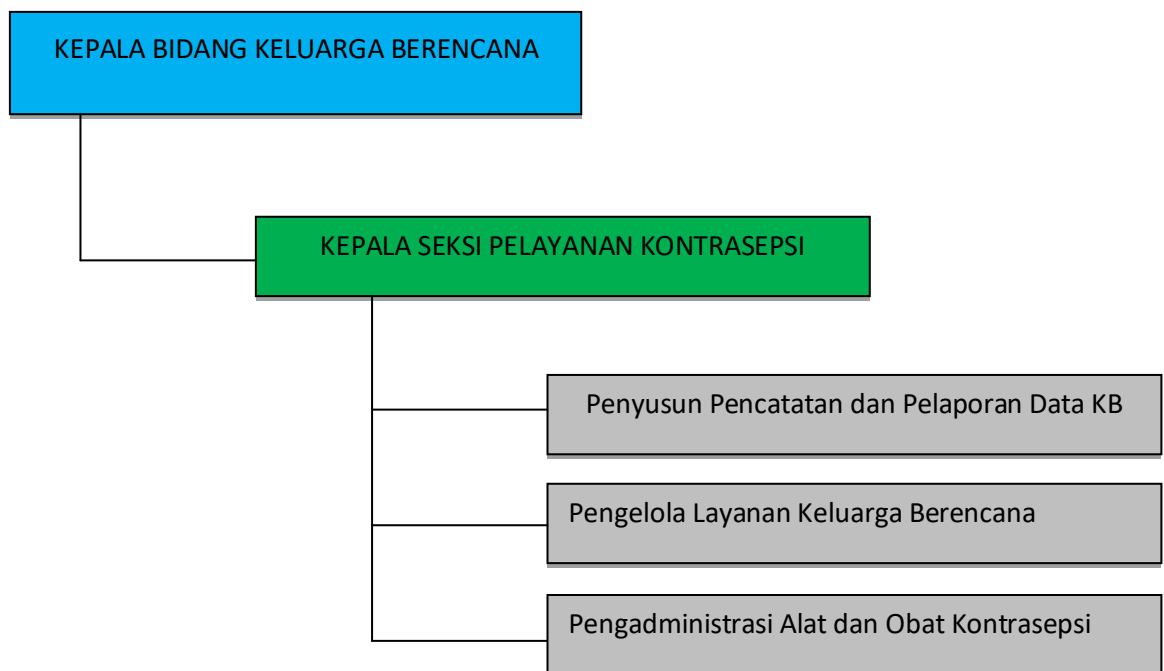
Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pasal 17 menyatakan tugas Seksi Pelayanan Kontrasepsi adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Kontrasepsi;
- b. menghimpun, mengolah dan menganalisa data dan bahan mengenai pelaksanaan pelayanan Kontrasepsi;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembinaan mengenai strategi pelaksanaan pengendalian dan pembinaan akseptor Keluarga Berencana dan pelayanan kontrasepsi;
- d. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program operasional, pengendalian, pembinaan serta strategi pelaksanaan pengendalian dan pembinaan akseptor Keluarga Berencana dan pelayanan kontrasepsi;
- e. melaksanakan kegiatan Pelayanan Kontrasepsi, melalui Tim Keliling Keluarga Berencana, Tim Mobil Unit Pelayanan Keluarga Berencana maupun pada kegiatan momentum terhadap Pasangan Usia Subur;
- f. melaksanakan pengelolaan, penyimpanan, penyaluran/distribusi alat kontrasepsi pada gudang alokon Keluarga Berencana Kabupaten;
- g. melaksanakan evaluasi dan analisis pelaksanaan kegiatan, pelayanan kontrasepsi, dan pengelolaan alat dan obat kontrasepsi Keluarga Berencana;

- h. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi, lembaga swadaya masyarakat, kader dalam pelaksanaan pelayanan kontrasepsi; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana sesuai bidang tugas.

B. Struktur Jabatan

Seksi Pelayanan Kontrasepsi berada pada Bidang Keluarga Berencana dan idealnya memiliki 3 Pelaksana berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, namun karena keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang ada maka hanya ada satu orang Pelaksana. Meskipun demikian diharapkan tidak mengganggu pencapaian target, sehingga *outcome* yang diharapkan bisa optimal. Struktur jabatan bisa dilihat pada gambar 1.1 berikut :



Gambar 1.1 Struktur Jabatan

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Program	Kegiatan	Anggaran
				4	5	6			
1	2	3	4	5			6	7	8
1	Terlaksananya pelayanan KBKR yang merata dan berkualitas	Jumlah PUS yang ber KB menggunakan alat kontrasepsi	Peserta KB Aktif		34412		Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana	Rp 259.507.900

B. Capaian Kinerja

Tabel 2.2 Capaian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran (%)
				4	5	6	4	5	6						
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10	11	12
1	Terlaksananya pelayanan KB KR yang merata dan berkualitas	Jumlah PUS yang ber KB menggunakan alat kontrasepsi	Peserta KB Aktif		34412			37655		109,42%	Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana	Rp 259.507.900	Rp 85.750.000	33,04%

Keterangan : Data Capaian Kinerja berdasarkan laporan Statistik Rutin BKKBN pada <http://aplikasi.bkkbn.go.id/SR>

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja berdasar pada *output* dengan standar 100 dan diinterpretasikan dengan mencapai, tidak mencapai, dan atau melebihi target. Interpretasi tersebut bisa dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Metode penyimpulan capaian kinerja

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan II 2019 capaian kinerja Seksi Pelayanan Kontrasepsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari Sasaran dan indikator sasaran mencapai 109,42%.

Capaian kegiatan lainnya yang dilaksanakan pada Triwulan II adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Penyuluhan KB (DAK Fisik)

Belum ada realisasi sesuai perencanaan, namun proses survei, pembuatan kontrak, rewiu APIP sebagai salah satu syarat penyaluran dana tahap pertama sedang berproses.

- 2) Kegiatan Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK Non Fisik – BOKB) 28,6%

Realisasi anggaran adalah 28,6%, kendala sumber daya dan beberapa kesalahan pelaporan serta pertanggungjawaban sehingga proses realisasi menjadi terhambat.

- 3) Kegiatan Operasional Penggerakan Program KKBPK di Kampung KB (DAK Non Fisik – BOKB)5,39

Realisasi anggaran pada kegiatan ini adalah 5,39%. Secara umum di Kampung KB masih didominasi oleh kegiatan KKBPK,

sementara kegiatan dari instansi lintas sektor relatif terbatas; Karena inilah kegiatan di Kampung KB tidak optimal dan pada akhirnya mempengaruhi realisasi.

- 4) Kegiatan Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK Non Fisik – BOKB) 17,31

Capain realisasi anggaran pada kegiatan ini adalah 17,31.

- 5) Kegiatan Operasional Pembinaan Program KB bagi Masyarakat oleh Kader PPKBD dan Sub PPKBD (DAK Non Fisik – BOKB) 6,29

Realisasi anggaran pada kegiatan ini adalah 6,29%. Kekurangan dan kelemahan baik dalam pelaksanaan maupun pelaporan di lapangan menjadi kendala pada kegiatan ini.

- 6) Kegiatan Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi ke Faskes (DAK Non Fisik – BOKB) 1,93%

Beberapa kegiatan terealisasi namun realisasi keuangan sangat sedikit yaitu 1,93%. Hal ini karena memang *demand* untuk kontrasepsi mengalami penurunan karena pada semua Fasilitas Klinik KB sudah tercukupi kebutuhannya sehingga distribusi tidak banyak dilakukan.

Output enam kegiatan tersebut mempunyai tujuan spesifik untuk mencapai indikator perkegiatan. Namun secara umum *outcome* seluruh rangkaian kegiatan adalah untuk mempertahankan Jumlah PUS yang ber-KB menggunakan alat kontrasepsi (Peserta KB Aktif) dan menambah Jumlah PUS yang ber-KB (Peserta KB baru). Oleh karena itu ada saling keterkaitan antara kegiatan dengan perjanjian kinerja pada tabel 2.1.

Selanjutnya untuk menunjang Perjanjian Kinerja disusunlah target kinerja (bisa dilihat pada tabel 2.4) yang disesuaikan dengan tupoksi dan kegiatan tambahan lainnya. Dalam hal ini setiap item tupoksi dijabarkan dengan beberapa item kegiatan dengan target

kinerja yang realistis. Setiap item target kinerja tersebut pada bertujuan spesifik pada setiap tupoksi. *Output* yang diharapkan adalah terealisasinya target kinerja yang direncanakan. *Outcome* dari seluruh rangkaian kegiatan juga untuk mempertahankan Jumlah PUS yang ber-KB menggunakan alat kontrasepsi (Peserta KB Aktif) dan menambah Jumlah PUS yang ber-KB (Peserta KB baru). Dengan demikian, perjanjian kinerja pada tabel 2.1 bisa direalisasikan melalui rangkaian kegiatan pada target kinerja berdasar tupoksi dan enam kegiatan yang sudah disebutkan terdahulu.

Hasil evaluasi dan analisis dari realisasi kinerja/kegiatan pada triwulan II mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan I, akan tetapi tidak ada perkembangan yang signifikan atau dengan kata lain belum optimal. Realisasi anggaran target kinerja pada triwulan I adalah 21,89% sedangkan pada triwulan II menjadi 33,04%. Asumsinya adalah, jika kegiatan sudah mencapai setengah tahun setidaknya realisasi anggaran sudah mencapai minimal 50%. Hal ini disebabkan antara lain, seringnya terjadi kesalahan dalam pengSPJan, dan jumlah sumber daya manusia yang terbatas.

Walaupun realisasi anggaran tidak sesuai harapan, capaian kinerja pada triwulan ini adalah 109,42. Terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan triwulan I dengan capaian 108,29%. Angka capaian ini menunjukkan *outcome* dari seluruh rangkaian kegiatan bisa dipertahankan. Dengan kata lain jumlah PUS yang ber-KB menggunakan alat kontrasepsi (Peserta KB Aktif) tetap bisa dipertahankan dan menambah jumlah PUS yang ber-KB (Peserta KB baru) bisa direalisasikan.

Tabel 2.4 Target Kinerja berdasar topuksi

NO	TOPUKSI		TARGET KINERJA	SATUAN	Apr	Mei	Juni
1	menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Kontrasepsi	1.1	Menyusun Pra RKA T.A 2020	Dokumen			
		1.2	Menyusun RKA pergeseran T.A 2019	Dokumen			
2	menghimpun, mengolah dan menganalisa data dan bahan mengenai pelaksanaan pelayanan Kontrasepsi	2.1	Membuat Laporan pelaksanaan pelayanan kontrasepsi	Dokumen	1	1	1
3	menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembinaan mengenai strategi pelaksanaan pengendalian dan pembinaan akseptor Keluarga Berencana dan pelayanan kontrasepsi	3.1	Membuat Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Dokumen			
		3.2	Membuat Petunjuk Teknis Pelayanan kontrasepsi	Dokumen			
		3.3	Membuat SOP Pelayanan Kontrasepsi	Dokumen			
4	melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program operasional, pengendalian, pembinaan serta strategi pelaksanaan pengendalian dan pembinaan akseptor Keluarga Berencana dan pelayanan kontrasepsi	4.1	Melakukan Pembinaan Faskes Klinik KB	Kegiatan	1	1	1
		4.2	Membuat Laporan Hasil Pembinaan Faskes Klinik KB	Dokumen	1	1	1
5	melaksanakan kegiatan Pelayanan Kontrasepsi, melalui Tim Keliling Keluarga Berencana, Tim Mobil Unit Pelayanan Keluarga Berencana maupun pada kegiatan momentum terhadap Pasangan Usia Subur	5.1	Membuat perencanaan kebutuhan kegiatan pelayanan KB Gratis melalui MUYAN KB	Kegiatan			1
		5,2	Memfasilitasi kegiatan Pelayanan KB Gratis melalui MUYAN KB	Kegiatan			1
		5,3	Membuat Laporan Pelaksanaan Pelayanan KB Gratis melalui MUYAN KB	Dokumen	1		
6	melaksanakan pengelolaan, penyimpanan, penyaluran/distribusi alat kontrasepsi pada gudang alokon Keluarga Berencana Kabupaten	6.1	Membuat Pedoman pengendalian dan pendistribusian Alokon	Dokumen			
		6.2	Menganalisa Kebutuhan Alokon pada Faskes Klinik KB	Dokumen	1	1	1
		6.3	Mendistribusikan Alokon ke Faskes KB	Kegiatan	1	1	1
7	melaksanakan evaluasi dan analisis pelaksanaan kegiatan, pelayanan kontrasepsi, dan pengelolaan alat dan obat kontrasepsi Keluarga Berencana	7.1	Membuat Laporan Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan kontrasepsi akhir tahun	Dokumen			
8	menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi, lembaga swadaya masyarakat, kader dalam pelaksanaan pelayanan kontrasepsi	8.1	Melakukan Rapat monitoring dan evaluasi bulanan	kegiatan	1	1	1

D. Rencana Tindak lanjut

Langkah-langkah atau tindak lanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi beberapa kegiatan yang belum terealisasi sesuai target.
2. Peningkatan kualitas sumber daya.
3. Angka capaian kinerja yang melebihi target harus didiskusikan secara kritis, kontekstual, dan ilmiah.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

.....

.....

.....

.....

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√).

BAB III

PENUTUP

Capaian kinerja Triwulan II 2019 capaian kinerja Seksi Pelayanan Kontrasepsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari Sasaran dan indikator sasaran mencapai 109,42%. Angka capaian yang melebihi ini dicapai berkat kerja sama yang baik antara para pihak. Angka capaian ini menunjukkan *outcome* dari seluruh rangkaian kegiatan bisa dipertahankan. Dengan kata lain jumlah PUS yang ber-KB menggunakan alat kontrasepsi (Peserta KB Aktif) tetap bisa dipertahankan dan menambah jumlah PUS yang ber-KB (Peserta KB baru) bisa direalisasikan.

Keterpaduan program dan kegiatan pada seksi ini juga menopang pencapaian tersebut. Meskipun ada beberapa kegiatan yang belum optimal namun tidak mengurangi *output* capaian. Akan tetapi hal itu akan menjadi dasar evaluasi dan perbaikan pada triwulan selanjutnya. Dengan demikian, sinkronisasi dan keterpaduan kegiatan dengan indikator sasaran menjadi sangat penting serta adanya keberlanjutan kegiatan yang juga tidak kalah penting.

Tanggal, 01 Juli 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kepala Bidang Keluarga Berencana,



SYAHRIL SOFIAN
Pembina
NIP.197107261997032005

Kepala Seksi Pelayanan
Kontrasepsi,



RAKHMAD RIZALI, S.Kep
Penata
NIP.19830318 200501 1 003

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : NURUL YUDA
NIP : 19700120 199303 2 006
PANGKAT / GOL : PENATA (III/c)
JABATAN : Kasi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS.
Triwulan : I Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

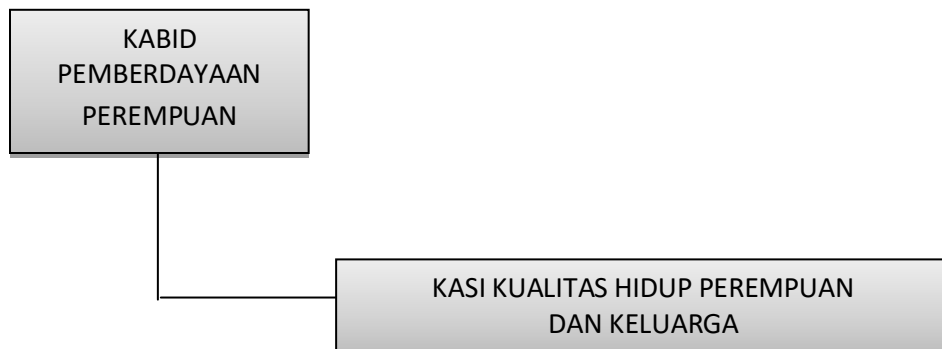
Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bawah tugas Sub. Bagian Perlindungan Perempuan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan kajian pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan pengelolaan data/informasi gender;
- c. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, pengelolaan data/ informasi gender;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, pengelolaan data/ informasi gender;
- e. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, pengelolaan data/ informasi gender;
- f. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta pengolahan, analisis dan penyajian data/ informasi gender;
- g. menyiapkan pelembagaan pengarusutamaan gender;
- h. menyiapkan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga;

- i. melaksanakan upaya peningkatan kesetaraan gender pada keluarga;
- j. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai bidang tugas.

Untuk melaksanakan tugas diatas Sub. Bagian Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Aparatur Daerah mempunyai fungsi :

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)



BAB II

**AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN
KINERJA JABATAN**

A. PERJANJIAN KINERJA :

Triwulan : II

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Program	Kegiatan	Anggaran
				1	2	3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terlaksananya MoU peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Jumlah SKPD yang perencanaan dan penganggaran responsif gender	SKPD	-	-	10	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Pelaksanaan PUG di tingkat daerah	67.014.500,-
2	Terlaksananya pelayanan, penatausahaan administrasi umum, dan kepegawaian	Jumlah kegiatan peran serta dan partisipasi masyarakat	Kegiatan	1	-	1	Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat	445.339.100,-

B. CAPAIAN KINERJA 2019

Triwulan : II

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran (%)
				1	2	3	1	2	3						
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10	11	12
1	Terlaksananya MoU peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan perempuan	Jumlah SKPD yang perencanaan dan penganggaran responsif gender	SKPD	-	-	10	-	-	10	100%	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Pelaksanaan PUG di tingkat daerah	67.014.500,-	29.003.750,-	75.34%
2	Terlaksananya pelayanan, penatausahaan administrasi umum, dan kepegawaian	Jumlah kegiatan peran serta dan partisipasi masyarakat	Kegiatan	-	-	1	-	-	1	100%	Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat	445.339.100,-	316.927.050,-	65.57 %

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja 26

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan II 2019 di atas, capaian kinerja Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Hulu Sungai Selatan dari 2 (dua) Sasaran dan 2 (dua) indikator sasaran mencapai 100,00% atau melebihi target dengan ringan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran : Terlaksananya MoU peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Indikator Kinerja : Jumlah SKPD yang perencanaan dan penganggaran responsif gender tercapai 100% yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Inspektorat, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian, Dinas Sosial. kegiatan yang mendukung dalam pelaksanaan antara lain :

- Terlaksananya rapat Koordinasi PUG dan Kegiatan pelaksanaan untuk 10 SKPD, tercapai (100%)

2. Sasaran : Terlaksananya pelayanan, penatausahaan administrasi umum, dan kepegawaian

Indikator Kinerja : Jumlah kegiatan peran serta dan partisipasi masyarakat kegiatan yang mendukung dalam pelaksanaan antara lain :

- Jumlah Pembinaan terhadap desa P2WKSS dan KSI, terlaksana (100%).
- Pembinaan P2WKSS dan KSI tingkat Provinsi terlaksana (100%)
- Kegiatan peningkatan wawasan kualitas hidup keluarga terlaksana (100%)
- Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan bulanan Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Tahun 2019 disusun dan disampaikan tepat waktu, tercapai (100%)
- Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan triwulan Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Tahun 2019 disusun dan disampaikan tepat waktu, tercapai (100%)

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan melalui Kegiatan Pelaksanaan PUG di tingkat daerah dengan serapan anggaran sebesar Rp. 29.003.750,- serta Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah melalui kegiatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat dengan serapan anggaran sebesar Rp. 316.927.050,-.

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut diatas yaitu masih kurangnya SDM yang memahami dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut:

1. Perlunya Sumber Daya Manusia yang SDM yang memahami dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (✓).

PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan II tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100,00% (sesuai target) yang telah ditetapkan selain itu ada juga kegiatan yang mendukung dalam pelaksanaan tugas kualitas hidup perempuan dan keluarga yaitu kegiatan peningkatan peran serta partisipasi masyarakat sudah terlaksana 100%.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja yaitu masih kurangnya sumber daya manusia yang memahami dan terlatih dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

C. Saran/masukan

Perlunya sumber daya manusia yang terlatih dan memahami dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tanggal, 01 Juli 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kabid
Pemberdayaan Perempuan,



Hj. NOORHADINI ULFAH, SKM

Pembina Tk. I
NIP. 19640701 198712 2 005

Kasi
Peningkatan Kualitas Hidup
Perempuan dan Keluarga,



NURUL YUDA

Penata
NIP. 19700120 199303 2 006

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : NOPSIARTI, SP
NIP : 19821109 200604 2 011
PANGKAT / GOL : PENATA TK. I (III/d)
JABATAN : Kasi Perlindungan Perempuan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS.
Triwulan : II Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bawah tugas Sub. Bagian Perlindungan Perempuan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan kajian kebijakan pencegahan dan perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan kebijakan pengelolaan data/informasi di bidang perlindungan perempuan;
- c. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pencegahan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan pengelolaan data/informasi di bidang perlindungan perempuan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pencegahan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan pengelolaan data/informasi perlindungan perempuan;
- e. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi dan distribusi kebijakan pencegahan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan pengelolaan data/ informasi perlindungan perempuan;
- f. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan;
- g. melaporkan penerapan kebijakan pencegahan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan pengelolaan data/informasi perlindungan perempuan; dan

h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai bidang tugas.

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)



BAB II

**AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN
KINERJA JABATAN**

A. PERJANJIAN KINERJA :

Triwulan : II

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Program	Kegiatan	Anggaran
				1	2	3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tersedianya layanan perlindungan perempuan	Jumlah organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan dibina	organisasi	-	-	3	Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan	Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan	10.045.000,-

B. CAPAIAN KINERJA 2019

Triwulan : II

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran (%)
				1	2	3	1	2	3						
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10	11	12
1	Tersedianya layanan perlindungan perempuan	Jumlah organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan dibina	organisasi	-	-	3	-	-	3	100%	Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan	Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan	10.045.000,-	4.732.000,-	47.11%

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja 26

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan II 2019 di atas, capaian kinerja Seksi Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Hulu Sungai Selatan dari 1 (satu) Sasaran dan 1 (satu) indikator sasaran telah dilaksanakan dan mencapai 100,00% atau melebihi target dengan ringan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran : Tersedianya layanan perlindungan perempuan

Indikator Kinerja : Jumlah organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan dibina, kegiatan yang mendukung dalam pelaksanaan antara lain :

- Jumlah Organisasi yang dibina antara lain Dharma Wanita Persatuan Kab. HSS, Gabungan Isteri Wakil Rakyat (GATRIWARA) Kab. HSS dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kab. HSS, tercapai (100%)
- Menyusun konsep Pra RKA kegiatan Perlindungan Perempuan untuk TA. 2020, terlaksana (100%)
- Jumlah desa/kecamatan yang mendapat sosialisasi perlindungan perempuan dalam rumah tangga, yaitu kecamatan Loksado terlaksana (100%)
- Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan bulanan Seksi Perlindungan Perempuan Tahun 2019 disusun dan disampaikan tepat waktu, tercapai (100%)
- Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan triwulan Seksi Perlindungan Perempuan Tahun 2019 disusun dan disampaikan tepat waktu, tercapai (100%)

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan melalui Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dengan serapan anggaran sebesar Rp. 4.732.000,-

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja tersebut diatas yaitu masih kurangnya SDM dalam pelayanan maupun pendampingan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan baik di SKPD terkait mau pun di tingkat organisasi perempuan sehingga dalam pelaksanaannya organisasi perempuan berperan sebagai kader dalam pelaporan bukan sebagai pendamping apabila terjadi kasus kekerasan .

D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut:

1. Perlunya Sumber Daya Manusia yang mendukung dalam pelayanan dan pendampingan Perlindungan Perempuan yang sudah terlatih dalam penanganan kasus.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (\surd).

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan II tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100,00% (sesuai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja yaitu masih kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam penanganan dan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan sehingga pelayanan dengan cepat terselesaikan.

C. Saran/masukan

Perlunya sumber daya manusia yang terlatih dalam penanganan dan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Tanggal, 01 Juli 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kabid
Pemberdayaan Perempuan,



Hj. NOORHADINI ULFAH, SKM

Pembina Tk. I

NIP. 19640701 198712 2 005

Kasi
Perlindungan Perempuan,



NOPSIARTI, SP

Penata Tk. I

NIP. 19821109 200604 2 011

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : HJ. NANI TRISNAWATI, S. Kep., MM
NIP : 19720225 199503 2 003
PANGKAT / GOL : PEMBINA (IV/a)
JABATAN : Kasi Pemenuhan Hak Anak Dinas PPKBPPPA
Triwulan : II Tahun 2019

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bawah tugas Seksi Pemenuhan hak Anak Bidang Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemenuhan Hak Anak;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Perumusan dan kajian pemenuhan hak anak;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakn pengelolaan data/informasi dan pemenuhan hak anak;
- d. melaksanakan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengelolaan data/informasi dan pemenuhan hak anak;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi,, bimbingan teknis, supervisi dan distribusi kebijakan pengelolaan data/informasi, pemenuhan hak anak;
- f. memantau dan melaporkan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak;
- g. menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga Pemerintah, non Pemerintah, dan dunia usaha;
- h. memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pembentukan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, pembentukan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup;
- i. memnatau perkembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;

- j. memantau perkembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- k. menyiapkan penguatan dan pengembanagn lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- l. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak sesuai dengan bidang tugas.

Untuk melaksanakan tugas diatas Kasi Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA :

Triwulan : II

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Program	Kegiatan	Anggaran
				1	2	3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tersedianya desa dan kelurahan Layak Anak	Jumlah indikator desa/kelurahan layak anak yang terpenuhi	Variabel indikator	1	1	1	Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Pelayanan Pemenuhan Hak Anak	92.724.300
		Jumlah Konsep Pra RKA tentang Pemenuhan Hak Anak yang disusun	dokumen	1	0	0			
		Jumlah konsep SK Sekolah Ramah Anak (SRA)	dokumen	0	0	0			
		Jumlah Konsep bahan dan perlengkapan untuk rapat kegiatan Pemenuhan Hak Anak	dokumen	0	0	0			

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Program	Kegiatan	Anggaran
				1	2	3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Konsep bahan dan perlengkapan untuk rapat pengurus Forum Anak Daerah	dokumen	0	0	1			
		Jumlah Konsep bahan dan perlengkapan untuk rapat Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	dokumen	1	0	0			
		Jumlah pelaksanaan sosialisasi Perlindungan Anak /Pemenuhan Hak Anak yang disiapkan	kali	1	1	1			
		Jumlah bahan Evaluasi KLA	dokumen	1	0	0			

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Program	Kegiatan	Anggaran
				1	2	3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Laporan Evaluasi KLA	dokumen	1	0	0			
		Jumlah pembentukan kelembagaan Forum Anak Desa yang disiapkan	kelompok	1	1	0			
		Jumlah pembinaan Forum Anak Desa	kelompok	0	1	0			
		Jumlah pembinaan Forum Anak Kecamatan	kali	1	1	0			

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Program	Kegiatan	Anggaran
				1	2	3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Puskesmas Ramah Anak yang dibina	kali	1	1	0			
		Jumlah Sekolah Ramah Anak yang dibina	kali	1	1	1			
		Jumlah Laporan Realisasi Fisik & Keuangan Kegiatan per Triwulan	laporan	0	0	1			
		Jumlah Laporan Realisasi Fisik & Keuangan Kegiatan Bulanan	laporan	1	1	1			

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran (%)
				1	2	3	1	2	3						
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10	11	12
		Jumlah Konsep bahan dan perlengkapan untuk rapat pengurus Forum Anak Daerah	dolumen	0	0	1	0	0	1	100%					
		Jumah Konsep bahan dan perlengkapan untuk rapat Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA)sesuai dengan ketentuan yang berlaku	dokumen	1	0	0	1	0	0	100%					
		Jumlah sosialisasi Perlindungan Anak /Pemenuhan Hak Anak yang dilaksanakan	kali	1	1	1	1	1	1	100%					

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran (%)
				1	2	3	1	2	3						
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10	11	12
		Jumlah bahan Evaluasi KLA yang disiapkan	dokumen	1	0	0	1	0	0	100%					
		Jumlah Laporan Evaluasi KLA	dokumen	1	0	0	1	0	0	100%					
		Jumlah kelembagaan Forum Anak Desa yang dibentuk	kelompok	1	1	0	1	1	0	100%					
		Jumlah pembinaan Forum Anak Desa	kelompok	0	1	0	0	1	0	100%					
		Jumlah Forum Anak Kecamatan yang dibina	kali	1	1	0	1	1	0	100%					

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran (%)
				1	2	3	1	2	3						
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10	11	12
		Jumlah Puskesmas Ramah Anak yang dibina	kali	1	1	0	1	1	0	100%					
		Jumlah Sekolah Ramah Anak yang dibina	kali	1	1	1	1	1	1	100%					
		Jumlah Realisasi Fisik & Keuangan Kegiatan per Triwulan	laporan	0	0	1	0	0	1	100%					

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran (%)
				1	2	3	1	2	3						
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10	11	12
		Jumlah Laporan Realisasi Fisik & Keuangan Kegiatan Bulanan	laporan	1	1	1	1	1	1	100%					

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan II 2019 di atas rata-rata capaian kinerja Seksi Pemenuhan Hak Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anaka Kab. Hulu Sungai Selatan dari 1 (satu) Sasaran dan 16 (enam belas) indikator sasaran dapat mencapai 100,00% atau melebihi target dengan ringan capaian kinerja sebagai berikut:

Sasaran : Tersedianya desa dan kelurahan Layak Anak

1. Indikator Kinerja :

- Jumlah indikator desa/kelurahan layak anak yang terpenuhi tercapai (100%)
- Jumlah Konsep Pra RKA tentang Pemenuhan Hak Anak yang disusun (100%)
- Jumlah konsep SK Sekolah Ramah Anak/SRA) (100%)
- Jumlah Konsep bahan dan perlengkapan untuk rapat kegiatan Pemenuhan Hak Anak (100%)
- Jumlah Konsep bahan dan perlengkapan untuk rapat pengurus Forum Anak Daerah (100%)
- Jumlah Konsep bahan dan perlengkapan untuk rapat Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku (100%)
- Jumlah sosialisasi Perlindungan Anak / Pemenuhan Hak Anak yang dilaksanakan (100%)
- Jumlah Jumlah bahan Evaluasi KLA yang disiapkan (100%)
- Jumlah Laporan Evaluasi KLA (100%)

- Jumlah kelembagaan Forum Anak Desa yang dibentuk (100%)
- Jumlah pembinaan Forum Anak Desa yang dibina (100%)
- Jumlah Forum Anak Kecamatan yang dibina (100%)
- Jumlah Puskesmas Ramah Anak yang dibina (100%)
- Jumlah Sekolah Ramah Anak yang dibina(100%)
- Jumlah Realisasi Fisik & Keuangan Kegiatan per Triwulan (100%)
- Jumlah Laporan Realisasi Fisik & Keuangan Kegiatan Bulanan (100%)

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak melalui Kegiatan Pelayanan Pemenuhan Hak Anak dengan serapan anggaran sebesar Rp. 23.912.000,-

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut diatas yaitu pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan karena disesuaikan dengan kondisi di lapangan karena kurangnya koordinasi pihak terkait dan masih terbatasnya peran Forum Anak Daerah dalam keterlibatan pembinaan Forum Anak Desa dan Kecamatan sehingga berdampak pada keterlambatan dalam mengajukan realisasi keuangan .

D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi koordinasi dengan pihak terkait (sekolah dan masyarakat) dan SKPD lintas sektor.

2. Optimalisasi peran serta Forum Anak Daerah (FAD) dalam pembinaan Forum Anak Desa dan Kecamatan.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (✓).

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan II tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100,00% (sesuai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, antara lain:

1. Koordinasi dengan pihak terkait (sekolah dan masyarakat kurang optimal
2. Masih terbatasnya peran Forum Anak Daerah dalam keterlibatan pembinaan Forum Anak Desa dan Kecamatan

B. Saran/masukan

1. Optimalisasi koordinasi dengan pihak terkait (sekolah dan masyarakat) dan SKPD lintas sektor.
2. Memotivasi Forum Anak Daerah (FAD) untuk mengoptimalkan peran sertanya dalam pembinaan Forum Anak Desa dan Kecamatan.

Tanggal, 01 Juli 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kepala Bidang Perlindungan Anak,



Hj. TATIK SRI RAHAYU, S.Pt., MP

Pembina

NIP. 19681007 199803 2 002

Kasi Pemenuhan Hak Anak,



Hj. NANI TRISNAWATI, S. Kep., MM

Pembina

NIP.19780225 1995033 2 003

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : LAILY DIMIATI, S.Sos
NIP : 19731116 200804 2 001
PANGKAT / GOL : PENATA (III/c)
JABATAN : Kasi Perlindungan Khusus Anak Bidang Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS.
Triwulan : II Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bawah tugas Sub. Bagian Perlindungan Khusus Anak adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan Khusus Anak.
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan perlindungan khusus anak dan kebijakan pengelolaan data/ informasi kekerasan terhadap anak
- c. menyusun bahan pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak dan pengelolaan data/ informasi kekerasan terhadap anak.
- d. menyusun bahan pelaksanaan perumusan kajian kebijakan perlindungan khusus anak dan pengelolaan data/informasi kekerasan terhadap anak.
- e. menyusun bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan perlindungan khusus anak dan pengelolaan data/ informasi kekerasan terhadap anak.
- f. menyusun bahan fasilitasi, sosialisasi, dan distribusi kebijakan perlindungan khusus anak dan pengelolaan data/ informasi kekerasan terhadap anak.
- g. menyusun bahan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan perlindungan khusus anak dan pengelolaan data/informasi kekerasan terhadap anak.
- h. memantau dan melaporkan penerapan kebijakan perlindungan khusus anak dan kebijakan pengelolaan data/ informasi kekerasan terhadap anak.

- i. menyusun bahan evaluasi upaya pencegahan kekerasan terhadap anak pada lembaga Pemerintah, non Pemerintah, dan dunia usaha.
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan anak sesuai bidang tugas.

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA :

Triwulan : II

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Program	Kegiatan	Anggaran
				1	2	3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tersedianya layanan perlindungan anak	Persentase Penanganan kasus korban kekerasan terhadap anak yang terselesaikan oleh P2TP2A	Persen	100	100	100	Program Peningkatan Perlindungan Anak	Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak	23.966.000,-
		Jumlah PATBM yang dibentuk dan di bina	Desa	1	0	0			

B. CAPAIAN KINERJA 2019

Triwulan : II

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran (%)
				1	2	3	1	2	3						
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10	11	12
1	Tersedianya layanan perlindungan Anak	Persentase Penanganan kasus korban kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	Persen	1 0 0	1 0 0	1 0 0	1 0 0	1 0 0	1 0 0	-	Program Peningkatan Perlindungan Anak	Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak	23.966.000,-	7.820.415,-	32,63
		Jumlah PATBM yang dibentuk dan di bina	Desa	1	0	0	1	0	0						

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja 26

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan II 2019 di atas, capaian kinerja Seksi Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Hulu Sungai Selatan dari 1 (satu) Sasaran dan 1 (satu) indikator sasaran telah dilaksanakan dan mencapai 100,00% atau melebihi target dengan ringan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran : Tersedianya layanan perlindungan anak

Indikator Kinerja : Persentase penanganan kasus korban kekerasan anak yang terselesaikan oleh P2TP2A (target pencapaian dimulai pada triwulan II), kegiatan yang mendukung dalam pelaksanaan antara lain :

- Jumlah perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) yang dibentuk atau dibina, tercapai (100%)
- Jumlah pendampingan pelaksanaan penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang melaporkan atau pun yang terdata, (100%).
- Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan bulanan Seksi Perlindungan Khusus Anak Tahun 2019 disusun dan disampaikan tepat waktu, tercapai (100%)
- Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan triwulan Seksi Perlindungan Khusus Anak Tahun 2019 disusun dan disampaikan tepat waktu, tercapai (100%)

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Peningkatan Perlindungan Anak melalui Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan

Perlindungan Anak dengan serapan anggaran sebesar Rp. 7.820.415,-

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut diatas yaitu masih kurangnya SDM dalam pelayanan maupun pendampingan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak sehingga dalam penyelesaian dan pendampingannya memerlukan tenaga dan waktu yang cukup lama.

D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut:

1. Perlunya Sumber Daya Manusia yang mendukung dalam pelayanan dan pendampingan Perlindungan anak yang sudah terlatih dalam penanganan kasus.
2. Perlunya kerjasama masyarakat / desa untuk dibentuk Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (✓).

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan II tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100,00% (sesuai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja yaitu masih kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam penanganan dan pendampingan kasus kekerasan terhadap anak sehingga pelayanan cepat terselesaikan.

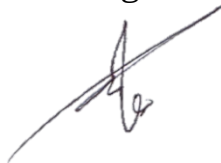
C. Saran/masukan

Perlunya sumber daya manusia yang terlatih dalam penanganan dan pendampingan kasus kekerasan terhadap anak.

Tanggal, 01 Juli 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kabid
Perlindungan Anak,



Hj. TATIK SRI RAHAYU, S.Pt, MP

Pembina Tk. I

NIP. 19681007 199803 2 002

Kasi
Perlindungan Khusus Anak



LAILY DIMIATI, S.Sos

Penata

NIP.19731116 200804 2 001

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : DESSYANNA PUSPITASARI, S.Psi
NIP : 19801222 201101 2 005
PANGKAT / GOL : Penata (III/c)
JABATAN : Kepala Sub. Bagian Perencanaan Dinas PPKBPPA
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Triwulan : II

BAB I

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

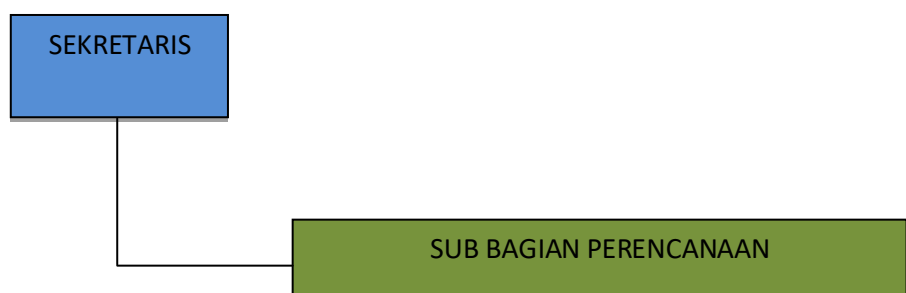
Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Stuktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa tugas Sub. Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut :

1. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan;
2. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan perubahan anggaran;
5. melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang;

6. menyusun rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyusunan rencana anggaran belanja dan rencana pendapatan dan penerimaan;
8. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan kinerja;
9. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data yang berhubungan dengan bidang perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan;
10. menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kegiatan Dinas, baik laporan rutin maupun laporan insidental;
11. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Perencanaan; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai bidang tugas

Untuk melaksanakan tugas diatas Sub. Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJAKINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Triwulan : II

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Terpenuhinya dokumen AKIP dari aspek kualitas	Dokumen AKIP memenuhi aspek kualitas	Dokumen	2	Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Dokumen AKIP	4.910.000

B. Capaian Kinerja 2019

Triwulan : I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran (%)
1	Terpenuhinya dokumen AKIP dari aspek kualitas	Dokumen AKIP memenuhi aspek kualitas	Dokumen	2	2	100	Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Dokumen AKIP	4.910.000	2.055.000	41,85
Rata-rata Capaian Kinerja Triwulan II				2	2	100					

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan II Tahun 2019 di atas capaian kinerja Sub. Bagian Perencanaan indikator sasaran dapat mencapai 100% dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran : Terpenuhinya dokumen AKIP dari aspek kualitas, capaian kinerja 100%.

Indikator Kinerja :

- Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas (Renstra, LKj Triwulan) tercapai (100%)

D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi sasaran dan indikator sasaran yang tdak tercapai.

Sasaran yang tidak tercapai dari uraian diatas tidak ada. Semua dokumen AKIP dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (\surd).

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan II tahun 2019 diperoleh capaian kinerja sasaran 100% dari target yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja tidak ada. Berkat kerjasama dan koordinasi yang baik antar bidang di Dinas PPKBPPPA sehingga dokumen AKIP dapat diselesaikan tepat waktu.

C. Saran/masukan

Meningkatkan koordinasi antara pelaksana pengumpul data dengan masing-masing bidang sesuai dengan SOP Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja.

Tanggal, Juli 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung
Sekretaris,



MOCH. ADIB, SKM, M.Kes
Pembina Tk.I
NIP. 19700624 199602 1 001

Kepala Sub Bidang Perencanaan,



Dessyanna Puspitasari, S.Psi
Penata
NIP. 19801222 201101 2 005

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : RUSNAWATI, SKM
NIP : 19740321 200212 2 003
PANGKAT/GOL : PENATA/IIIc
JABATAN : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PPKBPPPA KAB.
HSS
TRIWULAN : II Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

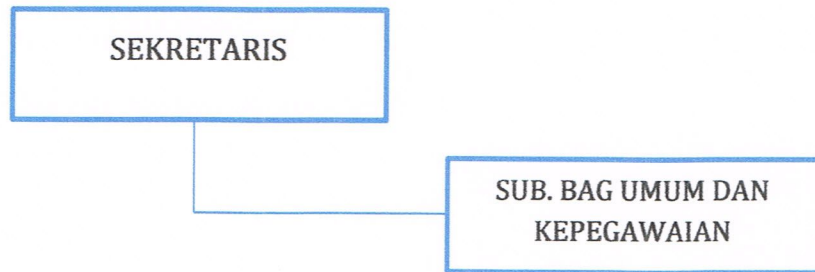
A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai usulan masing-masing bidang;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang;
- e. Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- f. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- g. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- h. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian, meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- l. Menyiapkan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi DUK, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;

- m. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) PADA Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugas.

B. Struktur Jabatan



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut :

- A. Perjanjian Kinerja
Triwulan II
- B. Capaian Kinerja
Triwulan II

Indikator	Satuan	Target	Program	Kegiatan	Anggaran
Pelayanan administrasi sesuai standar	Bulan	3	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa dan administrasi kantor	Rp 44.545.200,00
um 1				Penyediaan jasa komunikasi,sumber air dan listrik	Rp 63.600.000,00
				Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Rp 14.000.000,00
				Penyediaan makanan dan minuman	Rp 28.104.000,00
				Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya	Rp 45.850.000,00
				Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan lapangan	Rp 403.333.650,00
			Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 80.239.000,00
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp 94.520.000,00
				Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 68.070.000,00
					Rp 842.261.850,00

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran
Pelayanan administrasi sesuai standar	Bulan	3	100	100	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa dan administrasi kantor	Rp 44.545.200,00	Rp 20.109.300,00	45%
						Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik	Rp 63.600.000,00	Rp 14.532.967,00	23%
						Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya	Rp 14.000.000,00	Rp -	0%
						Perencanaan makanan dan minuman	Rp 28.104.000,00	Rp 6.000.000,00	21%
						Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan lapangan	Rp 45.850.000,00	Rp 18.300.000,00	40%
							Rp 403.333.650,00	Rp 112.108.511,00	28%
					Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 80.239.000,00	Rp 36.522.000,00	46%
						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp 94.520.000,00	Rp 14.672.092,00	16%
						Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 68.070.000,00	Rp 2.200.000,00	3%
							Rp 842.261.850,00	Rp 224.444.870,00	24,6

an Langsung

Kandungan, 30 Juni 2019

PPTK

AS

1, M. Kes

99602 1 001

RUSNAWATI, SKM

NIP. 19740321 200212 2 003

C. Evaluasi dan Analisa Kinerja

Metode penyimpulan Capaian Kinerja sbb

No	Capaian	Interprestasi
1	> 100%	Melebihi target
2	= 100%	Mencapai target
3	<100%	Tidak mencapai target

Berdasarkan tabel capaian kinerja triwulan II 2019 di atas, untuk capaian sub bagian umum dan kepegawaian mencapai 100% dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran : Terlaksananya pelayanan penatausahaan administrasi umum dan kepegawaian, capaian kinerja adalah 100%

Indikator Kinerja :

- Pelayanan administrasi sesuai target, tercapai 100%, Semenara kegiatan penyebarluasan informasi tugas pokok dan fungsi SKPD masih 0% dikarenakan belum jadwal pelaksanaan.

D. Rencana Tindak Lanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi sasaran dan indikator sasaran yang tidak tercapai.

Sasaran yang tidak tercapai dari uraian di atas tidak ada, pelayanan administrasi sesuai standar sudah dapat direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan.

E. Tanggapan Atasan Langsung

<input type="checkbox"/>	Laporan Kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Laporan diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dengan mencontreng (y)

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada Triwulan II Tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran adalah 100%

B. Permasalahan

Adanya mekanisme internal

Adanya mekanisme revisi anggaran Kas dengan dokumen pelaksanaan anggaran

Adanya mekanisme pengadaan barang dan jasa

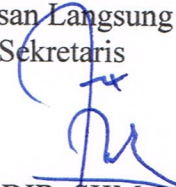
Yang memperlambat proses realisasi dan penyerapan

C. Saran/Masukan


Perbaikan termasuk merevisi beberapa peraturan agar permasalahan yang ada dapat teratasi dengan baik, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Kandangan, 30 Juni 2019

Mengetahui :
Atasan Langsung
Sekretaris


MOCH. ADIB, SKM, M. Kes
NIP. 19700624/199602 1 001

Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian
Dinas PPKBPPPA Kab. HSS


RUSNAWATI, SKM
NIP. 19740321 200212 2 003

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : Hernyanti
NIP : 19820103 2007012 004
PANGKAT / GOL : Penata Muda / III/a
JABATAN : Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas
PPKBPPPA Kab. HSS
TRIWULAN : II Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

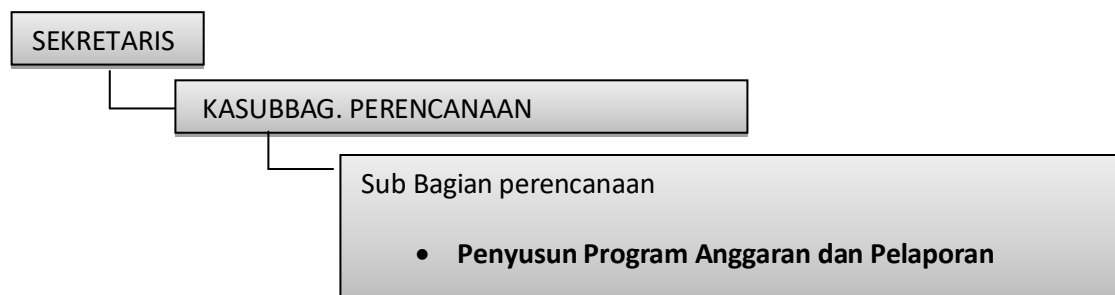
A. Uraian Tugas

Berdasarkan keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/201/KUM/2018 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bahwa tugas Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan Perencanaan adalah sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan dan mengirim lembar usulan kegiatan ke masing-masing unit kerja sebagai bahan penyusunan RKA
- b. Menerima dan mengumpulkan bahan usulan rencana kegiatan dan anggaran yang telah diisi oleh pejabat yang berwenang sebagai bahan penyusunan RKA
- c. Membuat dan menyerahkan konsep usulan rencana kegiatan dan anggaran kepada atasan untuk dikoreksi kebenarannya
- d. Menginput data usulan rencana kegiatan dan anggaran ke dalam aplikasi RKA sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
- e. Meminta pengesahan/persetujuan RKA kepada pejabat/Instansi yang berwenang untuk kelancaran pelaksanaan operasionalnya
- f. Mengirim usulan rencana kegiatan dan anggaran tahun depan dan semua kelengkapan data pendukung dari masing-masing unit kerja, sebagai bahan pembuatan RKA sesuai dengan tugas dan fungsi (tusi) yang mengacu pada Renstra SKPD

- g. Menerima dan mengumpulkan laporan akuntabilitas dari masing-masing unit kerja
- h. Menyortir dan mengklasifikasikan informasi dari laporan akuntabilitas kinerja masing-masing unit kerja
- i. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan
- j. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan lain LKPJ yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan
- k. Menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) murni dan perubahan
- l. Menyiapkan bahan e-planning
- m. Menyiapkan bahan e-budgeting
- n. Menyiapkan bahan e-monev

B. Struktur jabatan (peta jabatan)



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja :

Triwulan : II

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terlaksananya kegiatan penyusunan program anggaran dan pelaporan yang meliputi penyiapan dan pengumpulan bahan, penginputan data, koordinasi dan penyusunan pelaporan, dibagian perencanaan, sesuai dengan pedoman kerja untuk tertib administrasi perencanaan	Jumlah bahan usulan rencana kegiatan dan anggaran yang telah diisi oleh pejabat yang berwenang	Dokumen	2
		Jumlah data usulan rencana kegiatan dan anggaran sesuai petunjuk dan pedoman yang berlaku	Dokumen	2
		Jumlah data usulan rencana kegiatan dan anggaran tahun depan dan semua kelengkapan data pendukung dari masing-masing unit kerja petunjuk dan pedoman yang berlaku	Dokumen	2
		Jumlah bahan e Budgeting	Dokumen	2
		Jumlah bahan e Monev	Dokumen	3

B. Capaian kinerja 2019

Triwulan : II

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1	Terlaksananya kegiatan penyusunan program anggaran dan pelaporan yang meliputi penyiapan dan pengumpulan bahan, penginputan data, koordinasi dan penyusunan pelaporan dibidang pengelola bahan perencanaan, sesuai dengan pedoman kerja untuk tertib administrasi perencanaan	Jumlah bahan usulan rencana kegiatan dan anggaran yang telah diisi oleh pejabat yang berwenang	Dokumen	2	2	100
		Jumlah data usulan rencana kegiatan dan anggaran sesuai petunjuk dan pedoman yang berlaku	Dokumen	2	2	100
		Jumlah data usulan rencana kegiatan dan anggaran tahun depan dan semua kelengkapan data pendukung dari masing-masing unit kerja petunjuk dan pedoman yang berlaku	Dokumen	2	2	100
		Jumlah bahan e Budgeting	Kegiatan	25	25	100
		Jumlah bahan e Monev	Dokumen	3	3	100
		Rata-rata Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2019				

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100 %	Melebihi Target
2	=100 %	Mencapai Target
3	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja triwulan II tahun 2019 di atas telah capai capaian kinerja Penyusunan program Anggaran dan Pelaporan dari 1 (satu) Sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran sudah dapat mencapai 100% atau telah sesuai target dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran : Terlaksananya kegiatan penyusunan yang meliputi penyiapan dan pengumpulan bahan, koordinasi dan penyusunan pelaporan dibagian penyusunan program anggaran dan pelaporan, sesuai dengan pedoman kerja untuk tertib administrasi perencanaan, capaian kinerja 100%.

Indikator Kinerja :

- Jumlah bahan usulan rencana kegiatan yang diisi oleh pejabat yang berwenang, tercapai (100%).
- Jumlah data usulan rencana kegiatan dan anggaran sesuai petunjuk dan pedoman yang berlaku, tercapai (100%)
- Jumlah data usulan rencana kegiatan dan anggaran tahun depan dan semua kelengkapan data pendukung dari masing-masing unit kerja sesuai petunjuk dan pedoman yang berlaku (100%)
- Jumlah bahan e Budgeting, tercapai (100%)
- Jumlah bahan e monev, tercapai (100%)

D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi sasaran dan indicator yang tidak tercapai dari uraian diatas tidak ada. Semua berkas dan laporan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

E. Tanggapan Atasan Langsung

	Laporan kurang baik
	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain.....(ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (\surd).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan :

Berdasarkan capaian triwulan II tahun 2019 diperoleh hasil capaian kinerja sasaran sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja kurang optimal berkat kerja sama dan koordinasi yang baik antar pelaksana dan atasan langsung serta bidang di Dinas PPKBPPPA sehingga berkas dan laporan dapat diselesaikan tepat waktu

C. Saran/ masukan :

1. Lebih meningkatkan lagi kerjasama Bagian Perencanaan dengan Bidang
2. Lebih meningkatkan lagi koordinasi antar bawahan dan atasan langsung;
3. Data capaian kinerja yang dikirimkan harus dikoordinasikan terlebih dahulu kepada pejabat yang membidangi dan dengan pihak-pihak yang terkait.

Kandangan, 1 Juli 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kepala Sub Bagian Perencanaan
Perencanaan



Dessyanna Puspitasari, S. Psi
Penata (III/c)
NIP. 19801222 201101 2 005

Penyusunan Prog Angg Pelaporan
Perencanaan



Hernyanti, S. Sos
Penata Muda (III/a)
NIP. 19820103 200701 2 004

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : LINA RAINA
NIP : 19740717 199403 2 003
PANGKAT / GOL. : Penata Muda Tingkat I, III/b
JABATAN : Pengelola Kepegawaian
Dinas PPKBPPPA Kab. HSS
TRIWULAN : II Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

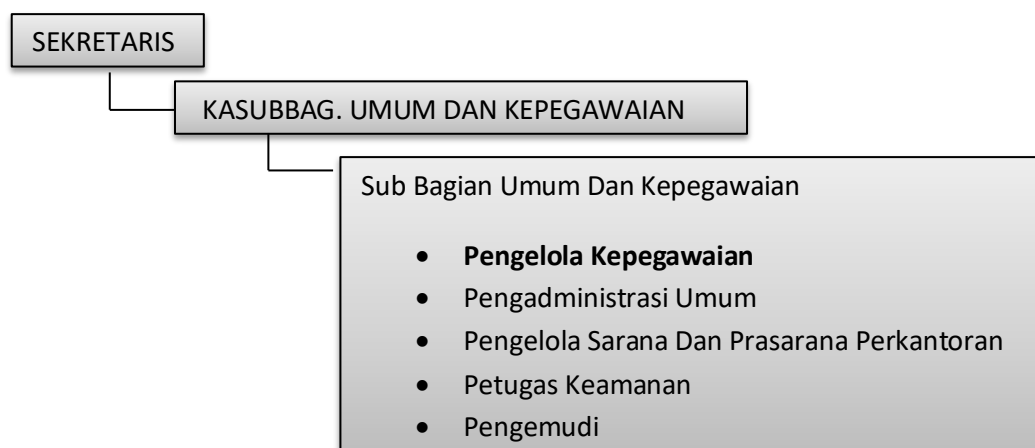
A. Uraian Tugas

Berdasarkan keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/201/KUM/2018 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bahwa tugas Pengelola Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- a. Meneliti dan mencatat dalam buku pen jagaan data pegawai yang akan mengalami perubahan kenaikan pangkat dan perubahan kenaikan gaji berkala sebagai acuan pelaksanaan tugas
- b. Menghimpun dan menyiapkan berkas lampiran untuk proses Kenaikan Pangkat dan perubahan kenaikan gaji berkala serta pelaksanaan prosesnya
- c. Menghimpun dan menyiapkan berkas lampiran untuk proses pensiun serta pelaksanaan prosesnya
- d. Meneliti, mencatat dan mendistribusikan SK Kenaikan Pangkat dan Kenaikan gaji lerkala kepada pegawai yang bersangkutan sebagai pemberitahuan
- e. Melakukan analisa kebutuhan diklat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi pegawai
- f. Meneliti dan menyusun konsep usulan mengikuti Diklat bagi pegawai yang telah memenuhi syarat dalam rangka pengembangan ketrampilan pegawai
- g. Menghimpun, meneliti dan mengadministrasikan dan memelihara naskah dinas kepegawaian perorangan yang mengalami perubahan, penambahan ke dalam file pribadi peroangan guna tertib administrasi.

- h. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (Nominatif) sesuai dengan perubahan data perorangguna mengetahui posisi pegawai yang bersangkutan
- i. Memproses dan mengadministrasikan surat izin cuti pegawai
- j. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep rencana kebutuhan pegawai
- k. Mengelola absensi pegawai
- l. Mengelompokkan data kepegawaian sesuai masalahnya untuk memudahkan dalam pelaksanaan tugas
- m. Mengendalikan data kepegawaian yang telah dikelompokkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas
- n. Mengkoordinasikan dengan unit-unit kerja terkait dan atau instansi lain dalam rangka pengelolaan data kepegawaian agar dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal
- o. Menyajikan data kepegawaian sesuai permintaan pimpinan secara berkala sebagai bahan informasi
- p. Membuat laporan hasil kegiatan operasional sebagai bahan masukan untuk perbaikan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis

B. Struktur jabatan (peta jabatan)



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja :

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Triwulan : II

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
				April	Mei	Juni
1	Terlaksananya kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan dibidang kepegawaian , sesuai dengan pedoman kerja untuk tertib administrasi kepegawaian	Jumlah bahan kerja dan data yang berkaitan dengan pengelolaan kepegawaian yang harus disiapkan	Dokumen	5	5	5
		Jumlah kegiatan koordinasi pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	2
		Jumlah kegiatan penyusunan laporan pengelolaan kepegawaian yang dilakukan	Laporan	1	1	1
		Jumlah penyusunan pelaporan pelaksanaan pekerjaan kepada atasan yang dilaksanakan	Laporan	1	1	1

B. Capaian kinerja 2019

Triwulan : I

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target			Realisasi	Capaian kinerja (%)
				April	Mei	Juni		
1	Terlaksananya kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan dibidang kepegawaian , sesuai dengan pedoman kerja untuk tertib administrasi kepegawaian	Jumlah bahan kerja dan data yang berkaitan dengan pengelolaan kepegawaian yang harus disiapkan	Dokumen	5	5	5	15	100
		Jumlah kegiatan koordinasi pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	2	6	100
		Jumlah kegiatan penyusunan laporan pengelolaan kepegawaian yang dilakukan	Laporan	1	1	1	3	100
		Jumlah penyusunan pelaporan pelaksanaan pekerjaan kepada atasan yang dilaksanakan	Laporan	1	1	1	3	100
Rata-rata Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2019								100

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100 %	Melebihi Target
2	=100 %	Mencapai Target
3	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja triwulan II tahun 2019 di atas telah capai capaian kinerja pengelola kepegawaian dari 1 (satu) Sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran sudah dapat mencapai 100% atau telah sesuai target dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran : Terlaksananya kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan dibidang kepegawaian , sesuai dengan pedoman kerja untuk tertib administrasi kepegawaian, capaian kinerja 100%.

Indikator Kinerja :

- Jumlah bahan kerja dan data yang berkaitan dengan pengelolaan kepegawaian yang harus disiapkan, tercapai (100%).
- Jumlah kegiatan koordinasi pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan, tercapai (100%)
- Jumlah kegiatan penyusunan laporan pengelolaan kepegawaian yang dilakukan, tercapai (100%)
- Jumlah penyusunan pelaporan pelaksanaan pekerjaan kepada atasan yang dilaksanakan, tercapai (100%)

D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi sasaran dan indicator yang tidak tercapai dari uraian diatas tidak ada. Semua berkas dan laporan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

E. Tanggapan Atasan Langsung

	Laporan kurang baik
	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain.....(ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (\checkmark).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan :

Berdasarkan capaian triwulan II tahun 2019 diperoleh hasil capaian kinerja sasaran sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tidak ada berkat kerja sama dan koordinasi yang baik antar pelaksana dan atasan langsung serta antar bidang di Dinas Perikanan sehingga berkas dan laporan dapat diselesaikan tepat waktu

C. Saran/ masukan :

1. Lebih meningkatkan lagi koordinasi antar bawahan dan atasan langsung;
2. Data capaian kinerja yang dikirimkan harus dikoordinasikan terlebih dahulu kepada pejabat yang membidangi dan dengan pihak-pihak yang terkait.

Kandangan, 1 Juli 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kepala Sub Bagian Kepegawaian



Hj. RUSNAWATI, SKM
Penata (III/c)
NIP. 19740321 200212 2 003

Pengelola Kepegawaian



LINA RAINA
Penata Muda Tk. 1 (III/b)
NIP. 19740717 199403 2 003

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : Hj. ANETA LESFIANI, A. Md
NIP : 19700531 199103 2 006
PANGKAT /GOL : Penata Muda Tk. I/III/b
JABATAN : PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA
TRIWULAN : II Tahun 2019

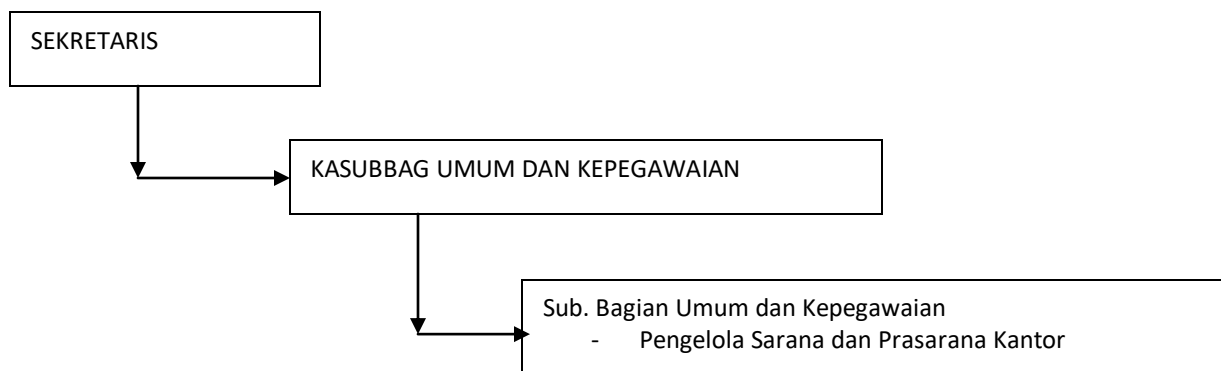
BAB I PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas

Berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/201/KUM/2018 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bahwa tugas Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor adalah sebagai berikut :

- a. Mengontrol keadaan gedung dan halaman kantor untuk mengetahui bagian yang rusak dan kotor untuk segera diperbaiki dan dibersihkan
- b. Menerima dan mengumpulkan laporan kerusakan gedung dan halaman kantor yang telah disetujui atasan untuk segera dikerjakan
- c. Mengecek kerusakan gedung dan halaman kantor yang dilaporkan untuk memastikan kebenarannya dan menentukan bahan yang perlu diganti atau memperbaiki
- d. Memperbaiki dan mengganti bagian gedung dan halaman kantor yang rusak agar menjadi baik
- e. Meminta tanda tangan pimpinan unit kerja atau melaporkan kerusakan sebagai tanda bukti perbaikan yang telah diselesaikan
- f. Memelihara kondisi gedung dan halaman kantor serta memperbaiki bagian gedung yang rusak agar tetap terpelihara dan terjaga kebersihannya
- g. Mengawasi pekerjaan perbaikan gedung dan halaman kantor yang diperbaiki oleh pihak lain untuk mengetahui perkembangan perbaikannya
- h. Melaporkan perbaikan gedung dan halaman kantor baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pemborong sebagai bahan masukkan bagi atasan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis
- j. Menyelenggarakan Akuntansi Barang Milik Negara di lingkungan Satuan Kerja
- k. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah
- l. Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang
- m. Menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang
- n. Mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang dalam berita acara
- o. Menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang
- p. Membuat Kartu Inventaris Ruangan semesteran dan tahunan
- q. Melakukan Stock Opname barang persediaan

B.Struktur Jabatan (peta jabatan)



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja
Triwulan II :2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terlaksananya kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan ,koordinasi dan penyusunan laporan di Bidang Sarana dan Prasarana kantor sesuai dengan petunjuk teknis untuk kelancaran tugas.	1. Jumlah bahan kerja dan data yang berkaitan dengan pengelolaan Program yang harus disiapkan	Dokumen	3
		2. Jumlah kegiatan Koodinasi pengelolaan yang di laksanakan	Kegiatan	3
		3. Jumlah Kegiatan penyusunan laporan pengelolaan yang di lakukan	Laporan	3
		4. Jumlah Penyusunan pelaporan pelaksanaan pekerjaan kepada atasan yang di laksanakan.	Laporan	3

B. Capaian Kinerja 2019
Triwulan II : 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	Terlaksananya kegiatan Pengelolaan dalam Penyiapan bahan	Jumlah bahan kerja dan data yang berkaitan dengan pengelolaan Program yang harus di siapkan	Dokumen	3	3	100
2	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah kegiatan Koodinasi pengelolaan yang di laksanakan	Kegiatan	3	3	100
3	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Kegiatan penyusunan laporan pengelolaan yang di lakukan	Laporan	3	3	100
4	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan yang di lakukan	Laporan	3	3	100

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	100%	Melebihi Target
2	=100%	Mencapai Target
3	100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan II tahun 2019 di atas rata –rata capaian kinerja Pengelola Sarana dan Prasarana kantor dari 1(satu) sasaran dan 4 (empat) indikator Sasaran dapat mencapai 100% dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran : Terlaksananya kegiatan Pengelolaan dalam Penyiapan bahan , capain kinerja 100%
Indikator Kinerja :
 - Jumlah bahan kerja dan data yang berkaitan dengan pengelolaan Program yang harus di siapkan , tercapai (100%).
2. Sasaran : Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Bidang Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor , capaian kinerja 100%
Indikator Kinerja :
 - Jumlah kegiatan Koodinasi pengelolaan yang di laksanakan , tercapai (100%)
3. Sasaran : Terlaksananya Penyusunan Laporan Kegiatan Bidang Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor , capaian kinerja 100%
Indikator Kinerja :
 - Jumlah Kegiatan penyusunan laporan pengelolaan yang di lakukan , tercapai (100%)
4. Sasaran : Terlaksananya Penyusunan Laporan Kegiatan Bidang Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor, capaian kinerja 100%
Indikator Kinerja : Jumlah Kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan yang di lakukan , tercapai (100%)

D. Rencana Tindak Lanjut

Capaian kinerja Triwulan II tahun 2019 di atas rata-rata capaian kinerja Pengurus Barang Pembantu

Prasarana Kantor dari 1 (satu) Sasaran dan 4 (empat) Indikator Sasaran dapat mencapai 100%.
Diharapkan untuk Triwulan berikutnya supaya dapat ditingkatkan dan lebih baik lagi

E. Tanggapan Atasan Langsung

Laporan Kurang Baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain.....(ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat di isi sesuai kebutuhan yang di perlukan dengan mencentang (v)

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan II 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100% mencapai target yang telah ditetapkan.

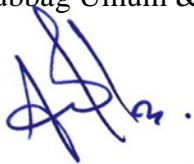
B. Permasalahan :

Permasalahan yang di hadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja : Pengiriman bahan / data oleh bidang kadang terlambat.

C. Saran / Masukan :

Ada percepatan dalam pengiriman bahan / data

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kasubbag Umum & Kepegawaian



Hj. Rusnawati, SKM
Penata / III/c
19742103 200212 2 003

Kandangan, 1 Juli 2019

Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor



Hj. Aneta Lesfiyani. A. Md
Penata Muda / III/b
19700531 199103 2 006

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : AHMAD SAYUTI
NIP : 19720901 200604 1 015
PANGKAT / GOL : Pengatur Tk.I (II/d)
JABATAN : Pengemudi pada Dinas PPKBPPPA
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
TRIBUNAN : II Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas

Berdasarkan hasil Analisis Jabatan di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bawah tugas Pengemudi adalah sebagai berikut :

- Melakukan kegiatan menyiapkan bahan kelengkapan kerja yang berkaitan dengan peralatan kendaraan bermotor untuk kegiatan mengemudikan kendaraan dinas, sesuai dengan pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
- Melakukan kegiatan pelayanan antar jemput pejabat atau pegawai, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan agar pelaksanaan kerja berjalan lancar;
- Melakukan kegiatan pelayanan transportasi lainnya yang bersipat kedinasan, sesuai dengan juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan pengemudi;
- Membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada atasan sesuai dengan pedoman kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan bahan masukan serta kebijakan pimpinan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas agar kegiatan berjalan lancar.

B. Struktur jabatan (peta jabatan)



BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Tribulan : II

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terlaksananya kegiatan menyiapkan bahan kelengkapan kerja yang berkaitan dengan peralatan kendaraan bermotor untuk kegiatan mengemudikan kendaraan dinas, sesuai dengan pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan	Jumlah bahan kelengkapan kerja yang berkaitan dengan peralatan kendaraan bermotor untuk kegiatan mengemudikan kendaraan dinas, sesuai dengan pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan	Peralatan kerja	55
2	Terlaksananya kegiatan pelayanan antar jemput pejabat atau pegawai, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan agar pelaksanaan kerja berjalan lancar	Jumlah kegiatan pelayanan antar jemput pejabat atau pegawai, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan agar pelaksanaan kerja berjalan lancar	Kegiatan	55
3	Terlaksananya kegiatan pelayanan transportasi lainnya yang bersipat kedinasan, sesuai dengan juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan pengemudi	Jumlah kegiatan pelayanan transportasi lainnya yang bersipat kedinasan, sesuai dengan juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan pengemudi	Kegiatan	6
4	Terlaksananya pembuatan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada atasan sesuai dengan pedoman kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan bahan masukan serta kebijakan pimpinan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada atasan sesuai dengan pedoman kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan bahan masukan serta kebijakan pimpinan	Laporan	3
5	Terlaksananya tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas agar kegiatan berjalan lancar	Jumlah tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas agar kegiatan berjalan lancar	Kegiatan	55

B. Capaian kinerja 2019

Tribulan : II

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1	Terlaksananya kegiatan menyiapkan bahan kelengkapan kerja yang berkaitan dengan peralatan kendaraan bermotor untuk kegiatan mengemudikan kendaraan dinas, sesuai dengan pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan	Jumlah bahan kelengkapan kerja yang berkaitan dengan peralatan kendaraan bermotor untuk kegiatan mengemudikan kendaraan dinas, sesuai dengan pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan	Peralatan kerja	55	55	100
2	Terlaksananya kegiatan pelayanan antar jemput pejabat atau pegawai, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan agar pelaksanaan kerja berjalan lancar	Jumlah kegiatan pelayanan antar jemput pejabat atau pegawai, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan agar pelaksanaan kerja berjalan lancar	Kegiatan	55	55	100
3	Terlaksananya kegiatan pelayanan transportasi lainnya yang bersipat kedinasan, sesuai dengan juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan pengemudi	Jumlah kegiatan pelayanan transportasi lainnya yang bersipat kedinasan, sesuai dengan juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan pengemudi	Kegiatan	6	6	100
4	Terlaksananya pembuatan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada atasan sesuai dengan pedoman kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan bahan masukan serta kebijakan pimpinan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada atasan sesuai dengan pedoman kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan bahan masukan serta kebijakan pimpinan	Laporan	3	3	100

5	Terlaksanannya tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas agar kegiatan berjalan lancar	Jumlah tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas agar kegiatan berjalan lancar	Kegiatan	55	55	100
Rata-rata Capaian Kinerja Tribulan II Tahun 2019						100

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100 %	Melebihi Target
2	=100 %	Mencapai Target
3	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja tribulan II tahun 2019 di atas rata-rata capaian kinerja Pengemudi dari 5 (lima) sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja. Sasaran dapat mencapai 100% atau mencapai target dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran : Terlaksanannya kegiatan menyiapkan bahan kelengkapan kerja yang berkaitan dengan peralatan kendaraan bermotor untuk kegiatan mengemudikan kendaraan dinas, sesuai dengan pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, capaian kinerja 100%.

Indikator Kinerja :

- Jumlah kegiatan menyiapkan bahan kelengkapan kerja yang berkaitan dengan peralatan kendaraan bermotor untuk kegiatan mengemudikan kendaraan dinas, sesuai dengan pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, mencapai target (100%).

2. Sasaran : Terlaksanannya kegiatan pelayanan antar jemput pejabat atau pegawai, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan agar pelaksanaan kerja berjalan lancar, capaian kinerja 100%.

Indikator Kinerja :

- Jumlah kegiatan pelayanan antar jemput pejabat atau pegawai, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan agar pelaksanaan kerja berjalan lancar, mencapai target (100%)

3. Sasaran : Terlaksanannya kegiatan pelayanan transportasi lainnya yang bersipat kedinasan, sesuai dengan juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan pengemudi, capaian kinerja 100%.

Indikator Kinerja :

- Jumlah kegiatan pelayanan transportasi lainnya yang bersipat kedinasan, sesuai dengan juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan pengemudi, mencapai target (100%).
4. Sasaran : Terlaksananya pembuatan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada atasan sesuai dengan pedoman kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan bahan masukan serta kebijakan pimpinan, capaian kinerja 100%.
- Indikator kinerja :
- Jumlah laporan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada atasan sesuai dengan pedoman kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan bahan masukan serta kebijakan pimpinan, mencapai target (100%)
5. Sasaran : Terlaksananya tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas agar kegiatan berjalan lancar, capaian kinerja 100%.
- Indikator kinerja :
- Jumlah laporan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas agar kegiatan berjalan lancar, mencapai target (100%)

D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk meningkatkan sasaran dan indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya kegiatan menyiapkan bahan kelengkapan kerja yang berkaitan dengan peralatan kendaraan bermotor untuk kegiatan mengemudikan kendaraan dinas, sesuai dengan pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Indikator Kinerja : jumlah kegiatan menyiapkan bahan kelengkapan kerja yang berkaitan dengan peralatan kendaraan bermotor untuk kegiatan mengemudikan kendaraan dinas, sesuai dengan pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, dengan cara menyimpan bahan kerja dan peralatan pada tempatnya (lemari atau meja).
2. Terlaksananya kegiatan pelayanan antar jemput pejabat atau pegawai, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan agar pelaksanaan kerja berjalan lancar. Indikator Kinerja : jumlah kegiatan pelayanan antar jemput pejabat atau pegawai, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan agar pelaksanaan kerja berjalan lancar, dengan cara melakukan pelayanan prima dan tepat waktu.
3. Terlaksananya kegiatan pelayanan transportasi lainnya yang bersipat kedinasan, sesuai dengan juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan pengemudi. Indikator Kinerja : jumlah kegiatan pelayanan transportasi lainnya yang bersipat kedinasan, sesuai dengan juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan pengemudi, dengan cara melakukan pelayanan prima dan tepat waktu.
4. Terlaksananya pembuatan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada atasan sesuai dengan pedoman kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan bahan masukan serta kebijakan pimpinan. Indikator kinerja : jumlah laporan hasil pelaksanaan pekerjaan

kepada atasan sesuai dengan pedoman kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan bahan masukan serta kebijakan pimpinan, dengan cara membuat penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang dibuat pada setiap akhir tahun pada tahun berjalan.

5. Terlaksanannya tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas agar kegiatan berjalan lancar. Indikator kinerja : jumlah laporan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas agar kegiatan berjalan lancar, dengan cara melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai petunjuk atasan yang berwenang.

E. Tanggapan Atasan Langsung

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang ().

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Tribulan II tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100% (mencapai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, antara lain :
tidak ada lemari atau meja untuk menyimpan bahan kerja dan peralatan pada tempatnya.

C. Saran/ masukan :

Adanya lemari atau meja untuk menyimpan bahan kerja dan peralatan pada tempatnya.

Tanggal, Juli 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian,



Hj. RUSNAWATI, SKM
Penata III/c
NIP. 19740321 200212 2 003

Pengemudi,



AHMAD SAYUTI
Pengatur Tk.I(II/d)
NIP. 19720901 200604 1 015

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : RIDUANSYAH
NIP : 19820108 201001 1 004
PANGKAT / GOL. : Pengatur Muda Tingkat I, II/b
JABATAN : Petugas Keamanan Kantor
Dinas PPKBPPPA Kab.HSS
TRIWULAN : II Tahun 2019

BAB I

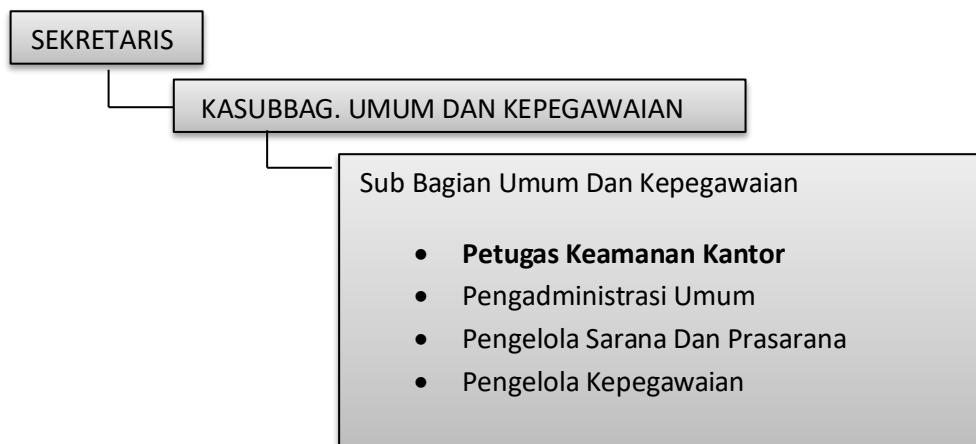
PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas

Berdasarkan keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/201/KUM/2018 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bahwa tugas Petugas Keamanan Kantor adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga kantor pada waktu malam hari mulai pukul 19.00 WIB s/d 06,30 WIB setiap har
- b. Melakukan pengontrolan lingkungan sekitar kantor untuk memastikan kondisi keamanan kantor
- c. Menyalakan & mematikan lampu kantor setelah jaga malam
- d. Memeriksa kunci-kunci pintu dan pagar kantor
- e. Membuat laporan tentang kejadian-kejadian penting selama masa penjagaan pada buku laporan
- f. Mengisi buku serah terima jaga tentang kondisi / keadaan kantor saat berjaga, baik dengan penjaga keamanan sebelum / sesudahnya maupun dengan pramu kantor
- g. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh atasan sesuai bidangnya baik lisan maupun tertulis

B. Struktur jabatan (peta jabatan)



LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : RIDUANSYAH
NIP : 19820108 201001 1 004
PANGKAT / GOL. : Pengatur Muda Tingkat I, II/b
JABATAN : Petugas Keamanan Kantor
Dinas PPKBPPPA Kab.HSS
TRIWULAN : II Tahun 2019

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja :

Triwulan : I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
				Januari	Februari	Maret
1	Terlaksananya tugas yang meliputi kegiatan keamanan, penertiban untuk kenyamanan dilingkungan kantor sesuai dengan petunjuk pelaksanaan agar kegiatan berjalan lancar	Jumlah bahan kerja dan data yang berkaitan dengan bidang keamanan yang harus disiapkan	Peralatan	1	1	1
		Jumlah kegiatan pengamanan kantor	Kegiatan	1	1	1
		Jumlah kegiatan penertiban untuk kenyamanan lingkungan kantor	Kegiatan	1	1	1
		Jumlah penyusunan pelaporan pelaksanaan pekerjaan kepada atasan yang dilaksanakan	Laporan	1	1	1

B. Capaian kinerja 2019

Triwulan : II

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target			Realisasi	Capaian kinerja (%)
				Januari	Februari	Maret		
1	Terlaksananya tugas yang meliputi kegiatan keamanan, penertiban untuk kenyamanan dilingkungan kantor sesuai dengan petunjuk pelaksanaan agar kegiatan berjalan lancar	Jumlah bahan kerja dan data yang berkaitan dengan bidang keamanan yang harus disiapkan	Peralatan	3	3	3	9	100
		Jumlah kegiatan pengamanan kantor	Kegiatan	1	1	1	3	100
		Jumlah kegiatan penertiban untuk kenyamanan lingkungan kantor	Kegiatan	1	1	1	3	100
		Jumlah penyusunan pelaporan pelaksanaan pekerjaan kepada atasan yang dilaksanakan	Laporan	1	1	1	3	100
Rata-rata Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2019							100	

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100 %	Melebihi Target
2	=100 %	Mencapai Target
3	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja triwulan II tahun 2019 di atas telah capai capaian kinerja Petugas Keamanan Kantor dari 1 (satu) Sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran sudah dapat mencapai 100% atau telah sesuai target dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran : Terlaksananya tugas yang meliputi kegiatan keamanan, penertiban untuk kenyamanan dilingkungan kantor sesuai dengan petunjuk pelaksanaan agar kegiatan berjalan lancar, capaian kinerja 100%.

Indikator Kinerja :

- Jumlah bahan kerja dan data yang berkaitan dengan bidang keamanan yang harus disiapkan, tercapai (100%).
- Kegiatan pengamanan kantor, tercapai (100%)
- Jumlah kegiatan penertiban untuk kenyamanan lingkungan kantor, tercapai (100%)
- Jumlah penyusunan pelaporan pelaksanaan pekerjaan kepada atasan yang dilaksanakan, tercapai (100%)

D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi sasaran dan indicator yang tidak tercapai dari uraian diatas tidak ada. Semua berkas dan laporan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

E. Tanggapan Atasan Langsung

	Laporan kurang baik
	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain.....(ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (\checkmark).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan :

Berdasarkan capaian triwulan II tahun 2019 diperoleh hasil capaian kinerja sasaran sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tidak ada berkat kerja sama dan koordinasi yang baik antar pelaksana dan atasan langsung serta antar bidang di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Hulu Sungai Selatan sehingga berkas dan laporan dapat diselesaikan tepat waktu

C. Saran/ masukan :

1. Lebih meningkatkan lagi koordinasi antar bawahan dan atasan langsung;
2. Data capaian kinerja yang dikirimkan harus dikoordinasikan terlebih dahulu kepada pejabat yang membidangi dan dengan pihak-pihak yang terkait.

Kandangan, 1 Juli 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kepala Sub Bagian Kepegawaian



Hj. RUSNAWATI, SKM
Penata (III/c)
NIP. 19740321 200212 2 003

Petugas Keamanan Kantor



RIDUANSYAH
Pengatur Muda (II/a)
NIP. 19820108 201001 1 004

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : AKHMAD NORMALIADI, S. Sos
NIP : 19781111 200604 1 021
PANGKAT / GOL : Penata Muda Tk. I (III/b)
JABATAN : Bendahara Pengeluaran pada Dinas PPKBPPPA Kab. HSS
TRIWULAN : II Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

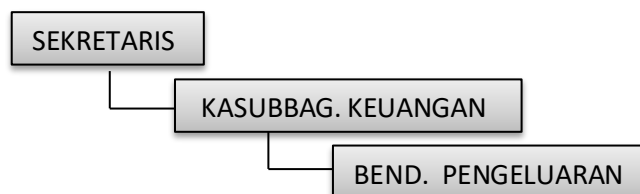
A. Uraian Tugas

Berdasarkan keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa tugas bahwa tugas Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

- a. Mempelajari peraturan yang berhubungan dengan tugas bendahara sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas dan untuk mencegah terjadinya kesalahan
- b. Mempelajari DPA dan Petunjuk Operasional (PO) agar dapat mengetahui macam dan jumlah kegiatan untuk tahun anggaran yang berlaku
- c. Membuat dan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk mendapatkan SP2D baik SP2D GO maupun SP2D LS
- d. Menyetorkan dan menyelesaikan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atau Giro ke Bank tepat pada waktu yang ditentukan
- e. Menerima, membukukan dan menyimpan uang yang diterima dari Bank, Kas Negara atau tagihan dari pihak lain untuk menjaga keamanan uang
- f. Membayarkan uang sesuai dengan mata anggaran dan ketentuan yang berlaku atas persetujuan PPK/KPA
- g. Membukukan semua penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- h. Menyetorkan pajak ke Kas Negara seperti pajak Pendapatan dan PPH sesuai dengan ketentuan
- i. Membukukan semua penerimaan dan pengeluaran anggaran belanja rutin untuk Tertib administrasi
- j. Menyimpan semua bukti penerimaan dan pengeluaran serta pertanggung jawabannya sebagai tanda bukti untuk pemeriksa keuangan apabila sewaktu-waktu ada pemeriksaan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis

B. Struktur jabatan (peta jabatan)



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja :

Triwulan : II

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terlaksananya kegiatan penerimaan, pengeluaran dan pembukuan terkait dengan transaksi keuangan, sesuai dengan pedoman kerja untuk tertib administrasi keuangan	Jumlah bahan kerja dan data yang berkaitan dengan pengelolaan program keuangan yang harus disiapkan	Dokumen	45
		Jumlah kegiatan penerimaan keuangan	Kegiatan	6
		Jumlah kegiatan pengeluaran keuangan	Laporan	9
		Jumlah kegiatan pembukuan transaksi keuangan	Laporan	6
		Jumlah penyusunan pelaporan pelaksanaan pekerjaan kepada	Laporan	6

B. Capaian kinerja 2019

Triwulan : II

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1	Terlaksananya kegiatan penerimaan, pengeluaran dan pembukuan terkait dengan transaksi keuangan, sesuai dengan pedoman kerja untuk tertib administrasi keuangan	Jumlah bahan kerja dan data yang berkaitan dengan pengelolaan	Dokumen	45	45	100
		Jumlah kegiatan penerimaan keuangan	Kegiatan	6	6	100
		Jumlah kegiatan pengeluaran keuangan	Laporan	9	9	100
		Jumlah kegiatan pembukuan transaksi keuangan	Laporan	6	6	100
		Jumlah penyusunan pelaporan pelaksanaan pekerjaan kepada atasan yang dilaksanakan	Laporan	6	6	100
<i>Rata-rata Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2019</i>						100

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100 %	Melebihi Target
2	=100 %	Mencapai Target
3	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja triwulan II tahun 2019 di atas telah capai capaian kinerja Bendahara Pengeluaran dari 1 (satu) Sasaran dan 5 (lima) indikator sasaran sudah dapat mencapai 100% atau telah sesuai target dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran : Terlaksananya kegiatan penerimaan, pengeluaran dan pembukuan terkait dengan transaksi keuangan, sesuai dengan pedoman kerja untuk tertib administrasi keuangan, capaian kinerja 100%.

Indikator Kinerja :

- Jumlah bahan kerja dan data yang berkaitan dengan pengelolaan program keuangan yang harus disiapkan, tercapai (100%).
- Jumlah kegiatan penerimaan keuangan, tercapai (100%)
- Jumlah kegiatan pengeluaran keuangan, tercapai (100%)
- Jumlah kegiatan pembukuan transaksi keuangan, tercapai (100%)
- Jumlah penyusunan pelaporan pelaksanaan pekerjaan kepada atasan yang dilaksanakan, tercapai (100%)

D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi sasaran dan indicator yang tidak tercapai dari uraian diatas tidak ada. Semua berkas dan laporan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

E. Tanggapan Atasan Langsung

	Laporan kurang baik
	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain.....(ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (\checkmark).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan :

Berdasarkan capaian triwulan II tahun 2019 diperoleh hasil capaian kinerja sasaran sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tidak ada berkat kerja sama dan koordinasi yang baik antar pelaksana dan atasan langsung serta antar bidang di Dinas PPKBPPPA Kab. HSS sehingga berkas dan laporan dapat diselesaikan tepat waktu

C. Saran/ masukan :

1. Perlunya mempertahankan kinerja yang ada karena telah mampu mencapai target yang ditetapkan;
2. Data capaian kinerja yang dikirimkan harus dikoordinasikan terlebih dahulu kepada pejabat yang membidangi dan dengan pihak-pihak yang terkait.
3. Dalam pelaksanaannya harus didukung oleh sarana dan prasarana yang menunjang

Kandangan, 30 Juli 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung
Plh. Kepala Sub Bagian Keuangan



DESSYANNA PUSPITASARI, S. Psi
Penata (III/c)
NIP. 19801222 201001 2 005

Bendahara Pengeluaran



AKHMAD NORMALIADI, S. Sos
Penata Muda Tk. 1 (III/b)
NIP. 19781111 200604 1 021

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : RUSMANSYAH
NIP : 19830813 201001 1 004
PANGKAT / GOL : Pengatur /IIC
JABATAN : Pengelola Keuangan pada Dinas PPKBPPPA HSS
TRIWULAN : II Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

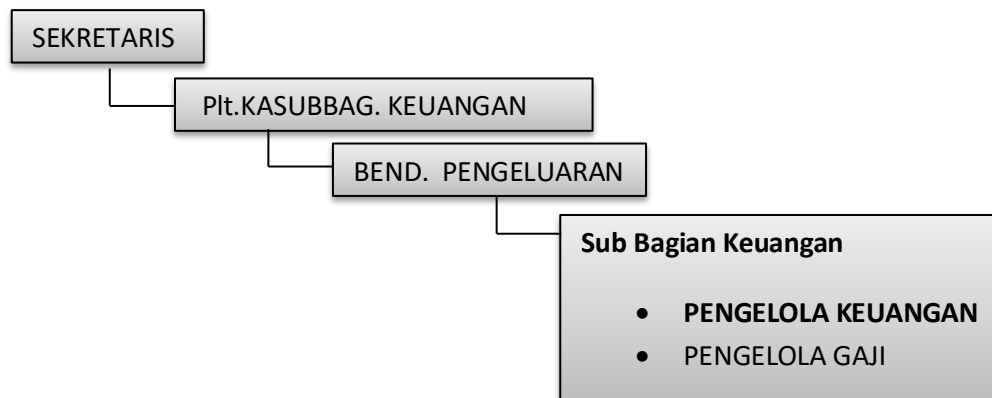
A. Uraian Tugas

Berdasarkan keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa tugas bahwa tugas Pengelola Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengagendakan SPP dan Surat Setoran Pajak sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;
- b. Menyusun dan membuat rincian pengambilan uang dari Bendahara sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai alat kendali;
- c. Membukukan setiap transaksi ke dalam Buku Kas Umum, Buku Kas Harian, Buku Bank, Buku Panjar, Buku Wasdit dan Buku Pajak sesuai sistem pembukuan agar mudah dikendalikan;
- d. Melaporkan Pajak Bulanan (SPT Masa) dan Pajak Tahunan (SPT Tahunan) kepada kantor pajak sebagai bukti pembayaran pajak;
- e. Membuat bukti potong pajak penghasilan Pasal 21 sesuai peraturan perpajakan sebagai bukti pembayaran pajak penghasilan
- f. Menerima dan mengumpulkan SPM dan SP2D untuk dicatat ke dalam buku kendali dan diinput ke aplikasi SAI sebagai bahan penyusunan laporan tahunan
- g. Menerima dan mempelajari data objek kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka membuat objek kerja

- h. Membuat laporan realisasi anggaran
- i. Menyiapkan data beban kerja yang telah diselesaikan untuk dituangkan ke dalam konsep laporan tahunan
- j. Melaporkan kepada pimpinan bahan konsep laporan tahunan untuk dikoreksi kebenarannya dan mengadakan perbaikan konsep
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis

B. Struktur jabatan (peta jabatan)



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja :

Triwulan : II

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terlaksananya kegiatan pengelolaan yang meliputi persiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan dibidang pengelolaan keuangan, sesuai dengan pedoman kerja untuk tertib administrasi keuangan	Jumlah SPP dan Surat Setoran Pajak sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi	Dokumen	15
		Jumlah SPM dan SP2D untuk dicatat kedalam buku kendali	Dokumen	15
		Jumlah pengarsipan laporan bulanan	Dokumen	3
		Jumlah menyerahkan SPJ	SPJ	300
		Jumlah menyerahkan SP2D	Dokumen	15
		Jumlah menyerahkan SP2D	Dokumen	15
		Jumlah menyerahkan SPM	Dokumen	15

B. Capaian kinerja 2019

Triwulan : II

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1	Terlaksananya kegiatan pengelolaan yang meliputi persiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan dibidang pengelolaan keuangan, sesuai dengan pedoman kerja untuk tertib administrasi keuangan	Jumlah SPP dan Surat Setoran Pajak sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib	Dokumen	15	15	100
		JumlahSPM dan SP2D untuk dicatat kedalam buku kendali	Dokumen	15	15	100
		Jumlah pengarsipan laporan bulanan	Dokumen	3	3	100
		Jumlah mengarsipkan SPJ	SPJ	300	300	100
		Jumlah mengarsipkan SP2D	Dokumen	15	15	100
		Jumlah mengarsipkan SPM	Dokumen	15	15	100

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100 %	Melebihi Target
2	=100 %	Mencapai Target
3	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja triwulan II tahun 2019 di atas telah capai capaian kinerja pengelola keuangan dari 1 (satu) Sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran sudah dapat mencapai 100% atau telah sesuai target dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran : Terlaksananya kegiatan pengelolaan yang meliputi persiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan dibidang pengelolaan keuangan, sesuai dengan pedoman kerja untuk tertib administrasi keuangan, capaian kinerja 100%.

Indikator Kinerja :

- Jumlah SPP dan surat setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi, tercapai (100%).
- Jumlah SPM dan SP2D untuk dicatat kedalam Buku Kendali, tercapai (100%)
- Jumlah Pengarsipan Laporan Bulanan, tercapai (100%)
- Jumlah mengarsipkan SPJ, tercapai (100%)
- Jumlah mengarsipkan SP2D, tercapai (100%)
- Jumlah mengarsipkan SPM, tercapai (100%)

D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi sasaran dan indicator yang tidak tercapai dari uraian diatas tidak ada. Semua berkas dan laporan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

E. Tanggapan Atasan Langsung

	Laporan kurang baik
	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain.....(ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (\checkmark).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan :

Berdasarkan capaian triwulan II tahun 2019 diperoleh hasil capaian kinerja sasaran sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tidak ada berkat kerja sama dan koordinasi yang baik antar pelaksana dan atasan langsung serta antar bidang di Dinas PPKBPPPA sehingga berkas dan laporan dapat diselesaikan tepat waktu

C. Saran/ masukan :

1. Perlunya mempertahankan kinerja yang ada karena telah mampu mencapai target yang ditetapkan;
2. Data capaian kinerja yang dikirimkan harus dikoordinasikan terlebih dahulu kepada pejabat yang membidangi dan dengan pihak-pihak yang terkait.
3. Dalam pelaksanaannya harus didukung oleh sarana dan prasarana yang menunjang

Kandangan, 30 Juli 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung
Plh. Kepala Sub Bagian Keuangan



Dessyanna Puspitasari, S. Psi
Penata (III/c)
NIP. 19801222 201101 2 005

Pengelola Keuangan



RUSMANSYAH
Pengatur
NIP. 19830813 201001 1 004

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : MAGDALENA, SE
NIP : 19630920 200604 2 002
PANGKAT / GOL : Penata Muda (III/a)
JABATAN : Pengelola Keuangan pada Dinas PPKBPPPA HSS
TRIWULAN : II Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

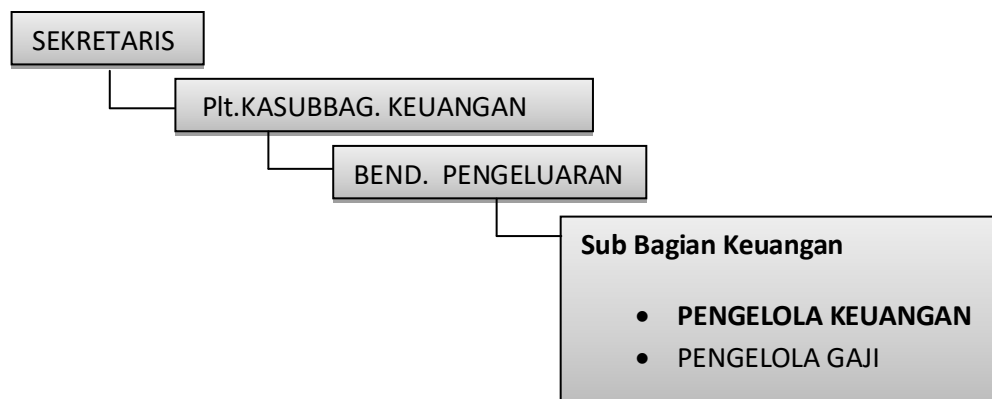
A. Uraian Tugas

Berdasarkan keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/201/KUM/2018 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bahwa tugas Pengelola Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengagendakan SPP dan Surat Setoran Pajak sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;
- b. Menyusun dan membuat rincian pengambilan uang dari Bendahara sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai alat kendali;
- c. Membukukan setiap transaksi ke dalam Buku Kas Umum, Buku Kas Harian, Buku Bank, Buku Panjar, Buku Wasdit dan Buku Pajak sesuai sistem pembukuan agar mudah dikendalikan;
- d. Melaporkan Pajak Bulanan (SPT Masa) dan Pajak Tahunan (SPT Tahunan) kepada kantor pajak sebagai bukti pembayaran pajak;
- e. Membuat bukti potong pajak penghasilan Pasal 21 sesuai peraturan perpajakan sebagai bukti pembayaran pajak penghasilan
- f. Menerima dan mengumpulkan SPM dan SP2D untuk dicatat ke dalam buku kendali dan diinput ke aplikasi SAI sebagai bahan penyusunan laporan tahunan
- g. Menerima dan mempelajari data objek kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka membuat objek kerja

- h. Membuat laporan realisasi anggaran
- i. Menyiapkan data beban kerja yang telah diselesaikan untuk dituangkan ke dalam konsep laporan tahunan
- j. Melaporkan kepada pimpinan bahan konsep laporan tahunan untuk dikoreksi kebenarannya dan mengadakan perbaikan konsep
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis

B. Struktur jabatan (peta jabatan)



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja :

Triwulan : II

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terlaksananya kegiatan pengelolaan yang meliputi persiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan dibidang pengelolaan keuangan, sesuai dengan pedoman kerja untuk tertib administrasi keuangan	Jumlah SPP dan Surat Setoran Pajak sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi	Dokumen	15
		JumlahSPM dan SP2D untuk dicatat kedalam buku kendali	Dokumen	15
		Jumlah pengarsipan laporan bulanan	Dokumen	3
		Jumlah mengarsipkan SPJ	SPJ	300
		Jumlah mengarsipkan SP2D	Dokumen	15
		Jumlah mengarsipkan SPM	Dokumen	15

B. Capaian kinerja 2019

Triwulan : II

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1	Terlaksananya kegiatan pengelolaan yang meliputi persiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan dibidang pengelolaan keuangan, sesuai dengan pedoman kerja untuk tertib administrasi keuangan	Jumlah SPP dan Surat Setoran Pajak sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi	Dokumen	15	15	100
		JumlahSPM dan SP2D untuk dicatat kedalam buku kendali	Dokumen	15	15	100
		Jumlah pengarsipan laporan bulanan	Dokumen	3	3	100
		Jumlah mengarsipkan SPJ	SPJ	300	300	100
		Jumlah mengarsipkan SP2D	Dokumen	15	15	100
		Jumlah mengarsipkan SPM	Dokumen	15	15	100
						100

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100 %	Melebihi Target
2	=100 %	Mencapai Target
3	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja triwulan I tahun 2019 di atas telah capai capaian kinerja pengelola keuangan dari 1 (satu) Sasaran dan 6 (enam) indikator sasaran sudah dapat mencapai 100% atau telah sesuai target dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran : Terlaksananya kegiatan pengelolaan yang meliputi persiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan dibidang pengelolaan keuangan, sesuai dengan pedoman kerja untuk tertib administrasi keuangan, capaian kinerja 100%.

Indikator Kinerja :

- Jumlah SPP dan surat setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi, tercapai (100%).
- Jumlah SPM dan SP2D untuk dicatat kedalam Buku Kendali, tercapai (100%)
- Jumlah Pengarsipan Laporan Bulanan, tercapai (100%)
- Jumlah mengarsipkan SPJ, tercapai (100%)
- Jumlah mengarsipkan SP2D, tercapai (100%)
- Jumlah mengarsipkan SPM, tercapai (100%)

D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi sasaran dan indicator yang tidak tercapai dari uraian diatas tidak ada. Semua berkas dan laporan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

E. Tanggapan Atasan Langsung

	Laporan kurang baik
√	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain.....(ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan :

Berdasarkan capaian triwulan II tahun 2019 diperoleh hasil capaian kinerja sasaran sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tidak ada berkat kerja sama dan koordinasi yang baik antar pelaksana dan atasan langsung serta antar bidang di Dinas PPKBPPA sehingga berkas dan laporan dapat diselesaikan tepat waktu

C. Saran/ masukan :

1. Perlunya mempertahankan kinerja yang ada karena telah mampu mencapai target yang ditetapkan;
2. Data capaian kinerja yang dikirimkan harus dikoordinasikan terlebih dahulu kepada pejabat yang membidangi dan dengan pihak-pihak yang terkait.
3. Dalam pelaksanaannya harus didukung oleh sarana dan prasarana yang menunjang

Kandangan, 1 Juli 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung
Plh. Kepala Sub Bagian Keuangan



Dessyanna Puspitasari, S. Psi
Penata (III/c)
NIP. 19801222 201101 2 005

Pengelola Keuangan



Magdalena, SE
Penata Muda (III/a)
NIP. 19630920 200604 2 002

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : DARMIYATIE
NIP : 197702051997032003
PANGKAT / GOL. : Penata Muda Tingkat I, III/b
JABATAN : Penyusun Pencatatan dan Pelaporan KB
Dinas PPKBPPPA Kab. HSS
TRIWULAN : II Tahun 2019

BAB I

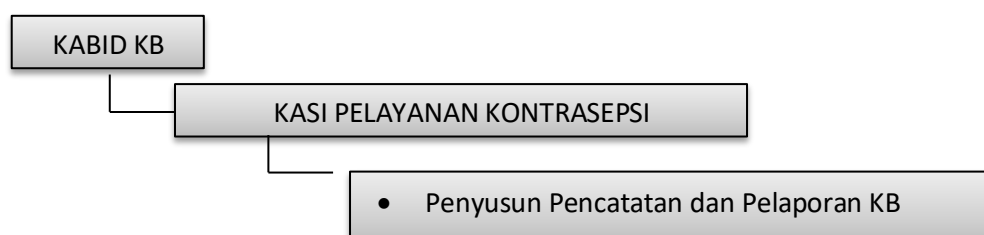
PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas

Berdasarkan keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/201/KUM/2018 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bahwa tugas Penyusun Pencatatan dan Pelaporan KB adalah sebagai berikut:

- a. Menerima data objek kerja di bidang pencatatan dan pelaporan data KB
- b. Mengklasifikasikan data objek kerja di bidang pencatatan dan pelaporan data KB
- c. Menelaah data objek kerja di bidang pencatatan dan pelaporan data KB
- d. Merekapitulasi sesuai kebutuhan
- e. Membuat Berkas SPJ
- f. Penyerahan
- g. Mengarsipkan
- h. Menggolongkan
- i. Menyimpan
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan

B. Struktur jabatan (peta jabatan)



AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja :

Triwulan : II

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terlaksananya kegiatan Pelayanan Peserta KB Sesuai Standar	Jumlah konsep rencana kegiatan seksi pelayanan kontrasepsi yang disiapkan	Konsep	2
		Jumlah data dan bahan pelaksanaan pelayanan kontrasepsi yang disiapkan	paket	2
		Jumlah Petunjuk teknis, SOP dan pembinaan mengenal strategi pelaksanaan pengendalian dan pembinaan akseptor KB dan pelayanan kontrasepsi yang diarsipkan	Dokumen	2
		Jumlah konsep / rencana program operasional dan pengendalian mengenai pembinaan serta strategi pelaksanaan pengendalian dan pembinaan akseptor KB dan pelayanan kontrasepsi yang diarsipkan	konsep	2
		Jumlah kegiatan pelayanan kontrasepsi yang dilaksanakan	Kegiatan	2
		Jumlah pengelolaan, penyimpanan, penyaluran / distribusi alat kontrasepsi pada gudang Alokon KB yang dilaporkan	Laporan	2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
		Jumlah laporan evaluasi dan analisis pelaksanaan kegiatan, pelayanan kontrasepsi, dan pengelolaan alat dan obat kontrasepsi yang diarsipkan ;	laporan	2
		Jumlah dokumen pengetikan dan administrasi kerjasama dengan instansi lembaga swadaya masyarakat, kader dalam pelaksanaan pelayanan kontrasepsi	Dokumen	2

B. Capaian kinerja 2019

Triwulan : II

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1	Terlaksananya kegiatan Pelayanan Peserta KB Sesuai Standar	Jumlah konsep rencana kegiatan seksi pelayanan kontrasepsi yang disiapkan	Konsep	2	2	100
		Jumlah data dan bahan pelaksanaan pelayanan kontrasepsi yang disiapkan	paket	2	2	100
		Jumlah Petunjuk teknis, SOP dan pembinaan mengenal strategi pelaksanaan pengendalian dan pembinaan akseptor KB dan pelayanan kontrasepsi yang diarsipkan	Dokumen	2	2	100

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
		Jumlah konsep / rencana program operasional dan pengendalian mengenai pembinaan serta strategi pelaksanaan pengendalian dan pembinaan akseptor KB dan pelayanan kontrasepsi yang diarsipkan	konsep	2	2	100
		Jumlah kegiatan pelayanan kontrasepsi yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	100
		Jumlah jumlah pengelolaan, penyimpanan, penyaluran / distribusi alat kontrasepsi pada gudang Alokon KB yang dilaporkan	Laporan	2	2	100
		Jumlah laporan evaluasi dan analisis pelaksanaan kegiatan, pelayanan kontrasepsi, dan pegelolaan alat dan obat kontrasepsi yang diarsipkan ;	laporan	2	2	100

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
		Jumlah dokumen pengetikan dan administrasi kerjasama dengan instansi lembaga swadaya masyarakat, kader dalam pelaksanaan pelayanan kontrasepsi	Dokumen	2	2	100
Rata-rata Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2019						100

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100 %	Melebihi Target
2	=100 %	Mencapai Target
3	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja triwulan II tahun 2019 di atas telah capai capaian kinerja Penyusun Pencatatan dan Pelaporan KB dari 1 (Satu) Sasaran dan 8 (delapan) indikator sasaran sudah dapat mencapai 100% atau telah sesuai target dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran : Terlaksananya kegiatan Pelayanan Peserta KB Sesuai Standar , capaian kinerja 100%.

Indikator Kinerja :

- Jumlah konsep rencana kegiatan seksi pelayanan kontrasepsi yang disiapkan, yang harus disiapkan, tercapai (100%).
- Jumlah data dan bahan pelaksanaan pelayanan kontrasepsi yang disiapkan yang dilaksanakan, tercapai (100%)
- Jumlah Petunjuk teknis, SOP dan pembinaan mengenal strategi pelaksanaan pengendalian dan pembinaan akseptor KB dan pelayanan kontrasepsi yang diarsipkan yang dilakukan, tercapai (100%)

- Jumlah konsep / rencana program operasional dan pengendalian mengenai pembinaan serta strategi pelaksanaan pengendalian dan pembinaan akseptor KB dan pelayanan kontrasepsi yang diarsipkan, tercapai (100%)
- Jumlah kegiatan pelayanan kontrasepsi yang dilaksanakan , tercapai (100%)
- Jumlah jumlah pengelolaan, penyimpanan, penyaluran / distribusi alat kontrasepsi pada gudang Alokon KB yang dilaporkan, tercapai (100%)
- Jumlah laporan evaluasi dan analisis pelaksanaan kegiatan, pelayanan kontrasepsi, dan pengelolaan alat dan obat kontrasepsi yang diarsipkan, tercapai (100%)
- Jumlah dokumen pengetikan dan administrasi kerjasama dengan instansi lembaga swadaya masyarakat, kader dalam pelaksanaan pelayanan kontrasepsi yang dilaksanakan, tercapai (100%)

D. Rencana Tindak lanjut

Langkah-langkah atau tindak lanjut untuk mengatasi sasaran dan indikator yang tidak tercapai dari uraian diatas tidak ada. Semua berkas dan laporan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

E. Tanggapan Atasan Langsung

	Laporan kurang baik
	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain.....(ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan :

Berdasarkan capaian triwulan II tahun 2019 diperoleh hasil capaian kinerja sasaran sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tidak ada berkat kerja sama dan koordinasi yang baik antar pelaksana dan atasan langsung serta antar bidang di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga berkas dan laporan dapat diselesaikan tepat waktu

C. Saran/ masukan :

Kandangan, Juli 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kasi PELKON,



Rakhmad Rizali, S.Kep
Penata (III/c)
NIP. 19830318 200501 1 003

PENYUSUN PENCATATAN
DAN PELAPORAN KB,



Darmiyatie
Penata Muda Tk. 1 (III/b)
NIP. 19770205 199703 2 003

KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : RIA ALVINA RAHMI, S.Pd
NIP : 198605072010012019
PANGKAT / GOL : Penata Muda Tk I (III/b)
JABATAN : Pengelola Advokasi Konseling dan Pembinaan KB
TRIWULAN : II Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/201/KUM/2018 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bawah tugas Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data bahan mengenai advokasi ,KIE dan konseling ,pembinaan KB dan kesehatan reproduksi serta pembinaan peran serta masyarakat dan institusi masyarakat pedesaan dan pembinaan petugas line lapangan;
- b. Melaksanakan Advokasi ,KIE untuk konseling ,Pembinaan KB dan kesehatan reproduksi serta pembinaan peran serta masyarakat pedesaan dan pembinaan petugas line lapangan;
- c. Melaksanakan Evaluasi Advokasi ,KIE untuk konseling ,pembinaan KB dan kesehatan reproduksi serta pembinaan peran serta masyarakat dan institusi masyarakat pedesaan dan pembinaan petugas line lapangan;
- d. Melaksanakan tugas lain berupa kegiatan baksos, TNI-KB-KES dan PKK-KB-KES dalam rangka pelayanan KB gratis kepada Masyarakat ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan ,baik atasan langsung maupun kepala dinas.

B. Struktur jabatan (peta jabatan)



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja 2019:

Triwulan : II

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terlaksananya kegiatan pengelolaan yang meliputi advokasi terhadap peserta KB	1. Jumlah arsip data IMP dan data PLKB /PKB	Dokumen	1
		2. Jumlah pembinaan petugas line lapangan /poktan/IMP	Dokumen	2
		3. Jumlah kegiatan hasil laporan line lapangan / poktan	Dokumen	2
		4. Jumlah kegiatan menyiapkan bahan KIE dan mendata bahan materi KIE	Dokumen	1

B. Capaian kinerja 2019

Triwulan : II

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1	Terlaksananya kegiatan pengelolaan yang meliputi advokasi terhadap peserta KB	1. Jumlah arsip data IMP dan data PLKB /PKB	Dokumen	1	1	100
		2. Jumlah pembinaan petugas line lapangan /poktan/IMP	Dokumen	2	2	100
		3. Jumlah kegiatan hasil laporan line lapangan / poktan	Dokumen	2	2	100
		4. Jumlah kegiatan menyiapkan bahan KIE dan mendata bahan materi KIE	Dokumen	1	1	100
Rata-rata Capaian Kinerja Tribulan II Tahun 2019						100

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100 %	Melebihi Target
2	=100 %	Mencapai Target
3	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja triwulan II tahun 2019 di atas capaian kinerja dari 1 (satu) Sasaran dan 4 (empat) indikator Sasaran Pengelola Advokasi Konseling dan Pembinaan KB sudah dapat mencapai 100% dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. sasaran : Terlaksananya kegiatan pengelolaan yang meliputi pengarsipan data IMP dan Data PLKB, Pembinaan petugas line lapangan /Poktan/IMP dan menyiapkan bahan KIE , sesuai dengan petunjuk teknis untuk ketepatan sasaran program , capaian kinerja 100%.

Indikator Kinerja :

- Jumlah arsip data IMP dan Data PKB /PLKB , tercapai (100%).
- Jumlah pembinaan petugas line lapangan / poktan/ IMP , tercapai (100%).
- Jumlah kegiatan hasil laporan pelaksanaan line lapangan, tercapai (100%).
- Jumlah kegiatan menyiapkan bahan KIE dan mendata bahan materi KIE , tercapai (100%).

D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi sasaran dan indikator sasaran yang tidak tercapai.

Sasaran yang tidak tercapai dari uraian di atas tidak ada. Semua dokumen, kegiatan dan laporan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (\checkmark).

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan :

Berdasarkan capaian triwulan II tahun 2019 diperoleh hasil capaian kinerja sasaran sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tidak ada.

Berkat kerja sama dan koordinasi yang baik antar pelaksana dan atasan langsung serta antar bidang di Dinas Perikanan sehingga dokumen, kegiatan dan laporan dapat diselesaikan tepat waktu.

C. Saran/ masukan :

1. Lebih meningkatkan lagi koordinasi antara pelaksana dan atasan langsung.
2. Data capaian kinerja yang dikirimkan harus dikoordinasikan terlebih dahulu kepada pejabat yang membidangi dan dengan pihak-pihak yang terkait.

Kandangan, 3 Juli 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kasi Advokasi KIE & Instutusi
Masyarakat



MAULIDY RIFANI, S.Mn
NIP. 19660717 198903 1006

Pengelola Advokasi Konseling dan
Pembinaan Keluarga Berencana



RIA ALVINA RAHMI, S.Pd
NIP. 19860507 201001 2 019

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : H. Sayuti Rachman ,SKM
NIP : 196608051989031016
PANGKAT / GOL : Penata Tk. I /III / d
JABATAN : Penyusun Bahan Data Kependudukan dan KB
Triwulan : II Tahun 2019

BAB I PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan berdasarkan Anjab bahwa tugas Sub. Bagian Keterpaduan dan Sinkronisasi Kependudukan Jabatan Penyusun Bahan Data dan Kependudukan dan KB adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan kerja dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas
2. Melakukan kegiatan pengklarifikasian bahan dan data
3. Melakukan Pengklarifikasian bahan dan data
4. Melakukan kegiatan penelaahan untuk penyusunan naskah rapat
5. Melaksanakan penyusunan pelaporan pelaksanaan pekerjaan kepada atasan
6. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan oleh atasan

Untuk melaksanakan tugas di atas Sub. Bagian Keterpaduan dan Sinkronisasi Kependudukan Jabatan penyusun bahan data kependudukan dan KB mempunyai fungsi :

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Triwulan		
				I	II	III
1	2	3	4	5		
1	Memonitor pengiriman laporan kependudukan dan KB secara online	Jumlah kegiatan monitoring	Kegiatan	3	3	
2	Menerima Pelaporan kependudukan dan KB	Jumlah dokumen	Dokumen	3	3	
3	Mencatat dan mendokumentasikan lap;oran kependudukan dan KB	Terlaksana pencatatan dan pendokumentasian laporan	Kegiatan	2	2	
4	Mengumpulkan bahan data kependudukan	Terhimpunnya bahan dan data data kependudukan	dokumen	0	1	
5	Mengumpulkan bahan dan data Keluarga berencana	Terhimpunnya bahan dan data-data bahan dokumen KB	Dokumen	0	1	
6	Membukukan dan mendokumentasikan nahan data kependudukan dan KB	Kegiatan	Kegiatan	0	0	
7	Menyiapkan bahan,data kegiatan forum diskusi keterpaduan dan sinkronisasi kependudukan	Dokumen	Dokumen	0	0	
8	Mentiapkan surat-surat untuk kegiatan diskusi keterpaduan dan sinkronisasi kependudukan	Dokumen	Dokumen	0	0	
9	Mengantar/membagi surat-surat undangan kegiatan diskusi keterpaduan dan sinkronisasi kependudukan	Dokumen	Dokumen	0	0	
10	Melaksanakan tugas lainnya yang dibedrikan oleh atasan langsung	Kegiatan	Kegiatan	3	3	

B. CAPAIAN KINERJA :
Triwulan : II

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		
				Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5		
1	Memonitor pengiriman laporan kependudukan dan KB secara online	Jumlah kegiatan monitoring	Kegiatan	3	3	100
2	Menerima Pelaporan kependudukan dan KB	Jumlah dokumen	Dokumen	3	3	100
3	Mencatat dan mendokumentasikan laporan kependudukan dan KB	Kegiatan	Kegiatan	2	2	100
4	Mengumpulkan bahan data kependudukan	Jumlah kegiatan pengumpulan bahan Dokumen kependudukan	dokumen	1	1	100
5	Mengumpulkan bahan dan data Keluarga berencana	Jumlah kegiatan pengumpulan bahan dokumen KB	Dokumen	1	1	100
6	Membukukan dan mendokumentasikan bahan data kependudukan dan KB	Kegiatan	Kegiatan	0	0	0
7	Menyiapkan bahan, data kegiatan forum diskusi keterpaduan dan sinkronisasi kependudukan	Dokumen	Dokumen	0	0	0
8	Mentiapkan surat-surat untuk kegiatan diskusi keterpaduan dan sinkronisasi kependudukan	Dokumen	Dokumen	0	0	0
9	Mengantar/membagi surat-surat undangan kegiatan diskusi keterpaduan dan sinkronisasi kependudukan	Dokumen	Dokumen	0	0	0
10	Melaksanakan tugas lainnya yang dibedrikan oleh atasan langsung	Kegiatan	Kegiatan	3	3	100

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan II 2019 di atas capaian kinerja pada jabatan penyusun bahan data kependudukan di Triwulan II Alhhamdulillah mencapai 100,00% , dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran : Kegiatan monitoring rutin laporan kependudukan dan KB, jumlah Kecamatan yang dimonitor adalah 11 kecamatan sudah seluruhnya termonitor dan laporan yang masuk sudah seluruh kecamatan
2. Sasaran : Penyampaian laporan dari 11 kecamatan sudah terealisasi 100 %
3. Sasaran : Pencatatan dan pendokumentasian laporan kependudukan dan KB sudah terlaksana dengan baik capaian 100 %

D. Rencana Tindaklanjut

Tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah membuat perjanjian kerjasama dengan instansi yang berkomitmen terhadap kependudukan.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan II tahun 2019 capaian kinerja sasaran sudah memenuhi target 100 %

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja masih adanya Kecamatan yang lambat mengisi form laporan kegiatan dan mengirimkannya Kabupaten

C. Saran/masukan

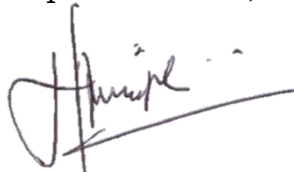
1. Untuk petugas PKB dikecamatan, agar dalam pengisian Form laporan Dan pengiriman/penyampaiannya ke kabupten lebih tepat waktu.

Tanggal, 01 Juli 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kasi Keterpaduan dan Sinkronisasi

Kependudukan,



Dra. NURSINAH

Penata Tk. I

NIP.19640411 199403 2 009

Penyusun Bahan Data
Kependudukan dan KB



H. Sayuti Rachman, SKM

Penata Tk. I

NIP.19660805 198903 1 016

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : Hariadin
NIP : 19781101 199803 1 003
PANGKAT / GOL : Pengatur Tk.I / II d
JABATAN : Pengelola Administrasi Kependudukan
TRIWULAN : II (Mei,Juni) Tahun 2019

BAB I PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas

Berdasarkan Topuksi yg diberikan Dinas Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Melalui Seksi Keterpaduan dan Sinkronisasi tugas Pengelola Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan untuk analisa dan evaluasi dari pendataan keluarga dan statistik rutin
- b. Melakukan pengunduhan data yang bersumber dari pendataan keluarga dan statistik rutin
- c. Melakukan pemilihan data yang sesuai dengan kebutuhan indikator pada masing-masing wilayah
- d. Melakukan pengolahan data dengan tools
- e. Melakukan interpretasi data yang disajikan dalam bentuk yang sederhana
- f. Melakukan verifikasi data
- g. Menyajikan data tiap bulan dalam bentuk tabel, grafik dan peta
- h. Membuat laporan bulanan dan profil wilayah yang sesuai dengan kebutuhan terhadap indikator-indikator program KKBPK di wilayah
- i. Melaksanakan perintah atasan langsung yang diberikan oleh kepala seksi Keterpaduan dan Sinkronisasi Kependudukan

B. Struktur jabatan (peta jabatan)



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja :

Triwulan : II (mei,juni)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Tersusunnya kegiatan Seksi Keterpaduan dan Sinkronisasi Kependudukan	Membantu menyusun kegiatan Seksi Keterpaduan dan Sinkronisasi Kependudukan	Dokumen	1
		Membantu menyiapkan materi pembahasan Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Bulanan	Dokumen	1
2	Terlaksananya Kegiatan Seksi Keterpaduan dan Sinkronisasi Kependudukan Sesuai Bidang Tugas			
		Membantu memonitor laporan pengendalian lapangan secara online 11 kecamatan di Kabupaten HSS	Kegiatan	1
		Membantu mengentry data laporan pengendalian lapangan secara online 11 Kecamatan di Kabupaten HSS	Dokumen	1
		Membantu membuat laporan pengendalian lapangan	Dokumen	1

B. Capaian kinerja 2019

Triwulan : II (mei,Juni)

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1	Terlaksananya kegiatan Seksi Keterpaduan dan Sinkronisasi Kependudukan	Membantu menyusun kegiatan Seksi Keterpaduan dan Sinkronisasi Kependudukan	Dokumen	1	1	100
		Membantu menyiapkan materi pembahasan Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Bulanan	Dokumen	1	1	100
2	Terlaksananya Kegiatan Seksi Keterpaduan dan Sinkronisasi Kependudukan Sesuai Bidang Tugas	Membantu memonitor laporan pengendalian lapangan secara online 11 kecamatan di Kabupaten HSS	Kegiatan	1	1	100
		Membantu mengentry data laporan pengendalian lapangan secara online 11 Kecamatan di Kabupaten HSS	Kegiatan	1	1	100
		Membantu membuat laporan pengendalian lapangan	Dokumen	1	1	100
Rata-rata Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2019						100

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100 %	Melebihi Target
2	=100 %	Mencapai Target
3	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja triwulan II tahun 2019 di atas telah capai capaian kinerja Pengelola Administrasi Kependudukan 2 (dua) Sasaran dan 5 (lima) indikator sasaran sudah dapat mencapai 100% atau telah sesuai target dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran : Terlaksananya kegiatan Seksi Keterpaduan dan Sinkronisasi Kependudukan yang meliputi menyusun kegiatan seksi Keterpaduan dan Sinkronisasi Kependudukan, Terlaksana Kegiatan Seksi Keterpaduan dan Sinkronisasi Kependudukan sesuai bidang tugas masing masing dengan capaian kinerja pengelola Administrasi kependudukan 100% sesuai dengan indikator kinerja, Satuan, Target dan realisasi

D. Rencana Tindak lanjut

Langkah-langkah atau tindak lanjut untuk mengatasi sasaran dan indicator yang tidak tercapai dari uraian diatas tidak ada. Semua berkas dan laporan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

E. Tanggapan Atasan Langsung

	Laporan kurang baik
√	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain.....(ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan :

Berdasarkan capaian triwulan II tahun 2019 diperoleh hasil capaian kinerja sasaran sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

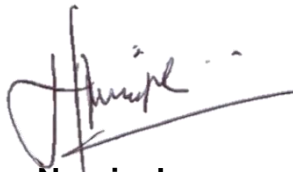
Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja harus di tingkatkan lagi untuk mencapai hasil yang optimal berkat kerja sama dan koordinasi yang baik antar pelaksana dan atasan langsung serta bidang di Dinas PPKBPPPA sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik

C. Saran/ masukan :

1. Lebih meningkatkan lagi kerjasama Bagian Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga
2. Lebih meningkatkan lagi koordinasi antar bawahan dan atasan langsung;
3. Data capaian kinerja yang dikirimkan harus dikoordinasikan terlebih dahulu kepada pejabat yang membidangi dan dengan pihak-pihak yang terkait.

Kandangan, 1 Juli 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kasi Keterpaduan dan Sinkronisasi
Kependudukan



Dra. Nursinah
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19640411 199403 2 009

Pengelola Administrasi
Kependudukan



Hariadin
Penata Tk I (II/d)
NIP.19781101 199803 1 003

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : MUHAMMAD TALHAH, SKM
NIP : 19750515 200003 1 007
PANGKAT/GOLONGAN : PENATA / III C
JABATAN : ANALIS KESEJAHTERAAN KELUARGA PADA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK
& PEREMPUAN
TRIWULAN : II TAHUN 2019

BAB I

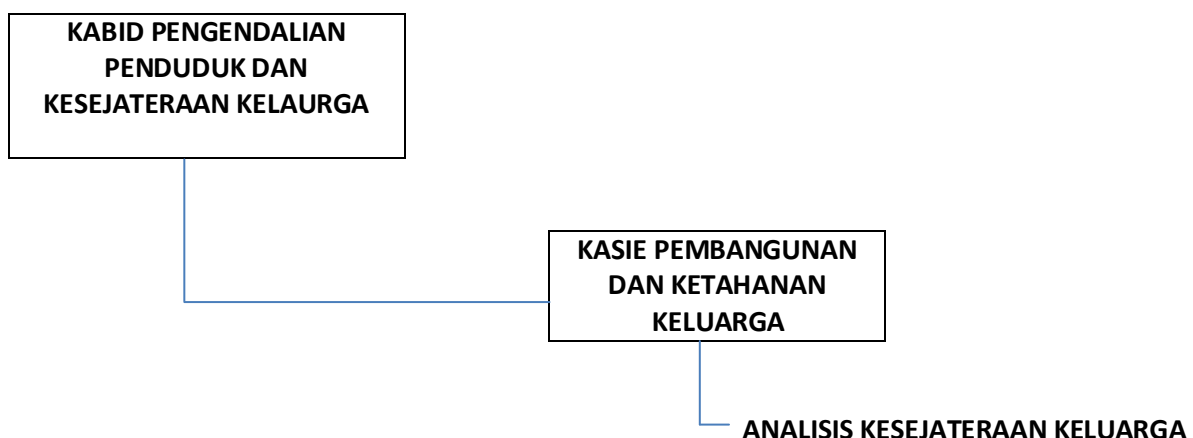
PENDAHULUAN

A. URAIAN TUGAS

Berdasarkan hasil Analisis jabatan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindung Anak dan Perempuan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Menerima pelaporan, mencatat, dan mendokumentasikan program pembangunan dan kesejahteraan keluarga.
- b. Menyiapkan bahan dan pengadministrasian pelaporan program kesejahteraan keluarga.
- c. Mencatat dan mendokumentasikan pelaporan program kesejahteraan keluarga.
- d. Mengumpulkan bahan dan data kependudukan program pembangunan ketahanan dan kesejatraan keluarga, peningkatan peran serta organisasi pembangunan keluarga.
- e. Menyiapkan bahan untuk kegiatan pembinaan dan pengendalian pembangunan ketahanan da dan pengendalian kesejahteraan keluarga, peningkatan peran serta organisasi pembangunan keluarga.
- f. Membuat laporan tahunan dalam rangka pembinaan dan pengendalian pembangunan ketahanan dan kesejateraan keluarga, peningkatan peran serta organisasi pembangunan keluarga.
- g. Menganalisis data laporan dalam rangka pembinaan dan pengendalian pembangunan ketahanan dan kesejateraan keluarga, peningkatan peran serta organisasi pembangunan keluarga.
- h. Melaksanakan feed back laporan ke Penyuluh Keluarga Berencana tiap kecamatan dalam rangka pembinaan dan pengendalian pembangunan ketahanan dan kesejateraan keluarga, peningkatan peran serta organisasi pembangunan keluarga.
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejateraan Keluarga sesuai dengan bidang tugasnya.

B. STRUKTUR JABATAN (PETA JABATAN)



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KERJA

TRIWULAN : II

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terlaksananya pelaporan, pencacatan , dan mendokumentasikan program pembangunan kesejahteraan keluarga 1.1. Membuat rekap penerimaan bulanan 1.2. Membuat rekap laporan tahunan.	Jumlah dokumen schedule penyusunan laporan program pembangunan kesejahteraan keluarga	Dokumen	3
2	Menyiapkan bahan atau Formulir pengadministrasian pelaporan program kesejahteraan keluarga 2.1. Menyiapkan Formulir Laporan Bulanan 2.2. Menyiapkan Formulir Laporan Tahunan	Jumlah dokumen bahan atau formulir program pembangunan kesejahteraan keluarga	Dokumen	3
3	Terlaksananya pencatatan dan pelaporan program kesejahteraan keluarga untuk laporan Bulanan dan Tahunan 3.1. Membuat laporan Bulanan 3.2. Membuat Laporan Tahunan.	Jumlah Laporan Bulanan dan Tahunan untuk program pembangunan kesejahteraan keluarga	Dokumen	3
4	Terlaksananya pengumpulan data kependudukan program pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, peran serta organisasi pembangunan keluarga. 4.1. Mengumpulkan data dibidang pengendalian penduduk dan kesejahteraan penduduk. 4.2. Menyajikan data dalam bentuk Laporan. 4.3. Memberikan analisis data tentang pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, peran serta organisasi pembangunan keluarga. 4.4. menginventarisir dan ikut dalam pembinaan BKB, BKR, PIK Remaja dan unit pendukung lainnya.	Jumlah bahan-bahan yang dikumpulkan dan data-data yang disajikan.	Dokumen	3

5	Terlaksananya pengetikan surat-surat bidan PPKS dan bahan laporan kegiatan pembangunan dan pembangunan dan kesejahteraan keluarga.	Jumlah surat dan draf laporan	Dukomen	15
---	--	-------------------------------	---------	-----------

B. CAPAIAN KINERJA

TRIWULAN : II

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Terlaksananya pelaporan, pencacatan , dan mendokumentasikan program pembangunan kesejahteraan keluarga 1.3. Membuat rekap penerimaan bulanan 1.4. Membuat rekap laporan tahunan.	Jumlah dokumen schedule penyusunan laporan program pembangunan kesejahteraan keluarga	Dokumen	3	3	100
2	Menyiapkan bahan atau Formulir pengadministrasian pelaporan program kesejahteraan keluarga 2.3. Menyiapkan Formulir Laporan Bulanan 2.4. Menyiapkan Formulir Laporan Tahunan	Jumlah dokumen bahan atau formulir program pembangunan kesejahteraan keluarga	Dokumen	3	3	100
3	Terlaksananya pencatatan dan pelaporan program kesejahteraan keluarga untuk laporan Bulanan dan Tahunan 3.3. Membuat laporan Bulanan 3.4. Membuat Laporan Tahunan.	Jumlah Laporan Bulanan dan Tahunan untuk program pembangunan kesejahteraan keluarga	Dokumen	3	3	100

4	<p>Terlaksananya pengumpulan data kependudukan program pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, peran serta organisasi pembangunan keluarga.</p> <p>4.1. Mengumpulkan data dibidang pengendalian penduduk dan kesejahteraan penduduk.</p> <p>4.2. Menyajikan data dalam bentuk Laporan.</p> <p>4.3. Memberikan analisis data tentang pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, peran serta organisasi pembangunan keluarga.</p> <p>4.4. menginventarisir dan ikut dalam pembinaan BKB, BKR, PIK Remaja dan unit pendukung lainnya.</p>	Jumlah bahan-bahan yang dikumpulkan dan data-data yang disajikan.	Dokumen	3	3	100
5	Terlaksananya pengetikan surat-surat bidan PPKS dan bhan laporan kegiatan pembangunan dan pembangunan dan kesejahteraan keluarga.	Jumlah surat dan draf laporan	Dukomen	15	15	100

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb :

No	Capaian Kinerja	Interprestasi
1	➤ 100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan table capaian kinerja Triwulan I dan II Tahun 2019 semuanya mencapai Target yang telah dsetujui oleh atasan yaitu 100%.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatakan untuk mempertahankan capaian Target tersebut adalah dengan tetap menjalin kerjasama sesama rekan kerja dan atasan lanngsung, sehingga keharmonisan suasana kerja tetap terjaga.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Secara umum Tanggapan Atasan langsung atas hasil laporan dan Capaian target kinerja **sudah Baik**.

BAB III PENUTUP

A. KESEIMPULAN

Pada Triwulan II Tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sudah tercapai 100% (sesuai Target yang telah ditetapkan).

B. PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Target dan indicator Kinerja adalah sering terlambatnya pengiriman Laporan dan PKB-PKB kecamatan sehingga data yang diperoleh sering terlambat dan penginputan laporan sering terlambat.

C. SARAN DAN MASUKAN

1. Adanya percepatan dalam pengiriman laporan.
2. Perlu peningkatan kerjasama sesama rekan kerja dan Atasan langsung.

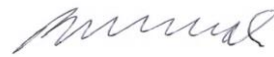
Kandangan, Juli 2019

Mengetahui :
Atasan langsung
Kasi Pembangunan dan Kesejahteraan Keluarga



Hj. RAKHMAWATI
NIP. 19690629 198903 2 007

Analisis Kesejahteraan Keluarga



MUHAMMAD TALHAH, SKM
NIP. 19750515 200003 1 007